



RPJMD

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2025-2029**



**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2025**



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
dan
BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Sasaran Daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program perangkat daerah.
10. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran pembangunan.
13. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

14. Indikator ...

14. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan kegiatan.
15. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian target secara ekonomis, efisien dan efektif.
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah menyediakan rencana pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Tujuan RPJMD, terdiri dari:
 - a. memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
 - b. merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
 - c. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - d. sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan;

b. Bab II ...

- b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 4

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 1 September 2025



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 1 September 2025



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025 NOMOR 003
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO:
05/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan bahwa Daerah melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah yang dilakukan melalui pembangunan Daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Hal ini dilakukan melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai menuju arah yang lebih baik. Perencanaan pembangunan berperan penting dan signifikan dalam menentukan arah perkembangan daerah yang bersangkutan. Selain untuk menjadikan pembangunan lebih terarah, perencanaan pembangunan juga berfungsi sebagai standar atau alat ukur dalam pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Tanpa perencanaan Pembangunan yang baik tujuan pembangunan yang dicita-citakan akan

sulit tercapai. Perencanaan yang baik dilakukan berdasarkan pada data, fakta, dan informasi yang valid, akurat, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis di daerah, provinsi, maupun nasional.

Pada tanggal 20 Februari 2025, Presiden Republik Indonesia telah melantik pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih atas nama Paulus Henuk, SH dan Apremoy Dudelusy Dethan menjadi Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Periode Tahun 2025-2030. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun RPJMD yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya, penetapan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan peraturan daerah paling lambat harus dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2025 sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan tahap Pertama pembangunan jangka menengah pada periode RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan RPJPD Rote Ndao 2025-2045 dengan arah kebijakan adalah optimalisasi dan akselerasi pembangunan. Oleh karena itu RPJMD 2025-2029 menerjemahkan Visi, Misi dan Agenda Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan untuk optimalisasi dan akselerasi yang merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Optimalisasi dan akselerasi harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Proses pelaksanaannya dilakukan

melalui pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu

- 1) Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;
- 4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) Pendekatan holistik-tematik, mempertimbangkan keseluruhan unsur/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah;
- 3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pote Ndao Tahun 2025-2029, dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

RPJMD dilaksanakan berbasis pada penerapan *e-planning* melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah selanjutnya digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan menjadi dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup

jelas Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 005

LAMPIRAN ...

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN 2025-2029



DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-10
1.4.1 Maksud	I-10
1.4.2 Tujuan	I-10
1.5 Sistematika Penulisan	I-10
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	II-1
2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II-10
2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-19
2.1.1.4 Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan	II-20
2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	II-22
2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	II-28
2.1.1.7 Demografi	II-43
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-49
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-49 ✓
2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua	II-60 ✓
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang merata	II-65 ✓
2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-68 ✓



2.1.2.5	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-71
2.1.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	II-74
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-77
2.1.3.1	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-77
2.1.3.2	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi ...	II-77
2.1.3.3	Penerapan Ekonomi Hijau	II-84
2.1.3.4	Transformasi Digital	II-87
2.1.3.5	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-87
2.1.3.6	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-89
2.1.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	II-95
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum	II-98
2.1.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-98
2.1.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial	II-106
2.1.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-108
2.1.4.4	Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah	II-109
2.1.4.5	Indikator Kinerja Kunci	II-123
2.1.5	Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-133
2.1.6	Kerjasama Daerah	II-136
2.1.7	Rencana Pembangunan Infrastruktur	II-137
2.1.8	Badan Usaha Milik Daerah Yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah	II-138
2.2	Gambaran Keuangan Daerah	II-138
2.2.1	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024	II-138
2.2.2	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029	II-146
2.3	Permasalahan dan Isu Strategis	II-159
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-159
2.3.2	Isu Strategis	II-167



BAB III	VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran	III-1
3.1.1	Visi	III-1
3.1.2	Misi	III-5
3.1.3	Keselarasasan Visi dan Misi	III-10
3.1.4	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029	III-14
3.2	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-19
3.2.1	Strategi Pembangunan Daerah	III-20
3.2.2	Penahapan Pembangunan	III-21
3.2.3	Penyajian Lokus Pembangunan	III-24
3.2.4	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	III-30
3.2.5	Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-33
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1	Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-61
4.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-61
4.2.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)	IV-64
4.2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	IV-70
4.2.4	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-88
BAB V	PENUTUP	V-1
5.1	Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2	Pedoman Transisi	V-2



DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao	II-2
2.2 Curah Hujan Rata-Rata Tahun 2024 Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao	II-9
2.3 Rata-Rata Temperatur dan Kelembaban Udara Tahun 2024 Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao	II-9
2.4 Rencana Pemanfaatan Ruang Kabupaten Rote Ndao	II-13
2.5 Penggunaan Lahan Kabupaten Rote Ndao	II-14
2.6 Rencana Pemanfaatan Lahan Kabupaten Rote Ndao	II-16
2.7 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	II-21
2.8 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022-2024	II-23
2.9 Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	II-25
2.10 Persentase Pengelolaan Sampah	II-26
2.11 Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga	II-27
2.12 Jenis, Jumlah, Dampak, dan Kerugian Akibat Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004-2021	II-31
2.13 Prioritas Intervensi Aksi Ketahanan Iklim Kabupaten Rote Ndao	II-40
2.14 Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Rote Ndao	II-43
2.15 Jumlah Penduduk Kabupaten Rote Ndao Menurut Jenis Kelamin	II-43
2.16 Distribusi Penduduk Per Kecamatan	II-44
2.17 Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-44
2.18 Struktur Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-45
2.19 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029	II-45
2.20 Proyeksi Penduduk Usia Produktif Tahun 2025-2029	II-46
2.21 Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Rote Ndao Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2029	II-46
2.22 Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029	II-47
2.23 Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029	II-48
2.24 Laju Pertumbuhan ekonomi	II-49
2.25 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	II-50
2.26 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	II-51
2.27 Tingkat Kemiskinan	II-51



	Halaman
2.28 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020-2024 Kabupaten Rote Ndao	II-53
2.29 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024	II-55
2.30 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-56
2.31 Indeks Gini Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024	II-58
2.32 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-59
2.33 Usia Harapan Hidup	II-60
2.34 Prevalensi Stunting	II-63
2.35 Treatment Covarage Kasus Tuberkulosis (TBC)	II-64
2.36 Indeks Pendidikan	II-65
2.37 Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten, Provinsi dan Nasional	II-65
2.38 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024	II-66
2.39 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)	II-69
2.40 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	II-69
2.41 Presentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	II-71
2.42 Dimensi dan Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	II-73
2.43 Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender	II-76
2.44 Rasio Ketergantungan	II-77
2.45 PDRB Bruto Kabupaten Rote Ndao Menurut Lapangan Usaha Khususnya Industri Pengolahan atau Manufacturing	II-79
2.46 Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Rote Ndao Sektor Industri Pengolahan	II-80
2.47 Jumlah Angkatan Kerja Laki-Laki dan Perempuan	II-83
2.48 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	II-83
2.49 Indikator Tiga Pilar Ekonomi Hijau	II-85
2.50 Durasi Penyinaran Matahari	II-86
2.51 Data Pembangunan Instalasi PLTS Terpusat oleh KESDM	II-86
2.52 Pembentukan Modal Tetap Bruto	II-87
2.53 Realisasi Investasi Daerah di Kabupaten Rote Ndao	II-88
2.54 Persentase Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	II-89
2.55 Persentase Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Layak	II-90
2.56 Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	II-91
2.57 Status Desa di Kabupaten Rote Ndao	II-94



	Halaman
2.58 Inflasi Kabupaten Rote Ndao Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024	II-97
2.59 Indeks SPBE	II-99
2.60 Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2024	II-100
2.61 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	II-101
2.62 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	II-103
2.63 Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	II-104
2.64 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	II-104
2.65 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	II-105
2.66 Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat	II-107
2.67 Kasus Kriminalitas di Kabupaten Rote Ndao	II-107
2.68 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	II-109
2.69 Realisasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 -2024	II-110
2.70 Realisasi indikator kinerja kunci perangkat daerah tahun 2020-2024	II-124
2.71 Capaian SPM Untuk Tiap Jenis Layanan	II-134
2.72 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan berbagai lembaga	II-136
2.73 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang sudah diperbaharui	II-136
2.74 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2024	II-140
2.75 Neraca Daerah Tahun 2020-2024	II-144
2.76 Proyeksi Pendapatan Daerah	II-148
2.77 Proyeksi Belanja Daerah	II-153
2.78 Proyeksi Pembiayaan Daerah	II-156
2.79 Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan	II-157
2.80 Hubungan Masalah Pokok dan Isu Strategis Kabupaten Rote Ndao	II-182
2.81 Penalahaan Terhadap Isu KLHS dan Isu Lingkungan Dinamis Terhadap Isu Strategis Daerah	II-183
3.1 Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2045 disandingkan dengan Sasaran dan Indikator Visi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025- 2029	III-4 ✓
3.2 Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045	III-109 g



3.3	Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029	III-11
3.4	Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029	III-13
3.5	Tujuan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029	III-14
3.6	Sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029	III-15
3.7	Indikator dan Target Sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029	III-17
3.8	Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran setiap Misi	III-20
3.9	Penahapan Pembangunan RPJMD	III-22
3.10	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029	III-30
3.11	Dukungan Program Prioritas Kabupaten Rote Ndao Terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029	III-35
3.12	Dukungan Program Strategis Daerah terhadap Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029	III-40
3.13	Dukungan Terhadap 8 (Delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) RPJMN Tahun 2025-2029	III-41
3.14	Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029	III-53
3.15	Keselarasan Asta Cita, Dasa Cita dan Mbule Sio	III-66
3.16	Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao	III-68
3.17	Keterkaitan Mbule Sio Dengan Inovasi Daerah Tahun 2023-2025	III-70
4.1	Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030	IV-2
4.2	Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2030	IV-62
4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2030	IV-65
4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2030	IV-71
4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2030	IV-89



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Lainnya	I-8
2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rote Ndao	II-1
2.2 Peta Hidrologi Kabupaten Rote Ndao	II-4
2.3 Peta Kondisi Tanah Kabupaten Rote Ndao	II-7
2.4 Peta Klimatologi Kabupaten Rote Ndao	II-10
2.5 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Rote Ndao	II-15
2.6 Peta Rencana Pola Ruang	II-17
2.7 Peta Daya Dukung Wilayah Pengembangan	II-18
2.8 Peta SKL (Satuan Kemampuan Lahan) Erosi	II-31
2.9 Peta SKL (Satuan Kemampuan Lahan) Bencana Alam	II-31
2.10 Tipologi Zona Berpotensi Longsor Berdasarkan Hasil Kajian Hidrogeomorfologi	II-36 ✓
2.11 Penanganan Kawasan Konservasi dan Rawan Longsor	II-77
3.1 Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Rote Ndao	III-27 φ
3.2 Pengembangan Pola Ruang Kabupaten Rote Ndao	III-28
3.3 Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Rote Ndao	III-30 g



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
2.1. Penggunaan Lahan Kabupaten Rote Ndao	II-15
2.2. Presentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Tahun 2020-2024	II-22
2.3. Presentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak Tahun 2020-2024	II-26
2.4. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024	II-32
2.5. Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024	II-43
2.6. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024	II-49
2.7. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao, Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	II-52
2.8. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024	II-54
2.9. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-56
2.10. Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024	II-57
2.11. Perbandingan IPM Kabupaten Rote Ndao Terhadap Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024	II-59
2.12. Tren Kematian Ibu dan Kematian Bayi Tahun 2020-2024	II-62
2.13. Tren Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024	II-63
2.14. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	II-76
2.15. Presentase Koperasi Berkualitas	II-78
2.16. Presentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirausaha	II-79
2.17. Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum	II-81
2.18. Jumlah Kunjungan Wisatawan	II-82
2.19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-84
2.20. Rumah Layak Huni Terbangun Tahun 2020-2024	II-90
2.21. Persentase Kondisi Baik Jalan Kabupaten Tahun 2020-2024	II-92
2.22. Desa Maju dan Berkembang Tahun 2020-2024	II-93
2.23. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	II-95
2.24. Laju Inflasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024	II-96
2.25. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Tahun 2024	II-102



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mengamanatkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah yang dilakukan melalui pembangunan daerah sebagai perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Hal ini dilakukan melalui pengintegrasian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai menuju arah yang lebih baik. Perencanaan pembangunan berperan penting dan signifikan dalam menentukan arah perkembangan daerah yang bersangkutan. Selain untuk menjadikan pembangunan lebih terarah, perencanaan pembangunan juga berfungsi sebagai standar atau alat ukur dalam pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan. Tanpa perencanaan pembangunan yang baik tujuan pembangunan yang dicita-citakan akan sulit tercapai. Perencanaan yang baik dilakukan berdasarkan pada data, fakta, dan informasi yang valid, akurat, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus dilakukan dengan mempertimbangkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah untuk mengatasi permasalahan dan isu-isu strategis di daerah, provinsi, maupun nasional.

Pada pemilihan umum Kepala Daerah serentak di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, telah terpilih Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao untuk periode 2025–2030, yaitu Paulus Henuk, SH dan



Apremoy Dudelusy Dethan. Keduanya dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya, penetapan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai pelaksanaan tahap pertama pembangunan jangka menengah pada periode RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045.

Dokumen RPJMD yang disusun oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan RPJPD Rote Ndao Tahun 2025-2045 dengan arah kebijakan adalah optimalisasi dan akselerasi pembangunan. Oleh karena itu RPJMD Tahun 2025-2029 menerjemahkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah terpilih kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan untuk optimalisasi dan akselerasi yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. Optimalisasi dan akselerasi harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) **Pendekatan teknokratis**, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah;
- 2) **Pendekatan partisipatif**, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- 3) **Pendekatan politis**, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD;



- 4) **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas**, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten, daerah provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan menggunakan pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada hasil (*money follow program*), dan pendekatan substansi secara Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial, yaitu:

- 1) **Pendekatan holistik-tematik**, mempertimbangkan keseluruhan unsur/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
- 2) **Pendekatan integratif**, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah;
- 3) **Pendekatan spasial**, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029, dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 disusun secara berkesinambungan mencakup tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah selanjutnya digunakan sebagai dasar bagi seluruh perangkat daerah dalam proses penyempurnaan rancangan akhir Renstra perangkat daerah. Penyempurnaan rancangan akhir Renstra perangkat daerah dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.

Dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan menjamin keberlanjutan pembangunan daerah, maka telah dilakukan integrasi perencanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) yang tertuang di dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. Strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan untuk 5 (lima) tahun ke depan meliputi analisis capaian indikator



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), perumusan isu strategis, permasalahan, sasaran strategis daerah dan rekomendasi serta tindak lanjut berdasarkan target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar pembentukan peraturan daerah Kabupaten Rote Ndao tentang RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);



2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023–2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0138);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 Nomor 030, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 118);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 005);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Timur Nomor 005).

Selain itu juga terdapat legislasi semu yang digunakan sebagai dasar materi muatan tentang RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

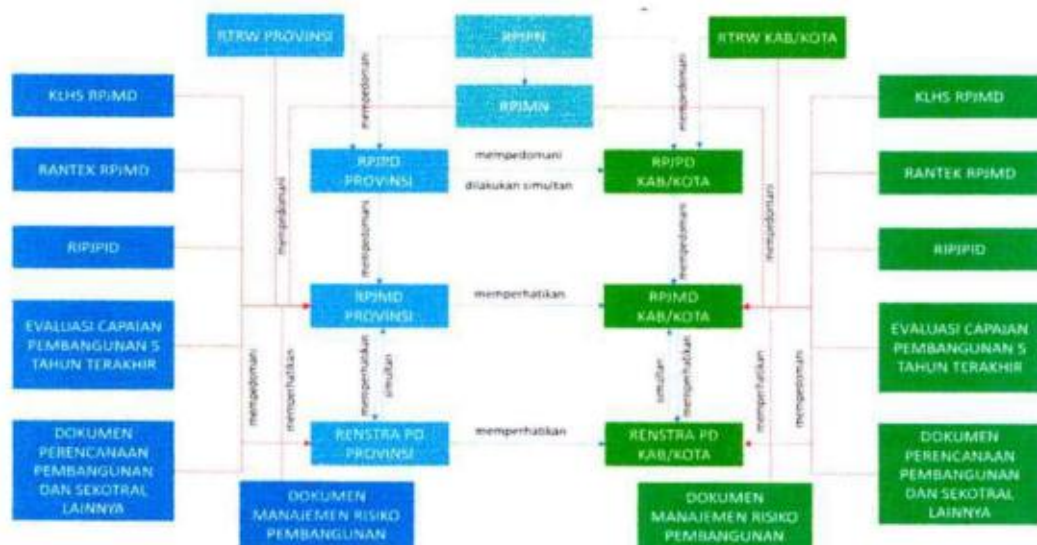
1.3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Kabupaten Rote Ndao. Keterkaitan antar dokumen tersebut menggambarkan hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional, hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan di tingkat kabupaten yang memiliki periode perencanaan berbeda dan hubungan selaras dengan dokumen perencanaan multi sektor.

Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Rote Ndao dengan dokumen perencanaan lainnya tercantum pada gambar berikut:

Gambar 1.1

Keterkaitan Dokumen RPJMD dengan Dokumen lainnya



Sumber: Imendagri Nomor 2 Tahun 2025

Penjelasan keterkaitan RPJMD Kabupaten Rote Ndao dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rote Ndao berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045, terutama terkait dengan isu



strategis, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada RPJMD tahap ke-1 dalam dokumen RPJPD.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rote Ndao memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033 terutama terkait dengan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang tahun 2025-2029.

3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rote Ndao memperhatikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Rote Ndao, terutama memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan memastikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan Nasional telah terakomodir dalam target dan indikator RPJMD.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rote Ndao memperhatikan dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan.

5. Dokumen Perencanaan Multi Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rote Ndao memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), RAD Pangan dan Gizi, Kajian Penguatan Pangan dan Pengurangan Kerentanan Pangan, dan lain sebagainya. RPJMD juga akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan multi sektor yang penyusunannya dilakukan setelah RPJMD ditetapkan.

6. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Rote Ndao tahun 2025 hingga tahun 2029 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menyediakan rencana pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah.
2. merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Sebagai instrumen indikator untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang; Dasar hukum penyusunan; Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya; Maksud dan tujuan; dan Sistematika penulisan

Bab II. GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.

Bab III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini berisi tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah.



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu dari 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil di bagian paling selatan kepulauan nusantara, dengan luas wilayah daratan 1.280,10 km², luas wilayah perairan 2.376 km².

Secara administrasi kewilayahan Kabupaten Rote Ndao sebelah utara berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah barat berbatasan dengan Laut Sawu, sebelah timur berbatasan dengan Laut Timor, dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Rote Ndao



Sumber: RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013 - 2033

Kabupaten Rote Ndao terdiri dari 11 kecamatan, 112 desa, 7 kelurahan dan 572 Dusun/Lingkungan, dengan jumlah rukun warga sebanyak 804 dan rukun tetangga sebanyak 1.622 dengan 10 Kecamatan terletak di pulau Rote, dan satu kecamatan kepulauan yang terdiri dari pulau Ndao, Nuse dan Do'o. Rincian luas wilayah kecamatan dijabarkan pada tabel berikut:



Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Rote Ndao

NO	KECAMATAN	DESA/ KEL.	JUMLAH RW	JUMLAH RT	LUAS WILAYAH (KM ²)	LUAS WILAYAH (%)
1.	Landu Leko	7	32	54	194,06	15,16
2.	Pantai Baru	15	98	201	176,18	13,76
3.	Rote Tengah	8	48	94	162,50	12,69
4.	Lobalain	18	75	187	145,70	11,38
5.	Rote Barat	7	41	88	116,28	9,08
6.	Rote Barat Daya	19	165	335	114,57	8,95
7.	Rote Timur	11	71	142	110,84	8,66
8.	Rote Barat Laut	12	115	215	98,53	7,70
9.	Rote Selatan	7	39	78	73,38	5,73
10.	Loaholu	10	66	132	73,87	5,77
11.	Ndao Nuse	5	36	72	14,19	1,11
	Jumlah total	119	804	1.622	1.280,10	100

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

B. Letak dan Kondisi Geografis

Letak astronomis Kabupaten Rote Ndao berada di antara 10°25' LS sampai 11°00' LS dan di antara 121°49' BT sampai 123°26' BT. Terdapat 120 pulau, dimana 7 (tujuh) pulau yang berpenghuni adalah pulau Rote, Ndao, Nuse, Landu, Ndana, Nusa Manuk, Usu dan sisanya 113 pulau tidak berpenghuni.

Pengelolaan 120 pulau yang tersebar di wilayah Kabupaten Rote Ndao menjadi tantangan bagi Pemerintah khususnya terkait pulau-pulau berpenghuni dalam hal menyediakan sarana dan prasarana konektivitas akses pelayanan yang memadai untuk memudahkan transportasi antar pulau-pulau tersebut. Untuk pulau-pulau tak berpenghuni difokuskan tata kelola aset pada pemantauan aktivitas penguasaan lahan agar tidak dikuasai secara ilegal.

Berdasarkan posisi geografis dan kondisi wilayah di atas Kabupaten Rote Ndao selain memiliki potensi daratan juga memiliki potensi bahari yang sangat besar, dengan luas wilayah perairan laut yang cukup luas dan panjang garis pantai kurang lebih 330 km, Kabupaten Rote Ndao memiliki sejumlah pantai yang eksotik, beberapa di antaranya merupakan kawasan surfing terbaik dunia yakni Pantai Nemberala dan Pantai Bo'a.

Ditinjau dari kondisi Geostrategis Kabupaten Rote Ndao mempunyai wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Negara Australia, dari sudut pandang sumber daya dan perdagangan dapat dilihat sebagai potensi, namun pada kenyataannya masih memiliki potensi konflik



antara Indonesia dan Australia sehubungan dengan kegiatan melaut dari nelayan Rote Ndao dan kegiatan transit imigran gelap dari Asia ke Australia.

Kondisi wilayah lautan di atas juga berdampak terhadap potensi bencana siklon tropis yang sering melewati perairan pada perbatasan Samudera Hindia dengan Benua Australia. Ini telah terbukti dengan bencana Siklon Seroja yang terjadi pada tahun 2021 silam. Siklon tropis tersebut bukan baru pernah terjadi. Tercatat sejak tahun 1960 hingga sekarang sudah terjadi 10 siklon tropis dengan rata-rata satu siklon tropis terjadi setiap sepuluh tahun.

Selain itu kondisi perbatasan dengan celah Timor sebagai kawasan pengeboran minyak lepas pantai dapat menyebabkan risiko terjadinya pencemaran laut. Kondisi ini pernah terjadi pada tahun 2012 dimana pernah terjadi pencemaran minyak lepas pantai yang merugikan petani rumput laut di wilayah Kabupaten Rote Ndao hingga ke wilayah pesisir pulau Timor

C. Topografi dan Kemiringan Lahan

Wilayah Rote Ndao memiliki topografi yang relatif datar dengan wilayah yang sebagian besar merupakan daratan berbukit-bukit dengan ketinggian 0-30 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan rincian dataran 35% (45.250 Ha), berbukit dan gunung 25% (32.625 Ha) dan lainnya 40% (50.135 Ha). Rata-rata kemiringan lahan wilayah Kabupaten Rote Ndao berada pada rentang 0-40%, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Kemiringan lahan khususnya kecamatan Rote Barat dan Rote Timur lebih landai dari kecamatan lainnya di pulau Rote. Lereng dengan kemiringan lebih dari 40% hanya terdapat di Kecamatan Rote Timur sebesar 0,33% dari luas wilayahnya.
2. Kecamatan Pantai Baru 47,74% dari luas wilayahnya kemiringannya 2-15%, 38% berkemiringan 15-40%, sedangkan 11,70% dari luas wilayahnya berkemiringan 0-2%.
3. Kecamatan Rote Tengah merupakan daerah yang berbukit- bukit dan bergunung dilihat dari kemiringan lahan 15% sampai 40% sebesar 49,3% dari luas lahan secara keseluruhan di Kabupaten Rote Ndao.
4. Dan dari luas lahan yang memiliki kemiringan >40% di Kecamatan Rote Tengah terdapat luas 70% dari luas wilayah secara keseluruhan.

D. Geologi

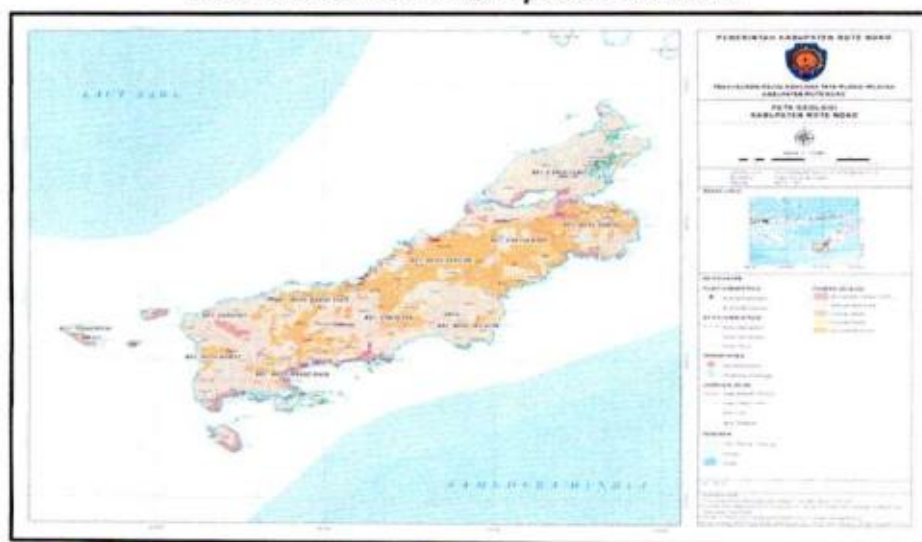
Pulau Rote dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, sama seperti pulau Timor, Sabu dan Sumba, terbentuk melalui proses pengangkatan (*uplift*).



sebagai akibat dari pergeseran kerak bumi dari lempeng Australia dan lempeng Asia. Pergeseran antara dua lempengan tersebut mendorong kerak-kerak kepulauan Nusa Tenggara ke atas. Pengangkatan ini terus berlangsung, dan diperkirakan laju pengangkatan berlangsung beberapa mm per tahun. Kabupaten Rote Ndao berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral terdapat bahan galian golongan C dan golongan B, antara lain lempung botonitan, batu gamping, batu mangan, gypsum, batu hias setengah permata, kalsit dan aragonit. Selain itu adanya palung minyak Rote I dan II di selatan Pulau Rote.

Gambar 2.2

Peta Kondisi Tanah Kabupaten Rote Ndao



Sumber: RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013 - 2033

Rote Ndao juga mempunyai wilayah laut yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Negara Australia, yang dari sudut pandang sumber daya dan perdagangan dapat dilihat sebagai potensi, tetapi pada kenyataannya masih memiliki konflik antara Indonesia dan Australia sehubungan dengan kegiatan melaut dari nelayan tradisional Rote Ndao. Selain itu, adanya kegiatan transit imigran gelap dari Asia ke Australia juga merupakan salah satu masalah yang ada. Serta, adanya potensi risiko pencemaran laut dengan adanya pengeboran lepas Pantai Australia dan transportasi laut seperti yang pernah terjadi pada Tahun 2009. Selain itu, badai siklon juga merupakan salah satu tantangan karena kepulauan Rote Ndao yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia.



E. Hidrologi

Potensi hidrologi didominasi oleh air permukaan yang berasal dari sungai dan danau, air bawah tanah dan mata air untuk menyediakan air sepanjang tahun. Jumlah sungai yang berair sepanjang tahun berjumlah 12 buah, dengan panjang sungai 32 km. Sungai terbesar adalah Sungai Menggelama. Sementara jumlah danau yang berair sepanjang tahun ada 6 (enam) buah, dengan total volume kurang lebih 7 (tujuh) juta meter kubik.

Pemanfaatan sumber air baku yang dikelola oleh PDAM digunakan untuk pelayanan air minum di Kabupaten Rote Ndao berasal dari 8 (delapan) sumber yakni mata air Siokoen dengan kapasitas 17,5 liter/detik, Oemau 10 liter/detik, Lualemba 15 liter/detik, Lidabesi 10 liter/detik, Nioen 15 liter/detik, Lelebe 10 liter/detik, Sumur Bor Kantor Camat Pantai Baru 5 liter/detik. Dari total kapasitas terpasang sebesar 87,5 liter/detik dan kapasitas produksi sebesar 34,5 liter/detik terdapat *idle capacity* sebesar 53 liter/detik yang dapat dimaksimalkan untuk perluasan jaringan pelayanan air bersih.

Selain air permukaan, sumber air baku dari air bawah tanah memiliki potensi yang besar yakni dari Cekungan air Tanah (CAT). Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah Kabupaten Rote Ndao memiliki 3 (tiga) Cekungan Air Tanah (CAT) yakni CAT Nemberala dengan luas 236 km², CAT Batutua luas 229 km² dan CAT Rote luas 250 km². Potensi CAT ini bila dieksplorasi secara maksimal dengan sumur bor, sumur gali ataupun dengan teknologi lainnya, dapat menopang kebutuhan utama air di Kabupaten Rote Ndao.

Berdasarkan data-data sumur bor, sumur gali, mata air, pengukuran geolistrik Potensi air tanah di dalam Cekungan Air Tanah Nemberala dapat dikelompokkan menjadi empat bagian air tanah, yaitu:

1. Potensi air tanah dangkal pada batu gamping dan berhubungan dengan air laut, dapat terjadi intrusi air laut apabila pengambilan air tanah berlebihan. Untuk kelompok ini meliputi daerah dengan morfologi pedataran tersebar di daerah pesisir/pantai yang melingkari Cekungan Air tanah Nemberala. Meliputi daerah Oeseli, Oenggaut, Nemberala, Oelolok, Mbueain, Boni.
2. Potensi air tanah dangkal sampai dalam pada batu gamping. Tersebar di daerah Oebou, Oeseli, Boa, Oenggaut, Nemberala, Oenitas, Lalukoen, Oetefu, Lidor, Oehandi, Meoain, Modosinal, Inguinak.
3. Batu gamping yang tidak berpotensi air tanah. Tersebar di Oelua, Tolama, Temas, Oebela.



4. Lapisan *Impermeable* (tidak memiliki potensi air tanah). Dapat dikembangkan rekayasa air permukaan (Embung).

Berdasarkan data-data sumur bor, sumur gali, mata air, pengukuran geolistrik Potensi air tanah di dalam Cekungan Air Tanah Batutua dapat dikelompokkan menjadi Lima bagian air tanah, yaitu:

1. Potensi air tanah dangkal pada batu gamping dan berhubungan dengan air laut, dapat terjadi intrusi air laut apabila pengambilan air tanah berlebihan. Untuk kelompok ini meliputi daerah dengan morfologi pedataran tersebar di daerah pesisir/pantai selatan Cekungan Air Tanah Batutua, meliputi daerah Batutua, Dolasi, Kuli, Inaoe, dan Dodaek.
2. Potensi air tanah dangkal pada batu gamping dapat dimanfaatkan dengan sumur gali. Potensi air tanah jenis ini tersebar setempat-setempat di daerah Daleholu, Lenguselu, Suelain, Busalangga, Batutua, Tuanatuk, Mokdale dan Maubesi.
3. Potensi air tanah dalam pada batu gamping dapat dimanfaatkan dengan sumur bor. Potensi air tanah jenis ini tersebar di daerah Lidamanu, Lenguselu, Inaoe, Suelain, Oelasin, Haloama, Helebeik, Sanggaoen, Oelunggu, Maubesi, Oetutulu dan Batutua.
4. Batu gamping yang tidak berpotensi air tanah tersebar di daerah Suelain, Kolobolon, Daleholu, Dodaek, setempat-setempat di daerah Oetutulu, dan Tuanatuk.
5. Lapisan *Impermeable* (tidak memiliki potensi air tanah) dapat dikembangkan rekayasa air permukaan (Embung). Lapisan impermeable ini tersebar di daerah: Mbokak, Lekik, Oebafok, Oebatu, Modosinal, Netenain, Oetutulu, Daudolu, Tuanatuk, Baadale, Oelunggu, Maubesi, Helebeik, Bebalain, Kolobolon, Maubesi, Lidabesi dan Onatali. ✓

Lapisan *Impermeable* (tidak memiliki potensi air tanah) dapat dikembangkan rekayasa air permukaan (Embung). Lapisan *impermeabel* ini tersebar di daerah Olafuliha'a, Edalode dan Serubeba. ✓



Gambar 2.3

Peta Hidrologi Kabupaten Rote Ndao



Sumber : RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013 - 2033

Potensi hidrologi di Kabupaten Rote Ndao relatif terbatas. Sumber mata air yang ada pada umumnya berasal dari perbukitan dengan debit air menurun pada musim kemarau sehingga kebutuhan air untuk musim kemarau merupakan kendala untuk wilayah ini. Ini berisiko terhadap terjadinya bencana kekeringan. Selain hal ini disebabkan karena ketidakberimbangan antara input presipitasi dan luaran berupa evapotranspirasi (ET), salah satu penyebab lainnya adalah karakteristik daerah aliran sungai (DAS). DAS merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh pegunungan/perbukitan yang sama yang memiliki fungsi hidrologis, yaitu menampung air, menyimpan dan mengalirkan air hujan melalui satu outlet utama. Hasil analisis DAS di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan bahwa dari total 161 DAS, hanya 1 DAS diantaranya dapat diklasifikasikan sebagai DAS yang berukuran kecil (luas DAS 10.000 - <100.000 ha) dan sisanya 160 DAS terkategori sebagai DAS berukuran sangat kecil (luas DAS < 10.000 ha).

Padahal, semakin luas suatu DAS, hasil akhir (water yield) yang diperoleh akan semakin besar, karena hujan yang ditangkap juga semakin banyak. Oleh karena itu dengan bentuk penampang DAS-DAS yang sebagian besar berukuran sangat kecil yang berfungsi sebagai processing dari input presipitasi, maka dapat diperkirakan persoalan ketersediaan air dan kontinuitasnya adalah salah satu faktor penghambat pengembangan produktifitas pertanian di Kab. Rote Ndao. Apalagi bila konservasi tanah dan air tidak dilakukan untuk menahan selama mungkin air permukaan dan air



tanah pada musim kemarau, serta memperkecil peluang terjadinya erosi dan sedimentasi yang membawa dampak negatif, baik on-site maupun off-site.

Jumlah sungai yang berair sepanjang tahun berjumlah 12 buah. Sungai terbesar adalah Sungai Menggelama, dengan panjang sungai 32 km. Sementara jumlah danau yang berair sepanjang tahun ada 6 buah, dengan total volume 7 (tujuh) juta meter kubik. Selain air permukaan, potensi air tanah juga sudah diidentifikasi. Dengan demikian, maka tidak mengherankan ketika hasil digitasi titik lokasi embung secara on-screen menggunakan citra Google Earth menunjukkan 349 lokasi embung yang tersebar di Kabupaten Rote Ndao. Embung sangat berperan penting bagi wilayah Rote Ndao karena dapat digunakan untuk menahan kelebihan air dan menjadi sumber air irigasi pada musim kemarau. Embung dapat berperan untuk menahan air permukaan sehingga dapat mendistribusikan air dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk keperluan tanaman ataupun ternak di musim kemarau dan penghujan

F. Klimatologi

Kabupaten Rote Ndao memiliki iklim tropis kering dengan pola musim yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan timur yang bergantian bertiup sepanjang tahun. Pergerakan arah dan waktu angin muson ini dipengaruhi oleh perubahan musim di benua Asia dan Australia. Pengaruh pola angin tersebut menentukan pola musim hujan dan musim kemarau di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

Jumlah hari hujan dalam setahun pada tahun 2024 di wilayah Kabupaten Rote Ndao 135 hari, paling banyak terjadi pada bulan Maret. Curah hujan rata-rata tinggi terjadi pada bulan Januari, Februari, Maret, April dan Desember. Berdasarkan rincian tabel di bawah, curah hujan tertinggi di Kabupaten Rote Ndao diatas 445,8 mm dan hari hujan diatas 25 hari hujan terjadi pada bulan Desember. Penilaian faktor iklim yang digambarkan dalam bentuk curah hujan sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian terutama pada pola dan waktu menanam.

Kawasan selatan mempunyai iklim tropis dan curah hujan rata-rata yang cukup tinggi. Hal ini dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pertanian dan perkebunan yang merupakan kegiatan dominan di kawasan selatan. Selain itu perlu mengantisipasi curah hujan yang tinggi dengan menyediakan kawasan penyangga atau konservasi sehingga apabila curah hujan yang tinggi tidak menimbulkan masalah banjir dan juga erosi. Berikut



rincian tabel curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Rote Ndao selama 1 tahun:

Tabel 2.2
Curah Hujan Rata-Rata Tahun 2024
Menurut Bulan di Kabupaten Rote Ndao

NO.	BULAN	CURAH HUJAN (MM)	HARI HUJAN (HH)
1.	Januari	178,5	21
2.	Februari	252,2	18
3.	Maret	445,8	21
4.	April	243,2	16
5.	Mei	19,9	6
6.	Juni	0,5	2
7.	Juli	21,0	4
8.	Agustus	-	-
9.	September	89,7	9
10.	Oktober	24,4	4
11.	November	55,1	9
12.	Desember	440,6	25

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Lekunik-Baa mencatat rata-rata suhu tertinggi pada tahun 2024 adalah 34,4°C terjadi pada bulan November, dan terendah adalah 30,3°C pada bulan Juli. Secara umum beriklim tropis, dengan variasi suhu dan penyinaran matahari efektif rata-rata 99% per tahun. Kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 77% sampai dengan 91%.

Tabel 2.3
Rata-Rata Temperatur dan Kelembapan Udara Tahun 2024 Menurut
Bulan di Kabupaten Rote Ndao

NO	BULAN	SUHU UDARA (°C)		RATA- RATA	KELEMBABAN (%)		RATA- RATA
		MAX	MIN		MAX	MIN	
1	Januari	23,9	32,4	28,9	63	97	84
2	Februari	23,2	31,8	27,8	79	97	88
3	Maret	22,6	31,8	27,3	84	100	90
4	April	21,8	32,5	27,2	77	98	86
5	Mei	23,2	31,9	27,3	72	87	81
6	Juni	22,6	31,1	25,6	70	87	77
7	Juli	22,0	30,3	25,1	57	89	76
8	Agustus	21,4	31,2	25,6	59	86	79
9	September	22,2	32,2	26,9	72	93	80
10	Oktober	23,6	33,6	28,5	65	84	78
11	November	24,7	34,4	29,8	64	89	77
12	Desember	24,2	31,3	27,1	84	97	91

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Gambar 2.4

Peta Klimatologi Kabupaten Rote Ndao



Sumber: RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033

Berdasarkan tabel 2.2, 2.3 dan Peta di atas, kawasan selatan mempunyai iklim tropis dan curah hujan rata-rata yang cukup tinggi. Hal ini dapat memberikan manfaat yang besar terhadap pertanian dan perkebunan yang merupakan kegiatan dominan di kawasan selatan. Selain itu perlu pengantisipasi curah hujan yang tinggi dengan menyediakan kawasan penyangga atau konservasi sehingga apabila curah hujan yang tinggi tidak menimbulkan masalah banjir dan juga erosi. Curah hujan tertinggi di Kabupaten Rote Ndao diatas 280 mm pada bulan Februari dan hari hujan tertinggi berada pada bulan februari, yaitu sebanyak 21 hari hujan.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

A. Potensi Sumber Daya Perikanan

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang menjadi perencanaan pembangunan wilayah Kabupaten Rote Ndao. Keberadaan PPI Tulandale akan menjadi pusat bisnis kegiatan perikanan, baik di sub sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Posisi lokasi PPI Tulandale yang berada di Kecamatan Lobalain, sebagai penopang utama dari aktivitas ekonomi sektor perikanan di Kecamatan Lobalain, dengan Ba'a sebagai PKL Kabupaten Rote Ndao, sedangkan 3 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Selatan dan Kecamatan Rote Tengah akan berkontribusi sebagai zona pendukung dan keterkaitan terhadap kebutuhan bahan baku produksi perikanan di Kecamatan Lobalain, atau Zona Inti PPI Tulandale.



Pengembangan sentra perikanan di SKPT Rote Ndao akan dilaksanakan sejak dari proses pra – produksi hingga pasca – produksi. Industri perikanan dilakukan hulu ke hilir oleh seluruh pelaku bisnis yang terpusat pada sentra sentra yang telah ditetapkan. Usaha perikanan yang dikembangkan meliputi usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pembangunan perikanan diarahkan pada perikanan modern yang berorientasi pada agrobisnis, berbudaya industri, berdaya saing tinggi dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya perikanan juga dilakukan secara rasional, efisien, berhasil dalam mewujudkan, memberdayakan serta meningkatkan kesejahteraan petani nelayan yang profesional, maju dan mandiri melalui eksploitasi, eksplorasi dan konservasi kekayaan laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sumberdaya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya sangat potensial untuk dikembangkan guna mendorong pembangunan perikanan terutama di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Sumberdaya tersebut diantaranya jenis-jenis ikan pelagis dan demersal seperti ikan kembung (*Rastrelling sp*), ikan teri (*Stelophorus sp*), ikan tembang (*Sardinella sp*), kerapu (*Epinephelus sp*), ikan lencam (*Lethrinus sp*), ikan kakap (*Lutjanus sp*) dan sebagainya sedangkan jenis rumput laut seperti *Euchema cottonii*, *hallymenia* dan shakol serta pengolahan hasil perikanan seperti ikan asin, dodol rumput laut dan sebagainya. Sumberdaya perikanan di wilayah Kabupaten Rote Ndao diperkirakan memiliki potensi tangkap lestari ikan mencapai 17.875 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) 14.300 ton/tahun, meliputi komoditi unggulan berupa ikan tuna, ikan cakalang, dan ikan-ikan demersal. Potensi yang baru dimanfaatkan rata-rata/tahun 30-40%. Luas lahan untuk kegiatan budidaya cukup besar yaitu 32.675 ha dengan pemanfaatan baru mencapai 10 ha. Potensi tersebut didukung oleh berbagai kehidupan komunitas perairan diantaranya ekosistem terumbu karang, lamun dan mangrove yang masih baik serta potensi budidaya rumput laut. Selain itu, di wilayah Kabupaten Rote Ndao juga terdapat beberapa sungai/kali kecil yang merupakan daerah estuaria yang subur. Faktor lain yang turut mendukung potensi perikanan di Kabupaten Rote Ndao adalah tingkat pencemaran industri dan rumah tangga masih rendah serta penggunaan alat tangkap masih bersifat sederhana/ tradisional.

1. Potensi Perikanan di Kabupaten Rote Ndao:

- Luas Perairan: 376 Km²
- Panjang Garis Pantai: 330 Km



- Lebar Garis Pantai: 7,2 Km
 - Perikanan Tangkap Lestari: 875 Ton/Tahun
 - Perikanan Tangkap yang diperbolehkan: 300 Ton
2. Budidaya Laut: 675 Ha
- Budidaya Perairan: 127 Ha
 - Budidaya Pantai: 12.937 Ha
 - Budidaya Rumput Laut: 32.000 Ha
 - Budidaya Mutiara: 30 Ha
 - Tambak Garam: 206 Ha
 - Ekosistem Terumbu Karang: 714 Ha
 - Vegetasi Mangrove: 232 Ha
 - Balai Benih Ikan (BBI): 3 Ha
 - Kawasan Minapolitan: 58 Buah
 - Sentral Kawasan Minapolitan: 3 Buah
3. Pemanfaatan Potensi Sumber Daya:
- Perikanan Tangkap (Catch): 310 Ton/Tahun
 - Lahan Budidaya Mutiara: 5 Ha
 - Lahan Budidaya Rumput Laut: 214 Ha
 - Lahan Budidaya Payau: 5 Ha
 - Lahan Budidaya Perikanan Darat (Air Tawar): 5 Ha
 - Lahan Tambak Garam: 5 Ha

B. Potensi Sumber Daya Pertanian

Komoditas tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan yaitu padi, jagung, sorgum, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Komoditas hortikultura yang paling banyak diproduksi adalah bawang merah, selain itu terdapat komoditas lainnya seperti cabai besar, cabe rawit, kol kubis, tomat, peterseli/sawi dan kangkung. Buah-buahan tahunan yang paling banyak diproduksi adalah buah pepaya dan buah nangka. Komoditas perkebunan dengan luas tanam terbesar adalah kelapa. Komoditas perkebunan yang bernilai ekonomis dan mempunyai peluang pasar yang baik antara lain kelapa, Mangga, jeruk, pisang, semangka, alpukat, sukun dan buah naga.

C. Potensi Produksi Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan di Rote Ndao tidak dialokasikan sebagai kegiatan tersendiri namun merupakan suatu kegiatan tambahan di sektor pertanian, sehingga peruntukan lokasi pakan dan pengembalaan disesuaikan dengan lokasi kegiatan pertanian. Potensi pengembangan



kawasan komoditi peternakan unggulan di Rote Ndao adalah: ternak sapi potong, ternak kerbau, ternak kuda, ternak kambing, ternak domba, ternak babi dan ternak ayam pedaging.

D. Potensi Kepariwisata

Pariwisata merupakan leading sektor dan memiliki potensi untuk di kembangkan dan diperkenalkan baik di dalam dan luar negeri. Pengembangan *Eco-Edu Tourism* yang berkiblat pada tiga hal utama: ekowisata, eduwisata dan wisata budaya merupakan peluang pariwisata Rote Ndao untuk bertumbuh dan berkembang. Konsep *Eco-Edu Tourism* memperluas definisi tradisional pariwisata dari 'tourist destinations' menjadi ekosistem pembelajaran, penelitian dan budaya yang berkelanjutan.

Eco-Edu Tourism menjadi peluang karena beberapa potensi yang dimiliki oleh Rote Ndao antara lain: Keanekaragaman hayati dengan beberapa sumberdaya endemik Pulau Rote, kekayaan budaya, panorama alam dan pantai yang unik dan cantik sebagai ke khasan pulau – pulau kecil.

E. Persentase Pemanfaatan Ruang

Rencana pola ruang merupakan suatu rencana untuk menggambarkan fungsi-fungsi dan gambaran aktivitas dari kegiatan-kegiatan lindung dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan kawasan budidaya).

Rencana pola ruang wilayah merupakan kegiatan memanfaatkan ruang melalui program-program pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Rencana pola ruang kawasan wilayah menggambarkan rencana sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya

Tabel 2.4

Rencana Pemanfaatan Ruang Kabupaten Rote Ndao

NO.	PEMANFAATAN RUANG	Ha	Km2	%
A	Kawasan Lindung			
A.1	Badan Air	2.060,67	20,61	1,61
A.2	Hutan Lindung	7.497,05	74,97	5,86
A.3	Kawasan Perlindungan Kawasan Bawahannya	53.529,34	535,29	41,82
A.4	Sempadan Pantai	2.830,71	28,31	2,21
A.5	Sempadan Sungai	966,92	9,67	0,76
A.6	Sempadan Embung	106,30	1,06	0,08
A.7	Sempadan Danau/Situ	264,91	2,65	0,21
A.8	Sempadan Mata Air	240,77	2,41	0,19
A.9	Suaka Marga Satwa Harlu	1.604,36	16,04	1,25



NO.	PEMANFAATAN RUANG	Ha	Km2	%
A.10	Taman Buru Ndana	1.418,43	14,18	1,11
A.11	Suaka Marga Satwa Laut	0,41	0,00	0,00
	Sub Total	70.519,87	705,20	55,09
B	Kawasan Budidaya			
B.1	Hutan Produksi Tetap	9.380,48	93,80	7,33
B.2	Pertanian Tanaman Pangan	11.990,96	119,91	9,37
B.3	Pertanian Hortikultura	1.602,10	16,02	1,25
B.4	Perkebunan	3.748,71	37,49	2,93
B.6	Padang Pengembalaan	12.232,41	122,32	9,56
B.7	Kawasan Wisata			
	1. Nembrala dan Sekitarnya	8.752,61	87,53	6,84
	2. Mulut Seribu dan Sekitarnya	2.524,60	25,25	1,97
	3. Oesosole dan Sekitarnya	3.975,86	39,76	3,11
B.8	Kawasan Permukiman Perkotaan	1.530,57	15,31	1,20
B.9	Kawasan Permukiman Perdesaan	1.751,83	17,52	1,37
	Sub Total	57.490,13	574,90	44,91
	Jumlah	128.010,00	1.280,10	100,00

Sumber : Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan wilayah Kabupaten Rote Ndao saat ini secara garis besar terbagi atas dua kelompok utama jenis penggunaan, yaitu penggunaan lahan basah/sawah dan penggunaan lahan kering. Penggunaan lahan basah antara lain terdiri dari irigasi teknis setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa dan sawah tadah hujan. Kategori penggunaan lahan terbesar lainnya adalah belukar/tegalan/ladang dan padang rumput. Selain itu terdapat penggunaan fasilitas-fasilitas sosial maupun umum seperti perumahan, pertokoan, perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, kesehatan, taman rekreasi dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk mengetahui gambaran penggunaan lahan saat ini di Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel penggunaan lahan Kabupaten Rote Ndao dan gambar peta penggunaan lahan.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kabupaten Rote Ndao

NO	TUTUPAN LAHAN	LUAS (Ha)	%
1	Badan Sungai	238,86	0,19
2	Danau/Situ	1765,70	1,38
3	Hutan Bakau/Mangrove	2417,14	1,89
4	Hutan Rimba	7255,56	5,67
5	Landasan Pacu Bandara	5,35	0,00
6	Padang Rumput	17926,41	14,00
7	Perkebunan/Kebun	5932,30	4,63
8	Permukiman/Area Terbangun	3806,83	2,97
9	Sawah	8459,29	6,61
10	Semak Belukar	75873,81	59,27
11	Tanah Kosong	1441,97	1,13
12	Tegalan/Ladang	2886,77	2,26
	Luas Wilayah	128.010,00	100

Sumber: Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021



Grafik 2.1
Penggunaan Lahan Kabupaten Rote Ndao



Sumber: Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

Gambar 2.5
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Rote Ndao



Sumber: Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

G. Persentase Ahli Fungsi Lahan

Sebagian besar lahan di Kabupaten Rote Ndao masih berupa lahan kosong tak terbangun yaitu semak belukar dan padang rumput. Lahan terbangun hanya terdapat di kawasan permukiman perkotaan yang tersebar di hampir seluruh ibukota kecamatan.

Untuk pengembangan wilayah barat-timur diperlukan strategi dan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu pendekatan pembangunan diletakkan pada konsep kawasan yakni kawasan agropolitan berbasis pertanian di Rote Barat Daya dan kawasan



Mamaluk, kawasan minapolitan dan budidaya perikanan di Rote Barat Daya dan Rote Timur serta Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Batutua yang diprioritaskan untuk memacu pengembangan kawasan barat Kabupaten Rote Ndao berupa kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan dengan fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan/pelayanan, dapat ditekan terjadinya urbanisasi walaupun saat ini pusat-pusat kegiatan masih terjadi di kota kabupaten dan kota-kota kecamatan.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033, peruntukan lahan dengan memperhatikan pola ruang terdiri dari kawasan budidaya seluas 98.606,06 Ha dan lahan peruntukan kawasan Lindung seluas 29.854,39 Ha. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Tabel 2.6

Rencana Pemanfaatan Lahan Kabupaten Rote Ndao

NO.	RENCANA POLA RUANG	LUAS	
		Ha	%
1.	Bandar Udara	4,23	0,0033
2.	Budidaya Perikanan Darat	0,82	0,0006
3.	Danau	2.114,46	1,6460
4.	Hutan Bakau	1.480,59	1,1526
5.	Hutan Lindung	15.385,43	11,9767
6.	Hutan Produksi	22.688,00	17,6613
7.	Kawasan Sekitar Danau dan Waduk	1.208,19	0,9405
8.	Lahan Penggembalaan	12.582,50	9,7948
9.	Pariwisata	117,49	0,0915
10.	Perkebunan	5.872,94	4,5717
11.	Permukiman	4.647,38	3,6034
12.	Pertanian Lahan Basah	4.073,36	3,1709
13.	Pertanian Lahan Kering	47.158,31	36,7101
14.	Rawa	589,43	0,4588
15.	Sempadan Pantai	4.524,38	3,5220
16.	Sempadan Sungai	4.188,81	3,2608
17.	Suaka Margasatwa	445,59	0,3469
18.	Sungai	140,60	0,1094
19.	Taman Buru	1.257,50	0,9789
Total		128.280,01	100

Sumber: RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013-2033

Kondisi pola ruang pada tabel di atas mendukung terlaksananya implementasi komponen utama dari Smart Islands untuk mendukung koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai game changer Kabupaten Rote Ndao yang terdiri dari komponen utama ekonomi hijau yang didukung oleh pertanian, peternakan, perkebunan, limbah pertanian dan peternakan maupun ekonomi biru yang didukung oleh perikanan tangkap, perikanan



budidaya, serta eco-edu tourism yang didukung oleh keanekaragaman hayati.

H. Potensi Pengembangan Wilayah

Untuk potensi rencana pengembangan wilayah di Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada peta rencana pola ruang berikut ini:

Gambar 2.6

Peta rencana Pola Ruang



Sumber: Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

I. Daya Dukung Wilayah Pengembangan

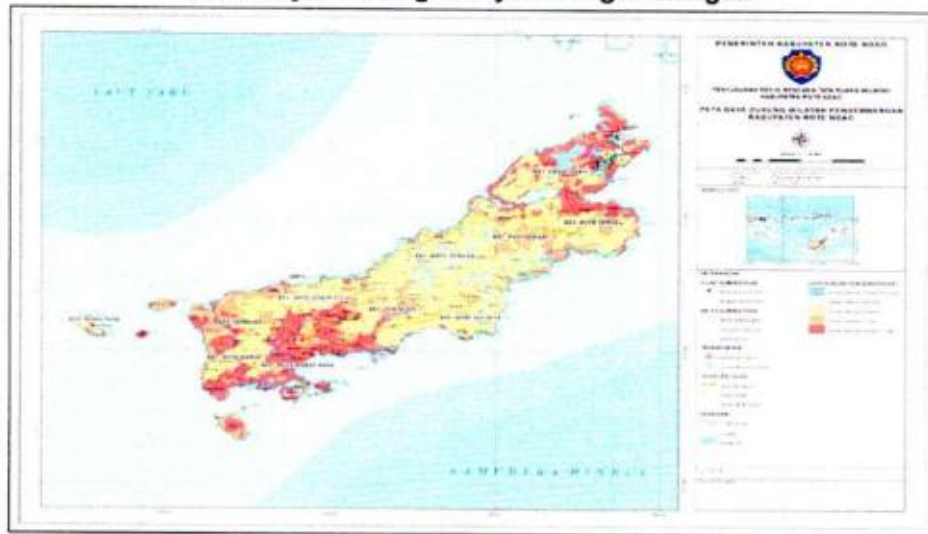
Kondisi daya dukung wilayah pengembangan berdasarkan fisik dasar ditujukan untuk mengetahui potensi daya dukung fisik ruang terhadap pengembangan wilayah, sehingga dapat diketahui potensi wilayah perencanaan dalam pengembangan pola ruang yang diijinkan. Pola daya dukung Wilayah Kabupaten Rote Ndao berdasarkan potensi fisik dasarnya dapat dilihat pada Gambar Peta Daya Dukung Wilayah Pengembangan.

Secara teoritis, berdasarkan studi-studi empiris yang pernah dilakukan, konsep kawasan lahan campuran (*mixed use zoning*) mengikuti pola struktur *land use* yang hampir sama. Gerakan tanah yang diakibatkan posisi geografis kawasan yang berada dalam sistem pertemuan lempengan geologi.



Gambar 2.7

Peta Daya Dukung Wilayah Pengembangan



Sumber: Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

J. Proporsi Penggunaan dan Pengembangan Wilayah (*Land Use*)

Proporsi *land use* dalam suatu kawasan (dominasi *land use*) biasanya berpedoman pada komposisi sebagai berikut:

- Fasilitas yang sesuai dengan fungsi dasar kawasan: 30 - 60 %
- Prasarana jalan dan utilitas: 15 - 30 %
- Open space/jalur hijau: 10 - 30 %
- Fasilitas lainnya: 10 - 30 %

Sejalan dengan perkembangan wilayah yang selalu menjadi pengenalan pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang harus diseimbangkan dengan daya dukung lingkungannya. Banyak wilayah yang berkembang secara tidak terkendali, sehingga terjadi degradasi lingkungan secara kualitatif dan kuantitatif. Salah satu contoh penyebab erosi lingkungan adalah "invasi penggunaan lahan" untuk pembangunan kawasan pemukiman baru dan peningkatan infrastruktur pada kawasan-kawasan yang semestinya menjadi daerah preservasi alami untuk melestarikan sumberdaya alam, khususnya air permukaan, air tanah dan tanah.

Ketika daya dukung wilayah terlampaui maka timbul berbagai macam permasalahan seperti meningkatnya kebutuhan akan infrastruktur yang membutuhkan ketersediaan lahan. Akibat penggunaan lahan yang dibutuhkan akan semakin meningkatkan nilai ekonomis penggunaan lahan.



2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Kondisi Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) di Kabupaten Rote Ndao didasarkan pada kemampuan lingkungan memenuhi kebutuhan makhluk hidup untuk menyediakan energi pangan dan air bersih. Terdapat tujuh wilayah kecamatan di Rote Ndao yang potensi wilayahnya mampu menopang penyediaan pangan secara aman/ berkelanjutan. Dua wilayah kecamatan (Rote Barat dan Rote Selatan) kinerja daya dukung pangan masuk dalam kategori aman bersyarat, sementara dua wilayah kecamatan lainnya (Ndao Nuse dan Loaholu) memiliki daya dukung pangan yang berada dalam kondisi tidak aman (defisit pangan).

Untuk menjaga DDLH penyediaan pangan tidak terlampaui dapat dilakukan dengan dua skenario, yaitu: (1) Berupaya untuk mengubah pola konsumsi masyarakat dan meningkatkan teknologi yang dapat mendukung ketersediaan sumber daya alam dan (2) Menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, memperbaiki kualitas jasa dari lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim

B. Jasa Ekosistem Penyedia Air

Ketersediaan air bersih yang terbatas merupakan masalah utama di sebagian besar wilayah Kabupaten Rote Ndao. Pada beberapa daerah, neraca air tahunannya memperlihatkan defisit. Variabilitas kondisi air bersih tersebut disebabkan oleh variabilitas curah hujan, juga karena kondisi hidrogeologi dan jumlah air pada cekungan air tanah.

Ada lima kecamatan yang menjadi penyumbang utama daya dukung lingkungan jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kabupaten Rote Ndao yakni Kecamatan Landu Leko, Rote Tengah, Pantai Baru, Lobalain dan Rote Barat Daya. Kecamatan yang menyediakan jasa terendah adalah Kecamatan Ndao Nuse dan Rote Selatan

Kebutuhan air total untuk Kabupaten Rote Ndao adalah sebesar 235,82 juta m³ /tahun, sementara ketersediaannya sebesar 224,32 juta m³ /tahun, sehingga statusnya defisit sebesar 11,49 juta m³ /tahun. Secara administratif, kebutuhan air terbesar terdapat di Kecamatan Lobalain sebesar 50,46 juta m³ /tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Ndao Nuse sebesar 6,05 juta m³ /tahun. Sementara itu, ketersediaan air terbesar



terdapat di Kecamatan Pantai Baru yaitu 33,65 juta m³ /tahun dan terendah terdapat pada Kecamatan Ndao Nuse sebesar 2,89 juta m³ /tahun.

2.1.1.4 Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan

Air dan pangan membentuk suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (*nexus*) dan sangat krusial untuk keberlangsungan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Rote Ndao. Aspek ini saling mempengaruhi dan keterbatasan pada salah satunya dapat berdampak signifikan pada aspek lainnya.

A. Indeks Ketahanan Pangan

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Tahun 2024, Indeks Ketahanan Pangan Rote Ndao pada Tahun 2024 adalah 71,27 termasuk dalam kategori Tahan atau Prioritas 5. Nilai indeks ini naik cukup signifikan jika dibandingkan pada tahun 2020, dimana nilai indeks ketahanan pangan Rote Ndao adalah 68,21.

B. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. PPH juga merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

PPH merupakan instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan yang dinyatakan dalam skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang (maksimal 100). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun-tahun mendatang. PPH dapat digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Skor PPH di Kabupaten Rote Ndao mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 skor PPH tercatat sebesar 56,40,



kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 61,30. Pada tahun 2022 Skor PPH turun menjadi 53,10, dan tahun 2023 meningkat menjadi 56,40. Pada tahun 2024 skor PPH sedikit menurun menjadi 55,50. Perubahan nilai ini menunjukkan adanya dinamika dalam pemenuhan keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan pangan lokal, tingkat pendapatan masyarakat, serta upaya pemerintah daerah dalam mendorong pola konsumsi pangan.

Penting untuk diingat bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ideal adalah 100. Oleh karena itu, capaian skor PPH tahun 2024 sebesar 55,50 masih tergolong jauh dari target yang diharapkan. Upaya berkelanjutan perlu terus dilakukan untuk mencapai skor ideal tersebut. Peningkatan skor PPH dapat ditempuh melalui edukasi gizi yang berkesinambungan, peningkatan akses dan konsumsi pangan yang beragam serta bergizi seimbang, serta pelaksanaan kebijakan dan program yang mendukung ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat.

Tabel 2.7

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	56,40	61,30	53,10	56,40	55,50

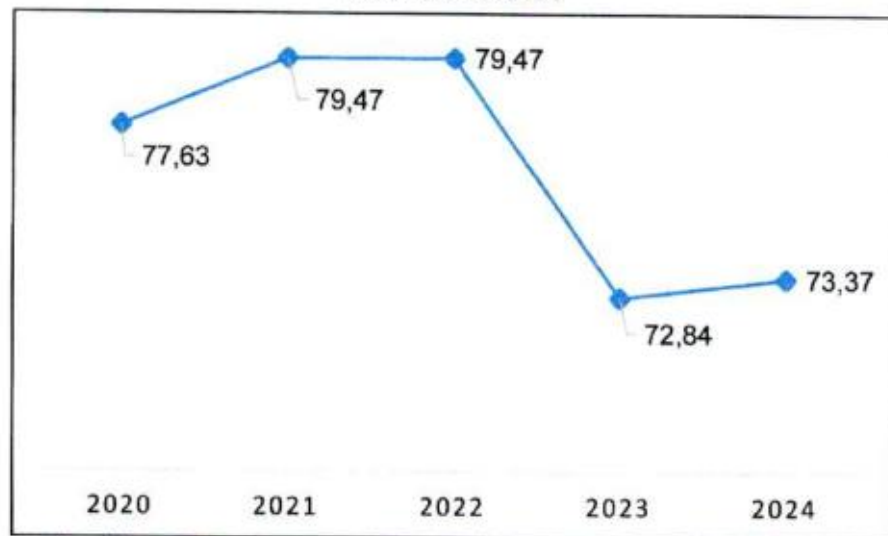
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

C. Persentase rumah tangga berakses air minum layak

Air minum merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus tersedia dengan layak dan mudah diakses. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Sampai dengan tahun 2024 rumah tangga berakses air minum mencapai 73,37%. Angka tersebut jauh dari target nasional sebesar 100% penduduk berakses air minum. Capaian rumah tangga akses air minum baru pada kondisi desa ber air minum, belum rumah tangga dengan air minum. Artinya bahwa akses air minum belum mencapai rumah tangga/sambungan rumah (SR) keseluruhan. Secara rinci perkembangan rumah tangga berakses air minum dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik 2.2
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak
Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa trend rumah tangga berakses air minum mengalami fluktuatif dari tahun 2020-2024. Pemerintah melakukan upaya yang sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah untuk meningkatkan akses air minum layak.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKHD)

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKHD) adalah alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat pengelolaan keanekaragaman hayati di tingkat daerah, seperti kabupaten/kota, provinsi, atau wilayah administratif lainnya. Tujuan IPKHD adalah untuk menilai sejauh mana suatu daerah telah berhasil dalam melestarikan, melindungi, dan mengelola keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

IPKHD membantu pemerintah daerah dalam memantau dan mengevaluasi upaya-upaya dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Dengan memahami tingkat keberhasilan dan tantangan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih efektif untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan hayati secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.



B. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sebagai Kabupaten Kepulauan, Kabupaten Rote Ndao telah merasakan dampak terhadap perubahan iklim. Kekeringan, badai/ siklon, dan banjir merupakan bencana yang hampir dihadapi oleh masyarakat Rote Ndao setiap tahunnya. Sehingga pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam secara permanen, sehingga dapat dipertahankan untuk generasi mendatang. Hal ini melibatkan perlindungan dan pemeliharaan ekosistem, konservasi sumber daya alam, dan penggunaan sumber energi bersih dan terbarukan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Rote Ndao ditentukan oleh tiga komponen utama: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Kualitas air Rote Ndao menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber air tawar, intrusi air laut pada wilayah pesisir, dan sistem sanitasi yang belum optimal. Embung-embung tradisional sebagai penampung air hujan mengalami tekanan akibat sedimentasi dan evaporasi tinggi. Kualitas udara relatif baik dibandingkan wilayah industri, meski tantangan berupa debu pada musim kemarau dan emisi dari PLTD masih ada. Tutupan lahan didominasi savana dan hutan kering dengan sejumlah kawasan mangrove di pesisir. Faktor yang mempengaruhi IKLH meliputi kondisi geografis pulau kecil beriklim kering, aktivitas ekonomi yang didominasi pertanian dan perikanan tradisional, serta keterbatasan infrastruktur lingkungan.

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Potensi penyediaan air di wilayah Kabupaten Rote Ndao terutama bersumber dari 48 sungai, 31 sumber mata air, 11 embung kecil, 7 embung irigasi, 4 bendungan, 6 danau (total volume 7 juta meter kubik) dan 3 buah CAT yang tersebar pada beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Rote Ndao. Sungai merupakan sumberdaya air permukaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dari 48 sungai, jumlah sungai yang berair sepanjang tahun hanya berjumlah 12 buah. Sungai terbesar adalah Sungai Menggelama, dengan panjang sungai 32 km. Sementara jumlah danau yang berair sepanjang tahun ada 6 buah, dengan total volume 7 juta meter kubik. Selain itu, banyak terdapat mata air yang tersebar di wilayah Kabupaten yang saat ini dimanfaatkan penduduk untuk pemenuhan



kebutuhan air minum dan irigasi. Ketersediaan air pada mata air ini sangat bergantung pada kondisi hutan yang memiliki kemampuan sebagai peresap air hujan. Kerusakan hutan baik karena kegiatan dalam hutan maupun alih fungsi untuk kegiatan lain perlu diantisipasi untuk menjaga pasokan air serta kualitasnya. Di Kabupaten Rote Ndao, jumlah mata yang telah terdata ada 31 mata air dengan total debit 781,79 liter/detik atau 24.654.529,44 m³/tahun. Kondisi kualitas air di Kabupaten Rote Ndao salah satunya dapat dilihat dari Indeks Kualitas Air (IKA) atau Indeks Pencemaran Air (IPA). Indeks Kualitas Air (IKA) adalah indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air di suatu wilayah. IKA dihitung berdasarkan perhitungan status mutu air dengan metode indeks pencemaran sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Secara nasional, parameter utama yang digunakan untuk menentukan Indeks Kualitas Air adalah TSS, DO dan COD, sejak tahun 2017 perhitungan IKA menggunakan 7 parameter kualitas air yaitu parameter TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fecal koliform, dan total coliform, kemudian mulai tahun 2018 perhitungan IKA menggunakan 10 parameter kualitas air yaitu TSS, TDS, pH, DO, BOD, COD, NH₃-N, total fosfat, NO₃-N dan fecal koliform.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Polusi merujuk pada berbagai jenis pencemaran, termasuk pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan permasalahan sampah. Pencemaran udara, khususnya, telah menjadi penyebab utama dari penyakit serta kematian dini di seluruh dunia. Dalam tahun-tahun terakhir, lebih dari tujuh juta individu telah kehilangan nyawa mereka lebih awal dari yang seharusnya disebabkan oleh efek buruk polusi (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, 2022). Bahkan lebih memprihatinkan, data menunjukkan bahwa sembilan dari setiap sepuluh orang di seluruh dunia harus menghirup udara yang mengandung tingkat polutan yang melebihi pedoman yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Sumber pencemaran udara utamanya berasal dari berbagai aspek dalam masyarakat, termasuk penggunaan energi fosil (seperti bahan bakar minyak dan gas), proses industri, kegiatan pertanian, perubahan lahan dan hutan, serta proses pengolahan limbah termasuk pengelolaan sampah. Dalam kerangka ini, sektor



transportasi menjadi salah satu penyumbang utama dalam emisi gas beracun, seperti karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO₂), dan hidrokarbon (HC). Dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi seiring berjalannya waktu, kontribusi sektor transportasi terhadap emisi CO, CO₂, dan HC juga ikut meningkat secara signifikan.

Gambaran kondisi kualitas udara di Kabupaten Kabupaten Rote Ndao salah satunya dapat dilihat dari Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter utama yang digunakan untuk menentukan Indeks Kualitas Udara adalah NO₂ dan SO₂.

Secara detail capaian kinerja indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021-2024

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Poin)	48,93	67,77	69,59	68,17
Aspek pengukuran:				
- Indeks Kualitas Air	0	50,00	51,67	53,33
- Indeks Kualitas Udara	95,17	95,27	97,66	92,22
- Indeks Tutupan Lahan	47,41	47,41	48,43	49,17

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

C. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mencegah manusia bersentuhan langsung dengan bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, sehingga menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Akses masyarakat terhadap sanitasi dasar masih memprihatinkan baik secara nasional maupun di tingkat kabupaten. Permasalahan bidang sanitasi yang muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi, budaya masyarakat dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Oleh sebab itu penanganan sanitasi menjadi kesepakatan nasional yang harus

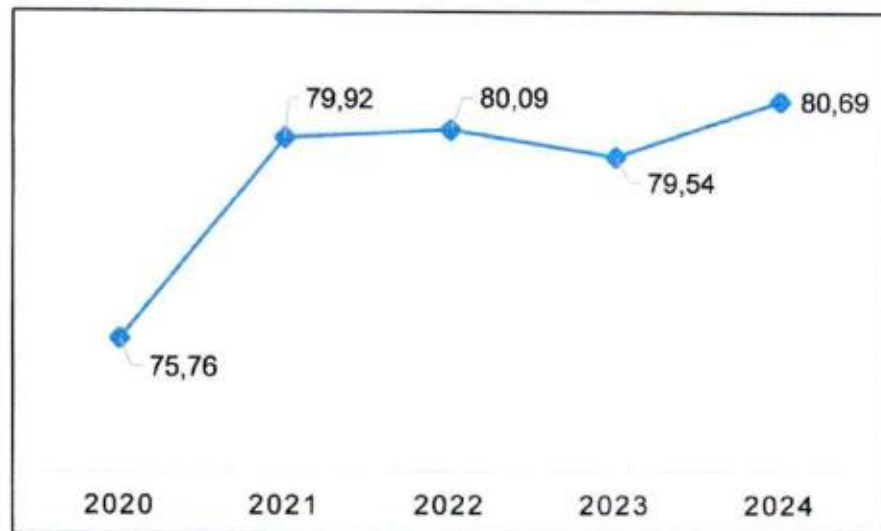


diimplementasikan dalam rangka meningkatkan derajat sanitasi secara nasional maupun di tingkat daerah.

Tren persentase rumah tangga bersanitasi layak di Kabupaten Rote Ndao selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup mencolok. Pada tahun 2020, angka rumah tangga bersanitasi layak tercatat sebesar 75,76% dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 79,92%. Peningkatan ini berlanjut di tahun 2022, meskipun hanya sedikit, mencapai 80,09%. Namun, di tahun 2023 terjadi penurunan tajam menjadi 79,54%, hampir menyamai angka pada tahun 2020. Meski begitu, pada tahun 2024 kembali terjadi peningkatan yang cukup baik dengan capaian 80,69%, menjadi angka tertinggi dalam periode lima tahun ini. Pola ini menunjukkan adanya perbaikan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan sanitasi layak di Kabupaten Rote Ndao. Secara rinci perkembangan pembangunan sanitasi dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.3

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

D. Persentase Sampah yang Ditangani dan Dikelola

1) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah merupakan besar volume sampah yang dihasilkan dari sumber sampah pada suatu wilayah tertentu persatuan waktu (m³/jam). Timbulan sampah digunakan untuk menentukan fasilitas yang akan digunakan dalam pengelolaan sampah. Menurut SNI 19-3964-1995, untuk menghitung besaran sistem dapat



digunakan timbulan sampah apabila belum dilakukan perhitungan timbulan sampah sebagai berikut:

- a) Satuan timbulan sampah untuk kota sedang (dengan jumlah penduduk $100.000 < p < 500.000$) yaitu: 2, 75-3,25 L/orang/hari atau 0,70-0,80 kg/orang/hari
 - b) Satuan timbulan sampah untuk kota kecil (dengan jumlah penduduk < 100.000) yaitu: 2,5-2,75 L/orang/hari atau 0,625-0,70 kg/orang/hari
- Perkiraan ini digunakan sebagai salah satu acuan untuk pemilihan sistem pengelolaan sampah agar dapat dilakukan dengan efisien.

Kabupaten Rote Ndao termasuk dalam satuan timbulan sampah untuk Kota Sedang karena jumlah penduduknya di antara 100.000 $< p < 500.000$. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPN), Timbulan Sampah di Rote Ndao pada Tahun 2024 adalah sebesar 135,05 Ton per hari atau 49.291,78 ton per tahun. Angka ini sedikit meningkat dari Tahun 2022 dan 2023 yang memiliki angka sama yaitu 133,75 per hari atau 48.819,44 per tahun.

Jumlah TPA di Kabupaten Rote Ndao tercatat adalah sebanyak 1 di desa Oelunggu, status TPA A. Data SIPSN mencatat TPA ini menampung sampah sebanyak 3.931,05 ton per tahun pada Tahun 2023. Sehingga, Capaian kinerja pengelolaan sampah Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9

Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

TAHUN	TIMBUNAN SAMPAH (TON/THN)	PENGURANGAN SAMPAH (%)	PENANGANAN SAMPAH (%)	SAMPAH TERKELOLA (%)
2024	49.291,78	2.1	6	8.10
2023	48,819.44	N/A	8.05	8.05
2022	48,819.44	N/A	8.06	8.06

Sumber: Website SIPN, Tahun 2025 (N/A: data tidak tersedia)

2) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Persentase jumlah sampah yang tertangani meningkat dari tahun 2020 sebesar 46,62% menjadi 69,26% pada tahun 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah armada sampah untuk mengangkut sampah yang ada di kontainer penampung sampah. Pelayanan ini pun hanya untuk wilayah Kota Ba'a. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah personil dan fasilitas



pendukung lainnya sehingga wilayah operasi armada persampahan hanya dibatasi untuk wilayah Perkotaan Ba'a. Terkait pengolahan sampah, Kabupaten Rote Ndao belum memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dimana selama ini yang dilayani hanya pengangkutan sampah dan selanjutnya dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Desa Oelunggu. Secara detail capaian kinerja Bidang lingkungan hidup di Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10

Persentase Pengelolaan Sampah

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pengelolaan Sampah (%)	46,62	54,73	72,49	90,83	69,26

Sumber : Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sebagai pulau terluar Indonesia yang menghadap Samudera Hindia dan Australia, Rote menjadi saksi nyata dari dampak perubahan iklim yang semakin intensif dalam beberapa dekade terakhir. Musim hujan menjadi semakin tidak terprediksi, dengan curah hujan yang lebih ekstrim tetapi durasi yang semakin pendek. Hujan lebat dalam waktu singkat menyebabkan genangan di beberapa kawasan, termasuk persawahan dan perumahan, terutama yang berada di pesisir pantai, sementara jeda antar hujan semakin panjang.

Berdasarkan data BMKG, musim kemarau cenderung lebih panjang dan lebih kering, dengan suhu rata-rata yang meningkat sekitar 1-1,5°C dibandingkan catatan suhu 30 tahun lalu. Kekeringan yang lebih parah menyebabkan krisis air bersih di beberapa desa, terutama di wilayah pesisir selatan. Pola angin berubah dengan tiupan yang lebih kencang dan tidak beraturan, menyulitkan nelayan tradisional untuk melaut dan meningkatkan risiko kecelakaan laut. Pengukuran tingkat resiliensi daerah merupakan integrasi dari pengkajian risiko dan status kesiapan daerah untuk menghadapi berbagai ancaman bencana.

Oleh karena itu Pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan mencakup peningkatan resiliensi dan adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.



A. Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga

Rasio gas rumah tangga merupakan rasio untuk mengukur seberapa banyak rumah tangga yang mengandalkan gas sebagai sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk memasak. Secara umum, masyarakat di Rote Ndao masih lebih sering menggunakan minyak tanah dibandingkan gas LPG. Hal ini dikarenakan fleksibilitas penggunaan minyak tanah yang lebih mudah, meskipun gas LPG dianggap lebih hemat dan ramah lingkungan. Masyarakat masih menggunakan minyak tanah dikarenakan bisa digunakan di berbagai jenis kompor sumbu dan masih lebih terjangkau, terutama untuk masyarakat dengan pendapatan rendah. Berikut ini adalah Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga di Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.11

Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga

	2021	2022	2023	2024
Kab. Rote Ndao	N/A	N/A	0,014	0,016
Prov. NTT	1,41	1,26	1,43	-

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025 (N/A: Data tidak tersedia)

B. Indeks Risiko Bencana (IRB)

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan alat pengukuran kuantitatif yang esensial dalam menilai potensi dampak bahaya alam di suatu wilayah. Instrumen ini menjadi fondasi penting untuk manajemen risiko bencana dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Risiko Bencana di Rote Ndao didominasi oleh ancaman kekeringan, abrasi pantai, dan banjir musiman dengan kategori risiko sedang hingga tinggi.

Dari segi bahaya, kekeringan menjadi ancaman paling signifikan dengan frekuensi 3-5 kejadian per tahun, mempengaruhi ketersediaan air dan produktivitas pertanian. Abrasi pantai semakin intensif akibat peningkatan permukaan air laut dan berkurangnya ekosistem pesisir pelindung. Banjir juga terjadi saat puncak musim hujan di beberapa wilayah dengan topografi rendah, terutama di wilayah pertanian yang berpengaruh pada produksi pertanian

Komponen kerentanan Rote Ndao diperparah oleh infrastruktur terbatas, sebaran pemukiman di wilayah rawan bencana, dan ketergantungan tinggi pada pertanian tadah hujan. Secara sosial-ekonomi, tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan akses terbatas terhadap layanan dasar meningkatkan kerentanan masyarakat.



Dari aspek kapasitas, kurang dari 30% desa berstatus "Desa Tangguh Bencana" mengindikasikan kesiapsiagaan yang belum optimal. Sistem peringatan dini hanya menjangkau 30-40% wilayah rawan bencana, sementara jalur evakuasi teridentifikasi di 50-60% wilayah potensial terdampak.

Potensi bencana di wilayah Kabupaten Rote Ndao dijabarkan sebagai berikut:

- Potensi longsor yang kecil ada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Rote Ndao akibat tergerusnya permukaan tanah oleh limpasan air hujan.
- Potensi bencana banjir terjadi wilayah aliran sungai dan saluran-saluran yang sudah melebihi daya tampungnya sebagai akibat pendangkalan dan kerusakan lingkungan oleh manusia.
- Potensi bencana abrasi yang berpotensi tinggi terdapat di wilayah bagian Selatan Kabupaten Rote Ndao.
- Potensi bencana angin kencang (seperti siklon tropis Seroja) yang berpotensi terdapat di wilayah Kabupaten Rote Ndao

Kawasan rawan bencana dibagi menjadi 4 (empat), yaitu kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi pada periode bulan November sampai bulan Februari umumnya terjadi gelombang musim barat. Periode gelombang musim barat umumnya terjadi pada bulan Desember sampai bulan Februari dan pada bulan April sampai dengan bulan November umumnya terjadi gelombang musim timur, merupakan gelombang dari selatan yakni Samudera Hindia memasuki Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir yang berhadapan dengan Samudera Hindia yakni di selatan dan timur Kabupaten Rote Ndao. Gelombang musim timur juga merupakan pertanda datangnya musim kemarau, Kawasan rawan bencana gerakan tanah, Kawasan rawan bencana gempa walaupun termasuk klasifikasi gempa rendah dan, Kawasan rawan bencana angin kencang/Angin Puting Beliung.

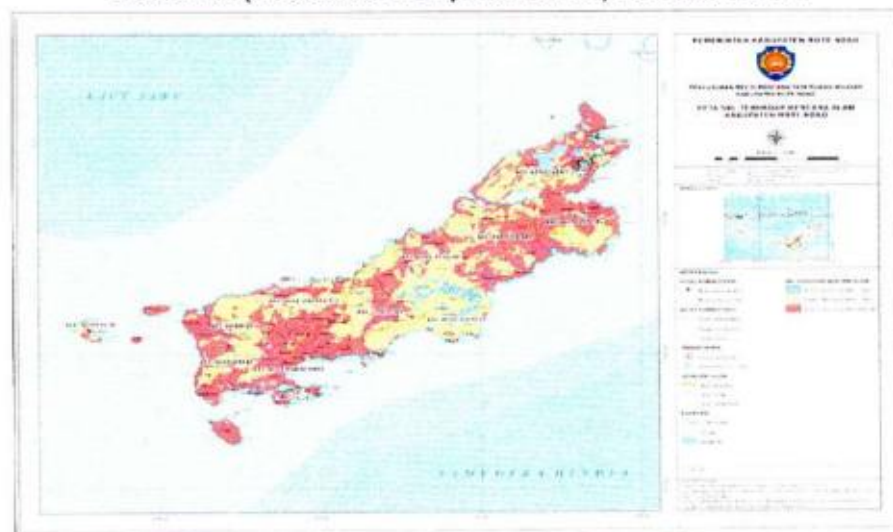


Gambar 2.8
Peta SKL (Satuan Kemampuan Lahan) Erosi



Sumber: Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

Gambar 2.9
Peta SKL (Satuan Kemampuan Lahan) Bencana Alam



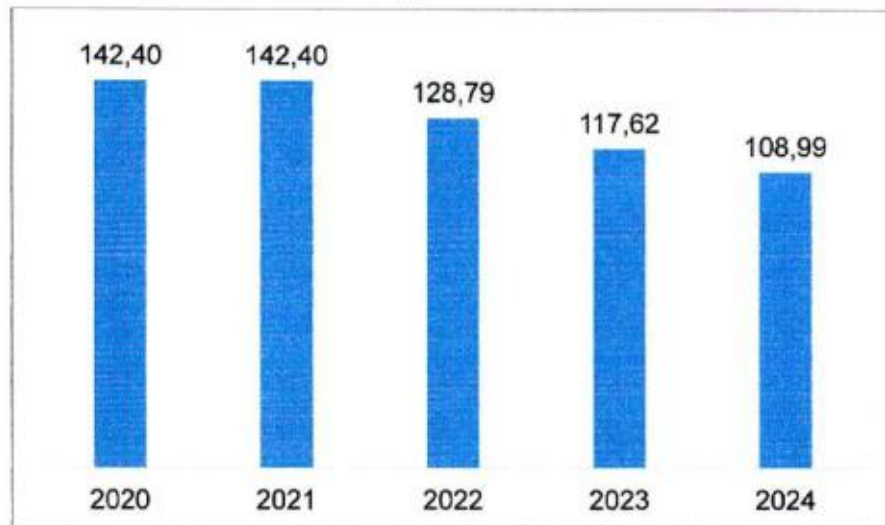
Sumber: Perhitungan Citra Satelit Resolusi Tinggi BIG, Tahun 2021

Berdasarkan data inaRISK BNPB menunjukkan bahwa kategori Risiko Bencana di Kabupaten Rote Ndao adalah sedang, dan untuk melihat tren indeks risiko bencana dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.4

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024



Sumber: Inarisk BNPB, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, indeks risiko bencana dari tahun 2020-2021 tidak mengalami perubahan yaitu berada pada 142,40 poin. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 128,79 poin dan terus menurun menjadi 108,99 poin pada tahun 2024. Penurunan Indeks Risiko Bencana disebabkan oleh berbagai faktor baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Bencana: Jika suatu daerah berhasil meningkatkan kapasitas dan efektivitas sistem manajemen bencana, termasuk dalam hal perencanaan, mitigasi, respons, dan pemulihan, maka risiko bencana dapat berkurang
2. Implementasi Kebijakan Mitigasi yang Sukses: Jika pemerintah dan masyarakat berhasil menerapkan kebijakan mitigasi yang efektif seperti regulasi bangunan yang lebih ketat, pengelolaan lahan yang berbasis risiko, atau kampanye kesadaran masyarakat tentang cara menghadapi bencana, maka risiko bencana dapat menurun.
3. Perubahan Sosial-Ekonomi: Peningkatan pendapatan, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan yang lebih baik, dan infrastruktur yang lebih kuat dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap bencana, sehingga menyebabkan penurunan risiko bencana.
4. Pengurangan Faktor Pemicu Bencana: Jika faktor-faktor pemicu bencana seperti perubahan iklim, aktivitas geologi, atau kebakaran



hutan dikelola dengan lebih baik atau berkurang, maka risiko bencana dapat menurun.

5. Peran Masyarakat: Keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, termasuk dalam hal partisipasi dalam perencanaan komunitas dan pengimplementasian rencana darurat, dapat membantu mengurangi risiko bencana.
6. Pengetahuan dan Teknologi: Kemajuan dalam penelitian dan teknologi mitigasi bencana, seperti sistem peringatan dini yang lebih baik, pemodelan risiko yang lebih canggih, atau infrastruktur tahan gempa, dapat membantu mengurangi risiko bencana, dan
7. Pendekatan Holistik: Pendekatan terhadap pengurangan risiko bencana yang holistik dan berbasis pada pemahaman akan interaksi antara berbagai faktor risiko, termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan, juga dapat menghasilkan penurunan IRB yang signifikan

Berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia DIBI-BNPB tahun 2022, pada periode 18 tahun terakhir (Tahun 2004 – 2022) jumlah kejadian bencana, dampak dan perhitungan total kerugian di Kabupaten Rote Ndao seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Jenis, Jumlah, Dampak, dan Kerugian Akibat Bencana
di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004-2022

TAHUN	BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	DAMPAK	TOTAL KERUGIAN (Rp.)
2004	Banjir	1	203 rumah rusak	1.092.000.000
2008	Banjir	1		9.467.000.000
	Puting beliung	2	1 orang luka – luka, 16 orang terdampak, 77 rumah rusak dan 1 fasilitas pendidikan rusak	14.024.000.000
	Tanah longsor	1		8.500.000.000
	Abrasi	1		13.300.000.000
2009	Puting beliung	2	77 orang terdampak, 16 rumah rusak dan 3 fasilitas perkantoran rusak	150.425.000.000
	Banjir	1		150.000.000
2010	Tanah longsor	2	155 orang terdampak, 15 rumah rusak	1.532.000.000
2014	Banjir	1	1 orang meninggal dan 5 unit rumah rusak	
	Kekeringan	1	32.026 orang menderita	
2015	Banjir	1	85 orang mengungsi	
2018	Puting beliung	4	6 unit rumah rusak	



TAHUN	BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	DAMPAK	TOTAL KERUGIAN (Rp.)
2019	Kekeringan	1	22.217 orang menderita	
	Banjir	4	55 unit rumah rusak	
	Kekeringan	1	51.076 orang menderita	
	Puting beliung	1	1 orang luka – luka, 1 rumah rusak dan 1 fasilitas perkantoran rusak	
2020	Kebakaran hutan dan lahan	1		
2021	Puting beliung	1	19 rumah rusak	
	Banjir	2	1 orang meninggal, 74 orang luka-luka, 17.699 orang terdampak, 5.563 mengungsi, 8.760 rumah rusak, 1 jembatan rusak	
2022	Banjir	2	Satu orang korban meninggal dunia terseret banjir. Kerusakan 2 unit Jembatan	52,500
			kerusakan pada tanggul embung kerusakan areal persawahan dengan umur padi 2bulan .	520.000.000
	Gelombang pasang/Rob- abrasi	1	Kurang lebih 50 meter tembok panahan pantai rusak	50.000.000
	Angin kencang	2	1 Rumah Rusak (1 RB) 1 KK (5 Jiwa) dievakuasi/ mengungsi	10.000.000
			2 Rumah Rusak (1 unit RR, 1 Unit RB) 2 KK (10 Jiwa) dievakuasi/mengungsi	25.000.000

Sumber: DIBI-BNPB tahun 2021, Pusdalops PB-BPBD NTT tahun 2022

Berdasarkan data kejadian bencana dimaksud diketahui bahwa terdapat 6 jenis kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Rote Ndao, dengan total 29 kejadian. Siklon Tropis Seroja dicatat sebagai 'banjir' dengan penjelasan bencana sebagai banjir, angin kencang dan abrasi pantai. Hal ini terjadi karena belum dimasukkan sebagai salah satu jenis bencana di Indonesia dan masih menggunakan dampak Siklon Tropis.



C. Kawasan Rawan Bencana

Kriteria lindung untuk kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang teridentifikasi sering dan berpotensi mengalami bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor serta banjir. Adapun maksud dari direncanakannya kawasan rawan bencana adalah sebagai mitigasi bencana yaitu upaya manusia dalam menurunkan dampak negatif terhadap suatu kejadian bencana, sehingga pengaruh yang lebih buruk dapat dihindari. Dengan demikian penelitian dan pengamatan dalam usaha perencanaan dan persiapan untuk meminimalkan efek bencana alam lebih baik daripada menghadapi kenyataan yang lebih buruk akibat terjadinya bencana.

1) Kawasan Rawan Bencana Longsor

Kawasan rawan bencana longsor di Rote Ndao potensi terbesar terjadi di Kecamatan Lobalain Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, Desa Oeleka, Desa Helebeik, Desa Kuli, dan Desa Kolobolon. Kecamatan Rote Tengah pada Desa Maubesi, Desa Lidabesi, Kelurahan Onatali, Desa Suebela dan Desa Limakoli. Kecamatan Rote Selatan pada Desa Tebole dan Desa Dodaek. Kecamatan Pantai Baru di Desa Nusakdale, Kecamatan Rote Barat Laut pada Desa Oetutulu dan Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Mbokak. Gerakan tanah terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao. Upaya untuk pengendalian kawasan rawan longsor dilakukan hal-hal berikut:

a. Pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi:

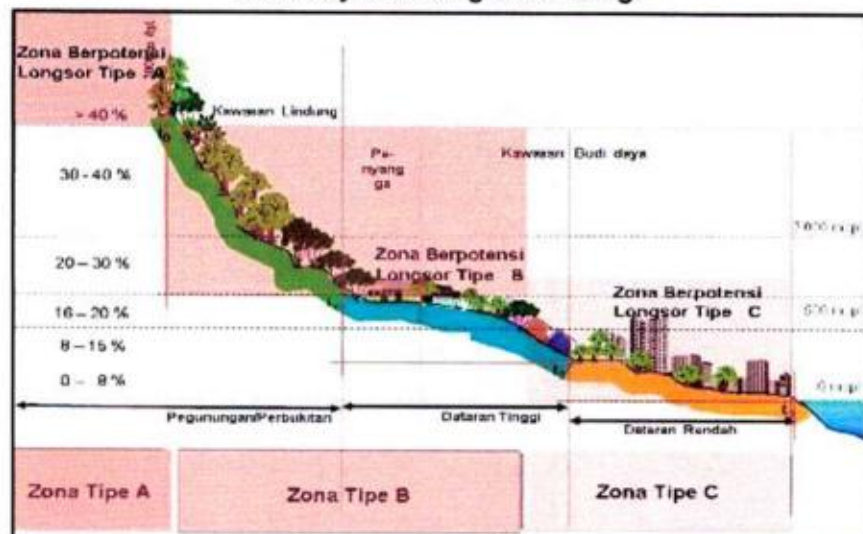
- 1) Pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten atau rencana detail tata ruang kabupaten/kota;
- 2) Dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah;
- 3) Tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/ tingkat risiko tinggi; terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya; dan

- 4) Kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ketat.
- b. Acuan peraturan zonasi pada kawasan rawan longsor.
- c. Perizinan pemanfaatan ruang kawasan rawan longsor.
- d. Perangkat insentif dan disinsentif pada kawasan rawan longsor.
- e. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang kawasan rawan longsor.

Mengingat kawasan sepanjang DAS ini sekaligus merupakan kawasan penyangga untuk mencegah pendangkalan waduk yang disebabkan oleh longsor dan erosi, maka upaya penanam vegetasi yang berkayu dengan tegakan tinggi juga harus diikuti oleh pengembangan tutupan tanah atau *ground cover* yang juga memiliki fungsi ekonomi seperti rumput gajah yang dapat digunakan untuk pakan ternak.

Gambar 2.10

Tipologi Zona Berpotensi Longsor Berdasarkan
Hasil Kajian Hidrogeomorfologi





Gambar 2.11

Penanganan Kawasan Konservasi dan Rawan Longsor



2) Kawasan Rawan Banjir

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Rote Ndao itupun bukan banjir tapi genangan. Kawasan rawan bencana banjir/genangan yang ada di Rote Ndao berada di sekitar kawasan dengan kondisi drainase yang buruk, antara potensi kerentanan terbesar terjadi di *Desa Busalangga Barat, Desa Dalek Esa, Desa Lekunik, Desa Munde, Desa Holoama, Desa Lalukoen, Desa Lidor, Desa Meoain, Kelurahan Mokdale, Desa Oebafok, Desa Oehandi, Desa Oelua, Desa Oenitas, Desa Sanggaoen dan Desa Temas*. Konsep pengendalian genangan di Kabupaten Rote Ndao dibangun dengan orientasi konservasi dan berbasis partisipasi masyarakat, dengan harapan akan berjalan efektif dan menunjang pengkondisian perbaikan kualitas lingkungan. Pelaksanaan penanggulangan akan lebih efektif jika dilakukan secara berjenjang. Penghijauan difokuskan pada daerah yang sangat kritis, dilanjutkan pada daerah agak kritis. Penyusunan prioritas bangunan baru dapat didasarkan pada status sungai dalam kaitannya dengan bahaya banjir.

Dalam melakukan pengendalian banjir perlu disusun strategi agar dapat dicapai hasil yang diharapkan, meliputi:

- Penghijauan kawasan Resapan Air;
- Pembuatan tanggul-tanggul sungai;
- Normalisasi sungai dan saluran drainase;
- Pembuatan terasering.



3) Kawasan Gelombang Pasang dan Rawan Abrasi

Kabupaten Rote Ndao garis pantai sekitar kurang lebih 521,01 Km dan seperti wilayah lain di Indonesia juga memiliki masalah dengan ekosistem pantainya terutama dengan masalah abrasi pantai dan gelombang pasang (ekstrim). Kawasan rawan abrasi dan gelombang yaitu di Wilayah pantai Kabupaten Rote Ndao, terdiri dari:

- Gelombang ekstrim terjadi hampir sepanjang tahun, hal ini dipengaruhi oleh pola angin dan pola tekanan udara. Gelombang ekstrim menjadi salah satu faktor utama fluktuatifnya harga barang dan jasa serta kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao. Pada periode bulan november sampai bulan februari umum terjadi gelombang musim barat, yaitu gelombang dari barat yakni Samudera Hindia memasuki perairan Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir Kabupaten Rote Ndao yang berhadapan dengan Samudera Hindia meliputi desa-desa di Kecamatan Landu Leko bagian utara yaitu Desa Pukuafu, Desa Sotimori, Desa Lifuleo, Desa Bolatena. Kecamatan Pantai Baru pada Desa Tesabela dan Desa Tunganamo. Kecamatan Rote Tengah pada Desa Nggodimeda, Desa Siomeda, Kelurahan Onatali, Desa Lidabesi dan Desa Maubesi. Kecamatan Lobalain pada Kelurahan Metina, Kelurahan Namodale, dan Desa Baadale. Kecamatan Rote Barat Laut pada Desa Daudolu, Desa Tualima, Desa Hundihuk, Kecamatan Loaholu Desa Oelua, Desa Holulai, Desa Oebela, Desa Tasilo dan Desa Boni. Kecamatan Rote Barat pada Desa Mbueain, Desa Oelolot, Desa Sedeeon, Desa Nemberala dan Desa Oenggaut. Kecamatan Ndao Nuse pada Desa Mbali Lendeiki, Desa Anarae dan Desa Mbiu Lombo. Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Oeseli. Periode gelombang musim barat umumnya terjadi pada bulan desember sampai bulan februari.
- Pada bulan april sampai dengan bulan november umumnya terjadi gelombang musim timur, merupakan gelombang dari selatan yakni Samudera Hindia memasuki Laut Sawu dan menerpa langsung daerah pesisir yang berhadapan dengan Samudera Hindia yakni di selatan dan timur Kabupaten Rote Ndao. Gelombang musim timur juga merupakan pertanda datangnya musim kemarau. Tingginya pola tekanan dan kecepatan angin menyebabkan gelombang timur dan selatan yang melanda Kecamatan Landu Leko pada Desa



Pukuafu, Desa Tenalain, Desa Daiama, Kelurahan Londalusi, Desa Faifua, Desa Mukekuku, dan Desa Batefalu. Kecamatan Pantai Baru pada Desa Oeledo, Desa Sonimanu, Desa Lenupetu, Desa Batulilok, dan Desa Nusakdale. Kecamatan Rote Selatan pada Desa Tebole, Desa Dodaek dan Desa Inaoe. Kecamatan Lobalain pada Desa Kolobolon, Desa Bebalain, Desa Suelain, dan Desa Kuli. Kecamatan Rote Barat Daya pada Desa Fuafuni, Desa Dolasi, Desa Sakubatun, Desa Oetefu, Desa Oebou, Desa Oeseli dan Desa Landu. Kecamatan Rote Barat pada Desa Boa, Kecamatan Ndao Nuse pada Desa Mbali Lendeiki, Desa Ndao Nuse dan Desa Mbui Lombo.

4) Kawasan Rawan Cuaca Ekstrim

Kabupaten Rote Ndao, sebagai kabupaten kepulauan di ujung selatan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan Australia, memiliki beberapa kawasan yang sangat rawan terhadap cuaca ekstrim. Terutama, perubahan iklim menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrim, serta posisi geografis Rote Ndao yang terbuka terhadap sistem cuaca Samudra Hindia dan Laut Timor. Berikut adalah kawasan-kawasan yang paling rentan:

- a) Kawasan Pesisir: Sebagai daerah kepulauan dan kategori pulau kecil, pesisir Rote Ndao merupakan kawasan yang rawan terhadap cuaca ekstrim karena: Menerima dampak langsung dari siklon tropis yang terbentuk di Samudra Hindia, berhadapan langsung dengan wilayah perairan dengan gelombang tinggi. Wilayah pemukiman di sekitar pesisir seperti pada Kelurahan Metina dan Desa Papela berpotensi berdampak langsung saat gelombang tinggi.
- b) Kawasan Pulau - Pulau Kecil: Pulau - pulau kecil di sekitar Pulau Rote sangat rentan terhadap cuaca ekstrim karena minimnya vegetasi pelindung, ketinggian daratan yang relatif rendah, infrastruktur pengaman yang terbatas, dan potensi terisolasi pada kondisi cuaca tertentu. Pulau Nusa Manuk, Pulau Usu, Pulau Ndao, Pulau Ndana, Pulau Landu, Pulau Nuse berisiko tinggi terhadap badai dan gelombang ekstrim.
- c) Kawasan Teluk dan Selat: Area teluk dan selat di perairan Kabupaten Rote Ndao memiliki kerentanan antara lain: selat



antara Pulau Rote dan Pulau Timor sering mengalami turbulensi angin dan arus laut yang kuat, Teluk Papela dan perairan pesisir dapat mengalami perubahan arus mendadak saat cuaca ekstrim, serta perairan antara pulau - pulau kecil sering mengalami peningkatan gelombang yang rawan dan berbahaya bagi nelayan.

- d) Kawasan Kekeringan : Bahaya kekeringan, terjadi akibat curah hujan di bawah nilai tertentu, serta wilayah Kabupaten Rote Ndao yang merupakan kawasan karstic dengan penyimpanan air permukaan yang terbatas. Pada umumnya potensi kekeringan terjadi di hampir seluruh wilayah Kabupaten Rote Ndao yang berakibat lahan petani sulit mendapatkan air. Wilayah dengan potensi kekeringan dengan skala tinggi sampai skala sangat tinggi dapat terjadi di Desa Serubeba, Kelurahan Londalusi, Desa Hundiho, Desa Faifua, Desa Mukekuku, Desa Batefalu, Desa Pukuafu, Desa Tenalai dan Desa Daiama.

5) Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Kabupaten Rote Ndao memiliki potensi bencana longsor dan banjir dan tsunami, sistem jalur evakuasi bencana di kabupaten Rote Ndao meliputi:

- a) Jalur evakuasi kawasan rawan longsor meliputi:
- Ruas jalan Kolektor Primer dan Lokal Primer serta jalan lain sebagai jalur evakuasi;
 - Pemanfaatan Lapangan-lapangan dan ruang terbuka di area ketinggian di seluruh Kabupaten Rote Ndao
 - Pemanfaatan Gedung-gedung pemerintahan sebagai posko bencana.
- b) Jalur evakuasi kawasan rawan banjir, meliputi:
- Pemanfaatan ruas jalan Provinsi dan Kabupaten sebagai jalur evakuasi
 - Pemanfaatan Lapangan-lapangan dan ruang terbuka di area ketinggian
 - Pemanfaatan Gedung-gedung pemerintahan sebagai posko bencana
 - Fasilitas ruang terbuka lainnya.



- c) Jalur evakuasi kawasan gelombang pasang/Tsunami, meliputi:
- Pemanfaatan ruas jalan Provinsi dan Kabupaten sebagai jalur evakuasi
 - Pemanfaatan Lapangan-lapangan dan ruang terbuka di area ketinggian
 - Pemanfaatan Gedung-gedung pemerintahan sebagai posko bencana
 - Fasilitas ruang terbuka lainnya.

6) Ancaman Perubahan Iklim

Kabupaten Rote Ndao, sebagai kabupaten kepulauan kecil yang terletak di ujung selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan Australia, menghadapi tantangan unik terkait perubahan iklim. Posisi geografis yang unik ini menjadikan Rote Ndao sebagai benteng terdepan Indonesia, juga menempatkannya pada garis terdepan dalam menghadapi ancaman perubahan iklim global.

Dampak perubahan iklim akan mempengaruhi sistem sosial dan ekologis secara luas dan rumit, termasuk teknologi, ekonomi, serta perubahan sosial dan ekologi yang melintasi berbagai wilayah, kelompok, dan sektor. Empat sektor yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah sektor pertanian, sumber daya air, kesehatan, serta sektor kelautan dan pesisir. Dalam sektor pertanian, ada potensi penurunan produksi tanaman pangan seperti padi. Sumber daya air memiliki potensi peningkatan kekeringan dan penurunan ketersediaan air. Kesehatan dapat terpengaruh dengan meningkatnya kejadian penyakit menular seperti DBD, malaria, dan pneumonia. Sementara sektor kelautan dan pesisir berisiko dengan peningkatan tinggi gelombang yang dapat mengancam keselamatan pelayaran serta kenaikan permukaan laut yang dapat menyebabkan banjir di wilayah pesisir.

Bappenas (2021) mengkategorikan lokasi terdampak perubahan iklim yang memerlukan intervensi aksi ketahanan iklim ke dalam 3 tingkatan prioritas yaitu **super prioritas**, **top prioritas**, dan **prioritas** berdasarkan tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana yang berpotensi terjadi. Kriteria lokasi prioritas ketahanan iklim pada empat sektor prioritas ditentukan berdasarkan tujuh komponen, yaitu (i)



Proyeksi Iklim, (ii) Potensi Bahaya, (iii) SIDIK, (iv) IRBI, (v) Potensi Kerugian Ekonomi, (vi) usulan K/L, dan (vii) Validasi Lapangan. Berdasarkan hasil kajian Bappenas tahun 2021, Kabupaten Rote Ndao termasuk dalam salah satu wilayah di Provinsi NTT yang rentan terhadap perubahan iklim sehingga menjadi Lokasi prioritas aksi ketahanan iklim.

Tabel 2.13

**Prioritas Intervensi Aksi Ketahanan Iklim
Kabupaten Rote Ndao**

SEKTOR	KATEGORI PRIORITASI AKSI KETAHANAN IKLIM			
	SUPER PRIORITAS	TOP PRIORITAS	PRIORITAS	NON-PRIORITAS
1. Kelautan & Pesisir:				
• Subsektor Kelautan	-	√	-	-
• Subsektor Pesisir	-	√	-	-
2. Air	-	√	-	-
3. Pertanian	-	√	-	-
4. Kesehatan:				
• Penyakit DBD	-	-	-	√
• Penyakit Malaria	-	-	-	√
• Penyakit Pneumonia	-	-	-	√

Sumber: Bappenas, Tahun 2021

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa di Kabupaten Rote Ndao, sektor yang masuk dalam lokasi top prioritas ketahanan iklim, yaitu sektor kelautan dan pesisir, sektor air, dan sektor pertanian.

7) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan komponen kapasitas dalam menghasilkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) serta diperlukan menjadi acuan pemantauan dan evaluasi pembangunan resiliensi daerah. IKD Kabupaten Rote Ndao adalah seperti pada Tabel di bawah ini.



Tabel 2.14

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Rote Ndao

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Poin)	0,28	0,47	0,50	0,52

Sumber: BPBD Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

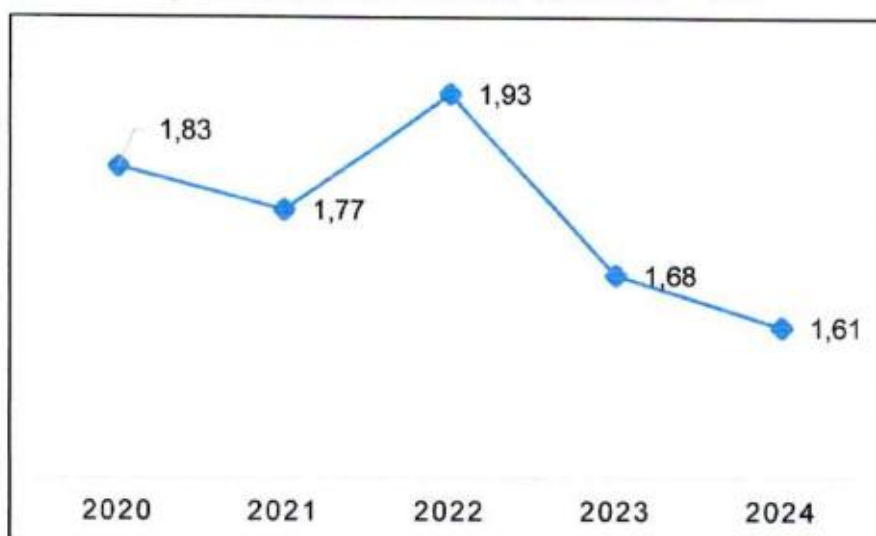
2.1.1.7 Demografi

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 adalah 1,68% dan tahun 2024 adalah 1,61%.

Grafik 2.5

Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

B. Rasio Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Rote Ndao terlihat bahwa pada tahun 2024 jumlah penduduk laki-laki sebesar 76.968 lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, yakni sebesar 75.982 dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) adalah 101,30 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101,30 penduduk laki-laki. Gambaran penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.15

Jumlah Penduduk Kabupaten Rote Ndao Menurut Jenis Kelamin

NO	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laki – Laki (Jiwa)	72.428	73.522	74.936	75.766	76.968
2.	Perempuan (Jiwa)	71.336	72.450	73.875	74.755	75.982
3.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	143.764	145.972	148.811	150.521	152.950
4.	Sex Ratio (%)	102	101	101	101,35	101,30

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao Tahun 2025



C. Kepadatan Penduduk

Adapun distribusi penduduk per kecamatan di Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16

Distribusi Penduduk Per Kecamatan

NO	KECAMATAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rote Timur	14.343	14.533	14.785	14.924	15.133
2	Pantai Baru	14.476	14.667	14.920	15.059	15.268
3	Rote Tengah	8.984	9.060	9.173	9.216	9.300
4	Rote Selatan	6.015	6.089	6.188	6.241	6.322
5	Lobalain	30.669	31.210	31.891	32.328	32.925
6	Rote Barat Laut	18.578	15.808	16.117	16.304	16.569
7	Rote Barat Daya	24.309	24.738	25.276	25.625	26.097
8	Rote Barat	9.113	9.270	9.467	9.593	9.765
9	Landu Leko	5.247	5.317	5.409	5.459	5.536
10	Loaholu	8.338	11.525	11.750	11.886	12.079
11	Ndao Nuse	3.692	3.755	3.835	3.886	3.956
Jumlah total		143.764	145.972	148.811	150.521	152.950

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Seperti terlihat pada tabel di atas, pada tahun 2020-2024 masih tampak bahwa penyebaran penduduk tahun 2024 masih bertumpu di Kecamatan Lobalain, yakni sebanyak 32.925 jiwa, kemudian diikuti oleh kecamatan Rote Barat Daya sebanyak 26.097 jiwa, Kecamatan Rote Barat Laut sebanyak 16.569 jiwa, Kecamatan Pantai Baru sebanyak 15.268 jiwa dan Kecamatan Rote Timur sebanyak 15.133 jiwa. Jumlah distribusi penduduk di Kabupaten Rote Ndao menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.17

Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	2020	2021	2022	2023	2024
0 – 4	16.910	17.093	17.093	16.761	16.689
5 – 9	15.921	16.188	16.188	16.649	16.755
10 – 14	13.343	13.586	13.586	14.827	15.382
15 – 19	12.323	12.351	12.351	12.661	12.842
20 – 24	10.999	10.975	10.975	11.572	11.854
25 – 29	11.498	11.794	11.794	11.171	11.084
30 – 34	11.485	11.826	11.826	11.765	11.794
35 – 39	10.307	10.590	10.590	11.159	11.411
40 – 44	8.847	9.107	9.107	9.735	10.009
45 – 49	6.674	6.929	6.929	7.846	8.284
50 – 54	5.661	5.911	5.911	5.996	6.198
55 – 59	5.161	5.418	5.418	5.274	5.317
60 – 64	4.227	4.475	4.475	4.527	4.663
65 – 69	3.929	4.179	4.179	3.747	3.708
70 – 74	3.006	3.243	3.243	3.158	3.194
75 +	3.473	3.720	5.146	3.673	3.766
Jumlah total	143.764	147.385	148.811	150.521	152.950

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025



Berdasarkan data komposisi penduduk tahun 2020-2024 distribusi penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif umur 15-64 tahun, kemudian diikuti oleh penduduk usia non produktif 0-14 tahun. Data di atas menunjukkan dari tahun 2020-2024 kelompok umur 5-9 tahun berada pada posisi terbanyak dengan rata-rata sebanyak 16.755 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin untuk Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18

Struktur Kepadatan Penduduk Menurut Kelompok Umur

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK
1	0-4	8.429	8.260	16.689
2	5-9	8.646	8.109	16.755
3	10-14	7.749	7.633	15.382
4	15-19	6.658	6.184	12.842
5	20-24	6.037	5.817	11.854
6	25-29	5.459	5.625	11.084
7	30-34	5.746	6.048	11.794
8	35-39	5.581	5.830	11.411
9	40-44	4.941	5.068	10.009
10	45-49	4.237	4.047	8.284
11	50-54	3.151	3.047	6.198
12	55-59	2.756	2.561	5.317
13	60-64	2.333	2.330	4.663
14	65-69	1.889	1.819	3.708
15	70-74	1.557	1.637	3.194
16	75+	1.799	1.967	3.766
Jumlah		76.968	75.982	152.950

Sumber: Diolah dari BPS Kab Rote Ndao, Tahun 2025

D. Proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun ke depan

1) Proyeksi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk di masa depan. Ini dapat membantu dalam perencanaan pemerintah untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan. Proyeksi penduduk sangat penting untuk membantu pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan serta program pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.19

**Jumlah dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029**

TAHUN	LUAS (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (Per Km ²)
2025	1.280,10	155.380	121
2026	1.280,10	157.800	123
2027	1.280,10	160.200	125



TAHUN	LUAS (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (Per Km ²)
2028	1.280,10	162.600	127
2029	1.280,10	164.980	129

Sumber: BPS Prov. NTT, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020–2035, Tahun 2020

2) Proyeksi Penduduk Usia Produktif

Proyeksi penduduk usia produktif (15-64 tahun) menjadi penting dalam memastikan bahwa potensi tenaga kerja dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2.20

Proyeksi Penduduk Usia Produktif Tahun 2025-2029

URAIAN	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
Penduduk Usia 15 - 64 Tahun (Jiwa)	95.300	97.240	99.250	101.390	103.550

Sumber: BPS Prov. NTT, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020–2035, Tahun 2020

3) Proyeksi Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan menggambarkan rasio jumlah penduduk tidak produktif, yaitu anak-anak dan lansia, terhadap jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Indikator ini penting untuk menilai tingkat beban sosial dan ekonomi yang harus ditanggung oleh kelompok penduduk usia produktif.

Tabel 2.21

Proyeksi Angka Ketergantungan Kabupaten Rote Ndao Menurut Kelompok Umur Tahun 2025-2029

TAHUN	KELOMPOK UMUR (JIWA)			RASIO KETERGANTUNGAN
	0-14	15-64	65+	
2025	49.290	95.300	10.790	63,04
2026	49.600	97.240	10.960	62,28
2027	49.790	99.250	11.160	61,41
2028	49.850	101.390	11.360	60,37
2029	49.870	103.550	11.580	59,34

Sumber: BPS Prov. NTT, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020–2035, Tahun 2020

4) Proyeksi Bonus Demografi

Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia belum produktif (0 – 14 tahun) dan kelompok



usia tidak produktif (usia > 65 tahun) lebih dari 60% dari total jumlah penduduk. Berdasarkan perhitungan proyeksi perkembangan penduduk berdasarkan kelompok usia produktif Kabupaten Rote Ndao telah mengalami bonus demografi, karena proporsi penduduk usia produktif lebih dari 60% dari jumlah penduduk atau dengan kata lain dikemukakan setiap 100 orang kelompok usia produktif menanggung beban 40 orang penduduk tidak produktif. Perincian tentang besarnya angka ketergantungan penduduk Kabupaten Rote Ndao tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 2.22

**Proyeksi Bonus Demografi Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2025-2029**

PARAMETER	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (jiwa)	155.380	157.800	160.200	62.600	164.980
Penduduk Usia Belum Produktif (0 -14 tahun)	49.290	49.600	49.790	49.850	49.870
Penduduk Usia Produktif (15 – 64 tahun)	95.300	97.240	99.250	101.390	103.550
Penduduk Usia Tidak Produktif (> 65 tahun)	10.790	10.960	11.160	11.360	11.580
Angka Ketergantungan (%)	63,04	62,28	61,41	60,37	59,34

Sumber: BPS Prov. NTT, *Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020–2035, Tahun 2020*

Bonus demografi hanya terjadi pada periode tahun 2025 – 2029, kedepan jumlah penduduk tidak produktif semakin meningkat, terutama kelompok lanjut usia, maka memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Rote Ndao dengan baik. Hal ini berdasarkan tantangan sebagai berikut:

- Masalah pengangguran: bonus demografi meningkatkan jumlah penduduk kelompok usia muda, Jika kelompok usia muda berpendidikan rendah, kurang keterampilan dan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran kelompok usia muda yang dapat menimbulkan penyakit sosial dan kriminalitas, Salah satu katup pengaman masalah pengangguran adalah dengan fasilitasi dan peningkatan usaha sektor informal, perdagangan skala kecil, pedagang kaki lima dan buruh tidak terampil,
- Meningkatnya tekanan pada infrastruktur dan pelayanan publik: pertumbuhan jumlah penduduk usia muda akan menjadikan



- meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, kesehatan, transportasi dan perumahan dan pemukiman serta sarana rekreasi/ olahraga,
- c. Tingginya permintaan pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, Jika kurang mencukupi maka akan menyebabkan kapasitas tenaga kerja usia muda kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

5) Proyeksi Penduduk Usia Lanjut

Pertumbuhan penduduk lanjut usia (lansia) di Kabupaten Rote Ndao akan meningkat setiap tahun, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23

Penduduk Usia Lanjut Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029

KELOMPOK UMUR	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
> 65 Tahun (Jiwa)	10.790	10.960	11.160	11.360	11.580

Sumber: BPS Prov. NTT, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur 2020-2035, Tahun 2020

Dampak dari pertambahan penduduk lansia ini perlu segera diantisipasi dan mendapat perhatian serta penanganan agar kebutuhan populasi yang menua dapat terpenuhi dengan baik. Berikut adalah beberapa manfaat dari proyeksi penduduk usia lanjut:

- Perencanaan Layanan Kesehatan: untuk merencanakan dan mengelola layanan kesehatan khusus untuk lansia, termasuk rumah sakit, klinik, dan fasilitas perawatan jangka panjang.
- Pengembangan Kebijakan Sosial: untuk merumuskan kebijakan sosial yang mendukung lansia, seperti program pensiun, bantuan sosial, dan kegiatan kesejahteraan sosial lainnya.
- Perencanaan Infrastruktur: untuk merencanakan infrastruktur yang ramah lansia, seperti jalan yang lebih aman, transportasi umum yang mudah diakses, dan fasilitas umum lainnya.

Pengembangan Program Kesejahteraan: untuk mengembangkan program-program kesejahteraan yang mendukung kehidupan sehat dan aktif bagi lansia.



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

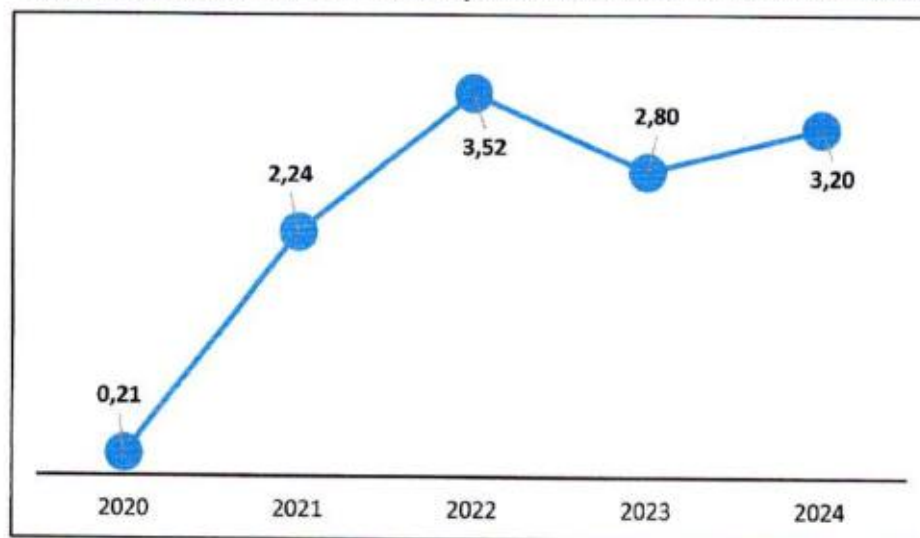
2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 sebesar 0,21 % meningkat hingga tahun 2022 menjadi 3,52 %. Tahun 2023 kembali turun menjadi 2,80 %, namun kembali meningkat di Tahun 2024 menjadi 3,20 %.

Grafik 2.6

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Nilai laju pertumbuhan ekonomi dibentuk oleh beberapa aspek pengukuran. Secara detail disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.24

Laju Pertumbuhan Ekonomi

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Laju pertumbuhan ekonomi	%	0,21	2,24	3,52	2,80	3,20
Aspek Pengukuran:						
A - Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,01	4,01	4,84	2,42	1,98
B - Pertambangan dan Penggalian	%	2,22	2,07	1,85	3,48	4,82
C - Industri Pengolahan	%	-4,11	-5,68	4,45	9,13	7,23
D - Pengadaan Listrik dan Gas	%	25,54	6,74	1,19	11,78	10,84
E - Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	%	5,7	11,9	0,45	2,16	4,42



INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
F - Konstruksi	%	-10,28	4,3	0,01	7,87	0,38
G - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	-6,13	3,59	7,29	5,19	5,02
H - Transportasi dan Pergudangan	%	-2,44	2,98	9,62	2,72	8,03
I - Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	-9,23	4,23	5,40	3,82	7,67
J - Informasi dan Komunikasi	%	13,6	0,96	3,46	2,40	3,23
K - Jasa Keuangan dan Asuransi	%	9,93	2,7	0,79	1,35	4,41
L - Real Estate	%	-0,42	5,38	3,76	2,45	1,97
M,N - Jasa Perusahaan	%	-40,31	-14,44	2,96	2,93	5,34
O - Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	%	-1,29	-3,23	0,13	0,01	5,97
P - Jasa Pendidikan	%	1,58	-1,72	- 0,57	2,75	2,99
Q - Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	%	5,88	8,91	1,88	4,67	3,59
R,S,T,U - Jasa lainnya	%	-9,72	0,04	0,40	4,24	2,57

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Menurut BPS Rote Ndao, selama lima tahun terakhir (2020-2024), struktur perekonomian Kabupaten Rote Ndao didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Jasa Administrasi Pendidikan; Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024.

Tabel 2.25

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Perumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	%	1,01	4,01	4,84	2,42	1,98

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan adalah nilai tambah bruto atas barang atau jasa yang diproduksi bidang usaha pertanian, Kehutanan dan perikanan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada waktu itu yaitu terhitung dari tahun 2010. Laju Pertumbuhan sektor pertanian



mengalami fluktuasi, hal ini terjadi karena total pendapatan dari PDRB sektor ini meningkat namun tidak signifikan,

Tabel 2.26

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	%	9,23	4,23	5,40	3,82	7,67

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata mengacu pada laju pertumbuhan PDRB ADHK sektor akomodasi makan minum. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata mengalami fluktuasi selama periode 2020–2024. Setelah sempat menurun akibat pandemi, sektor ini menunjukkan tren pemulihan dan penguatan menuju 2024. Peningkatan tersebut menjadi indikasi bahwa sektor pariwisata kembali menjadi motor penggerak ekonomi daerah, dengan potensi besar untuk terus tumbuh di tahun-tahun mendatang.

B. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan, yang merupakan nilai pengeluaran minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan dan non-makanan. Metode pengukuran kemiskinan meliputi pengukuran berdasarkan garis kemiskinan (pendapatan atau konsumsi), dan pengukuran berdasarkan karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin.

Tabel 2.27

Tingkat Kemiskinan

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan	%	27,54	28,08	27,45	27,05	25,78
Aspek Pengukuran:						
Indeks Head Count (P0)						
GKM (Garis Kemiskinan Makanan)						
Ketersediaan Pangan Utama	%	37,28	34,81	35,48	37,83	38,02
Pola Pangan Harapan	Poin	56,40	61,30	53,10	56,40	55,50
GKNM (Garis Kemiskinan Non Makanan)						
Perumahan						
Rumah Layak Huni	Unit	4.313	5.636	6.265	6.310	6.360
Pendidikan:						
Angka Putus Sekolah	Orang	27	15	20	18	15
Angka Partisipasi Murni SD	%	95,42	95,04	99,13	98,99	114,57
Angka Partisipasi Murni SMP	%	73,06	73,47	74,08	74,09	92,72
Literasi Membaca SD/Sederajat	%	N/A	N/A	N/A	44,89	50,88
Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	N/A	N/A	N/A	36,88	60,05
Numerasi SD/Sederajat	%	N/A	N/A	N/A	34,68	48,06
Numerasi SMP/Sederajat	%	N/A	N/A	N/A	27,11	56,42



INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Kesehatan						
Angka Kematian Ibu (AKI)	Orang	5	10	6	3	4
Angka Kematian Bayi (AKB)	Orang	57	53	28	40	52
Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%				75	50
Indeks Keparahan Kemiskinan	%	1,35	1,67	1,47	1,24	1,41
Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	5,36	5,82	5,31	4,97	5,23

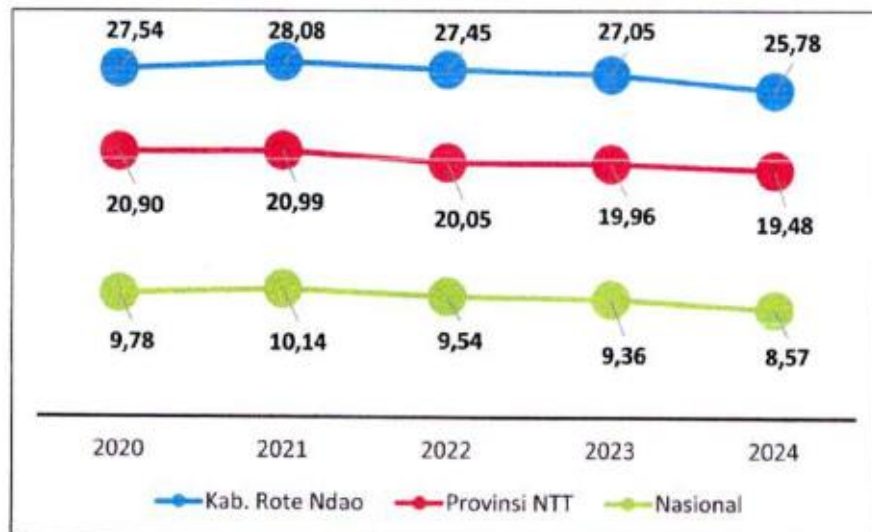
Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

1) Persentase Penduduk Miskin

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao pada Tahun 2024 sebesar 27,58% lebih tinggi 8,1% dari persentase penduduk miskin Provinsi NTT sebesar 19,48% dan tertinggal 19,01% dari persentase penduduk miskin nasional yang hanya sebesar 8,57%. Secara umum penyebab kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao dilihat dari ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari garis kemiskinan. Secara rinci angka kemiskinan tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.7

Tingkat Kemiskinan Kab. Rote Ndao, Prov. NTT dan Nasional
Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT & BPS Nasional, Tahun 2025

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Di Kabupaten Rote Ndao, perkembangan penduduk miskin sejak tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif, selama kurun waktu 5 tahun.



Persentase penduduk miskin di Kabupaten Rote Ndao yang paling tinggi adalah pada tahun 2021 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 51.710 jiwa dengan Garis Kemiskinan (GK) 341.135/bulan/kapita, dan tahun 2024 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 52.890 jiwa dengan Garis Kemiskinan (GK) 426.843/bulan/kapita. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.28

**Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2020 – 2024 Kabupaten Rote Ndao**

TAHUN	GARIS KEMISKINAN (Rp/KAPITA/BULAN)	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)
2020	322.619	48.770	27,54
2021	341.135	51.710	28,08
2022	372.179	52.430	27,45
2023	410.491	53.550	27,05
2024	426.843	52.890	25,78

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kab/Kota, Tahun 2025 (BPS) & LP2KD, Tahun 2025

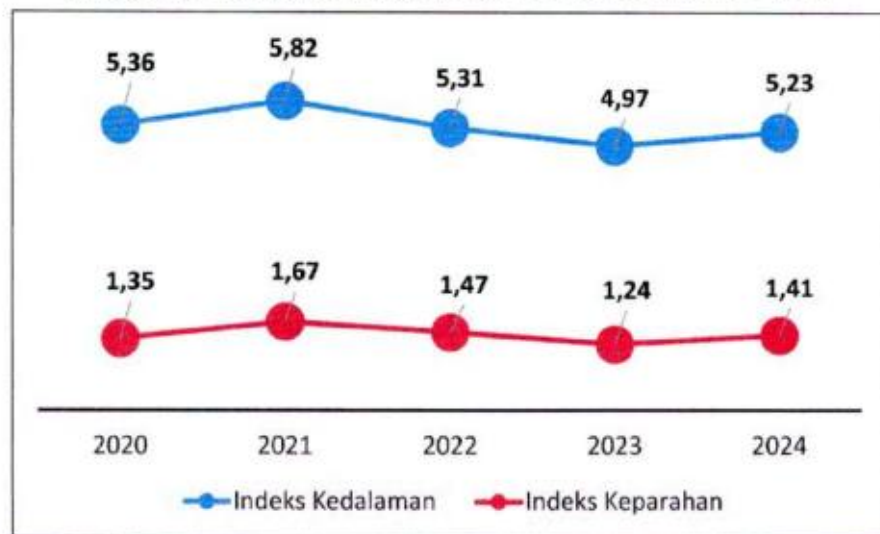
2) Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Kemiskinan tidak hanya menyangkut jumlah penduduk miskin dan Persentase penduduk miskin. Analisis lebih lanjut bagaimana kondisi kemiskinan yang terjadi dapat dilakukan dengan menggunakan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap Garis Kemiskinan (GK). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK. Sedangkan Indeks keparahan kemiskinan (poverty severity index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Sepanjang kurun waktu 2020 – 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Rote Ndao mengalami fluktuasi sejak tahun 2020 sebesar 5,36 persen, menurun menjadi 5,23 persen ditahun 2024, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2020 sebesar 1,35 persen, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 1,41 persen. Secara rinci dijabarkan pada grafik di bawah:



Grafik 2.8

**Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks
Keparahan Kemiskinan Kab. Rote Ndao Tahun 2020 – 2024**



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, BPS Prov. NTT & BPS Nasional, Tahun 2025

C. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Laporan BPS menunjukkan bahwa Perekonomian Kabupaten Rote Ndao berdasarkan besaran PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai 3,91 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 181 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 3,73 triliun rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan dari 2,10 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 2,16 triliun rupiah pada tahun 2024 atau mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,16 persen.



Selama lima tahun terakhir (2020-2024), struktur perekonomian Kabupaten Rote Ndao didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha antara lain Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Jasa Administrasi Pendidikan; Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Rote Ndao.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah adalah nilai PDRB per kapita. Nilai tersebut merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan memengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Rote Ndao atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, PDRB per kapita tercatat sebesar 22,16 juta rupiah yang secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 25,60 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun, kondisi ini juga mengindikasikan adanya perbaikan kesejahteraan dan Tingkat pendapatan. Berikut tabel Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.29
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024

PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB (Miliar Rupiah)					
ADHB	3.169	3.279	3.503	3.735	3.916
ADHK 2010	1.932	1.975	2.045	2.102	2.169
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)					
ADHB	22.161	22.306	23.669	24.900	25.603
ADHK 2010	13.510	13.435	13.818	14.013	14.176
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2020	0,2	-0,56	2,85	1,41	1,16
Jumlah Penduduk	143.764	147.385	148.811	150.521	152.950
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	1,83	1,77	1,93	1,68	1,67

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025



D. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka adalah pengangguran sementara yang terjadi secara alami ketika seseorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih cocok. Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan perbandingan antara penganggur terhadap angkatan kerja. Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat pengangguran di bidang angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Rote Ndao dijabarkan dalam tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.30

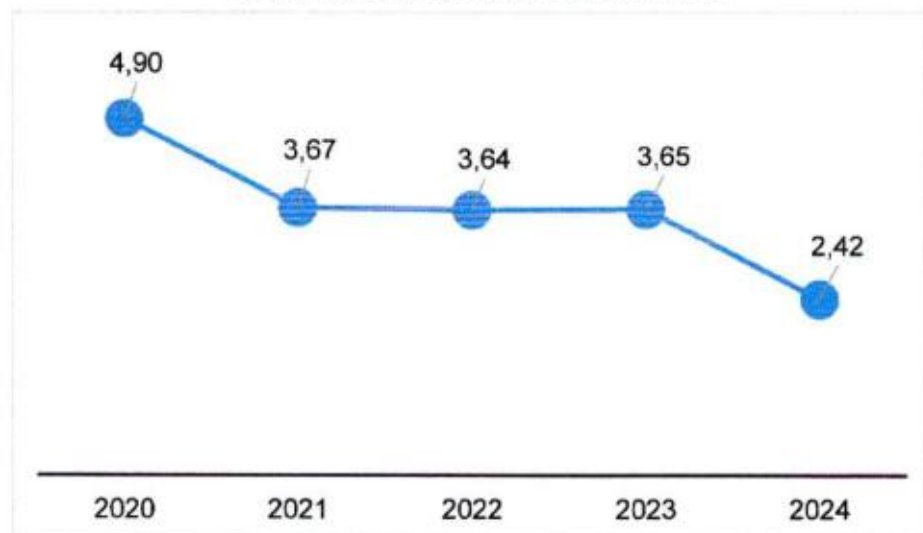
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,90	3,67	3,64	3,65	2,42
Aspek Pengukuran:					
Jumlah pengangguran	4.627	3.645	3.708	2.586	1.804
Jumlah angkatan kerja	94.376	99.232	101.998	70.813	74.578
Jumlah Bekerja	89.749	95.587	98.290	68.227	72.774

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Grafik 2.9

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 4,90 persen di tahun 2020 menjadi 3,64 persen di tahun 2022. Pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2,42 persen. Hal ini menunjukkan jumlah lapangan kerja di Kabupaten Rote Ndao terbatas sedangkan jumlah pencari kerja semakin bertambah.



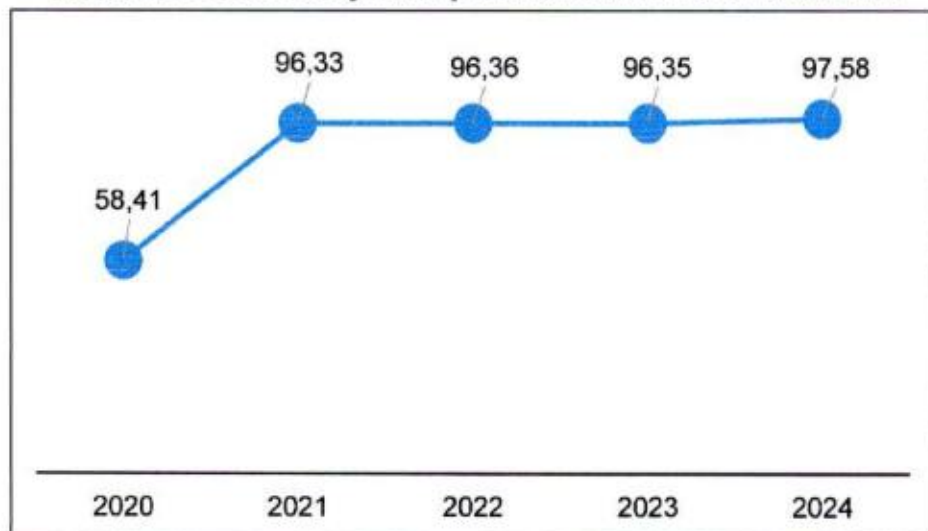
E. Rasio Penduduk Bekerja

Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Rote Ndao merupakan angkatan kerja yang terdiri atas jumlah total yang bekerja dan pengangguran berbanding terhadap angkatan kerja, rasio penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan peningkatan tahun 2020 sebesar 58,41 persen meningkat menjadi 97,58 persen pada tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh semakin meningkatnya jumlah yang bekerja dan pengangguran.

Rasio penduduk yang bekerja dengan nilai terendah pada tahun 2020 sebesar 58,41%. Hal ini diakibatkan oleh dampak Covid -19 yang membuat banyak pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sulit melamar pekerjaan di tempat yang baru dan membuat banyak penduduk tidak memiliki pekerjaan. Namun pada tahun 2021 mulai terjadi kondisi pemulihan pada sektor ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang ditunjukan dengan terus mengalami peningkatan pada tahun 2024. Berikut rasio penduduk bekerja Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024:

Grafik 2.10

Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

F. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks Gini merupakan hasil perhitungan kurva Lorenz yang berfungsi untuk menggambarkan distribusi pendapatan penduduk dari seluruh kelompok pengeluaran (pengeluaran pangan dan non pangan). Rentang angka dalam Indeks Gini adalah 0-1. Semakin Indeks Gini mendekati angka 0, maka dapat diartikan



bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila Indeks Gini semakin mendekati angka 1 maka dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar. Berikut adalah pembagian klasifikasi ketimpangan secara lebih detail:

- a) Indeks Gini $< 0,3$ = ketimpangan rendah
- b) $0,3 \leq$ Indeks Gini $\leq 0,5$ = ketimpangan sedang (moderat)
- c) Indeks Gini $> 0,5$ = ketimpangan tinggi

Indeks Gini Kabupaten Rote Ndao meningkat pada tahun 2020 sebesar 0,400. Pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami penurunan menjadi 0,325. Pada tahun 2024 menjadi 0,316. Indeks Gini Kabupaten Rote Ndao dikategorikan dalam ketimpangan sedang (moderat). Hal ini dipengaruhi oleh perbaikan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin pada desil 1 (satu) atau masyarakat miskin ekstrim.

Tabel 2.31

Indeks Gini Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 – 2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Gini	0,400	0,39	0,34	0,325	0,316

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

G. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index (HDI)* merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak.

Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.



Di Indonesia IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). IPM dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Untuk mengukur IPM, digunakan indikator seperti angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan GNI per kapita. Tabel di bawah ini menyajikan data terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rote Ndao.

Tabel 2.32

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

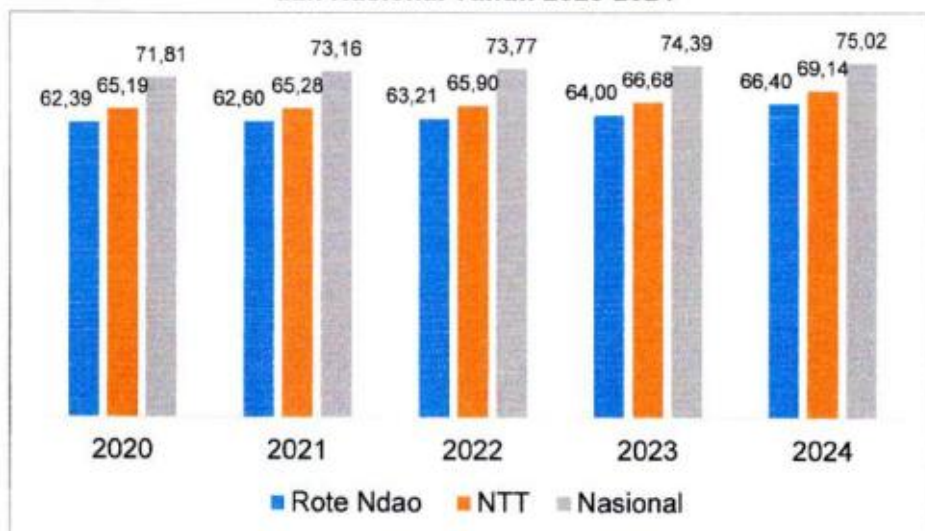
INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	62,39	62,60	63,21	64,00	66,40
Aspek Pengukuran:					
1. Unsur Pendidikan					
- harapan lama sekolah (Tahun)	13,18	13,19	13,21	13,22	13,23
- rata-rata lama sekolah (Tahun)	7,59	7,71	7,76	7,82	7,83
2. Unsur Kesehatan					
- usia harapan hidup (Tahun)	64,60	64,88	65,26	65,60	65,85
3. Tingkat Pendapatan					
- Pengeluaran riil per kapita (Ribu Rupiah)	6.539	6.509	6.719	7.061	7.340

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Di Kabupaten Rote Ndao IPM meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2024 sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.11

Perbandingan IPM Kabupaten Rote Ndao Terhadap Provinsi NTT dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat Indeks



Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Selama Tahun 2020-2024 angka IPM Kabupaten Rote Ndao terus mengalami peningkatan dari 62,39 pada tahun 2020 menjadi 66,40 pada tahun 2024. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas hidup penduduk Kabupaten Rote Ndao agar menjadi lebih baik lagi di tahun mendatang.

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan. Usia Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat dan diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Idealnya Angka Harapan Hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat Tabel Kematian. Tetapi karena sistem registrasi penduduk di Indonesia belum berjalan dengan baik maka untuk menghitung Angka Harapan Hidup digunakan cara tidak langsung dengan program. Usia Harapan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33

Usia Harapan Hidup

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
UHH Rote Ndao	64,60	64,88	65,26	65,60	65,85
UHH NTT	67,01	67,15	67,47	67,77	71,83

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao dan BPS Prov. NTT, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa usia harapan hidup penduduk Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020, yaitu 64,60 tahun dan meningkat hingga tahun 2024 mencapai 65,85 tahun. Hal ini menunjukkan seseorang yang lahir pada tahun 2024 memiliki usia harapan hidup selama 65,85 tahun.

B. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Salah satu indikator dalam menilai status kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). AKI dan AKB bukanlah sebatas indikator kesehatan ibu dan anak, melainkan



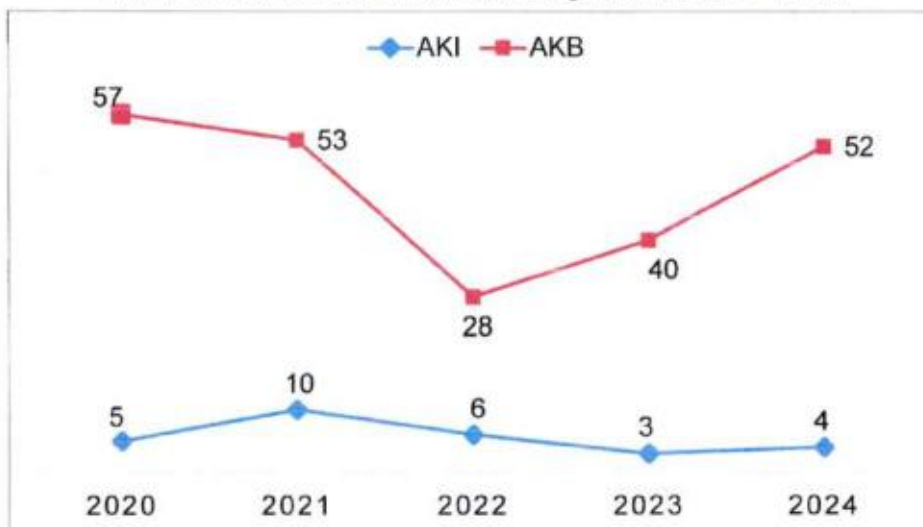
menggambarkan tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, efisien dan efektivitas dalam pengelolaan program kesehatan. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan berbagai cara dilakukan upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui fungsi Puskesmas pembantu, menempatkan tenaga bidan di Pustu, memperpanjang waktu pelayanan di Puskesmas Rawat Inap serta meningkatkan kualitas pelayanan. Khususnya untuk mengefektifkan pelayanan terhadap ibu hamil dan pada masa nifas. Dan juga kebijakan prioritas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil resiko tinggi. Faktor penyebab kematian bayi yaitu tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Semakin tinggi AKB di suatu wilayah dapat diartikan bahwa status kesehatan di wilayah tersebut masih relatif rendah. Kematian bayi pada umumnya disebabkan karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Asfiksia, Sepsis, Pneumonia, Diare, Observasi Febris, Syok Haemoragik dan Demam. Angka kematian ibu (AKI) yang terus meningkat terjadi di Kabupaten Rote Ndao disebabkan karena faktor pandemi COVID-19, status gizi, kesehatan perorangan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan bagi mereka serta masih rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Selain itu, akar penyebab kematian ibu adalah karena 3 Terlambat, yaitu terlambat mengambil keputusan, terlambat ke fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Kematian dan kesehatan pada bayi sangat terkait dengan imunisasi, status gizi, penyakit menular, kemiskinan dan juga fasilitas kesehatan yang tersedia. Disparitas cakupan pelayanan karena kendala geografis, sosial ekonomi dan klasifikasi tempat tinggal masih menjadi kendala secara nasional. Cakupan pelayanan selama persalinan dan pasca persalinan haruslah dapat menjangkau masyarakat miskin dan sulit mendapatkan akses pelayanan kesehatan sehingga diharapkan dapat mengurangi kematian bayi atau meningkatkan kelangsungan hidup bayi.



Grafik 2.12

Tren Kematian Ibu dan Kematian Bayi Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Pada grafik di atas menunjukkan bahwa angka kematian bayi tahun 2020 sebanyak 57 kasus lebih tinggi dari tahun 2021 yakni sebanyak 53 kasus. Pada tahun 2022 kasus kematian bayi menurun menjadi 28 kasus, meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 40 dan tahun 2024 menjadi 52 kasus yang disebabkan karena Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, pneumonia, diare, demam dan kelainan bawaan lainnya. Kasus kematian ibu Tahun 2021 sebanyak 10 kasus, pada tahun 2022 menurun menjadi 6 kasus dan menurun kembali menjadi 3 kasus di tahun 2023. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 4 kasus.

C. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak Balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi gagal tumbuh pada anak Balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, pola asuh, dan lingkungan (ketersediaan sanitasi dan akses air bersih). Di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 stunting sebesar 25,80 persen mengalami penurunan menjadi 18,41 persen pada tahun 2024. Ini menandakan ada usaha dan kerja keras pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi balita stunting. Percepatan penanganan dan penurunan angka stunting ini harus segera dilakukan agar tidak terjadi putusya generasi penerus pembangunan yang cerdas dan kreatif. Seluruh pemangku kepentingan secara bersama-sama perlu melakukan upaya secara terpadu dan bersinergi sehingga diharapkan angka tersebut menurun sesuai target.



Prevalensi stunting Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.13
Tren Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Tabel 2.34
Prevalensi Stunting

INDIKATOR		2020	2021	2022	2023	2024
Prevalensi Stunting	EPPGM	25,8	23,4	22,3	20,5	18,41
	SSG/SKI	N/A	40,1	38,4	39,8	32,4
Sumber Data		EPPGM	SSGI	SSGI	SKI	SSGI
Aspek Pengukuran:						
Total Balita Stunting		3.328	3.103	3.011	2.764	2.359
Total Balita diukur		11.167	13.215	13.523	13.508	12.816

Sumber: Data EPPGM 2020, SKI 2023 dan SSG 2021, 2024, 2024

Sejak ditetapkan sebagai Kabupaten Lokus Stunting pada tahun 2018, berbagai pendekatan penanganan stunting terus dilakukan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting. Pendekatan pencegahan Stunting dilakukan melalui Gerakan RevOlusi TERpadu (ROTE) CERDAS yaitu:

- C : Cek kehamilan secara rutin dan bersalin di fasilitas kesehatan (revolusi KIA)
- E : Enyahkan asap rokok dan ingat tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri
- R : Rutin ke Posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balita



D : Dekatkan ibu dan anak pada pangan lokal serta nutrisi yang cukup (gemar makan ikan/revolusi laut)

A : Ayo imunisasi balita secara lengkap dan selalu gunakan jamban sehat

S : Selalu beri ASI eksklusif

Pendekatan CERDAS dalam penanganan stunting merupakan salah satu pendekatan penanganan stunting di Kabupaten Rote Ndao yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rote Ndao No. 68 Tahun 2024 tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting, Eliminasi Kematian Ibu dan Bayi Dengan Penguatan Integrasi Layanan Kesehatan Primer di Kabupaten Rote Ndao. Pendekatan ini merupakan payung terhadap berbagai inovasi dalam mencegah dan menangani stunting di Kabupaten Rote Ndao. Salah satu inovasi lainnya yang mulai gencar dilakukan sejak tahun 2021 untuk penanganan baduta stunting, yaitu Gerakan Kakak Angkat Adik Asuh (Gerakan Ka'a Fa'di). Gerakan ini mendorong seluruh ASN menjadi kakak angkat bagi seluruh baduta stunting di Kabupaten Rote Ndao. Prevalensi stunting Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 sebesar 25,80 persen menurun menjadi 18,41 persen pada tahun 2024. Tren penurunan prevalensi stunting tidak terlepas dari 3 intervensi/inovasi utama dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Rote Ndao, yaitu:

1. Gerakan Kakak Angkat Adik Asuh
2. Inovasi Mama Bo'i
3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal

D. Cakupan pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Covarage*)

Tuberkulosis (TB) adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Tuberculosis*. Insidensi TB mengacu pada jumlah kasus baru penyakit TB yang terjadi dalam suatu populasi tertentu dalam jangka waktu tertentu. Insidensi biasanya diukur dalam bentuk jumlah kasus baru yang terjadi per seribu atau per seratus ribu populasi dalam satu tahun. *Treatment Coeverage* Kasus Tuberkulosis (TBC) dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.35

Treatment Covarage Kasus Tuberkulosis (TBC)

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	<i>Treatment Coeverage</i> Kasus Tuberkulosis (TBC)	111	66	234	262	159

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Rote Ndao, Tahun 2025



2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang merata

Indeks pendidikan adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian pendidikan suatu daerah. Indeks pendidikan terbentuk dari beberapa faktor pendukung, antara lain kelengkapan sarana pendidikan yang tersedia untuk setiap jenjang mulai dari sekolah dasar. Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pendidikan suatu daerah.

Indeks pendidikan di Kabupaten Rote Ndao adalah seperti yang terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.36

Indeks Pendidikan

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pendidikan	0,619	0,623	0,626	0,628	0,629

Sumber: BPS Prov. NTT, Tahun 2025

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah mencerminkan efek dari perbaikan dalam sistem pendidikan atau faktor-faktor lain serta menunjukkan kelanjutan dari upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta menunjukkan komitmen terus-menerus dari Pemerintah Rote Ndao untuk meningkatkan pendidikan. Tren ini menggambarkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan pendidikan formal dan peningkatan lama waktu yang dihabiskan individu dalam sistem pendidikan selama periode waktu yang diamati. Hal ini dapat memiliki dampak positif pada perkembangan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut serta dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan, rata-rata lama sekolah di tingkat provinsi (NTT) juga terus mengalami peningkatan, pada tingkat nasional juga mengalami peningkatan. Secara keseluruhan rata-rata lama sekolah Kabupaten Rote Ndao masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Berikut tabel rata-rata lama sekolah Rote Ndao, NTT dan Nasional:

Tabel 2.37

Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten, Provinsi dan Nasional

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Rote Ndao	7,59	7,71	7,76	7,82	7,83
Provinsi	7,63	7,69	7,70	7,82	8,02
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025



B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusta Statistik (BPS).

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Untuk menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan dapat dilihat dari indikator angka kelulusan dan rata-rata nilai hasil ujian.

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Rote Ndao relatif stabil dan terus meningkat sedikit demi sedikit setiap tahunnya, dari 13,18 tahun pada 2020 menjadi 13,23 tahun pada 2024. Angka ini sejalan dengan rata-rata provinsi Nusa Tenggara Timur, yang juga mencapai 13,23 tahun pada 2024. Konsistensi ini menunjukkan bahwa akses dan peluang pendidikan di Rote Ndao cukup baik dan mengalami peningkatan bertahap.

Dibandingkan dengan angka nasional, HLS di Kabupaten Rote Ndao dan NTT secara keseluruhan selalu berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2020, HLS nasional tercatat 12,98 tahun dan meningkat menjadi 13,21 tahun pada 2024. Kesenjangan positif ini menunjukkan bahwa di Rote Ndao dan NTT, anak-anak memiliki peluang yang lebih baik untuk menempuh pendidikan lebih lama dibandingkan rata-rata nasional. Peningkatan ini menjadi indikasi positif dari upaya pemerintah daerah dan provinsi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, yang tentunya mendukung pengembangan sumber daya manusia yang lebih baik.

Tabel 2.38

Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024

URAIAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Rote Ndao	13,18	13,19	13,21	13,22	13,23
Prov. Nusa Tenggara Timur	13,18	13,20	13,21	13,22	13,23
Nasional	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025; BPS Prov. NTT, Tahun 2025

Statistik Indonesia, Tahun 2025



C. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk dalam kelompok usia tersebut. Pendidikan tinggi di sini biasanya meliputi: Diploma (D1, D2, D3), Sarjana (S1), Magister (S2) dan Doktor (S3).

Di Kabupaten Rote Ndao data tingkat pendidikan yang tersedia adalah data ASN, yang terdiri dari D1 sebanyak 5 orang, D2 sebanyak 41 orang, D3 sebanyak 503 orang, D4 sebanyak 71 orang, S1 sebanyak 1.872 orang, S2 sebanyak 67 orang dan S3 sebanyak 1 orang dengan total 2.560 orang.

D. Angka Literasi/Numerasi

Skor Literasi dan Numerasi mengacu pada hasil penilaian atau pengukuran kemampuan individu dalam membaca, memahami, menafsirkan, serta menggunakan informasi secara efektif (literasi) dan kemampuan individu dalam memahami, menggunakan, dan bekerja dengan angka (numerasi). Skor Literasi dan Numerasi biasanya digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi dan numerasi suatu populasi, baik secara nasional maupun regional.

Skor Literasi dan Numerasi penting karena kemampuan literasi dan numerasi memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kesempatan pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat. Hasil penilaian ini juga dapat memberikan pandangan yang lebih baik tentang kebutuhan pendidikan dan pelatihan dalam memperbaiki kemampuan literasi dan numerasi di masyarakat.

E. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu :

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan



4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari
5. Jumlah perpustakaan ber-SNP
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi
7. Anggota perpustakaan

Berdasarkan Laporan Akhir Kajian IPLM 2024 oleh Perpustakaan Nasional, dilaporkan bahwa IPLM Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah 65,02. Nilai indeks ini naik dari nilai IPLM Tahun 2023 sebesar 56,19. Berdasarkan Nilai IPLM Tahun 2024, Kabupaten Rote Ndao masuk dalam kategori sedang, dan nilai indeks ini lebih tinggi dibanding nilai IPLM Propinsi NTT yaitu 62,62.

F. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

IMDI dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota, sekaligus menjadi acuan utama bagi penyusunan kebijakan dan program pengembangan masyarakat digital.

IMDI Kabupaten Rote Ndao di Tahun 2024 adalah sebesar 45,16. Dari 4 Pilar pembentuk IMDI, nilai tertinggi adalah pilar ketrampilan digital (52,66), dan nilai terendah adalah Pemberdayaan (26,09). Nilai IMDI Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 ini di atas nilai IMDI Propinsi NTT yaitu 42,32 bahkan juga di atas nilai indeks nasional yang tercatat sebesar 43,34 di tahun yang sama. Ada trend kenaikan nilai indeks di Rote Ndao sejak IMDI diperkenalkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2022. Nilai IMDI Kabupaten Rote Ndao di Tahun 2022 adalah 32,32 dan naik menjadi 41,74 di Tahun 2023.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di Kabupaten Rote Ndao terus mengalami peningkatan tahun 2022 sebesar 10,07 persen dengan rincian jumlah peserta jaminan sosial sebanyak 6.062 orang dibandingkan total jumlah penduduk bekerja sebanyak 60.220 orang, tahun 2023 sebesar 18,64 persen dengan rincian jumlah peserta jaminan sosial sebanyak 10.412 orang dibandingkan total jumlah penduduk bekerja sebanyak 55.870 orang, tahun 2023 sebesar 26,63 persen dengan rincian jumlah peserta jaminan sosial sebanyak 11.749 orang dibandingkan total jumlah penduduk bekerja sebanyak 44.121 orang. Berikut tabel cakupan kepesertaan jaminan sosial tahun 2020-2024:



Tabel 2.39

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	N/A	N/A	10,07	18,64	26,36

Sumber: Dinas Transnaker Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

B. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan peningkatan dari tahun tahun 2020 sebesar 80,20 persen meningkat menjadi 98,88 persen pada tahun 2024 yang berarti sekitar 9 dari 10 penduduk di kabupaten ini telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional. Angka ini sudah tergolong tinggi dan menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Kenaikan ini menandakan bahwa hampir seluruh penduduk Rote Ndao kini telah terlindungi oleh program JKN. Pencapaian ini sangat penting karena berarti masyarakat di kabupaten tersebut memiliki jaminan akses terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN yang hampir mencapai 99% ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi dan menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan *universal health coverage* di Kabupaten Rote Ndao. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan dari risiko finansial akibat biaya Kesehatan. Berikut tabel cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional tahun 2020-2024:

Tabel 2.40

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80,20	80,12	93,21	90,93	98,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kab Rote Ndao, Tahun 2025

Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, cakupan kepesertaan JKN di Rote Ndao mencapai 90,93%, yang berarti sekitar 9 dari 10 penduduk di kabupaten ini telah terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan nasional. Angka ini sudah tergolong tinggi dan menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Kemudian pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang



cukup substansial menjadi 98,88%. Kenaikan sebesar 7,95% ini menandakan bahwa hampir seluruh penduduk Rote Ndao kini telah terlindungi oleh program JKN. Pencapaian ini sangat penting karena berarti masyarakat di kabupaten tersebut memiliki jaminan akses terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN yang hampir mencapai 99% ini merupakan prestasi yang patut diapresiasi dan menunjukkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan universal health coverage di Kabupaten Rote Ndao. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan dari risiko finansial akibat biaya Kesehatan

C. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu atau kelompok yang mengalami hambatan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Hambatan ini bisa berasal dari berbagai faktor, termasuk ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. PMKS sering kali membutuhkan intervensi dari pemerintah atau lembaga non-pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengatasi masalah yang dihadapi.

PMKS dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis masalah yang mereka hadapi. Kategori utama PMKS adalah:

- 1) Anak Terlantar; Anak terlantar adalah anak-anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang memadai dari orang tua atau wali mereka. Mereka sering kali hidup di jalanan atau di tempat-tempat penampungan sementara dan berisiko tinggi terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.
- 2) Lansia Terlantar; Lansia terlantar adalah orang lanjut usia yang tidak mendapatkan perawatan atau perhatian yang memadai dari keluarga mereka. Mereka mungkin tinggal sendiri tanpa dukungan yang memadai dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
- 3) Penyandang Disabilitas; Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik atau mental yang menghambat kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Mereka memerlukan bantuan khusus untuk mencapai kemandirian dan integrasi sosial yang lebih baik.
- 4) Korban Kekerasan; Korban kekerasan mencakup individu yang mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual. Mereka



membutuhkan perlindungan dan dukungan untuk pulih dari trauma serta bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan.

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase PMKS yang menerima bantuan tercatat sebesar 42,18%. Angka ini terus mengalami perbaikan hingga mencapai 46,15% pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan program bantuan sosial dan meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di wilayah tersebut. Namun, angka ini juga menunjukkan bahwa masih diperlukan kerja lebih lanjut untuk memastikan seluruh PMKS mendapatkan dukungan yang memadai. Berikut capaian kinerja pelayanan Bidang sosial di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 2.41

**Presentase Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri**

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang tertangani (%)	42,18	65,38	65,38	65,38	46,15
2	Persentase PMKS Mandiri (%)	N/A	N/A	N/A	2,47	3,93

Sumber: Dinas Transnaker Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

D. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pekerjaan di sektor formal yang masuk usia kerja. Pentingnya hal ini adalah untuk mengukur sejauh mana inklusi dan aksesibilitas dunia kerja terhadap penyandang disabilitas di sebuah wilayah.

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni, toleransi, dan kerukunan antara berbagai kelompok agama di suatu wilayah, negara, atau komunitas. Indeks semacam ini bertujuan untuk menilai sejauh mana hubungan antarumat beragama dalam suatu masyarakat bersifat damai, saling menghormati, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi.

Indeks Kerukunan Umat Beragama membantu pemerintah, lembaga masyarakat, dan organisasi keagamaan untuk memantau dan mengevaluasi kondisi kerukunan antarumat beragama, serta merancang program-program



yang bertujuan untuk meningkatkan kerukunan dan toleransi di antara kelompok-kelompok agama. Dengan mempromosikan kerukunan antarumat beragama, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang damai, inklusif, dan berdaya, serta mencegah konflik antaragama yang merugikan bagi kemajuan sosial dan ekonomi.

B. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Kabupaten Rote Ndao adalah salah satu pulau paling selatan dalam jajaran kepulauan Nusantara Indonesia. Pulau-pulau kecil yang mengelilingi pulau Rote antara lain Pulau Ndao, Ndana, Naso, Usu, Manuk, Doo, Helina, Landu. Sebagian besar penduduk yang mendiami pulau/kabupaten Rote Ndao menurut tradisi tertua adalah suku-suku kecil Rote Nes, Bara Nes, Keo Nes, Pilo Nes, dan Fole Nes. Suku-suku tersebut mendiami wilayah kestuan adat yang disebut Nusak. Semua Nusak yang ada di pulau Rote tersebut kemudian disatukan dalam wilayah kecamatan. Masyarakat Rote Ndao mengenal suatu legenda yang menuturkan bahwa awal mula orang Rote datang dari Utara, dari atas, lain do ata, yang konon kini Ceylon. Kedatangan mereka menggunakan perahu lete-lete.

Strata sosial terdapat pada setiap leo. Lapisan paling atas yaitu mane leo (leo mane). Yang menjadi pemimpin suatu klein didampingi leo fetor (wakil raja) yang merupakan jabatan kehormatan untuk keluarga istri mane leo. Fungsi mane leo untuk urusan yang sifatnya spiritual, sedangkan fetor untuk urusan duniawi. Filosofi kehidupan orang Rote yakni mao tua do lefe bafi yang artinya kehidupan dapat bersumber cukup dari mengiris tuak dan memelihara babi. Dan memang secara tradisional orang-orang Rote memulai perkampungan melalui pengelompokan keluarga dari pekerjaan mengiris tuak. Mata pencaharian masyarakat Suku Rote umumnya berladang, beternak, menangkap ikan, menyadap nira, dan membuat produk kerajinan. Hasil pertanian utamanya adalah padi, jagung, dan ubi kayu, sedangkan hewan ternak utama adalah kerbau, sapi, kuda, dan ayam. Produk kerajinan Suku Rote yang terkenal adalah kain tenun dan topi Adat Ti'i Langga.

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah salah satu metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kesejahteraan dalam aspek kebudayaan suatu masyarakat. Komponen IPK terdiri dari komponen ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi serta gender.



Tabel 2.42

Dimensi dan Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

NO	DIMENSI	INDIKATOR	
1	Dimensi Ekonomi Budaya	1	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan
2	Dimensi Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah (MYS) penduduk usia 25 tahun ke atas
		2	Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas
		3	Angka Kesiapan Sekolah (AKS)
		4	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau ekskul kesenian
		5	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7-18 tahun yang bersekolah
		6	Persentase penduduk usia 7-18 tahun dengan kategori kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang bersekolah
3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	1	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari agama lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
		2	Persentase rumah tangga yang setuju jika ada sekelompok orang dari suku lain yang melakukan kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.
		3	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang beda agama.
		4	Persentase rumah tangga yang setuju jika salah satu anggota rumah tangga berteman dengan orang lain yang berbeda suku.
		5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir
		6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengikuti gotong royong
		7	Persentase rumah tangga yang merasa khawatir dengan keamanan saat berjalan kaki sendirian di malam hari
		8	Persentase rumah tangga yang merasa percaya menitipkan rumah kepada tetangga
4	Dimensi Warisan Budaya	1	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran
		2	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan
		3	Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari
		4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir. (*tahun 2021 ada perluasan definisi operasional (termasuk yang tidak langsung) dari nilai maksimum 70 untuk tahun 2018-2020 menjadi nilai maksimum 100 untuk tahun 2021-2022)
		5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia dalam setahun terakhir
		6	Persentase rumah tangga yang menggunakan produk tradisional dalam 3 bulan terakhir
5	Dimensi Ekspresi Budaya	1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang memberikan saran atau pendapat dalam kegiatan rapat selama setahun terakhir
		2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang aktif mengikuti kegiatan organisasi dalam setahun terakhir
		3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni dalam 3 bulan terakhir
		4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir
6	Dimensi Budaya Literasi	1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik dalam seminggu terakhir



NO	DIMENSI	INDIKATOR	
		2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir
		3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan masyarakat dalam 3 bulan terakhir
7	Dimensi Gender	1	Rasio tingkat partisipasi angkatan kerja usia 15 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki
		2	Rasio penduduk usia 25 tahun ke atas perempuan terhadap laki-laki yang memiliki ijazah minimal SMA/Sederajat
		3	Rasio anggota parlemen perempuan terhadap anggota parlemen laki-laki

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Indeks Kualitas Keluarga adalah evaluasi untuk mengukur dan menganalisis kualitas hubungan serta fungsi dalam keluarga. Tujuannya adalah untuk memahami dinamika keluarga, tingkat kepuasan dan kesejahteraan anggota keluarga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Indeks Kualitas Keluarga membantu dalam mengevaluasi keadaan keluarga secara komprehensif dan membantu dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau perhatian khusus. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas keluarga, pemerintah dan organisasi masyarakat dapat merancang program-program yang mendukung keluarga dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang lebih baik. Indeks ini dibentuk oleh lima dimensi yaitu dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya. Berikut ini lima dimensi Indeks Kualitas Keluarga beserta indikator yaitu:

a. Kualitas Legalitas dan Struktur (KLS) (3 Indikator) terdiri dari:

1. Kepemilikan surat nikah
2. Kepemilikan akte kelahiran.
3. Tinggal dalam satu rumah.

b. Kualitas Ketahanan Fisik (KKF) (6 Indikator) terdiri dari:

1. Mampu makan lengkap.
2. Tidak menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas.
3. Tidak ada menderita masalah gizi.
4. Ruang tidur terpisah antara orangtua dan anak.
5. Tidak ada anak merokok.
6. Tidak ada sakit sehingga meninggalkan



c. Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) (8 Indikator) terdiri dari:

1. Kepemilikan rumah.
2. Mempunyai penghasilan tetap per bulan.
3. Mempunyai tabungan.
4. Memiliki asuransi kesehatan.
5. Tidak menunggak membayar iuran pendidikan anak.
6. Tidak ada anak putus sekolah.
7. Istri bekerja.
8. Mengelola keuangan keluarga bersama.

d. Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) (6 Indikator) terdiri dari:

1. Tidak ada kekerasan antar suami dan istri.
2. Tidak ada kekerasan antar orangtua dan anak.
3. Tidak ada berhadapan dengan hukum.
4. Melakukan rekreasi bersama.
5. Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak.
6. Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak.

e. Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSBB) (6 Indikator) terdiri dari:

1. Tidak ada anak dinikahkan.
2. Orangtua mengajarkan pola hidup bersih dan sehat.
3. Berpartisipasi kegiatan sosial.
4. Memberi perhatian dan merawat orangtua lanjut usia.
5. Melakukan kegiatan agama.
6. Anak bersama orang dewasa menggunakan media sosial.

B. Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender (*Gender Development and Empowerment Index*) adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam suatu negara atau wilayah. Indeks semacam ini dirancang untuk mencerminkan sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan layanan, serta sejauh mana perempuan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang.



Tabel 2.43

Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	84,62	84,08	84,86	85,28	85,60
2	Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	47,40	47,20	49,01	49,07	50,43

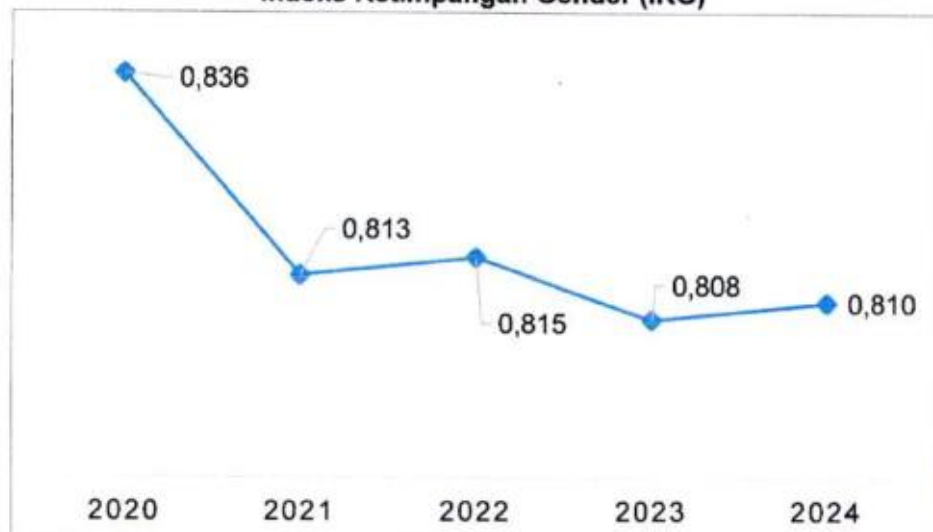
Sumber: Dinas P3AP2KB Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

C. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami penurunan dari 0,836 persen menjadi 0,813 poin, hal ini disebabkan oleh faktor kontrol atas sumber daya ekonomi, pendidikan, pendapatan, angka kematian, akses dalam mendapatkan pekerjaan, upah, dan wewenang di area publik dan swasta yang masih lemah terhadap perempuan. Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 0,815 poin dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0,808 poin, namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 0,810 poin.

Grafik 2.14

Indeks Ketimpangan Gender (IKG)



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025



2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Rasio Ketergantungan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), rasio ketergantungan atau *dependency ratio* merupakan perbandingan jumlah penduduk berumur 0 hingga 14 tahun, ditambah jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas, kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk umur 15 hingga 64 tahun. Atau diartikan sebagai ukuran demografi dari rasio jumlah tanggungan terhadap total penduduk Angkatan kerja di suatu wilayah.

Rasio ketergantungan memiliki dua fungsi utama, yaitu: Pertama Sebagai indikator demografi Artinya perhitungan rasio ketergantungan bisa digunakan untuk menancari tahu tingkat beban ketergantungan penduduk di suatu wilayah. Apabila *dependency ratio* tinggi, beban ketergantungan penduduk yang belum produktif dan tidak produktif, terhadap usia produktif akan semakin tinggi. Sedangkan jika rasio ketergantungannya rendah, beban ketergantungannya akan semakin rendah pula. Fungsi kedua adalah Indikator keadaan ekonomi suatu wilayah. Rasio ketergantungan menjadi indikator keadaan ekonomi suatu wilayah. Artinya lewat perhitungan ini, bisa diketahui apakah suatu negara sudah tergolong maju atau masih di tahap negara berkembang.

Rasio ketergantungan Kabupaten Rote Ndao tahun 2020–2024 dihitung dengan mencakup seluruh wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan, sehingga memberikan gambaran mengenai beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.44
Rasio Ketergantungan

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketergantungan	66,90	56,89	68,62	61,52	59,57

Sumber: BPS Prov. NTT, Tahun 2025

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Persentase Koperasi Berkualitas

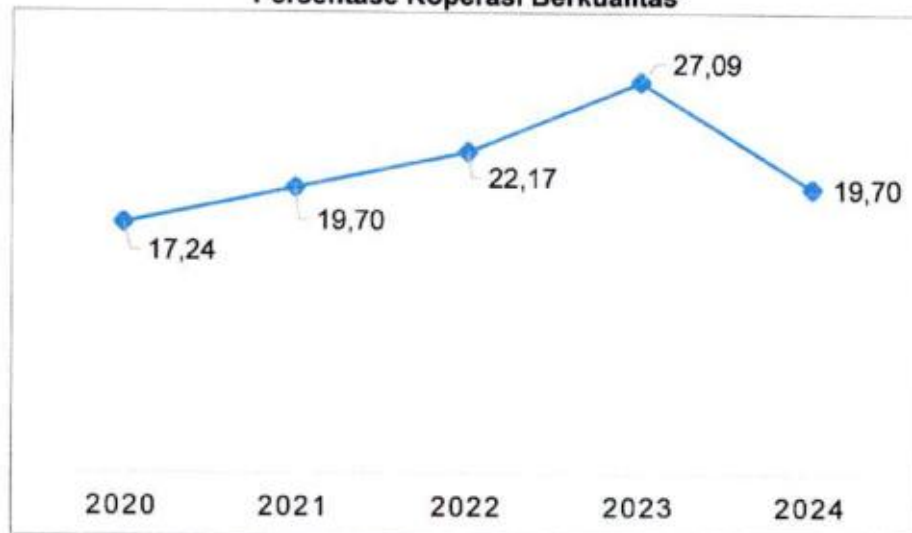
Koperasi berkualitas mencakup berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, usaha, keuangan, hingga manfaat bagi anggota dan masyarakat. Koperasi yang berkualitas memiliki kinerja baik di berbagai bidang, menerapkan prinsip-prinsip koperasi, dan bermanfaat bagi anggotanya.



Koperasi Berkualitas di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 sebesar 17,24% meningkat menjadi 27,09% pada tahun 2023. Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 19,70%. Berikut grafik koperasi berkualitas Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024:

Grafik 2.15

Persentase Koperasi Berkualitas



Sumber: Dinas Koperindag Kab Rote Ndao, Tahun 2025

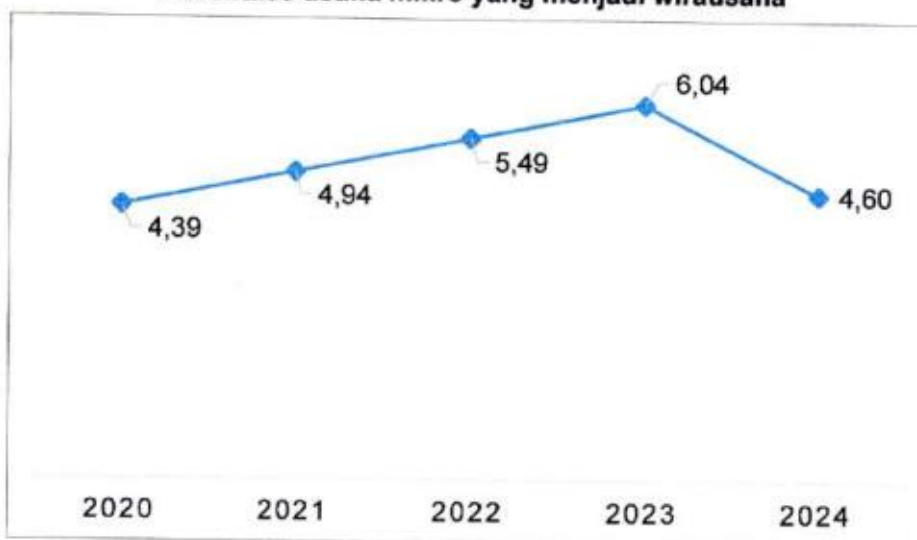
B. Pesentase usaha mikro yang menjadi wirausaha

Usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu dengan aset maksimal Rp 50 juta dan omzet maksimal Rp 300 juta. Pengusaha mikro, atau wirausaha mikro, adalah individu yang memulai dan mengoperasikan usaha bisnis kecil, seringkali dengan sumber daya, modal, dan staf yang terbatas. Usaha mikro menjadi wirausaha di Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 sebesar 4,39 persen meningkat menjadi 6,04 persen pada tahun 2023. Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 4,6 persen karena perbandingan terhadap jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Rote Ndao semakin banyak. Berikut grafik persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024:



Grafik 2.16

Pesentase usaha mikro yang menjadi wirausaha



Sumber: Dinas Koperindag Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

C. Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur, atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, atau penggalian seperti produk dari pengolahan kegiatan lainnya. Industri perubahan, pembaharuan, atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin, atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual, dan unit yang melakukan pengolahan bahan bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Peranan PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Rote Ndao menurut Lapangan Usaha khususnya Industri pengolahan atau manufacturing dijabarkan seperti di bawah ini.

Tabel 2.45

PDRB Bruto Kabupaten Rote Ndao Menurut Lapangan Usaha
Khususnya Industri Pengolahan atau Manufacturing

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan atau Manufacturing (%)	1,21	1,11	1,12	1,25	1,36

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025



Sementara Laju pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Rote Ndao menurut lapangan usaha, terutama PDRB Industri Pengolahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46
Laju Pertumbuhan Rill PDRB Kabupaten Rote Ndao
Sektor Industri Pengolahan

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Industri Pengolahan (%)	-4,11	-5,68	4,45	9,13	7,23

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Laju pertumbuhan Riil PDRB Bruto Kabupaten Rote Ndao menunjukan indikator utama pembangunan ekonomi yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah, secara khusus industri pengolahan di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi -4,11% dan -5,68%, hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid -19 yang melanda Kabupaten Rote Ndao sehingga aktivitas industri pengolahan mengalami stagnasi. Tahun 2022 geliat industri pengolahan mulai mengalami peningkatan sebesar 4,45% menjadi 7,23% pada tahun 2024, faktor yang menyebabkan peningkatan karena sektor industri pengolahan sudah mulai berkembang baik pada sektor makanan, minuman, tekstil dan lain sebagainya.

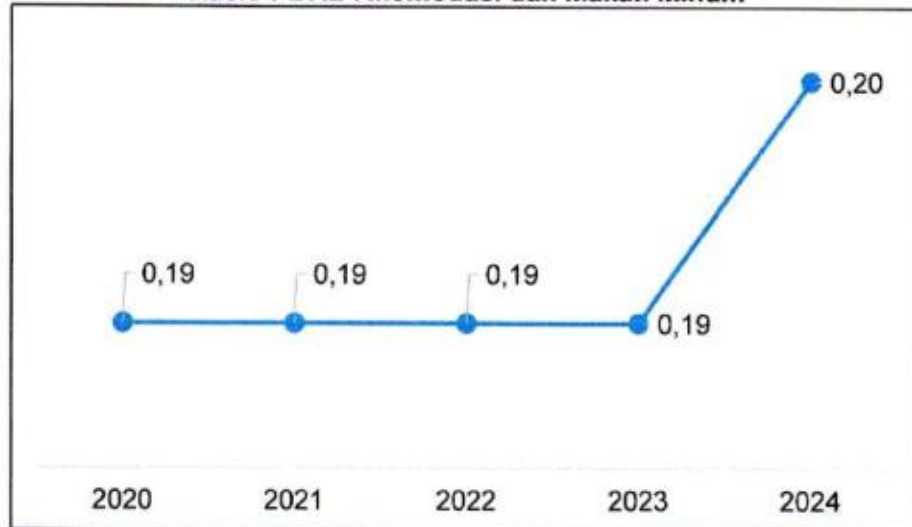
D. Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi serta Makan dan Minum di Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020–2024 mengalami stagnasi sebesar 0,19% dari tahun 2020 hingga 2023, kemudian meningkat menjadi 0,20% pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh ketersediaan jumlah rumah makan sebanyak 84 unit pada tahun 2024. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, yang tercatat sebanyak 16.374 orang pada tahun 2024. Berikut ini grafik Rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Rote Ndao tahun 2020–2024:



Grafik 2.17

Rasio PDRB Akomodasi dan Makan Minum



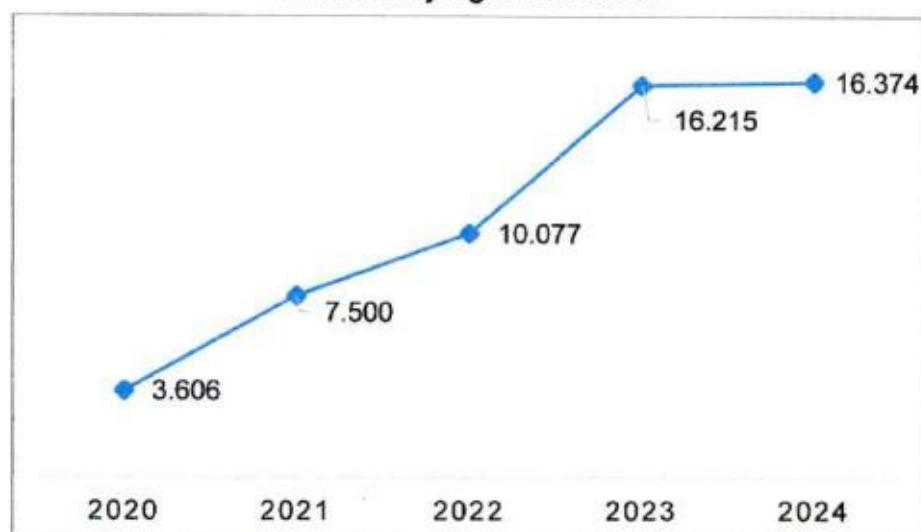
Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

E. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Rote Ndao pada periode tahun 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah kunjungan wisatawan masih relatif rendah akibat dampak pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat, baik wisatawan mancanegara maupun nusantara, sehingga aktivitas pariwisata di daerah ini mengalami penurunan yang cukup tajam. Namun, memasuki tahun 2021 hingga 2024, jumlah kunjungan wisatawan mulai pulih dan terus mengalami peningkatan yang stabil. Hal ini tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung, antara lain gencarnya upaya promosi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semakin lancarnya akses transportasi menuju Kabupaten Rote Ndao, serta semakin membaiknya sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Selain itu, keberagaman destinasi wisata yang ditawarkan, mulai dari wisata bahari dengan pantai-pantai yang eksotis hingga kekayaan budaya dan tradisi masyarakat lokal yang unik yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Gambaran mengenai perkembangan jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Rote Ndao selama tahun 2020–2024 dapat dilihat pada grafik berikut



Grafik 2.18
Jumlah Kunjungan Wisatawan



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

F. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan indikator penting untuk memahami kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan suatu daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Rote Ndao.

Angkatan Kerja adalah penduduk yang usianya masuk ke dalam kategori usia kerja, termasuk diantaranya penduduk yang saat ini telah bekerja maupun penduduk yang sedang dalam proses mencari pekerjaan itu sendiri. Semua orang yang berada di dalam masa usia produktif (usia kerja) akan dikategorikan sebagai angkatan kerja, kelompok ini termasuk dalam kategori bekerja dan menganggur.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Rote Ndao cenderung fluktuatif, di mana pada tahun 2020 sebanyak 94.378 jiwa dengan rincian jumlah bekerja sebanyak 89.749 jiwa dan jumlah pengangguran sebanyak 4.627 jiwa. Tahun 2024 jumlah penduduk bekerja menurun menjadi 72.774 jiwa dan jumlah pengangguran mengalami penurunan menjadi 1.804 jiwa. Angka pengangguran menurun karena lapangan usaha yang sudah semakin terbuka, sehingga penduduk yang bekerja sudah terserap, yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.47

Jumlah Angkatan Kerja Laki-laki dan Perempuan

NO	ANGKATAN KERJA	LAKI-LAKI + PEREMPUAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Bekerja	89.749	95.587	98.290	68.227	72.774
2.	Pengangguran	4.627	3.645	3.708	2.586	1.804
Jumlah		94.376	99.232	101.998	70.813	74.578

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebesar 71,82% mengalami fluktuasi karena berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi sehingga keadaan perekonomian yang naik turun berpengaruh pada partisipasi angkatan kerja usia produktif.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Rote Ndao dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.48

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	73,07	74,16	73,20	68,99	71,82

Sumber : BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

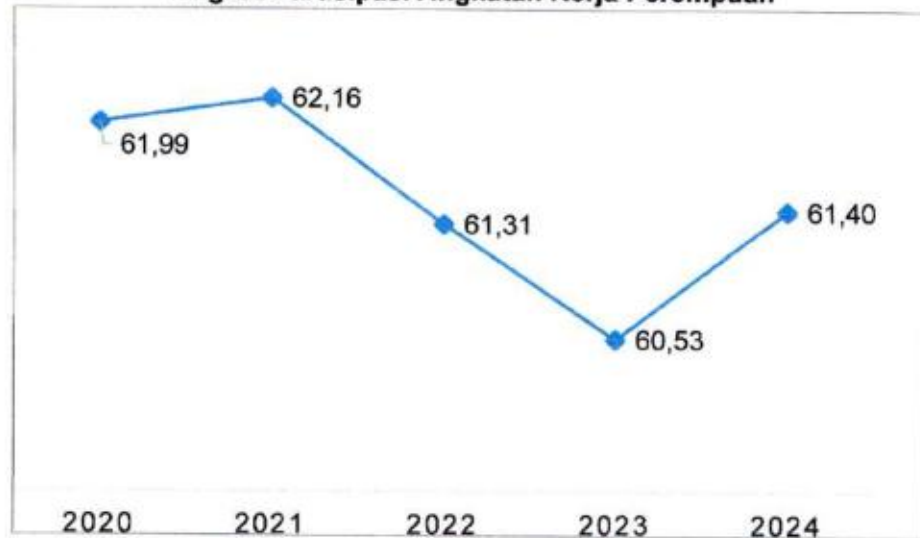
Tingkat Partisipasi Kerja Perempuan Kabupaten Rote Ndao cenderung fluktuatif, tahun 2020-2021 mengalami peningkatan dari 61,99 persen menjadi 62,16% pada tahun 2021. Tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 61,40%.

Faktor penyebab menurunnya Tingkat Partisipasi Kerja Perempuan di Kabupaten Rote Ndao yaitu rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pelayanan publik maupun swasta.



Grafik 2.19

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

G. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan dan menilai seluruh inovasi daerah, baik di bidang digital maupun non-digital. Pengukuran dan penilaian dilakukan terhadap inovasi yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri. Skor Indeks Inovasi Daerah Rote Ndao Tahun 2024 adalah sebesar 40,18 masuk dalam kategori inovatif. Nilai ini naik dari nilai indeks di Tahun 2023 yaitu 39,48.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau

A. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index*) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu wilayah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi penggunaan sumber daya alam, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, serta transisi menuju energi terbarukan. Selain itu, Indeks Ekonomi Hijau juga mengukur kontribusi sektor-sektor ekonomi hijau, seperti pertanian berkelanjutan, ekowisata, dan industri ramah lingkungan, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian alam..

Melalui Indeks Ekonomi Hijau, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat memantau kinerja pembangunan daerah dalam mewujudkan ekonomi yang lebih inklusif dan berwawasan lingkungan. Indeks ini juga menjadi



panduan dalam merancang strategi dan kebijakan yang mendukung pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan penerapan konsep ekonomi hijau, diharapkan tercipta keseimbangan antara pembangunan yang pesat dan pelestarian lingkungan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh generasi saat ini maupun mendatang. Indeks ekonomi hijau terdiri dari 11 indikator terpilih yang memiliki 3 (tiga) pilar *Sustainable Development* yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan

Tabel 2.49

Indikator Tiga Pilar Ekonomi Hijau

PILAR		INDIKATOR	
A.	Pilar lingkungan	1.	Persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Indonesia
		2.	Bauran energi baru terbarukan (EBT) dari sumber energi primer
		3.	Persentase sampah terkelola
B.	Pilar ekonomi	4.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
		5.	Produktivitas pertanian
		6.	Produktivitas tenaga kerja sektor industry
		7.	Produktivitas tenaga kerja sektor jasa
C.	Pilar sosial	8.	Rata-rata lama sekolah
		9.	Angka harapan hidup
		10.	Tingkat kemiskinan
		11.	Tingkat pengangguran terbuka

B. Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi

Energi Baru Terbarukan (EBT) merujuk pada sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui secara alami dan tidak terbatas, seperti matahari, angin, air, dan biomassa. EBT memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sumber energi konvensional, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, karena EBT memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dan dapat mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Pengembangan dan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan menjadi fokus utama dalam upaya mitigasi perubahan iklim global dan diversifikasi sumber energi. Banyak negara dan organisasi telah meningkatkan investasi dan kebijakan untuk menggalakkan penggunaan EBT guna mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Data dari UPT BMKG dan beberapa penelitian terkait energi angin di Rote menunjukkan bahwa pada periode musim penghujan tercatat memiliki nilai kecepatan angin yang rendah (3-5 m/s) daripada periode bulan kemarau



(4-8 m/s). Arah angin di Rote Ndao sangat dipengaruhi oleh angin monsun. Pada saat bulan Desember – Maret, arah angin dominan cenderung berasal dari barat dan barat laut. Sedangkan Mei - September arah angin dominan cenderung dari arah timur dan tenggara. Kecepatan rata-rata angin dengan nilai tinggi umumnya berada di wilayah selatan Rote Ndao. Sedangkan kecepatan angin rata-rata minimum umumnya berada di wilayah utara hingga tengah Rote Ndao. Wilayah Rote Ndao berpotensi sebagai sistem konversi energi angin (SKEA) berskala kecil (Oktober – Maret) hingga besar (April – September). Wilayah pesisir memiliki kecepatan angin yang lebih stabil dikarenakan wilayah pesisir memiliki gaya gesek yang lebih rendah.

Selain energi angin, energi yang bisa dimanfaatkan adalah energi matahari. BPS Prov. NTT mencatat durasi penyinaran matahari adalah seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.50
Durasi Penyinaran Matahari

	2020	2021	2022	2023
Durasi Penyinaran Matahari (%)	82,0	76.3	73.5	79.4

Sumber: BPS Prov. NTT, Tahun 2024

Sementara data pembangunan instalasi PLTS yang dikerjakan oleh Kementrian ESDM di Kab Rote Ndao adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51
Data Pembangunan Instalasi PLTS Terpusat oleh KESDM

TAHUN	LOKASI	KAPASITAS (KW)	SUMBER DANA
2011	Maeoe	5	DAK
2012	1. Desa Suebela,	15	APBN
	2. Desa Lidor,	15	
	3. Desa Bo'a	15	
2013	1. Desa Oelasin (Fuafuni)	10	APBN
	2. Desa Landu	10	
	3. Desa Limakoli	4	
2014	Desa Dodaek	15	DAU
2015	1. Desa Nuse	25	DAU
	2. Desa Daiama	75	APBN
	3. Desa Landu	5	APBN
	4. Desa Kuli	5	APBN
	5. Desa Batefalu	10	APBN
2016	1. Desa Mbokak	50	APBN
2019	1. Desa Tenalai	70	PLN (APBN)
2021	1. Desa Fuafuni	19	Kerjasama NGO BAPPENAs

Sumber: Sasongko, dli, Tahun 2022



2.1.3.4 Transformasi Digital

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Konektivitas digital pada pemerintah daerah mengacu pada upaya untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan di tingkat lokal. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk infrastruktur teknologi, aplikasi perangkat lunak, platform komunikasi, dan kebijakan yang mendukung penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi pelayanan publik.

Konektivitas digital pada pemerintah daerah memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Namun, perlu diingat bahwa kesuksesan implementasi bergantung pada komitmen pemimpin, alokasi sumber daya yang memadai, dan kerjasama antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup disini tetapi digolongkan sebagai pengeluaran pemerintah.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rote Ndao Atas Dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran, terutama pembentukan modal tetap bruto Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.52

Pembentukan Modal Tetap Bruto

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Pembentukan Modal Tetap Bruto (Miliar Rupiah)	1.001,74	1.082,36	1.133,43	1.235,58	1.280,04

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025



B. Realisasi Investasi Daerah

Laju Perekonomian daerah mengalami perkembangan yang cepat apabila didukung oleh penanaman modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk menjaring investor maka kondisi daerah yang kondusif, regulasi yang jelas dan pengurusan ijin yang tidak berbelit-belit serta pelayanan yang prima sangat diperlukan. Disamping itu database potensi sumberdaya baik sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang jelas dan akurat dan kejelasan status tanah harus dipersiapkan secara baik oleh daerah sehingga investor tertarik untuk melakukan investasi di daerah. Indikator kinerja Bidang penanaman modal dapat dilihat pada perkembangan jumlah investor dan besarnya nilai investasi swasta.

Capaian indikator kinerja bidang penanaman modal di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020-2024. Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) terus meningkat dari 54 pada 2020 menjadi 86 pada 2024. Nilai investasi pun melonjak tajam, dari Rp15,4 miliar pada 2020 menjadi Rp1,24 triliun pada 2024, mencerminkan kepercayaan investor yang semakin tinggi. Realisasi investasi juga mengalami fluktuasi, dengan kenaikan terbesar pada 2024 sebesar Rp334,1 miliar. Di sisi lain, persentase bangunan atau usaha berizin mengalami tren positif, meningkat dari 50% pada 2020 menjadi 142% pada 2024. Angka-angka ini menunjukkan perkembangan pesat dalam iklim investasi dan kepatuhan perizinan di wilayah tersebut. Adapun capaian kinerja Bidang penanaman modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53

Realisasi Investasi Daerah di Kabupaten Rote Ndao

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	54	60	74	80	86
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (x1.000.000)	15.405	493.030	788.394	906.968	1.242.351
Realisasi investasi PMDN/PMA (x1.000.000)	62.590,6	119.440,7	64.423,98	222.990,83	334.135,00
Persentase bangunan/usaha berizin	50	115,87	104	140,29	142

Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Rote Ndao, Tahun 2025



2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Persentase Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan

Persentase Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan merupakan pengukuran kuantitatif yang menilai kualitas infrastruktur berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Infrastruktur berkelanjutan didefinisikan sebagai infrastruktur yang dirancang, dibangun, dioperasikan, dan dipelihara dengan mempertimbangkan:

1. Ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam
2. Efisiensi sumber daya (energi, air, material)
3. Dampak lingkungan yang minimal
4. Inklusivitas dan aksesibilitas sosial
5. Kelayakan ekonomi jangka panjang
6. Inovasi dan teknologi hijau

Pengukuran indeks kualitas infrastruktur berkelanjutan merupakan proses yang kompleks dan kontekstual, yang perlu disesuaikan dengan kondisi lokal, jenis infrastruktur, dan prioritas pembangunan berkelanjutan di masing-masing wilayah. Persentase kualitas infrastruktur berkelanjutan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.54

Persentase Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan (25% x Jalan Kondisi Baik) + (25% x Irigasi Kondisi Baik) + (25% x IKLH) + (25% x Persentase Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Layak)	%	30,74	46,21	53,74	49,11	49,52
Aspek Pengukuran:						
25% x Jalan Kondisi Baik	%	43,49	47,02	53,35	32,97	33,47
25% x Irigasi Kondisi Baik	%	25,42	26,64	28,20	29,80	31,79
25% x Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	N/A	48,93	67,77	69,59	68,17
25% x Persentase Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Layak	%	54,04	62,24	65,65	64,09	64,66

Sumber: Dinas PUPR dan Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

B. Persentase Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Layak

Persentasi infrastruktur perumahan dan pemukiman layak merupakan capaian pembangunan infrastruktur perumahan layak yang terintegrasi dengan air minum dan sanitasi layak.



Tabel 2.55

Persentase Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman Layak

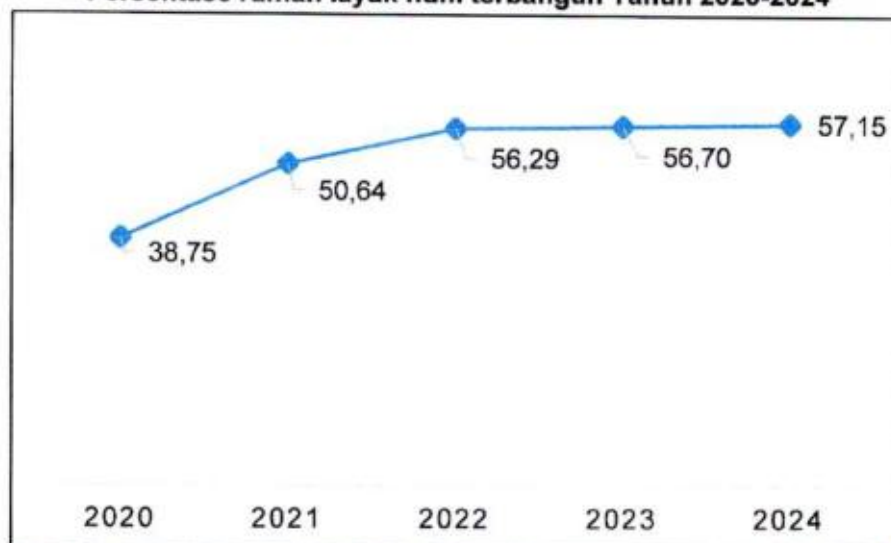
INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase infrastruktur perumahan dan pemukiman layak ($60\% \times \% \text{ RLH Tahun N} + (14\% \times \% \text{ Sanitasi Layak Tahun N}) + (26\% \times \% \text{ Air Minum Layak Tahun N})$)	%	54,04	62,24	65,65	64,09	64,66
Aspek Pengukuran:						
$60\% \times \% \text{ RLH Tahun N}$	%	38,75	50,64	56,29	56,70	57,15
$14\% \times \% \text{ Sanitasi Layak Tahun N}$	%	75,76	79,92	80,09	79,54	80,69
$26\% \times \% \text{ Air Minum Layak Tahun N}$	%	77,63	79,47	79,47	72,84	73,37

Sumber: Dinas PKPLH dan Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Persentase rumah layak huni terbangun merupakan perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah keseluruhan. Persentase rumah layak huni di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, angka rumah layak huni tercatat sebesar 38,75%, kemudian mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2021 menjadi 50,64%. Tren positif ini terus berlanjut di tahun 2022 dengan capaian 56,29% dan meningkat lagi menjadi 56,70% pada tahun 2023. Pada tahun 2024 meningkat menjadi 57,15%. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang terus dilakukan dalam penyediaan rumah yang memenuhi standar kelayakan bagi masyarakat di wilayah ini. Secara lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2.20

Persentase rumah layak huni terbangun Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Rote Ndao, Tahun 2025



C. Persentase kondisi mantap jalan kabupaten

Jalan kabupaten dalam kondisi mantap berarti jalan yang dikelola pemerintah kabupaten memiliki kondisi baik dan atau sedang sehingga dapat digunakan dengan nyaman dan aman. Kondisi mantap merujuk pada jalan yang tidak mengalami kerusakan berat atau signifikan, sehingga aman dan nyaman untuk dilalui kendaraan.

Berikut ini adalah persentase kondisi mantap jalan kabupaten pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.56

Persentase kondisi mantap jalan kabupaten

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten (Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Sedang + Baik / Jumlah panjang Jalan Kabupaten X 100)	%	48,11	51,67	58,00	44,67	44,83
Aspek Pengukuran:						
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Sedang	KM	21,26	21,4	21,4	53,83	64,466
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik	KM	199,96	216,21	245,31	151,585	190,07
Jumlah Panjang Jalan Kabupaten	KM	459,833	459,833	459,833	459,833	567,818

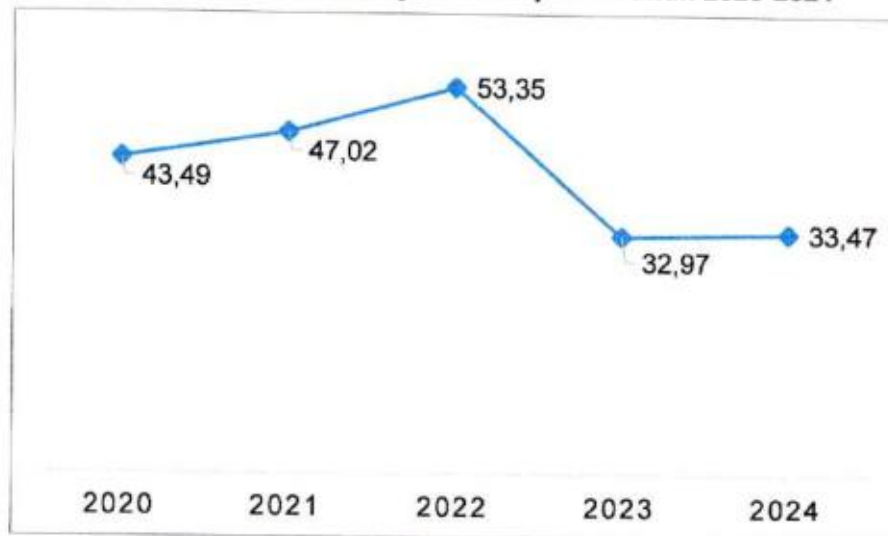
Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Perbaikan kualitas infrastruktur jaringan jalan terus menunjukkan perkembangan yang baik, hal ini dilihat dari tren, persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2020 sebesar 43,49 persen, meningkat menjadi 53,35 persen pada tahun 2022. Tahun 2023 kondisi jalan baik sebesar 32,97 persen meningkat menjadi 33,47 persen pada tahun 2024. Secara rinci proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 2.21

Persentase kondisi baik jalan kabupaten Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PUPR Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

D. Desa maju dan berkembang

Kriteria desa maju yaitu memiliki infrastruktur yang memadai, ekonomi yang beragam dan berkelanjutan, masyarakat yang berdaya, lingkungan yang lestari, dan pemerintahan yang efektif sedangkan kriteria desa berkembang masih memiliki potensi, namun belum optimal dalam pengelolaan sumber daya dan infrastruktur.

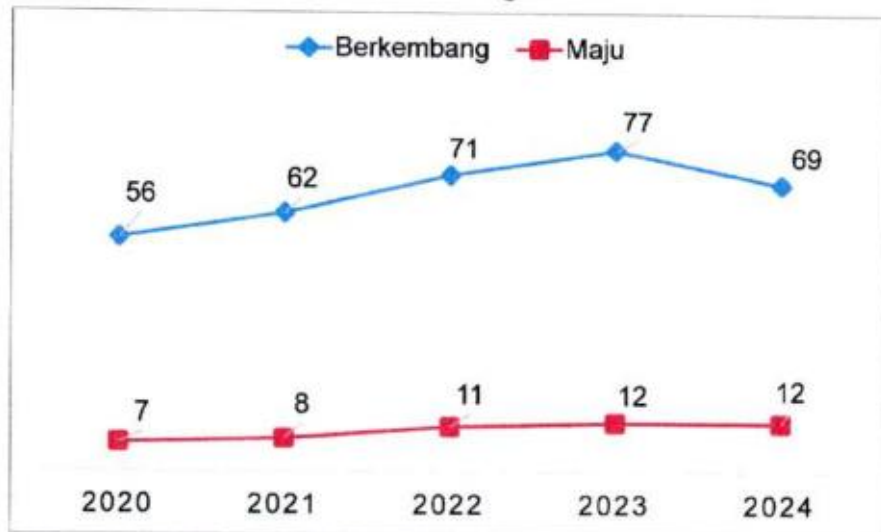
Desa berkembang adalah desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa ini berada pada tingkat status pembangunan menengah, di mana ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, dan pemerintahan sudah cukup memadai, namun masih perlu perbaikan

Desa maju dan berkembang di Kabupaten Rote Ndao terus mengalami peningkatan, tahun 2020 desa maju sebanyak 7 desa dan berkembang sebanyak 56 desa meningkat menjadi 12 desa maju dan berkembang sebanyak 77 desa pada tahun 2023. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 69 desa berkembang sedangkan desa maju tetap 12 desa, penurunan pada tahun 2024 karena kriteria yang ditetapkan dan Indeks Desa Membangun mengalami perubahan penilaian sehingga jumlah desa maju dan berkembang menurun. Berikut grafik desa maju dan berkembang Kabupaten Rote Ndao tahun 2020-2024:



Grafik 2.22

Desa Maju dan Berkembang Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas PMD Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Dari Tabel di atas diketahui bahwa status desa tertinggal cenderung menurun, bahkan desa sangat tertinggal sudah tidak ada. Di sisi lain terdapat peningkatan jumlah desa berkembang dan desa maju. Progres ini merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk terus mengawal pembangunan desa agar dapat meningkatkan status desa nya melalui pembangunan di desa.

E. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa adalah indikator strategis yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa di Indonesia. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024, indeks ini memberikan pedoman dalam menilai kemajuan desa melalui enam dimensi kunci. Indeks ini bertujuan untuk mengidentifikasi status kemajuan desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Desa diatur berdasarkan enam dimensi utama: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

Sebelum Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024 diterbitkan, status desa ditentukan berdasarkan Indeks Desa Membangun. Perubahan nama dari "Indeks Desa Membangun" menjadi "Indeks Desa" diikuti oleh beberapa perubahan penting. Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 9 Tahun 2024, perubahan tersebut mencakup:

1. Penyederhanaan Nama



Nama 'Indeks Desa Membangun' diubah menjadi 'Indeks Desa' untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman.

2. Perubahan Dimensi

Indeks Desa memiliki enam dimensi utama, yaitu: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

3. Penambahan Indikator

Setiap dimensi memiliki indikator-indikator spesifik yang lebih terukur dan terperinci untuk mengukur kemajuan desa.

4. Perubahan Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sekarang melibatkan proses yang lebih ketat dan terstruktur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.

Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan efektifitas pengukuran kemajuan desa, serta memfasilitasi perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Hingga tahun 2024, masih bernama Indeks Desa Membangun atau IDM, suatu indeks yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan kemandirian desa dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Capaian IDM Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 sebesar 0,653.

Status desa di Kabupaten Rote Ndao dijabarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.57

Status Desa di Kabupaten Rote Ndao

STATUS DESA	2020	2021	2022	2023	2024
Mandiri	0	0	0	0	0
Maju	7	8	11	12	12
Berkembang	56	62	71	77	69
Tertinggal	48	42	30	23	31
Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0
Jumlah	112	112	112	112	112

Sumber: Dinas PMD Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Dari Tabel di atas diketahui bahwa status desa tertinggal cenderung menurun, bahkan desa sangat tertinggal sudah tidak ada. Di sisi lain terdapat peningkatan jumlah desa berkembang dan desa maju. Progres ini merupakan peluang bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao untuk terus mengawal pembangunan desa agar dapat meningkatkan status desa nya melalui pembangunan di desa.



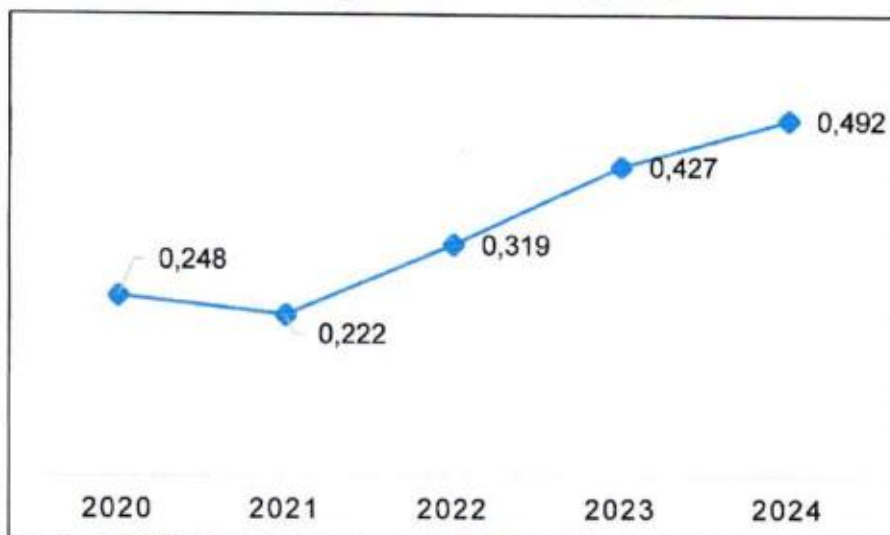
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ADHK Lapangan Usaha pada periode tahun 2020 hingga 2021 menunjukkan penurunan dari 0,248% menjadi 0,222%. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi, sehingga berimplikasi langsung pada menurunnya tingkat konsumsi serta pemanfaatan berbagai jasa, khususnya jasa perhotelan, penginapan, restoran, warung makan, dan sektor jasa lainnya yang menjadi salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Namun, mulai tahun 2022 hingga tahun 2024, rasio tersebut kembali mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan dan mencapai 0,492% pada tahun 2024. Peningkatan ini sejalan dengan membaiknya stabilitas perekonomian daerah, yang ditandai dengan pulihnya mobilitas masyarakat serta meningkatnya kembali akses dan konsumsi terhadap berbagai jenis pelayanan jasa. Perbaikan kondisi ini mencerminkan adanya pemulihan ekonomi pascapandemi serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong aktivitas usaha, sehingga kontribusi pajak daerah terhadap PDRB Lapangan Usaha kembali menunjukkan perkembangan positif.

Grafik 2.23

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB



Sumber: BPS Kab.Rote Ndao, Tahun 2025

B. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang mencerminkan kenaikan maupun penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang secara langsung

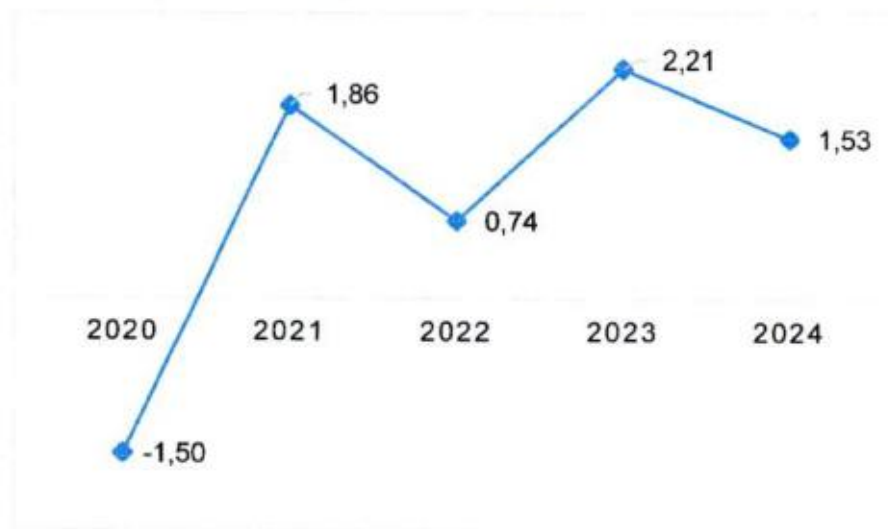


memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Ketika inflasi mengalami peningkatan, maka harga barang dan jasa dalam suatu wilayah juga ikut naik, sehingga nilai mata uang mengalami penurunan relatif terhadap harga kebutuhan pokok dan jasa. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya daya beli masyarakat, terutama terhadap barang dan jasa yang bersifat esensial. Dengan demikian, inflasi memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas harga barang dan jasa yang dibutuhkan penduduk, serta menjadi salah satu faktor penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat.

Data inflasi Kabupaten Rote Ndao tahun 2020 hingga tahun 2024 bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Perubahan laju inflasi dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan gambaran mengenai dinamika perekonomian daerah, khususnya dalam kaitannya dengan stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Untuk lebih jelasnya, perkembangan laju inflasi Kabupaten Rote Ndao pada Triwulan IV, periode Desember 2020 hingga Desember 2024, ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 2.24

Laju Inflasi Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Kabupaten Rote mengalami deflasi pada tahun 2020 sebesar 1,50%, pada tahun 2021 inflasi meningkat menjadi 1,86% dan tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,74%, tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 2,21% dan tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 1,53%.



Tabel 2.58

Inflasi Kabupaten Rote Ndao

Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2024

NO	KELOMPOK PENGELUARAN	IHK DES 2024	INFLASI
1	Makanan, Minuman dan Tembakau	107,32	0,94
2	Pakaian dan Alas Kaki	100,82	0,02
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar lainnya	102,27	-
4	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,86	-
5	Kesehatan	101,60	-0,01
6	Transportasi	110,84	-0,04
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	99,38	-0,05
8	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	100,81	0,01
9	Pendidikan	100,18	-
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	106,02	0,09
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	115,50	0,57

Sumber: BPS Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas inflasi tidak hanya berhubungan dengan jumlah uang yang beredar, akan tetapi juga berhubungan dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah inflasi, diantaranya kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan lainnya. Pada Desember 2024 Kabupaten Rote Ndao menurut kelompok pengeluaran mengalami inflasi sebesar 1,51 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar angka riil inflasi di Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan indeks harga konsumen disebabkan oleh naiknya semua kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan terbesar adalah kelompok transportasi dan makanan, minuman dan tembakau. Untuk mengatasi inflasi, hal yang harus dilakukan adalah mengetahui penyebab terjadinya inflasi agar strategi penanggulangannya dapat diketahui.

Upaya mengendalikan laju inflasi perlu dikoordinasikan dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Rote Ndao untuk melakukan evaluasi, pemantauan dan pengendalian terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan inflasi daerah, melakukan pemantauan dan pemberian informasi harga sembako, pengendalian harga komoditas strategis/utama (beras, cabe dan bawang merah), pemantauan dan pengendalian BBM, serta melakukan antisipasi kenaikan harga menjelang hari raya



keagamaan. Upaya lain yang tidak kalah penting adalah dengan memperlancar arus distribusi barang dengan peningkatan konektivitas antar daerah dari jalur laut mengingat Kabupaten Rote Ndao sebagai kabupaten kepulauan.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum merupakan sebuah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Kabupaten Rote Ndao mencatat kemajuan signifikan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan peningkatan indeks dari kategori "Cukup" menjadi kategori "Baik". Skor itu meningkat dari nilai indeks 2,48 di Tahun 2022 ke nilai indeks 2,99 di Tahun 2023. Peningkatan indeks SPBE Kabupaten Rote Ndao ke nilai 2,99 tidak hanya menandakan



peningkatan internal, tetapi juga melampaui rata-rata nilai indeks nasional saat ini yang berada pada nilai 2,7. Secara rinci, Indeks SPBE ditampilkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Indeks SPBE

INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	1,00	2.48	2.99	3.35
Aspek Pengukuran:				
1 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,00	3.00	3.00	5.00
2 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,00	3.00	3.00	5.00
3 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	1,00	4.00	3.00	5.00
4 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	1,00	3.00	3.00	5.00
5 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	1,00	3.00	4.00	5.00
6 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,00	3.00	3.00	5.00
7 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,00	3.00	3.00	5.00
8 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	1,00	3.00	4.00	5.00
9 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1,00	3.00	4.00	5.00
10 Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,00	4.00	4.00	5.00
11 Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,00	1.00	2.00	2.00
12 Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,00	1.00	2.00	2.00
13 Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	1,00	2.00	3.00	2.00
14 Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1,00	1.00	2.00	2.00
15 Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	1,00	3.00	3.00	3.00
16 Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1,00	2.00	2.00	3.00
17 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,00	1.00	2.00	2.00
18 Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,00	1.00	2.00	2.00
19 Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1,00	4.00	4.00	4.00
20 Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1,00	4.00	2.00	4.00
21 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1,00	1.00	2.00	2.00
22 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1,00	1.00	2.00	2.00
23 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1,00	1.00	2.00	2.00
24 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1,00	2.00	2.00	2.00
25 Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1,00	2.00	2.00	2.00
26 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1,00	1.00	2.00	2.00
27 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1,00	1.00	2.00	1.00
28 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1,00	1.00	2.00	2.00
29 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1,00	1.00	2.00	2.00



INDIKATOR	2021	2022	2023	2024
30 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1,00	1,00	2,00	2,00
31 Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1,00	1,00	2,00	2,00
32 Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	1,00	4,00	4,00	4,00
33 Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	1,00	4,00	4,00	4,00
34 Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	1,00	4,00	4,00	4,00
35 Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1,00	3,00	3,00	4,00
36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	1,00	2,00	4,00	4,00
37 Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	1,00	1,00	4,00	4,00
38 Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	1,00	3,00	4,00	4,00
39 Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1,00	1,00	3,00	3,00
40 Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1,00	3,00	3,00	3,00
41 Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	1,00	2,00	3,00	3,00
42 Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	1,00	4,00	4,00	4,00
43 Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1,00	3,00	3,00	2,00
44 Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	1,00	3,00	4,00	4,00
45 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	1,00	4,00	4,00	5,00
46 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	1,00	4,00	3,00	5,00
47 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	1,00	3,00	3,00	4,00

Sumber: Dinas KISP Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

C. Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Berdasarkan hasil analisis monitoring dan evaluasi pelayanan publik yang dilaksanakan secara mandiri pada 54 (lima puluh empat) Perangkat Daerah (PD) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Rote Ndao, diperoleh capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 2,44 pada tahun 2024. Kategori kualitas pelayanan masing-masing PD/UPTD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Tahun 2024

NO	KATEGORI	DINAS/BADAN/ BAGIAN	KECAMATAN	PUSKESMAS
1	Kategori B (baik)	- BKPSDMD - Dinas KISP		Puskesmas Ba'a
2	Kategori B (baik dengan catatan)	- Dinas Budpar - Dinas PMPTSP - BPBD		
3	Kategori C (cukup)	- Dinas PMD - Dinas PUPR - Bagian Pemkesra - Dinas Koperindag - Dinas PKPLH - Dinas Kesehatan - Dinas Nakertrans - Bapenda - Bagian Organisasi	Kecamatan Lobalain	- Puskesmas Batutua - Puskesmas Oele



NO	KATEGORI	DINAS/BADAN/ BAGIAN	KECAMATAN	PUSKESMAS
3	Kategori C (cukup dengan catatan)	- Bapelitbangda - Dinas PKO - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - BKAD - Bagian Umum - Dinas Perhubungan - Satpol PP - Sekwan - Dinas Peternakan - Bagian Ekbang - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan - Bakesbangpol - Dinas Perikanan - Inspektorat - Bagian PBJ - Bagian Hukum	- Kecamatan Rotim - Kecamatan Panbar - Kecamatan Loaholu - Kecamatan Ndao Nuse - Kecamatan Landu Leko	- Puskesmas Oelaba - Puskesmas Feapopi - Puskesmas Eahun - Puskesmas Korbafo - Puskesmas Delha - Puskesmas Ndao Nuse - Puskesmas Sonimanu - Puskesmas Busalangga
4	Kategori D (buruk)	Dinas P3AP2KB	- Kecamatan RBD - Kecamatan Rotsel - Kecamatan RBL - Kecamatan Robar - Kecamatan Roteng	Puskesmas Sotimori

Sumber: Bagian Organisasi Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

D. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kabupaten

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif dirancang sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas dengan kualitas pelayanan publik yang diberikan. Indeks pelayanan publik merupakan salah satu komponen pengukuran reformasi birokrasi.

Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2020 sebesar 78,74 Poin dan meningkat 87,65 Poin pada tahun 2022, tetapi mengalami penurunan menjadi 88,29 Poin pada tahun 2023. Pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 89,29 Poin.

Tabel 2.61

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	78,74	88,10	87,65	88,08	89,29

Sumber: Bagian Organisasi sKab. Rote Ndao, Tahun 2025

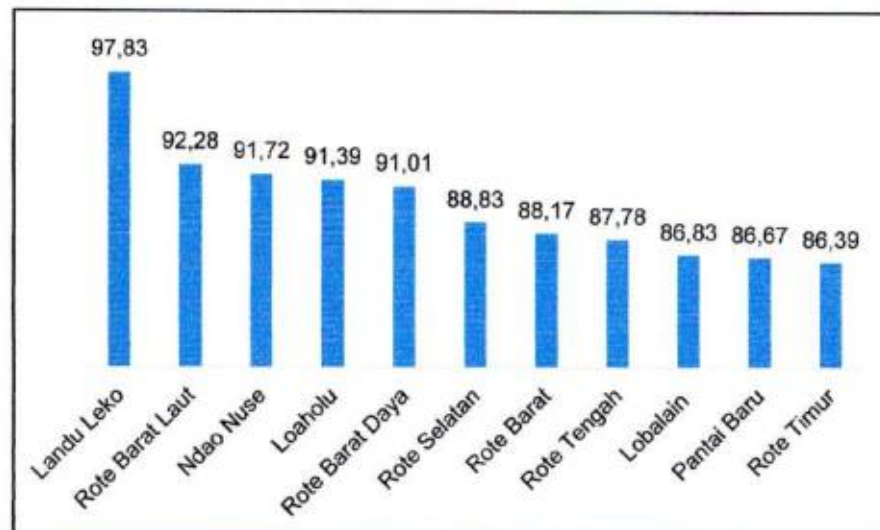


2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di tingkat kecamatan adalah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kecamatan kepada masyarakat. Kecamatan Landu Leko menempati posisi tertinggi dengan nilai 97,83, diikuti oleh Kecamatan Rote Barat Laut dengan 92,28 dan Kecamatan Ndao Nuse sebesar 91,72. Sementara itu, kecamatan dengan nilai terendah adalah Kecamatan Rote Timur dengan 86,39 dan Kecamatan Pantai Baru dengan 86,67. Secara umum, seluruh kecamatan menunjukkan capaian di atas 85, yang menandakan kinerja relatif baik di seluruh kecamatan.

Grafik 2.25

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Tahun 2024



Sumber: Bagian Organisasi Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

E. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini yang dihasilkan berdasarkan pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk



memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.62

Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BKAD Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

F. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) adalah salah satu alat evaluasi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengukur kinerja reformasi birokrasi. Tujuan utama dari Indeks RB adalah untuk menilai sejauh mana pemerintah telah berhasil dalam melakukan reformasi birokrasi guna meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

Indeks ini biasanya mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan dan regulasi, manajemen kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola, dan inovasi. Data yang digunakan untuk menghitung Indeks RB biasanya dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk survei kepada pegawai negeri dan masyarakat umum, analisis dokumen kebijakan, dan evaluasi kinerja birokrasi.

Melalui Indeks RB, pemerintah dapat memantau perkembangan reformasi birokrasi, mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, serta mengukur dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Dengan demikian, Indeks RB menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi serta mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Rote Ndao menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak mulai terukur pada tahun 2022. Pada tahun 2020 dan 2021, data indeks ini belum tersedia (N/A). Pada 2022, nilai awal yang tercatat adalah 42,14 poin. Kemudian, pada 2023 terjadi peningkatan menjadi 50,77 poin, dan pada 2024 indeks ini semakin membaik dengan capaian 62,68 poin. Kenaikan ini mencerminkan komitmen dan upaya pemerintah daerah dalam mendorong reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.



Tabel 2.63

Indeks Reformasi Birokrasi (RB)

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi (RB) (Poin)	N/A	N/A	42,14	50,77	62,68

Sumber: Penilaian Kemenpan RB, Tahun 2025

G. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebuah sistem yang digunakan di Indonesia untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Tujuan dari SAKIP adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Tabel 2.64

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP)	CC	CC	CC	CC	B

Sumber: Penilaian Kemenpan RB, Tahun 2025

H. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah suatu aturan yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 untuk mendorong terciptanya tata kelola keuangan daerah yang lebih baik. IPKD merupakan satuan ukuran yang menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD Provinsi dinilai oleh Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Balitbang sedangkan IPKD Kabupaten/ Kota dinilai oleh Gubernur. Indeks pengelolaan keuangan daerah biasanya mengevaluasi beberapa aspek seperti perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas. Nilai ini menjadi indikator penting tentang bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangannya.

Tabel 2.65

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

INDIKATOR	2023	2024
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	78.89	75.90

Sumber: BKAD Kab. Rote Ndao, Tahun 2025



I. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) adalah pengukuran yang diluncurkan oleh OJK untuk memetakan kondisi akses keuangan daerah dan mendukung inklusi keuangan. IKAD berfungsi sebagai jembatan antara data dan kebijakan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi tantangan akses keuangan, serta menjadi panduan untuk merancang kebijakan yang efektif dan mengukur pencapaian program inklusi keuangan

Pada tahun 2024, Kabupaten Rote Ndao mencatat realisasi IKAD sebesar 2,10. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat akses keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperluas jangkauan layanan keuangan dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat

J. Nilai Sistem Merit

Sistem merit adalah sebuah sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) yang mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, seperti pengadaan, pengembangan karir, promosi, dan lainnya. Nilai sistem merit diukur melalui penilaian mandiri menggunakan sistem skor dan bobot, yang mencakup aspek seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, hingga manajemen kinerja.

Penilaian sistem merit merupakan indikator yang baru diterapkan pada periode RPJMD tahun 2025 – 2029. Dengan sistem merit, maka kebijakan dan manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil, dan wajar tanpa diskriminasi. Aspek pengukuran nilai sistem merit meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan ASN: sudah memiliki rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun berdasarkan Anjab dan ABK yang disusun berdasarkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada, dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun;
2. Pengadaan ASN: sudah memiliki kebijakan internal (Perbup) terkait pemenuhan kebutuhan akan pegawai yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif dari jalur CPNS, PPPK, dan juga dari PNS yang bersala dari instansi lain;
3. Pengembangan Karir: memiliki kebijakan dan program pengembangan karier yang dimulai dengan pemetaan talenta, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, strategi dan program untuk



- mengatasi kesenjangan dan pembentukan *Talent Pool* dan rencana suksesi;
4. Promosi dan Mutasi: memiliki kebijakan promosi, mutasi secara objektif dan transparan, didasarkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi dan kinerja dengan memanfaatkan *Talent Pool*;
 5. Manajemen Kinerja: penerapan manajemen kinerja yang dimulai dengan penetapan target kinerja, evaluasi kinerja secara berkala, dengan menggunakan metode yang objektif, menganalisis kesenjangan kinerja dan mempunyai strategi untuk mengatasinya dan menggunakan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait promosi, mutasi dan demosi serta diklat;
 6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin: menghubungkan hasil penilaian kinerja dan disiplin dalam membayar tunjangan kinerja dan memberi penghargaan kepada pegawai serta melakukan penegakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku;
 7. Perlindungan dan Pelayanan: mempunyai program perlindungan dan memberikan pelayanan kepada pegawai;
 8. Sistem Informasi: memiliki sistem yang mendukung terwujudnya manajemen ASN berbasis merit, seperti sistem informasi kepegawaian, *Assessment Center*, *e-performance*, *e-office*, dll.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Rote Ndao merupakan komponen penting dalam tata kelola pemerintahan daerah untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Sebab ketentraman dan ketertiban yang stabil pada suatu daerah merupakan salah satu dasar suksesnya pelaksanaan pembangunan.

Secara umum kondisi di Kabupaten Rote Ndao kondusif dan terkendali meskipun ada gejolak/konflik masyarakat, namun tidak sampai mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Kondisi yang kondusif membuat masyarakat dan pemerintah dapat melakukan kegiatan dengan aman, nyaman dan tenteram. Indikator kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah jumlah penegakan perda, cakupan petugas linmas, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan), Jumlah layanan bencana kebakaran, dan tingkat waktu tanggap bencana kebakaran. Capaian indikator kinerja



tersebut dapat dilihat pada meningkatnya jumlah petugas Linmas dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, serta menurunnya jumlah kasus-kasus yang mengganggu ketertiban umum. Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) menurun dari 0,75% pada tahun 2020 menjadi 0,69% pada tahun 2024. Capaian indikator ketentraman dan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.66
Capaian Indikator Ketentraman dan Ketertiban Umum,
Perlindungan Masyarakat

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	0,75	0,75	0,72	0,69	0,69
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kab/kota (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (VMMK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rote Ndao, Tahun 2025

B. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini didapatkan melalui kompilasi berbagai fenomena terkait demokrasi yang terjadi di suatu daerah.

C. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas merupakan angka-angka yang menunjukan jumlah kriminalitas yang tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Data kriminalitas diperoleh dari hasil pencatatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan anggota masyarakat pada umumnya. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan perbandingan Jumlah kejadian kriminalitas yang terjadi dalam satu tahun per 10.000 penduduk

Tabel 2.67
Kasus Kriminalitas di Kabupaten Rote Ndao

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus Kriminalitas	361	376	270	317	360

Sumber: Statistik Kriminal Prov. NTT, Tahun 2025



Kasus kriminalitas di Kabupaten Rote Ndao mengalami fluktuasi, tahun 2020 sebanyak 361 kasus tindak pidana yang dilaporkan, meningkat menjadi 376 kasus pada tahun 2021, tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 270 kasus dan meningkat lagi menjadi 360 kasus pada tahun 2024

D. Konflik SARA

Konflik SARA adalah yang merujuk pada konflik yang berhubungan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan. Ini mencakup ketegangan atau bentrokan yang terjadi akibat perbedaan identitas sosial, budaya, atau kepercayaan dalam masyarakat.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang mengukur kemampuan daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam menarik investasi. IDSD terdiri atas empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Ke empat komponen ini diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasifikasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai pengelompokan konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks.

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan aspek keamanan mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian daerah; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan angka pengangguran dengan merangsang terciptanya



kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non-perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek.

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha (entry) dan juga kemudahan menutup usaha bagi entitas bisnis yang tidak efisien (exit), serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

Skor IDSD Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Rote Ndao adalah seperti pada Tabel berikut.

Tabel 2.68
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

	2022	2023	2024
Rote Ndao	-	2,63	3,10
NTT	3,20	3,42	3,41
Nasional	3,26	3,44	3,43

Sumber: BRIN IDSD, Tahun 2025

2.1.4.4 Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara efektif dan efisien. Kinerja ini menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu melaksanakan urusan-urusan seperti Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Pilihan, Pendukung Urusan Pemerintahan, Kewilayahan dan Pemerintahan Umum

Evaluasi kinerja tersebut mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta pencapaian hasil yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kinerja urusan pemerintahan daerah menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Realisasi indikator kinerja perangkat daerah tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.69

Realisasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 – 2024

❖ **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

a. Bidang Pendidikan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	60,00	57,33	90,15	77,68	86,59
2	Angka Partisipasi Kasar	%	104,01	61,58	90,15	91,67	92,23
3	Angka Partisipasi Murni	%	83,64	61,58	90,15	77,46	76,63
4	Persentase penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100,00	82,00	100,00	100,00	100,00
5	Angka putus sekolah	Orang	27	15	20	18	15
6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	96,61	46,50	53,03	67,01	67,20
7	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	96,83	84,57	96,94	96,94	97,05
8	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	83,08	84,32	93,17	93,26	94,28
9	Literasi Membaca SD/Sederajat	%	N/A	N/A	N/A	44,89	50,88
10	Literasi Membaca SMP/Sederajat	%	N/A	N/A	N/A	36,88	66,19
11	Numerasi SD/Sederajat	%	N/A	N/A	N/A	34,68	48,06
12	Numerasi SMP/Sederajat	%	N/A	N/A	N/A	27,11	56,42
13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	N/A	N/A	N/A	10,53	10,53

b. Bidang Kesehatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus Kematian Ibu	Orang	5	10	6	3	4
		per 100.000 KH	170,71	357,40	249,79	119,76	116,99
2	Kasus Kematian Bayi	Orang	57	53	28	40	52
		per 1.000 KH	19,46	18,94	11,66	15,97	15,21
3	Angka Kematian Balita (AKBA)	per 1.000 KH	26,30	20,00	14,20	19,60	15,80
4	Prevalensi wasting balita	%	9,70	10,50	9,50	10,20	14,60
5	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00
6	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase <i>Success Rate Tuberculosis</i>	%	81,00	80,00	89,00	88,00	89,00
8	Prevalensi HIV/AIDS	Per 100.000 penduduk	0,10	0,19	0,30	0,31	0,34



c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	48,11	51,67	45,75	44,67	44,83
2	Persentase luas daerah yang terlayani oleh jaringan irigasi	%	11,19	11,73	12,42	13,12	14,00
3	Persentase rumah tangga bersanitasi dan memiliki air minum layak	%	77,63	79,92	80,09	79,54	80,69
4	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	97,31	97,31	97,31	97,31	97,31
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	43,49	47,02	27,33	32,97	33,47
6	Persentase jalan strategis desa terbangun	%	25,20	28,66	33,80	37,01	41,26
7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	25,42	26,64	28,20	29,80	31,79
8	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	%	75,76	79,92	80,09	79,54	80,69
9	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	%	77,63	79,47	79,47	72,84	73,37
10	Persentase pemanfaatan ruang wilayah perkotaan	%	N/A	5,42	5,43	81,47	81,47

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase infrastruktur perumahan dan permukiman layak	%	53,77	61,87	65,25	63,69	64,66

e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Satuan Pamong Praja

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase gangguan tantribun dan perlindungan masyarakat yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Tingkat tanggap (respons time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase desa tangguh bencana	%	8,40	16,80	16,80	21,00	25,20
2	Persentase penanganan pra bencana	%	100,00	100,00	103,00	100,00	100,00
3	Persentase penanganan keadaan darurat bencana	%	100,00	99,98	100,00	100,00	107,00
4	Persentase penanganan pasca bencana	%	65,00	65,00	65,00	65,00	66,00

f. Bidang Sosial

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang dilayani	%	N/A	N/A	N/A	41,57	76,37

❖ Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Bidang Tenaga Kerja

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase tenaga kerja lokal yang terampil dan produktif (bersertifikat)	%	4,17	4,86	5,21	5,56	5,46
2	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	1,48	1,91	2,33	2,75	3,18
3	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

b. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	15,00
2	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	N/A	N/A	0,09	0,08	0,11
3	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	N/A	N/A	100,00	88,00	100,00

c. Bidang Pertanahan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase luas lahan Pemda bersertifikat	%	N/A	3,50	7,67	9,19	10,04



d. Bidang Lingkungan Hidup

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	0	0	50,00	51,67	53,33

e. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	86,34	92,23	89,95
2	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	%	90,90	97,32	86,76	90,64	94,19
3	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	75,54	86,29	82,96	86,80	88,77
4	Rasio pasangan berakte nikah	%	48,04	51,88	53,85	63,13	64,39
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	N/A	N/A	N/A	32,68	37,42

f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase desa maju dan berkembang	%	N/A	56,25	62,50	73,21	75,00
2	Persentase Bumdes berkembang	%	N/A	45,00	58,00	20,95	23,76

g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Total fertility rate (TFR) / Angka Kelahiran Total	%	3,67	3,67	3,60	3,27	3,04
2	Indeks Pembangunan Keluarga	%	N/A	N/A	N/A	60,90	54,40
3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	63,20
4	Angka Prevalensi Kontarsepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	N/A	N/A	50,04	52,93	50,32
5	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (AFR 15-19)	%	N/A	N/A	0,87	18,50	20,30



h. Bidang Perhubungan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kualitas layanan perhubungan	%	N/A	N/A	N/A	34,96	33,98
2	Persentase angkutan barang dan penumpang yang layak fungsi	%	N/A	N/A	N/A	12,50	13,97
3	Persentase uji KIR angkutan barang dan penumpang	%	N/A	N/A	N/A	12,50	13,97
4	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	%	40,44	40,44	42,89	53,02	53,99

i. Bidang Komunikasi dan Informatika

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	84,14	84,14	99,90	98,84
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	N/A	N/A	N/A	76,76	100,00
4	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (IPPS)	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	1,34
5	Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

j. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	%	7,54	7,64	7,92	8,10	8,25
2	Persentase koperasi aktif eceran	%	85,15	79,59	84,72	84,73	84,73

k. Bidang Penanaman Modal

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	85,30	90,21	87,92	92,09
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah (Miliar)	N/A	119	788	906	1.242



I. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pemuda yang berprestasi	%	N/A	N/A	N/A	3,00	0,10
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	%	N/A	N/A	N/A	41,16	0,20
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	%	N/A	N/A	N/A	41,16	0,20
4	Persentase atlit yang mendapatkan medali dalam Kejurprov/Kejurda	%	36,64	36,64	41,67	57,65	21,62

m. Bidang Statistik

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	1,34

n. Bidang Persandian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

o. Bidang Perpustakaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	86,25	87,36	88,25	88,80	91,08
2	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan pertahun	Orang	969	908	3.794	3.390	2.667
3	Meningkatnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Buku	2.400	946	76.264	1.526	954

p. Bidang Kearsipan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah	%	N/A	N/A	N/A	9,90	13,64
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	9,09	18,18	27,27	38,64	52,27



❖ **Urusan Pemerintahan Pilihan**

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase produksi perikanan	%	-1,60	-45,30	12,90	2,64	7,98
2	Produksi perikanan laut	Ton	19.910	10.886	12.290	12.614	13.621
3	Produksi perikanan darat	Ton	8,20	9,90	12,60	13,80	18,40
4	Konsumsi ikan	kg/ perkapita/ Tahun	50,70	51,00	53,50	58,42	59,51

b. Bidang Pariwisata

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival budaya dan pariwisata	Festival	1	1	4	4	4
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Kawasan	6	6	7	9	17
3	Jumlah cagar budaya yang diinventarisasi	Jumlah	23	23	79	91	91
4	PDRB sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	Rp. (Miliar)	5,89	6,14	6,61	7,08	7,84
5	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	3.606	7.500	10.077	16.215	16.374
6	Rata-rata lama tinggal	Hari	4	4	4	4	4
7	Retribusi jasa usaha pariwisata	Rp. (Juta)	N/A	12,06	45,62	49,14	50,55
8	Destinasi wisata yang dikembangkan	Destinasi	5	6	16	17	20
9	Jumlah Desa Wisata	Desa	2	19	19	19	19
10	Jumlah pariwisata yang ber-CHSE	Jumlah	50	21	21	21	21

c. Urusan Pertanian

1) Pertanian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi sektor pertanian	Ton	152.058	153.364	159.547,10	161.768,59	156.134,07
2	Produksi sektor perkebunan	Ton	3.445,52	3.411,13	4.571,65	5.149,76	5.149,76
3	Persentase ketersediaan pangan utama	%	37,28	34,81	35,48	37,83	38,02

2) Peternakan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	1,04	2,14	4,22	3,26	3,16
2	Populasi ternak besar	ekor	94.783	93.903	97.877	99.548	101.251
3	Populasi ternak kecil	ekor	128.379	130.055	136.088	140.172	144.377
4	Populasi ternak unggas	ekor	97.432	103.486	107.310	112.675	118.310



d. Bidang Perdagangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	-6,13	3,59	7,29	5,19	5,02

e. Bidang Perindustrian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase laju pertumbuhan sektor perindustrian	%	-4,11	-5,68	4,45	9,13	7,23

f. Bidang Transmigrasi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase transmigran yang mandiri	%	31,28	36,91	42,54	48,17	53,80
2	Persentase transmigran lokal yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

❖ Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

1) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum dan kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase layanan penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2) Bagian Hukum

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase produk hukum daerah yang diharmonisasi dan diasistensi	%	N/A	92,00	99,09	94,17	166,00
2	Persentase fasilitasi bantuan hukum untuk penanganan Kasus perdata dan TUN pemerintah daerah	%	N/A	100,00	100,00	100,00	83,00
3	Persentase publikasi produk hukum daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	%	N/A	100,00	100,00	100,00	166,00



3) Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase capaian layanan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan fisik keuangan tepat waktu	%	N/A	90,57	93,00	98,11	98,04
3	Persentase BUMD yang sehat	%	N/A	85,00	90,00	98,00	100,00
4	Ketersediaan data potensi sumberdaya alam	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

4) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	Skor	N/A	34,61	30,57	36,16	36,66
2	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	N/A	28,40	17,30	14,01	14,51
3	Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	Skor	N/A	1,76	8,82	8,82	8,82
4	Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)	Skor	N/A	4,44	4,44	13,33	13,33

5) Bagian Organisasi

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOTK	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen ABK dan Anjab	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	%	100,00	100,00	100	100,00	100,00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	poin	78,74	88,10	87,63	85,00	90,22



6) Bagian Umum

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	89,10	75,34	88,00	100,00	92,16
2	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai standar keprotokolan	%	89,10	75,34	88,00	100,00	92,16

b. Sekretariat DPRD

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah	%	80,00	28,57	225,00	100,00	175,00
3	Persentase keputusan DPRD yang dihasilkan	%	180,00	106,00	180,00	180,00	170,00
4	Persentase rancangan peraturan daerah Inisiatif DPRD yang dihasilkan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

❖ Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai perencanaan kinerja SAKIP	Poin	16,93	17,24	18,66	19,01	20,42
2	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	80,00

b. Keuangan

1) Keuangan dan Aset

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penetapan APBD	Tepat waktu / Tidak Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Persentase pengelolaan aset daerah	%	73,91	74,79	75,19	75,38	75,65
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	8,34	6,11	3,10	6,14	5,16
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



2) Pendapatan Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan	%	4,43	4,22	3,02	3,78	3,92
2	Persentase Realisasi PAD	%	126,07	94,81	100,83	117,57	102,36

c. Kepegawaian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase cakupan pemenuhan jabatan pada perangkat daerah	%	92,21	93,74	97,78	93,23	86,19
2	Persentase tingkat disiplin ASN	%	99,42	99,58	99,81	99,93	99,73

d. Pendidikan dan Pelatihan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ASN yang lulus pendidikan dan pelatihan formal	%	92,60	93,75	96,67	74,35	92,86
2	Persentase ASN yang telah lulus pendidikan dan pelatihan struktural	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

e. Penelitian dan Pengembangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi rencana keliitbangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

❖ Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Temuan	18	17	6	6	9
2	Persentase evaluasi AKIP perangkat daerah	%	N/A	N/A	21,28	34,78	100,00
3	Level Maturitas SPIP	Level	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
4	Level Kapabilitas APIP	Level	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
5	Persentase Aparatur Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang profesional	%	N/A	N/A	N/A	76,00	76,00
6	Persentase TLHP APIP	%	N/A	N/A	N/A	76,00	75,00
7	Persentase TLHP BPK	%	N/A	N/A	N/A	71,76	75,33



❖ **Unsur Kewilayahan**

a. Kecamatan Lobalain

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	86,75	89,41	86,83
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

b. Kecamatan Rote Barat Laut

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	84,47	91,66	92,28
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	NA	NA	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	NA	NA	100,00

c. Kecamatan Rote Barat Daya

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	89,08	91,01
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d. Kecamatan Rote Barat

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	86,44	88,17
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00



e. Kecamatan Rote Selatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	90,00	88,83
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00

f. Kecamatan Rote Tengah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	89,19	87,78
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

g. Kecamatan Pantai Baru

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	78,14	86,67
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	N/A	N/A	85,00

h. Kecamatan Rote Timur

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	76,26	86,39
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00



i. Kecamatan Ndao Nuse

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	N/A	92,68	91,72
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	N/A	100,00	100,00	100,00

j. Kecamatan Landu Leko

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	84,47	85,58	87,83
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

k. Kecamatan Loaholu

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Poin	N/A	N/A	86,75	89,41	91,39
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00

❖ **Unsur Pemerintahan Umum**

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ormas/LSM/Yayasan yang dibina	%	N/A	N/A	N/A	67,74	24,55
2	Persentase peran potensi paham radikal dan konflik sosial budaya yang ditangani	%	N/A	N/A	N/A	100,00	100,00

2.1.4.5 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik. Realisasi indikator kinerja kunci perangkat daerah tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.70

Realisasi indikator kinerja kunci perangkat daerah tahun 2020 – 2024

❖ Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	60	57,33	90,15	77,68	86,59
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	N/A	83,43	96,04	86,19	83,86
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	N/A	55,17	86,06	70,71	67,74
4	Persentase Penduduk usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pensisipan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	N/A	50,50	64,13	271,54	14,68

b. Urusan Kesehatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	%	0,06	0,06	0,08	0,83	0,07
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Yang Terakreditasi	%	0	0	0	100,00	100,00
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	70,47	76,43	56,43	71,12	58,13
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	%	55,67	77,84	64,93	70,38	67,30
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	24,42	85,23	70,84	76,00	66,05
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	62,64	79,30	73,31	93,90	86,62
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	34,30	90,32	94,27	85,77	79,65
8	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	14,13	41,57	50,30	43,41	67,00
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	34,30	10,18	57,13	77,75	81,88



NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
10	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	14,13	18,49	20,10	23,11	84,14
11	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	20,98	30,37	23,28	30,51	51,62
12	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	88,11	151,30	162,71	163,86	129,48
13	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	%	39,56	42,48	48,89	49,62	47,40
14	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	%	64,79	143,84	124,71	124,11	125,96

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	2,80	2,94	2,15	1,72	0,57
2	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kab/Kota	%	77,63	79,47	0	72,84	73,37
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	75,76	79,92	80,09	79,54	80,69
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	48,11	51,67	58,00	44,67	44,83
5	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	3,91	5,21	6,08	6,08	6,09
6	Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ kota	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	N/A	18,91	18,90	16,95	12,25
3	Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	N/A	0	0,15	0,15	0,14

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamong Praja

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	N/A	20,00	20,00	20,00	20,00
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	N/A	70,00	52,00	83,33	90,91
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	N/A	10,60	7,70	7,70	7,09

2. Bencana

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	107,00



f. Urusan Sosial

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	%	N/A	12,56	25,83	5,53	8,61
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	88,29	6,73	90,83

❖ Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	6,00	6,48	6,40	5,56	0,136
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	150,25	146,87	135,89	0	119,64
3	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	28,00	31,77	30,90	30,90	21,09
4	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/kota	%	75,00	100,00	55,11	100,00	67,48

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%	N/A	1,73	3,34	0,05	3,69
2	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	%	0,09	0,08	0,11	0,06	0,13
3	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 penduduk perempuan	N/A	0,60	0,75	0,80	0,08



c. Urusan Pangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	37,28	34,81	35,48	37,83	38,02

d. Urusan Lingkungan Hidup

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	73,70	71,60	67,77	69,59	68,17
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	46,62	54,73	72,49	90,83	69,26
3	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	N/A	0	95,15	96,30	3,59

e. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Perekaman KTP Elektronik	%	N/A	90,90	84,95	84,98	94,19
2	Persentase Anak Usia 1-7 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	%	N/A	9,21	35,74	39,43	37,42
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	N/A	74,69	82,95	84,94	88,87
4	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	N/A	2,17	2,17	2,17	4,55

f. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	42,86	N/A	40,00	30,43	25,00
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	-	-	-	-	-

g. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	N/A	3,67	3,27	3,27	3,11
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	86,41	76,38	50,04	52,93	50,32
3	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang Tidak Terpenuhi (unmet need)	%	N/A	13,50	34,30	25,70	20,04



h. Urusan Perhubungan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	N/A	81,67	81,67	81,67	81,50
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	%	N/A	0,32	0,32	0,32	0,315

i. Urusan Komunikasi dan Informatika

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	-	-	-	-	-
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	-	-	-	-	-
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	-	75,02	74,39	72,20	84,84

j. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	N/A	20,69	22,16	22,16	19,70
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	N/A	5,63	5,48	5,48	4,60

k. Urusan Penanaman Modal

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	N/A	1.146,2	59,90	-84,96	86,00

l. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	N/A	0,07	0,07	0,07	58,00
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	N/A	0,21	0,21	0,20	85,00
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	N/A	N/A	N/A	N/A	16,00



m. Urusan Statistik

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	N/A	100,00	89,13	100,00	100,00
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	N/A	100,00	69,56	100,00	100,00

n. Urusan Persandian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	40,61

o. Urusan Perpustakaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	N/A	N/A	N/A	N/A	70,07
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	N/A	8,95	N/A	N/A	65,02

p. Urusan Kearsipan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	N/A	14,78	28,44	29,02	28,46
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	56,80

❖ **Urusan Pemerintahan Pilihan**

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah total produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	19.918,00	2.651,90	6.988,00	6.501,00	12.378,00



b. Urusan Pariwisata

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-96,17	-46,88	11.475,51	3,00	7,78
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	41,48	112,22	-36,72	115,00	-3,10
3	Tingkat hunian akomodasi	%	N/A	23,05	27,49	26,97	39,39
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	N/A	0,03	25,40	0,14	0,17

c. Urusan Pertanian

1. Pertanian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ Hektar	N/A	4,67	5,22	6,60	5,00

2. Peternakan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	N/A	-54,62	-5,85	-45,33	-56,00

d. Urusan Perdagangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	N/A	39,88	21,01	58,31	65,81
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	N/A	16,21	17,73	10,88	34,90

e. Urusan Perindustrian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	N/A	2,06	N/A	3,61	1,85
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	N/A	95,00	1,00	1,00	100,00



❖ Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Urusan Perencanaan dan Keuangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	11,25	13,35	8,46	31,53	13,46
2	Rasio PAD	%	37,55	0,96	3,02	3,77	2,21
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
4	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
5	Rasio belanja urusan Pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Level	N/A	64,67	80,79	57,73	40,69
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Urusan Pengadaan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	N/A	50,34	88,74	67,31	86,53
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	N/A	19,93	56,07	91,58	48,16
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	N/A	N/A	313,55	73,00	-6,48

c. Urusan Kepegawaian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N/A	412,27	81,60	83,26	74,41
2	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N/A	66,49	18,51	15,66	22,77
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	N/A	5,48	27,84	27,77	30,58



d. Urusan Manajemen Keuangan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-12,12	5,60	3,95	5,85	-0,29%
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	4,85	3,59	0,82	18,15	-3,47%
3	Manajemen aset	%	N/A	40,00	100,00	100,00	100,00
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	8,60	8,05	3,60	0,06	6,14

e. Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik

NO.	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	97,10	311,11	100,00	100,00	99,97
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	0,94	100,00

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah dan berhak diperoleh warga negara secara minimal. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 2/2018 dan regulasi terkait lainnya, SPM memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan layanan yang setara dan terstandarisasi di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, kesejahteraan sosial, dan perumahan. Pemenuhan SPM merupakan esensi dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Penerapan SPM diatur secara teknis dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, di mana di dalamnya mengatur jenis dan kualitas layanan dasar yang menjadi hak setiap warga negara Indonesia. Pemerintah menerapkan SPM berdasarkan antara lain pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Hasil penerapan SPM di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah seperti yang ditampilkan pada Grafik di bawah ini.



Tabel 2.71

Capaian SPM Untuk Tiap Jenis Layanan

NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)			
			2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan	1 Pendidikan Dasar Usia Dini	64,50	56,59	86,88	95,06
		2 Pendidikan Dasar	87,50	75,62	90,72	98,39
		3 Pendidikan Kesetaraan	75,60	68,20	90,60	98,46
2	Kesehatan	1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76,84	44,06	75,43	55,65
		2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	80,03	51,95	76,31	61,31
		3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	86,65	56,67	80,80	60,04
		4 Pelayanan Kesehatan Balita	73,09	58,65	89,83	80,43
		5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	76,26	75,42	81,30	56,04
		6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	58,11	40,25	46,35	64,08
		7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	11,66	45,70	79,26	79,19
		8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	33,50	16,09	29,85	91,85
		9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	10,08	18,63	40,06	54,64
		10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100,00	80,00	89,88	93,41
		11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	43,43	30,67	51,52	50,57
		12 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	98,45	80,00	95,29	100,00
3	Pekerjaan Umum	1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	69,60	0,00	90,00	100,00



NO	URUSAN	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN (%)			
			2021	2022	2023	2024
		2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	61,92	83,33	90,00	100,00
4	Perumahan Rakyat	1 Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	85,00	85,00	100,00	100,00
		2 Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	100,00	100,00
5	Trantibumlinmas	1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	N/A	43,33	95,14	93,33
		2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	N/A	80,00	94,70	95,00
		3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	N/A	80,00	83,03	90,00
		4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	N/A	80,00	97,98	6,34
		5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	N/A	80,00	93,60	96,97
6	Sosial	1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	N/A	81,33	81,82	86,15
		2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	N/A	81,33	82,00	88,33
		3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	N/A	82,67	45,00	46,69
		4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	N/A	0,00	0,00	0,00



Dari Tabel di atas, dapat terlihat bahwa rendahnya capaian SPM bidang sosial dipengaruhi oleh 2 layanan yaitu rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (46,69%) dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (0%), hal ini disebabkan karena gelandangan dan pengemis di luar panti belum ditemukan di wilayah Kabupaten Rote Ndao.

2.1.6 Kerjasama daerah

Dalam melaksanakan pembangunannya, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao membangun kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai lembaga. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi dan peluang pembangunan di berbagai sektor. Upaya kolaborasi dan kerja sama yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut.

Tabel 2.72

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan berbagai lembaga

NO	INSTITUSI/LEMBAGA	BIDANG /SEKTOR	PERIODE KERJA SAMA
1	Perkumpulan Pengembangan Inisiatif Advokasi Rakyat Nusa Tenggara Timur	Kesehatan	2022 - 2023
2	PT Bank Pembangunan Daerah NTT	Keuangan	2022 - 2027
3	Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (Garamin) NTT	Kesejahteraan Masyarakat	2022 - 2025
4	Universitas Persatuan Guru 1945 NTT	Pendidikan	2022 - 2024
5	Badan Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara	Teknologi	2022 - 2026
6	Koperasi Mitra Akhir Mandiri	Peternakan	2022 - 2027
7	Universitas Nusa Cendana	Pendidikan	2022 - 2027
8	Majelis Sinode GMIT	SDM	2022 - 2024
9	Fakultas Kedokteran Hewan Undana	Pendidikan	2022 - 2025
10	Universitas Terbuka	Pendidikan	2024 - 2029
11	Yayasan Seribu Cita Bangsa	Kesehatan (Stunting)	2024 - 2027
12	PT BPR Tanoba Lais Manekat	Perbankan	2024 - 2027
13	Kejaksaan Negeri Rote Ndao	Hukum	2024 - 2026
14	Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II	Kesehatan	2024 - 2027
15	PT Surga Marina Indonesia	Pembangunan	2023 - 2024
16	Surfaid Internasional	Kesehatan	2022 - 2025
17	BPPOM	Kesehatan/Obat dan Makanan	2023 - 2028

Kerja sama yang setiap Tahun diperbaharui MoU nya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.73

Kerjasama Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang sudah diperbaharui

NO	INSTITUSI/LEMBAGA	BIDANG /SEKTOR	PERIODE KERJA SAMA
1	BPJS Kesehatan	Kesehatan	Setiap Tahun
2	BPJS Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	Setiap Tahun



Dari 17 lembaga/institusi yang melaksanakan kerja sama, 15 lembaga telah berakhir kerja samanya, dan 2 lembaga yang masih melaksanakan kerja sama

2.1.7 Rencana pembangunan infrastruktur

A. APBN

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rote Ndao untuk periode 2025–2029 akan diarahkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang memprioritaskan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. Sebagai kabupaten paling selatan di Indonesia yang berbatasan langsung dengan Australia, Rote Ndao memiliki posisi strategis dan menjadi fokus dalam perencanaan pembangunan nasional. Fokus Pembangunan Infrastruktur di Rote Ndao Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

- Peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk mendukung konektivitas antarwilayah.
- Perbaikan dan pengembangan Bandara D.C. Saudale, yang sebelumnya telah mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan dukungan dari Kementerian Perhubungan

2. Pengembangan Kawasan Perbatasan

Sebagai bagian dari kawasan perbatasan, Rote Ndao akan mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertahanan dan keamanan nasional serta kesejahteraan masyarakat

3. Peningkatan Infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Lokal

- Pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung potensi wisata bahari dan budaya di Rote Ndao.
- Peningkatan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan perikanan sebagai basis ekonomi lokal

B. APBD provinsi

Pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di tingkat kabupaten seperti:

1. Pemeliharaan jalan provinsi yaitu Ruas Jalan Ba'a - Batutua yang berdampak strategis bagi pengembangan wilayah



2. Hibah keuangan atau bantuan khusus untuk proyek-proyek infrastruktur di kabupaten yang membutuhkan, terutama pada kabupaten yang memiliki keterbatasan fiskal.
3. Pembangunan sekolah menengah (SMA/SMK) yang merupakan kewenangan provinsi,
4. Program pembangunan infrastruktur yang bersifat lintas sektor, seperti pembangunan perumahan rakyat atau revitalisasi pasar.

2.1.8 Badan Usaha Milik Daerah Yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rote Ndao merupakan lembaga usaha yang dimiliki pemerintah daerah yang dibentuk untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah Kabupaten Rote Ndao. BUMD memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi daerah dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di kabupaten ini. Dua BUMD yang berperan penting di Rote Ndao adalah:

1. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum)

Bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat Rote Ndao. PDAM berperan vital dalam memastikan akses air bersih bagi penduduk di wilayah ini. Data BPS menunjukkan, pada tahun 2020 PDAM Rote Ndao mencatat jumlah pelanggan adalah sebesar 5.861 pelanggan, naik menjadi 6.792 pelanggan pada tahun 2022. Jumlah pemakaian Air Minum PDAM tercatat sebesar 4.081.068.500 unit pada Tahun 2021 naik menjadi 4.936.381.000 Unit pada Tahun 2022.

2. PD (Perusahaan Daerah) ITA ESA

PD ITA ESA merupakan salah satu BUMD Rote Ndao yang juga mendukung pelayanan publik di kabupaten ini. PD ITA ESA berperan dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah. Namun, sejak Tahun 2020, PD ITA ESA tidak beroperasi.

2.2 Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020 – 2024

A. Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan salah satu faktor strategis yang ikut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu untuk meningkatkan capaian pembangunan yang berkualitas juga perlu didukung fungsi perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang komprehensif. Potret kinerja keuangan pada waktu lalu



menjadi dasar dalam penentuan kerangka pendanaan kedepan. Oleh karena itu melihat kemampuan keuangan masa lalu adalah penting untuk perencanaan pembangunan yang realistis.

Kinerja keuangan daerah masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kapasitas fiskal yang dimiliki, tingkat ketergantungan fiskal, realisasi belanja, keterkaitan antara aspek perencanaan dan penganggaran serta bagaimana penyelenggaraan pengelolaan kas yang telah dilakukan, dimana menampilkan gambaran bagaimana keuangan daerah yang tersedia dapat menjamin likuiditas dan pemanfaatan unsur pembiayaan secara efektif dan efisien.

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencakup 3 (tiga) aspek keuangan daerah yaitu pendapatan, belanja dan pembiayaan. [~] Sejumlah rasio pendapatan, belanja dan pembiayaan ditampilkan untuk ^φ mendapatkan bagaimana wujud pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rote Ndao kurun waktu 2020-2024. Perkembangan APBD tersebut dapat ^g dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.74

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 – 2024

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	32.683.328.390,45	31.511.204.366,82	24.189.482.297,00	33.885.585.638,59	34.098.348.873,68
	Pajak Daerah	7.866.751.680,50	7.295.753.984,05	11.165.927.823,00	15.934.199.650,70	19.254.375.291,99
	Retribusi Daerah	9.823.578.666,00	7.738.476.195,00	5.486.843.025,00	7.612.877.375,00	7.518.540.354,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.283.847.348,35	6.347.141.404,00	3.920.741.531,00	7.132.456.526,00	3.755.363.280,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.709.150.695,60	10.129.832.783,77	3.615.969.918,00	3.206.052.086,89	3.570.069.947,69
	B. PENDAPATAN TRANSFER	690.051.872.685,41	687.613.381.142,00	744.438.850.855,00	854.349.477.695,00	829.066.162.017,00
	Transfer Pemerintah Pusat	552.319.930.617,00	567.081.097.751,00	623.618.977.040,00	708.357.093.249,00	678.046.028.880,00
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	108.362.083.000,00	106.456.783.000,00	98.578.052.000,00	107.810.890.000,00	127.569.205.000,00
	Transfer Antar Daerah	29.369.859.068,41	14.075.500.391,00	17.404.189.815,00	21.430.098.446,00	23.450.928.137,00
	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.912.200.000,00	28.416.383.347,43	32.067.393.516,95	7.186.330.104,00	6.155.310.414,30
	Pendapatan Hibah	30.912.200.000,00	91.969.347,43	20.628.091,95	28.605.877,00	213.254.685,30
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	28.324.414.000,00	32.046.765.425,00	7.157.724.227,00	5.940.055.729,00
	JUMLAH PENDAPATAN	753.647.401.075,86	747.540.968.856,25	800.695.726.668,95	895.421.393.437,59	869.319.821.304,98
2	BELANJA					
	A. BELANJA OPERASI	452.886.584.051,99	480.445.415.408,51	511.901.906.714,05	517.439.019.579,73	582.664.244.546,55
	Belanja Pegawai	301.973.718.756,00	279.191.863.455,00	286.229.161.198,00	290.635.690.990,00	341.227.696.755,00
	Belanja Barang dan Jasa	145.862.357.295,99	192.804.493.164,51	216.805.591.727,05	203.443.748.164,73	206.106.268.384,55
	Belanja Hibah	4.550.508.000,00	5.610.553.789,00	7.450.653.789,00	22.759.580.425,00	35.230.279.407,00
	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	2.838.505.000,00	1.416.500.000,00	600.000.000,00	100.000.000,00
	B. BELANJA MODAL	127.698.586.508,36	105.810.657.251,00	156.236.433.484,00	182.700.144.208,00	125.988.888.811,50
	Belanja Modal Tanah	1.683.569.900,00	-	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.172.510.613,20	18.703.962.914,00	31.035.410.792,00	28.662.841.889,00	18.786.391.695,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.090.424.271,28	25.276.757.114,00	28.309.558.041,00	41.754.600.518,00	36.377.117.554,50
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	49.305.986.523,88	59.758.354.399,00	95.939.001.903,00	110.801.545.523,00	69.195.557.134,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.446.095.200,00	2.071.582.824,00	952.462.748,00	1.481.156.278,00	1.629.822.428,00



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	C. BELANJA TIDAK TERDUGA	13.053.547.350,00	13.991.825.796,00	524.831.500,00	886.938.096,00	325.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	13.053.547.350,00	13.991.825.796,00	524.831.500,00	886.938.096,00	325.000.000,00
	D. BELANJA TRANSFER	150.392.895.400,00	151.205.749.201,00	144.766.444.630,00	154.621.155.794,00	158.626.806.907,00
	Belanja Bagi Hasil	1.120.631.000,00	1.316.095.201,00	1.429.878.630,00	1.789.251.994,00	2.368.134.718,00
	Belanja Bantuan Keuangan	149.272.264.400,00	149.889.654.000,00	143.336.566.000,00	152.831.903.800,00	156.258.672.189,00
	JUMLAH BELANJA	744.031.613.310,35	751.453.647.656,51	813.429.616.328,05	855.647.257.677,73	867.604.940.265,05
	SURPLUS/DEFISIT	9.615.787.765,51	(3.912.678.800,26)	(12.733.889.659,10)	39.774.135.759,86	1.714.881.039,93
3.	PEMBIAYAAN DAERAH					
	A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	62.201.201.572,53	65.295.521.391,36	50.304.725.000,85	27.317.749.314,49	56.279.527.625,42
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	62.200.157.372,53	65.295.271.391,36	50.207.842.591,10	27.070.835.341,75	56.279.527.625,42
	Koreksi Saldo Awal	0,00	0,00	96.882.409,75	246.913.972,74	312.357.448,93
	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	1.044.200,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	5.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	56.701.201.572,53	54.795.521.391,36	39.804.725.000,85	16.817.749.314,49	45.779.527.625,42
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	66.316.989.338,04	50.882.842.591,10	27.070.835.341,75	56.591.885.074,35	47.494.408.665,35

Sumber : BKAD Kab.Rote Ndao tahun 2025



Pendapatan daerah merupakan total penerimaan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pendapatan merupakan faktor penting dan mutlak diperlukan. Pendapatan daerah juga menggambarkan tentang kapasitas fiskal dan derajat otonomi fiskal suatu daerah. Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir realisasi pendapatan daerah fluktuatif dimana pada tahun 2021 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020, kemudian mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023 dan kembali menurun pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan tahun 2020-2024 adalah 1,59%. Sumber pendapatan yang paling dominan adalah pendapatan transfer dengan proporsi sekitar 93% dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan daerah masih tinggi terhadap pemerintah pusat.

Belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Selama periode 2020-2024 rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 1,47%. Pada Tabel 3.1 menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja daerah kurun waktu 2020-2024 terus mengalami peningkatan. Peningkatan realisasi belanja ini seiring dengan kebijakan pendanaan dalam pemenuhan kebutuhan belanja daerah. Capaian kinerja serapan APBD setiap tahun terus meningkat dengan capaian rata-rata diatas 90%. Meskipun demikian terdapat beberapa kendala yang menyebabkan serapan tidak mencapai 100% diantaranya adalah perubahan peraturan dan Juknis serta Juklak dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan penyerapan DAU, DAK dan DBHCHT, serta perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyebabkan banyaknya peralihan kewenangan dari daerah ke pusat.

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi penerimaan pembiayaan daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dengan perkembangan yang fluktuatif. Pengeluaran pembiayaan adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dalam kurun waktu 2020 – 2024 pengeluaran pembiayaan daerah menunjukkan peningkatan yang digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.



SILPA dalam kurun waktu 2020 – 2024 mengalami kenaikan di tahun 2021 dibandingkan dengan dengan tahun 2020, kemudian menurun pada 3 (tiga) berikutnya, dan naik pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu perhatian serius dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal penyerapan anggaran belanja daerah.

B. Neraca Daerah

Neraca daerah adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai kondisi aset, kewajiban dan ekuitas suatu pada waktu tertentu. Posisi neraca daerah menjadi salah satu faktor penentu dalam perumusan kebijakan daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah 3 (tiga) komponen neraca daerah didefinisikan sebagai berikut:

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah;
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah

Kinerja neraca daerah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.75
Neraca Daerah Tahun 2020 – 2024

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1	ASET					
	A. ASET LANCAR	80.626.696.557,70	78.486.799.784,85	57.921.619.012,45	80.241.370.371,36	63.250.144.250,54
	Kas	66.363.520.200,04	50.087.437.783,10	34.553.807.163,75	56.221.149.400,78	47.404.259.043,56
	Piutang Pendapatan	4.503.254.373,11	9.508.569.986,11	13.116.810.502,39	13.393.498.310,87	7.057.789.329,87
	Piutang Lainnya	3.216.449.866,00	2.637.579.866,00	2.610.378.275,00	2.610.378.275,00	2.610.378.275,00
	Penyisihan Piutang	-6.100.866.476,29	-6.371.469.510,06	-6.482.010.013,84	-6.819.185.449,69	-8.036.336.904,34
	Persediaan	12.644.338.594,84	22.624.681.659,70	14.122.633.085,15	14.835.529.834,40	14.214.054.506,45
	B. INVESTASI JANGKA PANJANG	60.356.448.079,00	71.137.409.657,00	80.763.885.136,00	91.499.961.235,00	103.273.786.347,00
	Investasi Jangka panjang non permanen	-	-	-	-	-
	Dana Bergulir	5.684.064.012,00	5.683.814.012,00	5.683.814.012,00	5.683.814.012,00	5.683.814.012,00
	Penyisihan Dana bergulir Tidak Tertagih	-5.684.064.012,00	-5.683.814.012,00	-5.683.814.012,00	-5.683.814.012,00	-5.683.814.012,00
	Investasi Jangka panjang Permanen	60.356.448.079,00	71.137.409.657,00	80.763.885.136,00	91.499.961.235,00	103.273.786.347,00
	Penyertaan Modal Pemda	60.356.448.079,00	71.137.409.657,00	80.763.885.136,00	91.499.961.235,00	103.273.786.347,00
	C. ASET TETAP	1.395.679.384.479,75	1.392.054.330.498,25	1.455.142.456.250,95	1.544.695.918.035,29	1.556.074.274.009,17
	Tanah	159.313.409.426,12	161.762.034.526,12	161.762.034.526,12	161.574.875.323,12	161.574.875.323,12
	Peralatan dan Mesin	311.678.353.049,71	326.409.733.261,51	357.932.771.679,51	384.747.446.716,35	403.458.228.391,35
	Gedung dan Bangunan	536.739.817.816,13	538.078.688.085,46	576.431.058.768,85	629.315.624.017,48	663.630.532.720,98
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.068.373.001.640,31	1.118.182.267.983,31	1.214.859.410.160,4	1.327.532.806.526,88	1.395.788.035.675,88
	Aset Tetap Lainnya	31.121.837.326,00	31.666.102.726,00	31.883.468.184,00	32.187.162.050,00	32.992.894.578,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	627.887.546,00	10.167.906.675,00	126.500.000,00	4.003.432.984,60	3.465.077.733,60
	Akumulasi Penyusutan	-712.174.922.324,52	-794.212.402.759,15	-887.852.787.067,93	-994.665.429.583,14	-1.104.835.370.413,76



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	D. ASET LAINNYA	74.758.504.672,77	81.771.267.651,43	54.345.959.605,32	53.976.257.260,23	54.211.981.622,14
	Tagihan Jangka Panjang	3.697.423.124,18	4.657.338.487,06	0,00	0,00	0,00
	Kemitraan Dengan Pihak Kedua/Ketiga	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
	Aset Tak Berwujud	800.770.000,00	800.770.000,00	800.770.000,00	800.770.000,00	800.770.000,00
	Akumulasi Amortisasi	-640.770.000,00	-672.770.000,00	-704.770.000,00	-736.770.000,00	-768.770.000,00
	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	-	-	-	-	-
	Aset Lain-lain	79.190.789.670,39	95.049.492.028,59	68.227.637.749,39	65.603.320.173,44	68.146.969.630,91
	Akumulasi Penyusutan	-8.379.708.121,80	-18.153.562.864,22	-14.067.678.144,07	-11.781.062.913,21	-14.056.988.008,77
	JUMLAH ASET	1.611.421.033.789,22	1.623.449.807.591,53	1.648.173.920.004,72	1.770.413.506.901,88	1.766.810.186.228,85
2.	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	1.371.052.227,67	3.215.249.120,00	10.078.188.892,33	2.742.106.939,70	10.328.447.932,94
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.318.362,00	4.595.192,00	7.482.971.822,00	48.054.149,43	134.820.855,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	206.734.416,67	202.734.416,67	148.433.333,33	107.066.666,67	194.183.333,34
	Utang Belanja	91.620.986,00	329.253.678,00	46.783.737,00	186.986.123,60	7.599.443.744,60
	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.070.378.463,00	2.678.831.500,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.371.052.227,67	3.215.249.120,00	10.078.188.892,33	2.742.106.939,70	10.328.447.932,94
3.	EKUITAS					
	Ekuitas	1.610.049.981.561,55	1.620.234.558.471,53	1.638.095.731.112,39	1.767.671.399.962,18	1.766.481.738.295,91
	JUMLAH EKUITAS	1.610.049.981.561,55	1.620.234.558.471,53	1.638.095.731.112,39	1.767.671.399.962,18	1.766.481.738.295,91
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.611.421.033.789,22	1.623.449.807.591,53	1.648.173.920.004,72	1.770.413.506.901,88	1.766.810.186.228,85

Sumber : BKAD Kab. Rote Ndao tahun 2025



Dari Tabel di atas terlihat bahwa aset pemerintah Kabupaten Rote Ndao periode 2020-2024 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,85%. Jumlah aset pemerintah Kabupaten Rote Ndao didominasi oleh aset tetap, kemudian diikuti oleh investasi jangka panjang, aset lancar dan aset lainnya. Perkembangan kewajiban daerah dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan di atas 90%. Kewajiban berupa utang pemerintah daerah yang belum diselesaikan pada tahun 2024 didominasi oleh utang belanja, diikuti oleh utang jangka pendek lainnya, utang pendapatan diterima dimuka dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). Ekuitas yang menggambarkan jumlah kekayaan bersih pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, kemudian menurun pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan 2,39%. Penurunan ekuitas pada tahun 2024 dipengaruhi oleh jumlah kewajiban yang meningkat pada tahun berkenaan..

2.2.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara umum diarahkan untuk kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui pungutan pajak, retribusi daerah termasuk di dalamnya optimalisasi aset daerah serta pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat dengan prinsip keadilan dan kewajaran. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.

Pendapatan daerah tahun 2026-2030 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, capaian kinerja tahun 2020-2024 dan penetapan tahun 2025. Pendapatan Asli Daerah yang sebagian besar masih ditopang dari sektor pajak daerah diproyeksikan dengan mendasarkan pada realisasi penerimaan tahun 2024, tren realisasi penerimaan 5 tahun terakhir dan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan



Pemerintah Daerah (UU HKPD) membawa konsekuensi adanya penurunan PAD pada tahun 2025 khususnya karena adanya ketentuan mengenai opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang menggantikan skema bagi hasil pajak daerah. Dengan seiring optimisme atas pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional maka pada tahun 2026 pajak daerah kembali diproyeksikan meningkat. Proyeksi Pendapatan Transfer dihitung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta dengan mempertimbangkan pada tren realisasi pendapatan dan tren alokasi dana transfer mulai dari tahun 2020 hingga 2024.

Berdasarkan data realisasi penerimaan pendapatan selama kurun waktu 5 (lima tahun) sebelumnya terlihat bahwa ketergantungan pemerintah Kabupaten Rote Ndao sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Proporsi pendapatan transfer dalam kurun waktu 2020-2024 secara rata-rata mencapai 90%. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan pengelolaan keuangan daerah salah satunya bersumber dari rendahnya kemampuan pendapatan asli daerah (PAD), adanya alokasi jenis belanja yang kurang produktif, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak efisien dan efektif, serta pengelolaan administrasi yang belum optimal. Proyeksi pendapatan daerah tahun 2025-2030 dijabarkan pada tabel berikut:



Tabel 2.76
Proyeksi Pendapatan Daerah

NO.	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	APBD TAHUN	PROYEKSI TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN							
	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.099.657.720,68	42.526.420.488,00	45.555.129.165,00	48.743.988.206,55	53.130.947.145,14	58.444.041.859,65	64.872.886.464,22
	Pajak Daerah	19.254.375.291,99	23.582.445.376,00	28.167.025.309,00	30.351.785.296,85	33.664.235.276,37	37.876.621.703,26	41.644.119.467,83
	Retribusi Daerah	7.518.540.354,00	10.353.993.319,00	10.347.113.319,00	10.647.113.319,00	10.947.113.319,00	11.195.861.751,64	12.920.052.751,16
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.755.363.280,00	6.555.871.256,00	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	6.050.000.000,00	6.655.000.000,00	7.320.500.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.571.378.794,69	2.034.110.537,00	2.040.990.537,00	2.245.089.590,70	2.469.598.549,77	2.716.558.404,75	2.988.214.245,22
	B. PENDAPATAN TRANSFER	829.066.162.017,00	743.706.036.333,00	800.302.141.512,00	840.317.248.587,60	882.333.111.016,98	926.449.766.567,83	972.772.254.896,22
	Transfer Pemerintah Pusat	678.046.028.880,00	724.079.547.166,00	784.356.856.000,00	823.574.698.800,00	864.753.433.740,00	907.991.105.427,00	953.390.660.698,35
	Transfer Antar Daerah	151.020.133.137,00	19.626.489.167,00	15.945.285.512,00	16.742.549.787,60	17.579.677.276,98	18.458.661.140,83	19.381.594.197,87
	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.154.001.567,30	13.111.432.703,00	7.459.794.000,00	7.832.783.700,00	8.224.422.885,00	8.635.644.029,25	9.067.426.230,71
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	6.154.001.567,30	13.111.432.703,00	7.459.794.000,00	7.832.783.700,00	8.224.422.885,00	8.635.644.029,25	9.067.426.230,71
	JUMLAH PENDAPATAN	869.319.821.304,98	799.343.889.524,00	853.317.064.677,00	896.894.020.494,15	943.688.481.047,12	993.529.452.456,73	1.046.712.567.591,15

Sumber: BKAD Kab. Rote Ndao tahun 2025, diolah.



Guna pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 - 2030 dilakukan upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pada semua sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, serta memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan dan akurasi data potensi daerah untuk meningkatkan PAD;
2. Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi sistem;
3. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan pemerintah pusat, provinsi dan OPD penghasil;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
6. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
7. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
8. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah;
9. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Selain komponen PAD, pembangunan di Kabupaten Rote Ndao juga ditopang oleh komponen Transfer Keuangan Daerah (TKD). Komponen TKD tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa arahan untuk pemanfaatan APBD sejalan dengan arahan dan kebijakan atas belanja pusat. Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 memberikan dampak pada belanja Kementerian/Lembaga termasuk yang dilaksanakan di daerah. Kriteria pembatasan dan efisiensi belanja pada tahun 2025 tersebut tentu akan menjadi acuan pada pola belanja tahun berikutnya dan mempengaruhi proyeksi belanja pada tahun 2026-2030.

Belanja daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2026-2030 utamanya diarahkan pada pencapaian tujuan daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan melalui pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah yang dijabarkan dalam program prioritas. Program prioritas dimaksud harus memiliki hubungan langsung dengan kepentingan



publik, bersifat strategis, lintas sektor, memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Arah kebijakan belanja daerah tahun 2026-2030 diarahkan pada prioritas sebagai berikut:

1. Pemenuhan belanja yang bersifat *mandatory spending* antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengawasan;
2. Pemenuhan belanja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari 6 (enam) urusan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Pemenuhan program prioritas yang tertuang dalam penjabaran visi dan misi RPJMD Tahun 2025-2029;
4. Penyelesaian permasalahan dan isu strategis daerah
5. Dukungan terhadap prioritas nasional

Sebagaimana arah kebijakan belanja daerah tersebut diatas, maka struktur belanja daerah Kabupaten Rote Ndao tahun 2026-2030 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan alokasi gaji dan tunjangan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan ASN yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai termasuk belanja pegawai untuk PPPK dan CPNS, dan juga memperhitungkan jumlah pegawai yang pension, naik pangkat serta penyesuaian tambahan penghasilan pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan guna pencapaian tujuan dan sasaran prioritas daerah dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas;
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk dukungan pelaksanaan pilkada serentak, partai politik, instansi vertikal dalam



- rangka menjaga kondusifitas wilayah serta pembinaan kepemudaan dan olahraga;
- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan.
 2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah dan batas minimal kapitalisasi asset. Belanja Modal diantaranya untuk penyelesaian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana;
 3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yaitu:
 - 1) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
 4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa) meliputi:
 - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa;



- b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja daerah tahun 2027 diproyeksikan akan mengalami pengurangan yang cukup besar dibandingkan dengan tahun 2026, karena pada tahun 2027 sampai dengan tahun 2030 tidak dilakukan pinjaman daerah, sehingga ada pengurangan belanja dengan besaran sekitar pinjaman daerah untuk infrastruktur yang dilakukan pada tahun 2026. Disisi lain, tetap terdapat kenaikan belanja terkait pemenuhan pelayanan publik kepada Masyarakat dan pemenuhan kebijakan pusat. Pada akhir tahun perencanaan, dialokasikan dana cukup besar pada Belanja Hibah dan Bantuan Keuangan untuk memenuhi kebutuhan terkait pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini mengakibatkan terjadi penurunan pada komponen belanja lainnya. Proyeksi Belanja Daerah tahun 2026-2030 sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini:



Tabel 2.77
Proyeksi Belanja Daerah

NO.	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	APBD TAHUN 2025	PROYEKSI TAHUN				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	BELANJA							
	A. BELANJA OPERASI	582.664.244.546,55	631.635.617.030,00	599.753.770.269,81	628.654.720.187,49	658.330.065.427,14	689.541.351.841,82	722.843.637.359,85
	Belanja Pegawai	341.227.696.755,00	429.967.209.534,00	482.660.761.050,00	506.793.799.102,50	532.133.489.057,63	558.740.163.510,51	586.677.171.686,03
	Belanja Barang dan Jasa	206.106.268.384,55	189.881.262.738,00	102.459.686.579,00	107.582.670.907,95	112.961.804.453,35	118.609.894.676,02	124.540.389.409,82
	Belanja Bunga	-	411.068.494,00	3.007.246.376,81	2.652.173.913,04	1.608.695.652,17	565.217.391,30	-
	Belanja Hibah	35.230.279.407,00	10.876.076.264,00	11.126.076.264,00	11.126.076.264,00	11.126.076.264,00	11.126.076.264,00	11.126.076.264,00
	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	B. BELANJA MODAL	125.988.888.811,50	99.020.789.952,35	131.947.606.043,80	94.449.698.899,79	111.568.814.213,11	130.198.499.208,04	163.122.807.085,30
	Belanja Modal Tanah	-	400.000.000,00	-	-	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.786.391.695,00	15.656.938.840,00	13.239.367.937,22	12.930.533.980,00	14.930.533.980,00	12.930.533.980,00	12.930.533.980,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.377.117.554,50	14.496.121.500,00	47.892.875.948,58	14.078.521.500,00	27.078.521.500,00	32.078.521.500,00	32.078.521.500,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.195.557.134,00	64.604.403.062,35	66.952.035.608,00	63.577.316.869,79	65.696.432.183,11	81.326.117.178,04	114.250.425.055,30
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.629.822.428,00	3.863.326.550,00	3.863.326.550,00	3.863.326.550,00	3.863.326.550,00	3.863.326.550,00	3.863.326.550,00
	C. BELANJA TIDAK TERDUGA	325.000.000,00	533.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000
	Belanja Tidak Terduga	325.000.000,00	533.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000
	D. BELANJA TRANSFER	158.626.806.907,00	151.946.123.146,00	151.946.123.146,00	151.946.123.146,00	151.946.123.146,00	151.946.123.146,00	151.946.123.146,00
	Belanja Bagi Hasil	2.368.134.718,00	3.214.236.746,00	3.214.236.746,00	3.214.236.746,00	3.214.236.746,00	3.214.236.746,00	3.214.236.746,00
	Belanja Bantuan Keuangan	156.258.672.189,00	148.731.886.400,00	148.731.886.400,00	148.731.886.400,00	148.731.886.400,00	148.731.886.400,00	148.731.886.400,00
	JUMLAH BELANJA	867.604.940.265,05	846.838.298.189,35	886.947.499.459,61	878.350.542.233,28	925.145.002.786,25	974.985.974.195,86	1.041.212.567.591,15
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.714.881.039,93	(47.494.408.665,35)	(33.630.434.782,61)	18.543.478.260,87	18.543.478.260,87	18.543.478.260,87	5.500.000.000,00

Sumber : BKAD Kab. Rote Ndao, Tahun 2025, diolah



Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Persoalan utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam aspek pembiayaan adalah bagaimana meningkatkan investasi daerah yang dapat berkontribusi terhadap kenaikan pendapatan, optimalisasi pemanfaatan SILPA, dana cadangan dan peluang pinjaman daerah untuk membiayai program prioritas dan Pembangunan infrastruktur dengan sebaik mungkin. Dengan demikian, pembiayaan daerah Kabupaten Rote Ndao 5 (lima) tahun ke depan diarahkan pada

1. Memberikan peluang untuk dilakukannya investasi yang akan mendatangkan pendapatan bagi daerah;
2. Menciptakan pembiayaan anggaran dengan resiko rendah dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah meliputi:
 - a. Dana SILPA
 - b. Dana pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur
3. Mengembangkan pola kerja sama dan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan model sharing pendanaan baik dari pusat, LSM/NGO, dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dan skema pendanaan dari sumber dana lainnya yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Menjadikan penyertaan modal pemerintah sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD dan BUMDES.

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, menyadari akan tantangan dan kebutuhan dalam membiayai pembangunan di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya fiskal dari APBD Kabupaten Rote Ndao, pilihan pinjaman daerah menjadi alternatif yang dapat memberikan solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik.



Pinjaman daerah dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pengelolaannya, pemerintah daerah wajib memperhatikan beberapa prinsip dasar, seperti penggunaan pinjaman untuk kegiatan investasi yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Perencanaan pinjaman daerah dapat menjadi langkah strategis guna mengatasi keterbatasan pembiayaan dalam pembangunan, terutama untuk proyek-proyek yang memiliki dampak strategis dan signifikan bagi perkembangan daerah. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao pada tahun 2026 merencanakan melakukan pinjaman daerah sebesar Rp.50.000.000.000, diharapkan melalui pinjaman daerah ini dapat memberikan kontribusi positif dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao.



Tabel 2.78
Proyeksi Pembiayaan Daerah

NO.	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	APBD TAHUN	PROYEKSI TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	PEMBIAYAAN							
	A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.279.527.625,42	47.494.408.665,35	50.000.000.000,00	-	-	-	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	56.279.527.625,42	47.494.408.665,35	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		-	50.000.000.000,00	-	-	-	-
	B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.500.000.000,00	-	16.369.565.217,39	18.543.478.260,87	18.543.478.260,87	18.543.478.260,87	5.500.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	10.500.000.000,00	-	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah (Pokok Utang)	-	-	10.869.565.217,39	13.043.478.260,87	13.043.478.260,87	13.043.478.260,87	-
	PEMBIAYAAN NETTO	45.779.527.625,42	47.494.408.665,35	33.630.434.782,61	-18.543.478.260,87	-18.543.478.260,87	-18.543.478.260,87	-5.500.000.000,00
	SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	47.494.408.665,35	0	0	0	0	0	0

Sumber: BKAD Kab. Rote Ndao tahun 2025, diolah



Berdasarkan uraian di atas, maka proyeksi kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2026 – 2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.79
Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan

NO.	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	APBD TAHUN	PROYEKSI TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	PENDAPATAN							
	A. PENDAPATAN ASLI DAERAH	34.099.657.720,68	42.526.420.488,00	45.555.129.165,00	48.743.988.206,55	53.130.947.145,14	58.444.041.859,65	64.872.886.464,22
	Pajak Daerah	19.254.375.291,99	23.582.445.376,00	28.167.025.309,00	30.351.785.296,85	33.664.235.276,37	37.876.621.703,26	41.644.119.467,83
	Retribusi Daerah	7.518.540.354,00	10.353.993.319,00	10.347.113.319,00	10.647.113.319,00	10.947.113.319,00	11.195.861.751,64	12.920.052.751,16
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.755.363.280,00	6.555.871.256,00	5.000.000.000,00	5.500.000.000,00	6.050.000.000,00	6.655.000.000,00	7.320.500.000,00
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.571.378.794,69	2034110537	2.040.990.537,00	2.245.089.590,70	2.469.598.549,77	2.716.558.404,75	2.988.214.245,22
	B. PENDAPATAN TRANSFER	829.066.162.017,00	743.706.036.333,00	800.302.141.512,00	840.317.248.587,60	882.333.111.016,98	926.449.766.567,83	972.772.254.896,22
	Transfer Pemerintah Pusat	678.046.028.880,00	724.079.547.166,00	784.356.856.000,00	823.574.698.800,00	864.753.433.740,00	907.991.105.427,00	953.390.660.698,35
	Transfer Antar Daerah	151.020.133.137,00	19.626.489.167,00	15.945.285.512,00	16.742.549.787,60	17.579.677.276,98	18.458.661.140,83	19.381.594.197,87
	C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.154.001.567,30	13.111.432.703,00	7.459.794.000,00	7.832.783.700,00	8.224.422.885,00	8.635.644.029,25	9.067.426.230,71
	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	6.154.001.567,30	13.111.432.703,00	7.459.794.000	7.832.783.700,00	8.224.422.885,00	8.635.644.029,25	9.067.426.230,71
	JUMLAH PENDAPATAN	869.319.821.304,98	799.343.889.524,00	853.317.064.677,00	896.894.020.494,15	943.688.481.047,12	993.529.452.456,73	1.046.712.567.591,15
2	BELANJA							
	A. BELANJA OPERASI	582.664.244.546,55	631.635.617.030,00	599.753.770.269,81	628.654.720.187,49	658.330.065.427,14	689.541.351.841,82	722.843.637.359,85
	Belanja Pegawai	341.227.696.755,00	429.967.209.534,00	482.660.761.050,00	506.793.799.102,50	532.133.489.057,63	558.740.163.510,51	586.677.171.686,03
	Belanja Barang dan Jasa	206.106.268.384,55	189.881.262.738,00	102.459.686.579,00	107.582.670.907,95	112.961.804.453,35	118.609.894.676,02	124.540.389.409,82
	Belanja Bunga	-	411.068.494,00	3.007.246.376,81	2.652.173.913,04	1.608.695.652,17	565.217.391,30	-
	Belanja Hibah	35.230.279.407,00	10.876.076.264,00	11.126.076.264,00	11.126.076.264,00	11.126.076.264,00	11.126.076.264,00	11.126.076.264,00
	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO.	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	APBD TAHUN	PROYEKSI TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	B. BELANJA MODAL	125.988.888.811,50	62.723.558.013,35	131.947.606.043,80	94.449.698.899,79	111.568.814.213,11	130.198.499.208,04	163.122.807.085,30
	Belanja Modal Tanah	-	400.000.000,00	-	-	-	-	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.786.391.695,00	15.656.938.840,00	13.239.367.937,22	12.930.533.980,00	14.930.533.980,00	12.930.533.980,00	12.930.533.980,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.377.117.554,50	14.496.121.500,00	47.892.875.948,58	14.078.521.500,00	27.078.521.500	32.078.521.500,00	32.078.521.500,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	69.195.557.134,00	28.307.171.123,35	66.952.035.608,00	63.577.316.869,79	65.696.432.183,11	81.326.117.178,04	114.250.425.055,30
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.629.822.428,00	3.863.326.550,00	3.863.326.550,00	3.863.326.550,00	3.863.326.550,00	3.863.326.550,00	3.863.326.550,00
	C. BELANJA TIDAK TERDUGA	325.000.000,00	533.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000
	Belanja Tidak Terduga	325.000.000,00	533.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000	3.300.000.000
	D. BELANJA TRANSFER	158.626.806.907,00	151.946.123.146,00	151.946.123.146,00	151.946.123.146,00	151.946.123.146,00	151.946.123.146,00	151.946.123.146,00
	Belanja Bagi Hasil	2.368.134.718,00	3.214.236.746,00	3.214.236.746,00	3.214.236.746,00	3.214.236.746,00	3.214.236.746,00	3.214.236.746,00
	Belanja Bantuan Keuangan	156.258.672.189,00	148.731.886.400,00	148.731.886.400,00	148.731.886.400,00	148.731.886.400,00	148.731.886.400,00	148.731.886.400,00
	JUMLAH BELANJA	867.604.940.265,05	846.838.298.189,35	886.947.499.459,61	878.350.542.233,28	925.145.002.786,25	974.985.974.195,86	1.041.212.567.591,15
	SURPLUS / (DEFISIT)	1.714.881.039,93	(47.494.408.665,35)	-33.630.434.782,61	18.543.478.260,87	18.543.478.260,87	18.543.478.260,87	5.500.000.000,00
3	PEMBIAYAAN							
	A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN	56.279.527.625,42	47.494.408.665,35	50.000.000.000,00	-	-	-	-
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	56.279.527.625,42	47.494.408.665,35	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	-	-	50.000.000.000,00	-	-	-	-
	B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	16.369.565.217,39	18.543.478.260,87	18.543.478.260,87	18.543.478.260,87	5.500.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	10.500.000.000,00	-	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00
	Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah	10.500.000.000,00	-	10.869.565.217,39	13.043.478.260,87	13.043.478.260,87	13.043.478.260,87	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	47.494.408.665,35	33.630.434.782,61	-18.543.478.260,87	-18.543.478.260,87	-18.543.478.260,87	-5.500.000.000,00
	SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	45.779.527.625,42	0	0	0	0	0	0

Sumber: BKAD Kab. Rote Ndao tahun 2025, diolah



2.3 Permasalahan Dan Isu Strategis

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa mendatang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

A. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah tidak terlepas dari hasil kinerja indikator makro daerah. Berdasarkan hasil kinerja indikator makro daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, maka permasalahan pokok pembangunan sebagai berikut:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia:
3. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah
4. Belum optimalnya pelayanan infrastruktur berkelanjutan
5. Belum optimalnya pembangunan berbasis GEDSI yang menyumbang tingginya angka kemiskinan dan pengangguran

B. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan tiap urusan pembangunan daerah sebagai berikut:



a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Rendahnya aksesibilitas dan tata kelola mutu pendidikan SD dan SMP;
- b. Belum semua lembaga PAUD memiliki sarana dan Prasarana yang memadai;
- c. Kurangnya kualitas sumber daya manusia tenaga kependidikan;
- d. Kurangnya akses pendidikan non-formal;
- e. Belum ada sekolah berbasis keunggulan lokal (keunggulan di bidang teknologi atau seni)

2. Kesehatan

- a. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka kematian balita (AKABA);
- b. Sarana dan prasarana kesehatan masih kurang;
- c. Kurangnya tenaga kesehatan berkualitas (Rasio dokter per 1000 penduduk: 0,2);
- d. Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- e. Belum optimalnya pelayanan kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik;
- b. Belum optimalnya layanan jaringan irigasi kabupaten;
- c. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Cakupan rumah tinggal bersanitasi belum optimal;
- e. Cakupan rumah tangga dengan akses air minum layak belum optimal;
- f. Belum optimalnya pengelolaan drainase perkotaan;

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih rendahnya cakupan rumah layak huni;
- b. Masih adanya permukiman kumuh;
- c. Masih terbatasnya penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik;
- d. Masih luasnya lahan kritis;

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

- a. Rendahnya cakupan penanganan pelanggaran ketertiban, ketenteraman dan keindahan (K3).

✓
✓
✓



- b. Belum optimalnya penanganan bencana kebakaran dan kekeringan;
 - c. Belum optimalnya cakupan pelaksanaan penegakan perda (%).
 - 6. Bencana
 - a. Masih kurangnya desa tangguh bencana;
 - b. Belum optimalnya upaya pencegahan bencana alam;
 - c. Belum optimalnya penanganan pasca bencana;
 - 7. Sosial
 - a. Belum optimalnya pemberdayaan dan penanganan PMKS;
 - b. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pemberian jaminan sosial kepada PMKS.
 - c. Kelompok rentan belum dipenuhi hak-haknya secara optimal.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**
- 1. Tenaga Kerja
 - a. Masih kurangnya media informasi ketenagakerjaan;
 - b. Belum tersedianya BLK;
 - c. Masih rendahnya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat;
 - d. Minimnya pelatihan tenaga kerja berbasis industri;
 - e. Masih kurangnya SDM tenaga kerja dalam pemanfaatan teknologi.
 - 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Masih adanya kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - b. Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Masih rendahnya persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.
 - 3. Pangan
 - a. Belum optimalnya capaian pola pangan harapan;
 - b. Belum optimalnya pengawasan pembinaan dan keamanan pangan.
 - 4. Pertanahan
 - a. Masih rendahnya luas lahan bersertifikat.
 - b. Belum optimalnya penataan bidang tanah yang menjadi aset Pemda.

✓
4
9



5. Lingkungan Hidup
 - a. Masih beroperasinya TPA/TPST secara terbuka (open dumping);
 - b. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan;
 - c. Masih kurangnya volume sampah tertangani; dan
 - d. Rendahnya ruang terbuka hijau.
 - e. Pengelolaan sampah masih rendah (Pengelolaan Sampah: 69,26%);
 - f. Ancaman abrasi pantai (Wilayah Pesisir Terdampak: 30 km);
 - g. Belum optimalnya konservasi lingkungan dan satwa endemik;
6. Kependudukan dan Catatan Sipil
 - a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - b. Masih rendahnya pasangan berakte nikah;
 - c. Masih rendahnya persentase kepemilikan kartu identitas anak.
7. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana kantor desa;
 - b. Masih banyak masyarakat yang perlu diberdayakan baik secara kapasitas, ekonomi dan sosial;
 - c. Masih rendahnya Bumdes berkembang;
 - d. Masih kurangnya jumlah desa maju.
 - e. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan secara langsung.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian kependudukan dan keluarga berencana (KB);
 - b. Rendahnya rasio akseptor KB;
 - c. Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.
9. Perhubungan
 - a. Belum tersedianya sarana dan prasarana uji KIR;
 - b. Belum maksimalnya alat kelengkapan jalan
 - c. Belum terpenuhinya standar keselamatan transportasi;
 - d. Minimnya fasilitas transportasi publik di daerah terpencil.
10. Komunikasi dan Informatika
 - a. Infrastruktur jaringan komunikasi dan informatika belum optimal;
 - b. Indeks keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan;



- c. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih perlu ditingkatkan;
 - d. Hanya 30% layanan publik sudah terdigitalisasi;
 - e. Belum meratanya jaringan internet (Desa dengan akses internet: 60%).
11. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
- a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat;
 - b. Masih rendahnya modal usaha koperasi;
 - c. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro Kecil (UMK) baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;
 - d. Belum optimalnya pengembangan UMKM (Jumlah UMKM aktif: 1.250);
 - e. Belum adanya kebijakan ekonomi hijau.
12. Penanaman Modal
- a. Masih rendahnya investasi berskala nasional;
 - b. Belum berperannya investasi dalam sistem perekonomian dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Masih kurangnya promosi investasi untuk menarik minat investor;
 - d. Kurangnya investasi sektor swasta.
13. Kepemudaan dan Olahraga
- a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga;
 - b. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan keolahragaan;
14. Statistik
- a. Belum optimalnya penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan data/statistik daerah.
 - b. Belum semua perangkat daerah terintegrasi dalam Rote Satu Data
15. Persandian
- Belum optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan data dan informasi daerah.
16. Kebudayaan
- a. Belum optimalnya pembinaan seni dan budaya tradisional.
 - b. Masih perlunya pembinaan, perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan cagar budaya.



17. Perpustakaan

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana perpustakaan daerah;
- b. Akses layanan perpustakaan belum optimal;
- c. Rendahnya minat baca masyarakat.

18. Kearsipan

- a. Rendahnya sumber daya pengelola kearsipan baik secara kuantitatif maupun kualitatif
- b. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi kearsipan.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Pariwisata.

- a. Rendahnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan;
- b. Belum optimalnya pengelolaan destinasi wisata;
- c. Rendahnya promosi wisata;
- d. Masih kurangnya sarana dan prasarana di destinasi wisata;
- e. Masih rendahnya SDM kepariwisataan
- f. Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD.

2. Pertanian.

- a. Kurangnya sarana prasarana pendukung pertanian;
- b. Penggunaan teknologi budidaya pertanian dan penganekaragaman produk pengolahan hasil pertanian yang belum memadai;
- c. Kurangnya pengembangan produk unggulan.
- d. Kurang kuota subsidi pupuk.
- e. Masih rendahnya penggunaan pupuk organik
- f. SDM petani masih perlu ditingkatkan .

3. Kelautan dan Perikanan.

- a. Belum optimalnya hasil produksi dan pengolahan hasil perikanan;
- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi perikanan.
- c. Masih rendahnya ketersediaan sarana prasarana perikanan tangkap dan budidaya.
- d. Belum berkembangnya perikanan budidaya.
- e. Rendahnya Cakupan Bina Kelompok Nelayan.

4. Perdagangan.

- a. Belum optimalnya pembinaan kelompok pedagang/usaha informal.



- b. Belum optimalnya penggunaan teknologi oleh pedagang dalam memasarkan produk.

5. Perindustrian

- a. Belum optimalnya pembinaan kelompok pengrajin;
- b. Belum optimalnya pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) produk unggulan daerah.
- c. Belum memadainya sarana dan prasarana industri.

6. Transmigrasi.

- a. Terbatasnya ketrampilan para transmigran yang ditempatkan di lokasi transmigrasi;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana transmigrasi lokal.

d. Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

- a. Pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
- b. Pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan administrasi pembangunan masih perlu ditingkatkan;
- c. SDM pengelola barang dan jasa masih perlu ditingkatkan.

2. Sekretariat DPRD

Penetapan Perda agar sesuai dengan yang direncanakan dan tepat waktu.

e. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1. Perencanaan

- a. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data;
- b. Belum optimalnya penyelarasan dan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja.
- c. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja yang berorientasi hasil/manfaat untuk masyarakat.
- d. Belum optimalnya kapasitas dan profesionalitas SDM Perencana.

2. Keuangan

- a. Masih banyak Perangkat Daerah dalam menyerap/merealisasikan anggaran kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah disusun;
- b. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah;



c. Pendataan aset-aset yang belum tersertifikasi.

3. Kepegawaian

- a. Kurangnya jumlah sumber daya manusia ASN pada semua perangkat daerah;
- b. Kurangnya kualitas dan kompetensi ASN;
- c. Belum optimalnya pengembangan Sumber Daya Manusia ASN;
- d. Belum optimalnya pengembangan karier ASN pada jabatan fungsional;
- e. Belum optimalnya disiplin dan kinerja ASN.

4. Penelitian dan Pengembangan

- a. Masih rendahnya sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan daerah;
- b. Rendahnya kelitbangan yang dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan RPD/RPJMD;
- c. Rendahnya inovasi perangkat daerah; dan
- d. Belum adanya regulasi daerah terkait riset dan inovasi daerah.

5. Pengawasan

- a. Masih rendahnya Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP B.
- b. Persentase Tindak lanjut hasil temuan APIP dan BPK masih perlu ditingkatkan.
- c. Level maturitas SPIP dan kapabilitas APIP masih perlu ditingkatkan.

f. Urusan Kewilayahan

1. Kecamatan

- a. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan masih perlu ditingkatkan.
- b. Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

g. Urusan Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Pembinaan politik, kesatuan bangsa dan kewaspadaan dini masih perlu ditingkatkan. ✓
- b. Pembinaan Ormas/LSM masih perlu ditingkatkan. ✓



2. Non Urusan

- a. Layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan
- b. Masih rendahnya persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah

C. Permasalahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah:

1. Menghapus Kemiskinan;
2. Mengakhiri Kelaparan;
3. Kesehatan yang baik dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan Bermutu;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air bersih dan Sanitasi;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Mengurangi Ketimpangan;
11. Kota dan Komunitas yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Menjaga Ekosistem Laut;
15. Menjaga Ekosistem Darat;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang kuat;
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Kondisi dari luar sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan ditempuh serta kondisi pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah. Kondisi ini tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dan dimanfaatkan peluang yang ditimbulkan. Kondisi dari luar pada umumnya berlaku Regional, Nasional, bahkan Internasional dan berdimensi



waktu panjang. Beberapa kondisi dari luar yang diperkirakan berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

A. Isu Strategis Global

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan hidup, hukum dan tata kelola. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau tertinggal (*No-one Left Behind*). SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 220 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran SDGs berkomitmen untuk melaksanakan Agenda 2030 dengan tujuan untuk menggalakkan upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian SDGs, perlu adanya penyelerasan dengan RPJPN, RPJMN, RPJPD dan RPJMD.

Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- a) Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun
- b) Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
- c) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
- d) Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.



- e) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
- f) Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
- g) Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
- h) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
- i) Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan.
- j) Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
- k) Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
- l) Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
- m) Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
- n) Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
- o) Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
- p) Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
- q) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

2. Tantangan Pembangunan Global dan Domestik

Kondisi global kian kompleks. Penyusunan rencana pembangunan memang tidak bisa lepas dari tantangan global dan tantangan global ini tidak lepas daripada berbagai persoalan yang ada di dunia.

- a) **Perubahan Iklim (peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana).**

Perubahan iklim peningkatan suhu global yang terus meningkat, cuaca ekstrem dan diikuti dengan bencana tidak hanya terjadi di



Indonesia, tapi juga di dunia. Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca di Bumi, yang sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana. Proses ini mengakibatkan pemanasan global, di mana suhu rata-rata Bumi meningkat. Dampak dari pemanasan ini tidak hanya terasa dalam peningkatan suhu, tetapi juga mempengaruhi pola cuaca, menyebabkan peristiwa cuaca ekstrem seperti hujan lebat, kekeringan, dan badai yang lebih parah.

Selain itu, perubahan iklim berkontribusi pada peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Misalnya, pencairan es di kutub dan peningkatan permukaan laut berdampak pada daerah pesisir yang rentan, mengakibatkan banjir dan kehilangan habitat. Akibatnya, perubahan iklim menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan manusia, mempengaruhi ketahanan pangan, kesehatan, dan ekonomi di berbagai belahan dunia.

b) Dunia semakin proteksionis (meningkatnya proteksionisme mendorong ketidakpastian terhadap perdagangan global).

Proteksionisme yang meningkat pada tataran global seperti ini mengakibatkan ketidakpastian ekspor sebagian barang-barang dari Indonesia ke luar negeri. Konsep dunia yang semakin proteksionis merujuk pada kecenderungan negara-negara untuk melindungi industri domestik mereka dengan cara menerapkan kebijakan perdagangan yang lebih ketat, seperti tarif, kuota, dan pembatasan impor. Hal ini sering kali dilakukan untuk menjaga lapangan kerja dan mendukung perekonomian lokal, namun pada gilirannya dapat menciptakan ketidakpastian bagi perdagangan global. Ketika negara-negara meningkatkan proteksionisme, hal ini dapat mengganggu rantai pasokan internasional, memperlambat pertumbuhan perdagangan, dan mendorong konflik dagang, yang semua berkontribusi pada ketidakstabilan ekonomi di berbagai belahan dunia.

Dalam konteks kebijakan Amerika Serikat (AS), langkah-langkah seperti pengurangan atau penghentian bantuan luar negeri melalui program seperti USAID dapat memperparah situasi ini. Dengan berkurangnya dukungan ekonomi terhadap negara-negara berkembang, risiko meningkatnya kemiskinan dan ketidakstabilan politik di wilayah tersebut menjadi nyata. Selain itu, keputusan ini



juga dapat menciptakan jarak antara AS dan negara-negara yang sebelumnya bergantung pada bantuan tersebut, berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketegangan dalam hubungan internasional, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya isolasionisme dan proteksionisme di tingkat global.

c) Disrupsi teknologi (teknologi akan menggantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini).

Disrupsi teknologi merujuk pada perubahan besar dalam cara suatu industri beroperasi, terutama yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi yang cepat. Dalam konteks pekerjaan, disrupsi ini sering kali diidentikkan dengan otomatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan yang dapat menggantikan tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Menurut berbagai studi, diperkirakan bahwa hingga 40% pekerjaan yang ada saat ini berisiko tergantikan oleh teknologi dalam dekade mendatang. Hal ini menciptakan tantangan bagi angkatan kerja, yang perlu beradaptasi dengan keterampilan baru dan mempersiapkan diri untuk jenis pekerjaan yang akan muncul di masa depan.

Di sisi lain, meskipun banyak pekerjaan yang terancam, disrupsi teknologi juga membuka peluang baru. Teknologi tidak hanya menggantikan pekerjaan, tetapi juga menciptakan jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak ada, seperti di bidang pengembangan perangkat lunak, analisis data, dan pengelolaan sistem kecerdasan buatan. Oleh karena itu, penting bagi individu dan organisasi untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan perubahan ini, mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterampilan dan berinovasi agar tetap relevan dalam dunia kerja yang terus berkembang.

Dalam kondisi sekarang ini kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menyerap dan mengadopsi teknologi itu begitu kuatnya begitu cepatnya sehingga ini bukan hanya menjadi tantangan semata, tetapi seharusnya ini juga peluang mulai dari teknologi yang paling sederhana dalam pengolahan barang-barang pertanian, pengolahan barang-barang tambang, pengolahan barang-barang yang sifatnya juga sangat sederhana bisa meningkatkan nilai tambah karena faktor hilirisasi yang intinya adalah adopsi teknologi adopsi teknologi untuk mengolah barang-barang supaya barang-barang punya nilai tambah. Nilai tambah



tersebut ada di daerah karena industri juga ada di daerah sehingga ini bukan menjadi tantangan, tapi seharusnya menjadi peluang yang harus ditangkap oleh para pimpinan daerah.

Di sisi lain, Revolusi industri 5.0 merupakan tahap evolusi terbaru dalam perkembangan industri dan teknologi, yang merupakan kelanjutan dari Revolusi Industri 4.0. Revolusi ini ditandai dengan adopsi teknologi digital seperti *Internet of Things (IoT)*, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), big data, dan robotika dalam proses produksi dan manufaktur. Revolusi Industri 5.1 melampaui konsep otomatisasi dan digitalisasi yang diperkenalkan Revolusi Industri 4.1, di mana dalam Revolusi Industri 5.0 menekankan kembali peran manusia dalam produksi dan mempromosikan keterlibatan manusia dalam bekerja dengan system otomatis dan kecerdasan buatan. Tujuan utama dari Revolusi Industri 5.0 adalah untuk menciptakan lingkungan produksi yang manusiawi, dimana teknologi dan manusia bekerja secara sinergis untuk mencapai efisiensi, kreatifitas, dan inovasi yang lebih besar.

Revolusi industri 5.0 juga membuka peluang baru untuk pengembangan produk dan layanan yang lebih personal, peningkatan efisiensi dalam manufaktur, dan pemecahan masalah yang lebih adaptif dan responsive terhadap perubahan pasar dan lingkungan. Hal ini juga menimbulkan tantangan baru terkait pengelolaan dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab serta penyesuaian dalam Pendidikan dan ketrampilan kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi era baru ini.

d) Eskalasi geopolitik dan geoekonomi (memunculkan fragmentasi dan kekuatan baru)

Eskalasi geopolitik dan geoekonomi merujuk pada peningkatan ketegangan dan persaingan antara negara-negara dalam konteks politik dan ekonomi global. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan fragmentasi hubungan internasional yang disebabkan oleh kebangkitan kekuatan baru, seperti Tiongkok dan India, yang menantang dominasi negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat. Konsep ini mencakup penggunaan kekuatan militer, diplomasi, dan strategi ekonomi untuk mencapai tujuan nasional, seringkali menyebabkan terbentuknya blok-blok kekuatan yang terpisah dan menciptakan ketidakpastian di tingkat global.



Fragmentasi ini juga terlihat dalam persaingan untuk sumber daya, perdagangan, dan teknologi, di mana negara-negara berusaha untuk mengamankan kepentingan mereka sendiri sambil mengisolasi lawan. Geoekonomi, di sisi lain, menekankan penggunaan instrumen ekonomi seperti sanksi, investasi, dan perjanjian perdagangan untuk mendapatkan keunggulan strategis. Hal ini menghasilkan lanskap global yang semakin kompleks, di mana aliansi tradisional dapat terguncang dan negara-negara beradaptasi dengan realitas baru untuk mempertahankan posisi mereka dalam tatanan global yang terus berubah.

Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, Eropa dan negara-negara sedang berkembang. Tambahan pula dengan adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal. Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital outflow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (*tax policy*) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, di mana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan komposisi pertumbuhan ekonominya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah.

Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50% transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus



ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecenderungan (trend) ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships* (TPP), *ASEAN Regional Forum* (ARF), *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), *East Asia Summit* (EAS), serta *Expand ASEAN Maritime Forum* (EAMF).

e) Demografi global.

Demografi global merujuk pada studi tentang populasi dunia, termasuk ukuran, distribusi, dan perubahan populasi dari waktu ke waktu. Konsep ini mencakup berbagai aspek, seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, kelahiran, kematian, dan komposisi usia serta gender. Data demografi digunakan untuk menganalisis tren dan pola yang dapat mempengaruhi keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan di tingkat global. Misalnya, pertumbuhan populasi yang cepat di beberapa negara dapat menyebabkan tantangan dalam penyediaan sumber daya, kesehatan, dan pendidikan, sementara negara dengan populasi yang menua mungkin menghadapi masalah terkait pensiun dan tenaga kerja.

Perubahan demografi global juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, globalisasi, dan kebijakan pemerintah. Urbanisasi, misalnya, menyebabkan perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke perkotaan, yang berdampak pada kebutuhan infrastruktur dan layanan publik. Selain itu, globalisasi membawa pergeseran dalam pola migrasi, di mana banyak individu mencari peluang ekonomi di negara lain. Memahami demografi global sangat penting untuk pengembangan kebijakan yang efektif dan perencanaan sumber daya untuk menanggapi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Data dari badan PBB (United Nations) tahun 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2050 yang akan datang penduduk dunia akan meningkat menjadi 9,7 miliar dan porsi lansia meningkat sebanyak 55% di Asia. Peningkatan jumlah penduduk yang luar biasa ini tidak hanya menjadi tantangan kita, tetapi juga peluang kita. Penduduk selalu membutuhkan barang dan jasa, penduduk juga membutuhkan



makanan, pakaian barang-barang yang dipakai untuk kehidupan. Ini adalah kesempatan. Sejarah menunjukkan sejak kita merdeka kalau dunia sedang susah justru peluang ada. Tahun 1950-an dan 1960-an pada waktu dunia sedang kesulitan makanan, kesulitan bahan baku, dan barang dan jasa terutama di bidang pertanian, Indonesia justru mendapat manfaat. Demikian juga pada tahun 1998 saat krisis moneter tulis moneter yang berkepanjangan menyebabkan kesulitan tetapi karena ekspor yang pada waktu itu sangat kuat di bidang pertanian dan perkebunan maka Indonesia mendapatkan manfaat dari hasil ekspor pertanian dan perkebunan.

f) Keterbukaan Pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016.

Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia dan bahkan Nusa Tenggara Timur ke depan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipasinya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga dunia, yang merupakan potensi untuk pasar komoditas utama MEA, dan menjadikan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Namun di sisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

Hal yang paling berat adalah tantangan pembangunan yang ada di Indonesia. Data OECD tahun 2023 dan hasil PISA 2022 menempatkan skor PISA Indonesia masih rendah. Skor sains, matematika dan membaca justru menurun dari tahun 2018 ke 2022 pada setiap komponen sehingga menunjukkan kondisi yang sangat tertinggal dibandingkan dengan kondisi negara-negara OECD dan beberapa negara kita di ASEAN. Indonesia hanya lebih tinggi sedikit dibandingkan Timor Leste, namun jauh tertinggal di bawah Singapura.

Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia juga tidak terlalu baik. Kualitas SDM Indonesia masih relatif rendah. Menurut World Bank Database tahun 2025, Indeks Modal Manusia (IMM) Indonesia (0,54) sedikit di atas Timor Leste (0,45), tetapi masih sangat jauh tertinggal dari Singapura (0,88). Selain itu hasil Survei Kesehatan Indonesia



(SKI) pada tahun 2023 dan Long Form Sensus Penduduk (LFSP) tahun 2010 menunjukkan bahwa stunting (21,5%), angka kematian ibu (189 per 100.000 kelahiran hidup) dan angka kematian bayi (16,85 per 1000 kelahiran hidup) masih tinggi di Indonesia.

Demikian kondisi ekonomi di Indonesia juga dalam kondisi sangat tidak baik. Indonesia terjebak dalam pendapatan kelas menengah selama 30 tahun dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnan selama 20 tahun terakhir.

Sehubungan dengan perkembangan kinerja pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah di Indonesia pada tahun 2024 sebagian besar masih dikontribusikan oleh kawasan barat Indonesia. Namun kondisi perekonomian Indonesia Timur menunjukkan tanda-tanda yang baik. Indikator makro lain menunjukkan kondisi yang beragam di setiap wilayah dimana tingkat kemiskinan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia masih terkonsentrasi di kawasan Timur Indonesia sedangkan tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini yang tinggi terkonsentrasi justru di wilayah Jawa.

B. Isu Strategis Nasional

1. Transformasi Sosial: Peningkatan Kualitas Layanan Dasar

Berfokus pada pemenuhan layanan dasar yang berkualitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tantangannya meliputi tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), stunting, obesitas, serta prevalensi penyakit menular seperti TB dan kusta. Kualitas dan pemerataan fasilitas kesehatan dan tenaga medis masih menjadi kendala. Di sektor pendidikan, masalah utamanya adalah ketidakmerataan akses dan rendahnya kualitas, yang berdampak pada produktivitas dan daya saing lulusan. Sementara itu, perlindungan sosial masih menghadapi kendala akurasi data bantuan sosial yang rendah, ancaman bencana dan dampak perubahan iklim, serta kurangnya inklusivitas bagi kelompok rentan.

2. Transformasi Ekonomi: Hilirisasi, Inovasi, dan Produktivitas

Peningkatan produktivitas ekonomi melalui hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), penguatan riset dan inovasi, serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Arah pembangunan ekonomi mencakup industrialisasi,



modernisasi dan digitalisasi pertanian, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan UMKM dan Koperasi, serta pengembangan IPTEK. Penerapan ekonomi hijau dan biru, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pengembangan perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan juga menjadi prioritas.

3. Transformasi Tata Kelola: Kelembagaan Efektif dan Kolaboratif

Menciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Tujuannya adalah membangun kelembagaan yang tepat fungsi dan kolaboratif, meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), menciptakan regulasi yang efektif, mendigitalkan pelayanan publik, meningkatkan integritas partai politik, dan memberdayakan masyarakat sipil. Hal ini krusial untuk memastikan berjalannya transformasi sosial dan ekonomi secara optimal.

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang berkeadilan, stabilitas nasional, dan ketangguhan diplomasi. Tujuannya adalah menjamin keselamatan bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah, serta memperkuat peran Indonesia di kancah internasional. Kebebasan sipil, hak-hak politik, kesetaraan sosial-ekonomi-politik, dan partisipasi publik juga menjadi fokus, didukung oleh kesinambungan fiskal dan stabilitas harga.

5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi

Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai fondasi pembangunan. Ini mencakup penguatan agama sebagai landasan moral, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat. Aspek ekologi meliputi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kemandirian pangan, energi, dan air melalui pendekatan FEW Nexus (Food, Energy, Water), serta pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim berbasis karakteristik pulau

6. Transformasi Sistem Pangan

sektor pangan sebagai pilar ekonomi dan ketahanan nasional. Tantangan geopolitik dan perubahan iklim global berdampak pada stabilitas pasokan, kualitas, keamanan, dan akses pangan. Transformasi



sistem pangan bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan resiliensinya, memastikan kemampuan produksi pangan dalam berbagai skenario, serta memberikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang optimal melalui investasi dan inovasi berkelanjutan.

7. Transformasi Energi Baru Terbarukan

Upaya Indonesia dalam transisi energi dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai komitmen Paris Agreement. Meskipun potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) sangat besar, realisasi bauran EBT masih jauh dari target. Pemerintah terus berkomitmen dalam pengembangan EBT, namun diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target bauran energi nasional dan mengintegrasikan EBT secara signifikan dalam sistem energi.

C. Isu Strategis Provinsi

Isu strategis Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :

1. Transformasi Sosial: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesenjangan

Mewujudkan masyarakat NTT yang sejahtera, adil, dan kohesif melalui peningkatan kualitas hidup manusia di seluruh siklus. Ini mencakup perbaikan mutu dan akses pendidikan, serta optimalisasi pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. Selain itu, pembangunan Gender, Equality, Disability, dan Social Inclusion (GEDSI) yang belum optimal juga menjadi perhatian.

Upaya yang dilakukan meliputi:

- Kesehatan: Mengatasi stunting, penyakit endemi (malaria), meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas kesehatan, serta menekan angka kematian ibu, bayi, balita, dan gizi buruk.
- Pendidikan: Meningkatkan mutu dan angka partisipasi sekolah (termasuk disabilitas), angka melanjutkan sekolah, rata-rata lama sekolah, kualitas vokasional, akreditasi SMA/SMK, digitalisasi pendidikan, dan SPM sektor pendidikan.
- Perlindungan Sosial: Menurunkan angka kemiskinan, mengoptimalkan pembangunan GEDSI, memperluas perlindungan sosial bagi PMKS, mengoptimalkan cakupan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, meningkatkan akurasi data intervensi, memberdayakan kelompok miskin, menyediakan fasilitas umum ramah GEDSI, dan mengurangi rumah tidak layak huni.



2. Transformasi Ekonomi: Peningkatan Produksi Sektor Primer dan Hilirisasi

Peningkatan produksi dan produktivitas sektor primer (pertanian, peternakan, perikanan) untuk mendukung hilirisasi dan ketahanan pangan. Tantangannya meliputi belum maksimalnya transformasi ekonomi daerah, belum terbangunnya ketahanan pangan yang tangguh, serta belum optimalnya infrastruktur dan pelayanan dasar.

Arah transformasi ekonomi mencakup:

- Sektor Primer: Mengubah pola pertanian subsisten menjadi komersial, mengadopsi teknologi, memperkuat sentra produksi dan pengolahan, memperbaiki insentif pasar, memastikan ketersediaan sarana prasarana (pupuk, benih, irigasi), menangani hama penyakit, dan memperkuat ketahanan terhadap perubahan iklim.
- Hilirisasi dan Industri: Memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dari komoditas unggulan NTT (padi, mete, kopi, kakao, jagung, babi, sapi, rumput laut, perikanan tangkap, garam) untuk mendukung pengembangan industri pengolahan serta pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. Transformasi Tata Kelola: Efektivitas, Akuntabilitas, dan Profesionalisme Birokrasi

Agenda penting ini bertujuan meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan profesionalisme pengelolaan birokrasi, didukung oleh penguatan kemampuan fiskal daerah, kualitas ASN, regulasi yang efektif, pelayanan publik, manajemen talenta, dan keberlanjutan pembangunan.

Upaya yang dilakukan meliputi:

- Fiskal Daerah: Mengoptimalkan pengelolaan PAD, mengembangkan investasi pengelolaan keuangan daerah, dan memperkuat pengelolaan aset daerah.
- Pelayanan Publik: Meningkatkan akses layanan digital, pelayanan berbasis kepuasan pelanggan, dan inovasi pelayanan publik.
- Manajemen Talenta: Mengoptimalkan pengembangan SDM birokrasi berbasis manajemen talenta.
- Keberlanjutan Pembangunan: Mengintegrasikan proses bisnis perencanaan, penganggaran, akuntabilitas kinerja, pemantauan, dan evaluasi.



4. **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Daerah**

Peningkatan stabilitas makro untuk mewujudkan kesinambungan fiskal dan stabilitas ekonomi daerah. Ini dicapai melalui kerja kolaborasi hexa helix dan penguatan birokrasi yang efektif, akuntabel, dan profesional, termasuk kemampuan fiskal, kualitas ASN, regulasi, pelayanan publik, dan manajemen talenta.

5. **Sosial, Budaya dan Ekologi**

Fokus strategis ini mencakup aspek ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai landasan pembangunan berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui:

- Energi: Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
- Keseimbangan Lingkungan: Penguatan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi yang bertumpu pada keseimbangan alam dan lingkungan.
- Mitigasi Risiko: Penanganan perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kebencanaan.

Semua tantangan pembangunan di NTT ini selaras dengan isu-isu Global, Nasional, dan Regional, serta memerlukan sinergi dan kolaborasi produktif dari berbagai pihak (hexa helix) untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

D. **Isu Strategis Kabupaten**

Perumusan Isu strategis Kabupaten Tahun 2025-2029 berdasarkan isu strategis global, nasional, provinsi, Isu RPJPD, Isu KLHS RPJMD dan dipadukan dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih sebagai berikut:

1. **Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih**

Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih, akan memberikan rasa nyaman dan menentramkan bagi semua pihak. Dalam pelaksanaannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan produktif kepada Masyarakat dengan menerapkan prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, keadilan, efektifitas, efesiensi, kuntabilitas dan memberikan pelayanan publik lebih optimal.



2. Peningkatan Infrastruktur wilayah yang Tangguh dan berkelanjutan

Isu peningkatan Infrastruktur wilayah yang Tangguh dan berkelanjutan fokus pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, infrastruktur transportasi, pemenuhan sarana dan prasarana dasar, penyediaan fasilitas umum, infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana.

3. Peningkatan Sumber daya manusia yang unggul

Isu peningkatan sumber daya manusia yang unggul melalui penyediaan akses dan layanan akses Pendidikan dan Kesehatan untuk seluruh lapisan Masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan usia harapan hidup, peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan perlindungan keluarga.

4. Peningkatan Perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rote Ndao yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Kabupaten Rote Ndao. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan dan pariwisata.

5. Peningkatan kesejahteraan sosial Masyarakat

Isu Peningkatan kesejahteraan sosial Masyarakat ke depan adalah bagaimana menurunkan angka kemiskinan secara efektif dan efisien. Berdasarkan kondisi tersebut, penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara utuh mempertimbangkan empat prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif, yaitu perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif.



Tabel 2.80

Hubungan Masalah Pokok dan Isu Strategis Kabupaten Rote Ndao

NO	MISI	MASALAH POKOK	ISU STRATEGIS
1.	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, professional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas	- Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan - Kurangnya keterbukaan informasi publik - Budaya birokrasi yang belum sepenuhnya professional	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi.	- Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas - Penataan ruang belum optimal	Peningkatan infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan
3.	Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya	- Kualitas SDM masih rendah - Akses pendidikan dan kesehatan belum merata	Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul
4.	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal	- Produktivitas ekonomi masyarakat rendah - Ketergantungan pangan luar daerah tinggi	Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berdaya Saing
5.	Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan	- Tingkat kemiskinan masih tinggi - Akses perumahan dan permukiman layak belum merata - Kesempatan kerja terbatas - Pembangunan gender, equality, disabilitas dan sosial inklusi belum optimal	Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat



Tabel 2.81

Penalahaan Terhadap Isu KLHS dan Isu Lingkungan Dinamis Terhadap Isu Strategis Daerah

NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI NTT	
1	SDA						
1.1	Pertanian	1. Keterbatasan sumber air tawar 2. Curah hujan rendah dan tidak menentu 3. Infrastruktur pertanian yang belum optimal 4. Alih fungsi lahan pertanian 5. Rendahnya adopsi teknologi pertanian modern 6. Teknologi pengolahan hasil pertanian yang masih sederhana 7. Permasalahan ekologis (degradasi lahan, erosi, hama/penyakit, kekeringan)	1. Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran; 2. Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan; 3. Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 4. Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan	1. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; 2. Pengelolaan daratan yang berkelanjutan, pemulihan lahan terdegradasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati; 4. pengurangan emisi gas rumah kaca, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta peningkatan ketahanan terhadap bencana	Kerawanan pangan; Ekosistem terdegradasi; emisi gas rumah kaca; perubahan iklim	1. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan; 2. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan	1. Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berdaya Saing 2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 3. Peningkatan infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan
1.2	Perikanan	1. Ketergantungan pada cuaca 2. Fasilitas pelabuhan perikanan yang terbatas 3. Terbatasnya industri pengolahan hasil perikanan 4. Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya	1. Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran; 2. Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan; 3. Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 4. Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan	Perlindungan dan penggunaan secara berkelanjutan sumber daya laut	Penangkapan ikan terukur; budidaya laut, pesisir dan payau; pengolahan sampah plastik di laut	1. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan; 2. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan	1. Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berdaya Saing 2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.3	Peternakan	1. Keterbatasan hijauan pakan ternak	1. Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran;	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab,	Peningkatan produksi pakan ternak; pengendalian dan	1. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan;	1. Peningkatan Perekonomian Daerah Yang



NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI NTT	
1.3	Peternakan	1. Keterbatasan hijauan pakan ternak 2. Pola pemeliharaan yang masih ekstensif tradisional (lepas liar) 3. Terbatasnya industri pengolahan hasil peternakan 4. Infrastruktur pendukung yang terbatas (air bersih, rph, karantina hewan)	1. Isu Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran; 2. Isu Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan; 3. Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; 4. Isu Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim serta Ketahanan Pangan	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab,	Peningkatan produksi pakan ternak; pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; penyediaan benih dan bibit seta peningkatan produksi ternak; peningkatan kesehatan masyarakat veteriner; pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak	1. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan; 2. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan	1. Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berdaya Saing 2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.4	Pariwisata	1. Infrastruktur dan aksesibilitas yang terbatas 2. Kurangnya diversifikasi produk wisata 3. Belum optimalnya manajemen destinasi wisata 4. Kurangnya integrasi lintas sektor dalam pengembangan pariwisata terpadu 5. Distribusi manfaat sosial ekonomi pariwisata yang belum merata 6. Investasi dan permodalan yang terbatas		Pembangunan infrastruktur yang solid, inovatif, dan berorientasi pada industri berkelanjutan; Perlindungan dan penggunaan secara berkelanjutan sumber daya laut daratan	Pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meliputi pengembangan destinasi wisata baru yang tidak merusak lingkungan, pengelolaan limbah pariwisata yang efektif, dan penggunaan energi terbarukan	Pembangunan Destinasi Wisata sesuai Perwilayahan (spasial) dan Tematik; Manajemen Destinasi Wisata; peningkatan infrastruktur	1. Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Inklusif dan Berdaya Saing 2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat 3. Peningkatan infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan



NO	POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
				GLOBAL	NASIONAL	PROVINSI NTT	
2	Sumber Daya Manusia	1. Belum optimalnya pendidikan dan ketrampilan masyarakat 2. Masih tingginya isu kesehatan (stunting, aki akb, gizi buruk, akses layanan, dll) 3. Keterbatasan sdm di sektor unggulan 4. Belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintah 5. Belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi 6. Terbatasnya akses pendidikan dan pekerjaan bagi kelompok rentan	1. Isu Pengarusutamaan GEDSI (Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial) dan Perlindungan Anak serta Perempuan; 2. Isu Akses Layanan Kesehatan dan Pendidikan Berkualitas, Inklusif dan Merata; 3. Isu Good Governance dan Akses Pelayanan Publik yang Belum Optimal.	1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender; 6. Pengembangan kapasitas dan transfer teknologi,	1. Kesehatan untuk semua; 2. Pendidikan berkualitas yang merata; 3. perlindungan sosial yang adaptif	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial; Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT	1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul 2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Sesuai tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao 2025-2045, RPJMD periode 2025-2029 dalam tahapan **Optimalisasi dan Akselerasi Pembangunan (Periode RPJMD I, Tahun 2025-2029)**. Tahap ini mengandung arti "Optimalisasi dan akselerasi pembangunan" mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pembangunan di berbagai sektor, baik itu infrastruktur, ekonomi, sosial, maupun teknologi dengan wilayah lain baik di tingkat regional maupun nasional. Untuk itu kemajuan yang dicapai pada tahap sebelumnya harus terus ditingkatkan dan dimantapkan. Mengacu pada beberapa hal tersebut, sebagai arah pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang maka Visi Kabupaten Rote Ndao adalah: **"Transformasi Rote Ndao Dalam Bingkai Ita Esa: Transparan, Adil, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Kompetitif"**.

Adapun pokok-pokok visi pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao untuk periode RPJMD tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- **Transformasi Rote Ndao:** Suatu proses pembaharuan untuk mengatasi keteringgalan dalam berbagai sektor pembangunan. Hal ini termasuk peningkatan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan mengurangi keteringgalan dengan daerah lain. Perubahan ini bertujuan untuk merombak tata Kelola pembangunan menjadi lebih efisien dan efektif, fokus pada upaya yang mendukung kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rote Ndao.



- **Ita Esa:** Frasa ini berarti "**Kita Satu**". Ini menegaskan pentingnya kesatuan dan kerja sama antara semua elemen masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Ini menunjukkan bahwa semua sektor Masyarakat termasuk pemerintah, Agama, Adat, bisnis, dan warga harus bersatu padu dan berkolaborasi dalam upaya transformasi yang diinginkan untuk Pembangunan.
- **Transparan:** Dalam konteks pemerintahan adalah terciptanya keadaan di mana proses pengambilan keputusan, aliran informasi, dan tindakan pemerintah dapat diakses dan dipahami dengan jelas oleh masyarakat. Ini mencakup keterbukaan dalam administrasi, anggaran, dan pelayanan publik, sehingga mencegah KKN dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
- **Adil:** mengacu pada keadilan sosial di mana setiap individu di Kabupaten Rote Ndao diperlakukan dengan keadilan dan kesetaraan. Ini berarti setiap warga memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, peluang, dan layanan. Keadilan juga berkaitan dengan kebijakan yang tidak memihak dan system hukum yang berlaku sama untuk semua, tanpa diskriminasi. Hal ini termasuk pula distribusi beban dan manfaat pembangunan secara merata di seluruh lapisan masyarakat, sehingga menciptakan kondisi yang memungkinkan semua orang untuk mencapai potensi mereka secara penuh.
- **Cerdas:** Mengacu pada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, kapasitas untuk belajar yang luas, dan keterampilan yang adaptif, yang mendukung inovasi dan kreativitas.
- **Sehat:** Berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui Upaya kesehatan yang merata dan terjangkau, yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial.
- **Sejahtera:** Mengandung makna peningkatan infratraktur untuk kesejahteraan masyarakat yang merata, termasuk pengurangan kemiskinan, peningkatan pendapatan, dan akses yang lebih baik ke layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan.
- **Kompetitif:** Strategi peningkatan kuantitas, kualitas dan diversifikasi produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta sektor pariwisata dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menguatkan basis ekonomi lokal. Menciptakan keunggulan komparatif dan kompetitif di berbagai level pasar, mendorong inovasi, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rote Ndao dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.



Indikator sasaran visi pembangunan menggambarkan kondisi akhir periode perencanaan yang menjadi landasan utama dalam penyusunan misi, tujuan, indikator kinerja, serta program prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun 2025–2029. Keterkaitan sasaran dan indikator visi RPJPD Kabupaten Rote Ndao tahun 2025-2045 dengan sasaran dan indikator visi RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2025-2029 dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1

Sasaran Visi dan Indikator Visi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2045
disandingkan dengan Sasaran dan Indikator Visi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2029

Sasaran Visi	Sasaran Indikator Visi	Satuan	RPJPD Tahun 2025-2045		Baseline 2024	Target					
			2025	2045		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan per kapita terus meningkat	PDRB per kapita	Rupiah	26.396.124	83.299.070	25.603.988	26.396.124	27.188.260	27.980.396	28.772.532	29.564.668	30.356.804
Kemiskinan menuju satu digit dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan	%	24,51	2,47	25,78	24,51	23,24	21,97	20,70	19,43	19,00
	Rasio Gini	Poin	0,321	0,200	0,323	0,321	0,320	0,318	0,317	0,315	0,312
	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,60	7,50	3,20	3,60	4,50	4,75	5,00	5,20	5,60
Daya Saing Daerah yang meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Poin	2,63	3,55	3,10	3,57	4,04	4,51	4,98	5,45	5,92
Sumber daya manusia yang berkompeten sehat dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	65,00	80,00	66,40	66,58	66,77	66,95	67,13	67,32	67,50
Pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta tangguh bencana	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga	%	1,80	6,00	0,016	0,018	0,020	0,022	0,024	0,026	0,028
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	77,59	83,95	68,17	77,59	77,76	77,93	78,10	78,27	78,42
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	115,00	100,00	108,99	107,00	106,00	105,00	104,00	103,00	102,00



3.1.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Rumusan misi dapat memberikan gambaran dalam menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi melalui penetapan tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai.

Perwujudan Visi tersebut ditempuh melalui misi-misi yang mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yang dijalankan secara kemitraan dan berkelanjutan meliputi:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, profesional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas.

Pemerintahan yang baik adalah fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Rote Ndao berkomitmen untuk menciptakan **tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, profesional, dan partisipatoris** guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Pemerintahan yang **bersih** berarti terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dengan menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan pengelolaan sumber daya. Dengan menerapkan prinsip keterbukaan, masyarakat memiliki akses yang luas terhadap informasi publik dan dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kepercayaan terhadap pemerintah semakin meningkat.

Profesionalisme dalam birokrasi akan terus diperkuat dengan meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan, mendorong etos kerja yang berorientasi pada hasil, serta membangun sistem kerja yang efektif dan efisien. Selain itu, tata kelola pemerintahan juga akan mengedepankan prinsip **partisipatoris**, di mana masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan rakyat.

Kepemimpinan yang **meritokratik dan inovatif** menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola yang berkualitas. Setiap individu dalam pemerintahan akan dipilih dan ditempatkan berdasarkan kompetensi dan prestasi, bukan karena faktor kedekatan atau kepentingan tertentu. Sementara itu, pendekatan inovatif dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan



akan terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital dan strategi yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Dengan tata kelola yang semakin baik, Rote Ndao akan mampu memberikan **pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat**, serta menciptakan administrasi pemerintahan yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintahan yang bersih dan profesional bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi sebuah keharusan untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Rote Ndao.

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata menjadi kunci utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas sosial, serta menciptakan lingkungan yang berkelanjutan di Rote Ndao. Infrastruktur yang baik tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong utama bagi investasi, perdagangan, dan sektor produktif lainnya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pembangunan infrastruktur di Rote Ndao akan difokuskan pada peningkatan **kuantitas dan kualitas** sarana dan prasarana publik, termasuk jalan, jembatan, pelabuhan, jaringan air bersih, sanitasi, dan akses energi yang dimulai dari wilayah timur. Dengan infrastruktur yang lebih baik, aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih lancar, membuka peluang usaha baru, serta meningkatkan daya saing daerah.

Selain sebagai motor penggerak ekonomi, pembangunan infrastruktur juga memiliki peran strategis dalam **memperkuat kohesi sosial**. Dengan tersedianya infrastruktur yang memadai, hubungan antarwilayah dan antar komunitas akan semakin erat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong pemerataan pembangunan.

Di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan perubahan iklim, pembangunan infrastruktur di Rote Ndao juga akan diarahkan pada **mitigasi risiko bencana** dan peningkatan ketahanan lingkungan. Infrastruktur yang tangguh dan adaptif akan dibangun untuk mengurangi dampak bencana seperti



banjir, kekeringan, serta abrasi pantai. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi prioritas guna memastikan keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup generasi mendatang.

Seluruh upaya pembangunan infrastruktur ini akan didasarkan pada prinsip **tata ruang yang komprehensif dan terintegrasi**, sehingga setiap pembangunan memiliki perencanaan yang matang, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, Rote Ndao akan memiliki infrastruktur yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya

Pembangunan suatu daerah tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, Rote Ndao berkomitmen untuk menciptakan generasi yang unggul, cerdas, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan global, tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh leluhur.

Mewujudkan sumber daya manusia yang **unggul dan cerdas** berarti memberikan akses pendidikan yang berkualitas dan merata, membangun sistem pembelajaran yang inovatif, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya. Pendidikan dan pelatihan berbasis keterampilan akan menjadi prioritas, guna menciptakan tenaga kerja yang kompeten, kreatif, dan siap bersaing dalam berbagai sektor pembangunan.

Dalam sektor kesehatan, pemerintah akan memastikan tersedianya layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk fasilitas kesehatan yang memadai, tenaga medis yang kompeten, serta sistem jaminan kesehatan yang inklusif. Upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas gizi juga akan menjadi fokus utama guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Di bidang pendidikan, setiap anak Rote Ndao harus mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan berorientasi pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pemerintah akan terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, serta sistem pendidikan yang berbasis inovasi dan teknologi untuk mencetak generasi yang unggul dan siap bersaing.



Selain kecerdasan intelektual, pembangunan sumber daya manusia di Rote Ndao juga akan menekankan nilai-nilai **humanisme**. Pemerintahan akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan berlandaskan pada keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Masyarakat Rote Ndao harus berkembang dalam lingkungan yang inklusif, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadaban.

Di tengah modernisasi, penguatan identitas budaya menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pembangunan sumber daya manusia di Rote Ndao akan tetap **berakar pada budaya lokal**. Kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi harus terus dilestarikan, baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, maupun dalam kebijakan pembangunan. Dengan menjaga budaya sebagai bagian dari karakter masyarakat, maka Rote Ndao akan berkembang tanpa kehilangan identitasnya.

Dengan strategi yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan karakter yang humanis, serta pelestarian budaya, Rote Ndao siap menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur warisan nenek moyang.

4. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal

Rote Ndao memiliki potensi ekonomi yang besar dengan kekayaan sumber daya alam dan kearifan lokal yang khas. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah harus diarahkan untuk meningkatkan **daya saing** dengan tetap memastikan pertumbuhan yang **inklusif dan berkelanjutan**. Ekonomi yang inklusif berarti memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sementara keberlanjutan memastikan bahwa kemajuan ekonomi tidak merusak lingkungan dan tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Salah satu pilar utama dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah adalah **kedaulatan pangan**. Dengan memanfaatkan potensi pertanian, perikanan, dan peternakan yang ada, Rote Ndao akan mendorong peningkatan produksi pangan lokal agar mampu memenuhi kebutuhan sendiri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta menciptakan ketahanan pangan yang kuat. Pengembangan sektor ini akan didukung dengan inovasi teknologi, peningkatan kapasitas petani dan nelayan, serta akses pasar yang lebih luas agar hasil produksi dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat.



Untuk ketahanan dan kedaulatan pangan, Rote Ndao akan memperkuat produksi pangan lokal dengan memberdayakan petani, nelayan, dan peternak, serta memastikan distribusi pangan yang merata dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Pembangunan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan akan berbasis pada praktik berkelanjutan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Selain sektor pangan, pengembangan ekonomi berbasis **potensi sumber daya alam** lainnya seperti pariwisata, industri kreatif, dan usaha kecil menengah (UMKM) juga akan menjadi prioritas. Dengan memanfaatkan kearifan lokal, ekonomi daerah akan tumbuh dengan tetap mempertahankan identitas budaya, memperkuat komunitas lokal, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Melalui strategi ini, Rote Ndao akan membangun ekosistem ekonomi yang lebih tangguh, kompetitif, dan berdaya saing tinggi, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan kelestarian lingkungan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Rote Ndao tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga tetap menjaga keharmonisan sosial dan ekologi demi masa depan yang lebih baik.

5. Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan

Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berkomitmen untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Setiap warga harus memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pangan, infrastruktur dasar, dan peluang ekonomi guna menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen terhadap kesetaraan, kebijakan pembangunan akan berbasis **GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial)**, yang memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat—termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya—memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan.

Layanan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik, serta perumahan yang layak akan terus diperbaiki dan dikembangkan agar setiap masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Pemerintah juga akan memastikan konektivitas yang lebih baik melalui pembangunan dan



perbaikan jalan, jembatan, serta sarana transportasi yang mempermudah akses ke layanan publik dan aktivitas ekonomi.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, pemerintah akan membuka lebih banyak peluang kerja dengan mendorong investasi, pengembangan UMKM, serta pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan tersedianya akses terhadap pekerjaan yang layak, masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi dan meningkatkan taraf hidupnya.

Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, Rote Ndao akan menjadi daerah yang lebih maju, sejahtera, dan adil bagi seluruh warganya. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar serta meningkatnya kesejahteraan sosial, setiap masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan daerah demi masa depan yang lebih cerah dan berdaya saing tinggi.

3.1.3. Keselarasan Visi dan Misi

A. Keselarasan Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi RPJPD

RPJMD selain merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah juga disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Perumusan Visi misi RPJMD telah memperhatikan hasil penelaahan terhadap visi misi jangka panjang daerah dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Keselarasan Visi Misi tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2

Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan
Visi Misi RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045

RPJMD Kab. Rote Ndao 2025-2029		RPJPD Kab. Rote Ndao 2025-2045	
Visi	Transformasi Rote Ndao Dalam Bingkai Ita Esa: Transparan, Adil, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Kompetitif	Visi	ROTE NDAO NUSA MALOLE 2045: Gerbang Selatan Nusantara Maju, Berkeadilan, Inovatif dan Lestari Berkelanjutan
Misi 1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, professional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas	Misi 6	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, tangkas dan akuntabel
Misi 2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi	Misi 4	Meningkatkan ketangguhan bencana dan adaptasi perubahan iklim serta lingkungan hidup berkelanjutan
		Misi 5	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang universal, tangguh, menyeluruh dan berkesinambungan



RPJMD Kab. Rote Ndao 2025-2029			RPJPD Kab. Rote Ndao 2025-2045		
Misi	3	Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya	Misi	1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berbudaya, sehat dan unggul
Misi	4	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal	Misi	2	Meningkatkan perekonomian daerah yang stabil, inklusif, dan berdaya saing
Misi	5	Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan	Misi	3	Mewujudkan demokrasi substansial dan kesejahteraan sosial, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
			Misi	5	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang universal, tangguh, menyeluruh dan berkesinambungan

B. Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Perencanaan Pembangunan sebagai suatu sistem yang sinergis dari pusat sampai daerah. Oleh karena itu visi misi daerah harus selaras dengan visi misi Presiden dalam RPJMN agar pembangunan daerah berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Keselarasan visi misi RPJMD dan RPJMN dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3

Keselaran Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kab. Rote Ndao 2025-2029			RPJMN 2025-2029		
Visi	Transformasi Rote Ndao Dalam Bingkai Ita Esa: Transparan, Adil, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Kompetitif		Visi	Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045	
Misi	1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, professional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas	Misi	1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
			Misi	2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
			Misi	7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan



RPJMD Kab. Rote Ndao 2025-2029			RPJMN 2025-2029	
Misi 2		Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi	Misi 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
			Misi 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
			Misi 3.	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
			Misi 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Misi 3		Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya	Misi 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
			Misi 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sena penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
Misi 4		Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal	Misi 8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
			Misi 2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
			Misi 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
			Misi 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri



RPJMD Kab. Rote Ndao 2025-2029			RPJMN 2025-2029		
Misi	5	Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan	Misi	4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas
			Misi	6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

C. Keselarasan Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Rote Ndao berkontribusi pada pencapaian target pembangunan provinsi NTT. Hal ini dapat dilihat dari keselarasan Visi misi daerah dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Keselaran Visi Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029

RPJMD Kab. Rote Ndao 2025-2029			RPJMD Prov. NTT 2025-2029		
Visi	Transformasi Rote Ndao Dalam Bingkai Ita Esa: Transparan, Adil, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Kompetitif		Visi	Mewujudkan NTT yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan	
Misi	1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, profesional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas	Misi	1	Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (Maju)
			Misi	2	Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (Sehat)
			Misi	5	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan hak untuk masa depan yang inklusif
Misi	2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi	Misi	1	Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (Maju)



RPJMD Kab. Rote Ndao 2025-2029			RPJMD Prov. NTT 2025-2029		
Misi 3	Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya		Misi 2	Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (Sehat)	
			Misi 3	Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (Cerdas)	
Misi 4	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal		Misi 4	Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh masyarakat (Sejahtera)	
			Misi 5	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan hak untuk masa depan yang inklusif	
Misi 5	Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan		Misi 1	Memastikan infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (Maju)	
			Misi 2	Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (Sehat)	
			Misi 4	Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh masyarakat (Sejahtera)	

3.1.4. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

A. Tujuan RPJMD Kabupaten Tahun 2025-2029

Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari 5 misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Tujuan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029

No	Misi	Tujuan
(1)	(2)	(3)
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, professional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan berbasis elektronik
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan

2
4
9



No	Misi	Tujuan
(1)	(2)	(3)
3	Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia
4	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif
5	Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

B. Sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan Pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berikut disajikan tujuan dan sasaran berdasarkan misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, profesional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan berbasis elektronik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif berbasis pemanfaatan teknologi informasi Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah Meningkatnya upaya pengurangan risiko bencana Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
3	Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan yang unggul
4	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah



No	Misi	Tujuan	Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial masyarakat Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa



Tabel 3.7

Indikator dan Target Sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, professional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan berbasis elektronik		Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Poin	62,88	63,00	65,00	65,50	67,00	68,50	71,00
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,35	3,45	3,55	3,65	3,75	4,00	4,25
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah	Poin	89,29	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
			Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Nilai Sistem Merit	%	N/A	64,00	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan		Persentase kualitas Infrastruktur berkelanjutan	%	49,52	53,09	54,22	55,36	56,49	57,62	58,75
			Meningkatnya Pembangunan infrastruktur wilayah	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten	%	44,83	46,61	48,45	50,30	52,15	54,00	55,85
				Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	14,00	14,87	15,74	16,61	17,48	18,35	19,22
			Meningkatnya upaya pengurangan risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	108,99	107,00	106,00	105,00	104,00	103,00	102,00



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi 2024	Target					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,17	77,59	77,76	77,93	78,10	78,27	78,42
3	Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,40	66,58	66,77	66,95	67,13	67,32	67,50
			Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,85	66,20	66,50	66,90	67,40	67,90	68,50
				Prevalensi Stunting	%	32,40	30,20	28,20	26,40	24,70	23,10	21,60
			Meningkatnya kualitas pendidikan yang unggul	Indeks Pendidikan	Poin	0,629	0,632	0,634	0,638	0,639	0,642	0,645
4	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,20	3,60	4,50	4,75	5,00	5,20	5,60
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	%	1,98	2,48	2,98	3,48	3,98	4,48	4,98
				Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pariwisata	%	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	0,63	24,71	7,12	7,00	9,00	10,00	11,00
5	Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	25,78	24,51	23,24	21,97	20,70	19,43	19,00
			Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,42	2,40	2,36	2,30	2,25	2,20	2,00
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial Masyarakat	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	3,93	4,37	4,95	5,60	6,26	6,91	7,57
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	50,43	51,24	52,05	52,86	53,67	54,48	55,29
			Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	%	64,66	65,77	66,39	67,01	67,63	68,25	68,87
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Poin	0,653	0,660	0,673	0,683	0,693	0,703	0,713



3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Secara sederhana strategi adalah cara yang digunakan untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran akan tercapai. Strategi menjadi sebuah rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Perumusan strategi dilakukan dengan memperhatikan hasil kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan pada RPJMD periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh dalam menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan misi dan tujuan pembangunan daerah;
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan.



3.2.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yaag akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/ sasaran RPJMD. Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Setiap Misi

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, profesional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan berbasis elektronik	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan
				Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				Peningkatan upaya aksi pencegahan korupsi
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsive berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
				Penerapan Pelayanan Berbasis Teknologi dan Data
			Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh berkelanjutan	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatkan kualitas Jalan, jembatan dan fasilitas keselamatan jalan
				Meningkatkan layanan infrastruktur sumber daya air
			Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana	Meningkatkan Mitigasi dan Pencegahan Bencana terhadap Perubahan Iklim
			Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan Indeks Kualitas Lngkungan Hidup (IKLH)
3	Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Meningkatkan Pencegahan dan penanggulangan penyakit
				Meningkatkan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
				Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat
				Percepatan Pencegahan dan penanganan Stunting Terintegrasi



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat yang unggul	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan dapat dijangkau Meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik dan terpadu dengan aspek kesehatan, gizi, perlindungan dan pengasuhan
4	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan kedaulatan pangan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Mengembangkan inovasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, peternakan dan perikanan Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat Menjaga stabilitas ketahanan dan swasembada pangan Meningkatkan daya saing koperasi UMKM, industri dan perdagangan Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis potensi daerah
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatkan pendapatan asli daerah Meningkatkan investasi daerah
5	Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial masyarakat	Optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan Mengarusutamakan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial
			Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	Meningkatkan fasilitas layanan infrastruktur dasar (Air Bersih, Sanitasi dan Perumahan)
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kemandirian desa

3.2.2. Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan adalah tahapan atau strategi bertahap yang dirancang untuk mewujudkan visi, misi, dan program selama 5 tahun. Penahapan pembangunan ini menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Penahapan pembangunan daerah tahun 2025-2029 pada tabel berikut:



Tabel 3.9
Penahapan Pembangunan RPJMD

No	Misi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, profesional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas	Mengembangkan Sistem Pemerintahan yang Integratif melalui peningkatan kualitas SDM Aparatur berbasis meritokrasi, inovasi pelayanan publik berbasis digital	Akselerasi tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi dan pelayanan publik yang prima	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan SDM aparatur melalui inovasi dan pelayanan publik yang prima	Penguatan tata kelola pemerintahan melalui inovasi, pelayanan publik yang prima dan administrasi pemerintahan yang berkualitas	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, professional dan partisipatoris
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian daerah	Peningkatan infrastruktur antar wilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan infrastruktur daerah untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dan penghubung antar Kawasan	Pengembangan infrastruktur untuk wilayah-wilayah cepat tumbuh, strategis dan penghubung antar Kawasan	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
3	Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya	Menguatkan mutu pelayanan dasar bidang Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatan dan pemertaaan kualitas pelayanan dasar bidang Pendidikan dan Kesehatan	Peningkatkan kualitas SDM yang sehat, berkarakter dan berbudaya	Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yang berkarakter dan berbudaya	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul dan berbudaya



No	Misi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
4	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal	Peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan dan pertumbuhan ekonomi kreatif	Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah berbasis sumberdaya alam dan kearifan lokal serta pertumbuhan ekonomi kreatif	Peningkatan daya saing produk unggulan daerah, dan pertumbuhan ekonomi kreatif dan pemasaran ke luar daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing	Keberlanjutan dan daya saing ekonomi daerah
5	Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan	Optimalisasi perlindungan sosial, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak dan pelatihan berbasis Masyarakat	Perluasan perlindungan sosial, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak dan pelatihan berbasis kompetensi	Peningkatan Perlindungan sosial dasar Masyarakat dan perluasan akses terhadap lapangan pekerjaan	Peningkatan dan pemertaan Perlindungan sosial dasar Masyarakat dan perluasan akses terhadap lapangan pekerjaan	Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat



3.2.3. Penyajian Lokus Pembangunan

A. Nasional

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menetapkan bahwa Kabupaten Rote Ndao memiliki beberapa kawasan pembangunan, yaitu:

- Kawasan Komoditas Unggulan berupa Sentra Produksi Berbasis Komoditas Rumput Laut;
- Kawasan Afirmasi yaitu Kawasan Perbatasan dengan Kecamatan Perbatasan Prioritas yaitu Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Rote Timur, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Selatan, Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat dan Kecamatan Ndao Nuse;
- Kawasan Konservasi yaitu Taman Nasional (TNP) Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya;
- Kawasan Komoditas Unggulan berupa Komoditas Garam yaitu Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN). Kawasan K-SIGN di Rote Ndao mencakup luas lahan sebesar ± 13.000 hektare yang tersebar di Kecamatan Landu Leko, Kecamatan Pantai Baru, dan Kecamatan Rote Timur.

B. Provinsi

Rote Ndao memiliki potensi perikanan yang sangat besar karena didukung oleh kondisi geografis dan ekosistem laut yang kaya. Perairan di sekitar Rote Ndao merupakan habitat yang baik untuk ikan pelagis besar seperti tuna dan cakalang. Selain itu, jenis ikan karang seperti kerapu, kakap, dan baronang banyak ditemukan di perairan dangkal di sekitar Rote Ndao. Potensi perikanan budidaya terutama rumput laut sangat menjanjikan. Tahun 2022 produksi rumput laut tercatat sebanyak 88.028 ton yang menjadikan Rote Ndao sebagai daerah penghasil rumput laut terbanyak ke dua di NTT.

Di sektor peternakan, Pulau Rote memiliki potensi peternakan khususnya ternak sedang. Populasi domba di Rote Ndao pada tahun 2023 tercatat sebanyak 30.283 ekor (terbanyak ke dua di NTT). Selain itu, Pulau Rote termasuk dalam pulau-pulau terluar dengan kekayaan destinasi wisata dan keindahan alam yang sangat memukau. Beberapa destinasi wisata yang sangat terkenal di Rote Ndao misalnya Pantai Nembrala yang terkenal untuk surfing dan Mulut Seribu.



Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten meliputi:

- (1) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Kawasan Satuan Wilayah Pesisir dan Laut Terpau Laut Sawu III;
- (2) kawasan strategis lainnya berupa kawasan pendukung strategis perbatasan sebagai penunjang Kawasan Strategis Nasional perbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan Australia adalah Kawasan Ndana; dan
- (3) Kawasan Mulut Seribu merupakan surga tersembunyi di Indonesia telah menarik minat Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendorong sebagai Kawasan Ekonomi Khusus demi meningkatkan produksi perikanan melalui pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya yaitu Ikan Kerapu dan Kakap Putih. Selain itu Kawasan Mulut Seribu juga dikembangkan sebagai salah satu lokasi pariwisata estate Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Kabupaten

1. Arah Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Rote Ndao

Arah kebijakan pengembangan struktur ruang di Kabupaten Rote Ndao diarahkan pada sistem pusat kegiatan, sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya.

a) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Rote Ndao meliputi:

(1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL);

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu perkotaan Ba'a di Kecamatan Lobalain

(2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:

- a. Perkotaan Busalangga di Kecamatan Rote Barat Laut; dan
- b. Perkotaan Olafulihaa di Kecamatan Pantai Baru.

(3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:

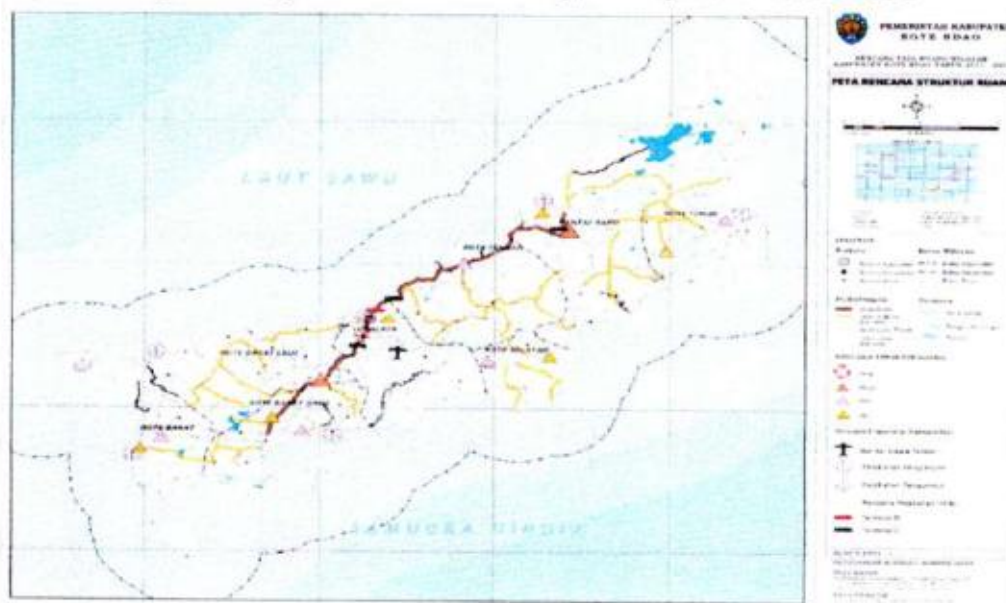
- a. Perkotaan Batutua di Kecamatan Rote Barat Daya;
- b. Perkotaan Sedeeon di Kecamatan Rote Barat;
- c. Perkotaan Londalusi di Kecamatan Rote Timur;
- d. Perkotaan Onatali di Kecamatan Rote Tengah;
- e. Perkotaan Lendeiki di Kecamatan Ndao Nuse;
- f. Perkotaan Naulaor di Kecamatan Landu Leko; dan
- g. Perkotaan Daleholu di Kecamatan Rote Selatan.



- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi:
 - a. Desa Faifua di Kecamatan Rote Timur;
 - b. Desa Meoaindi Kecamatan Rote Barat Daya;
 - c. Desa Nggodimedadi Kecamatan Rote Tengah;
 - d. Desa Teboledi Kecamatan Rote Selatan;
 - e. Desa Oelabadi Kecamatan Rote Barat Laut;
 - f. Desa Tesabeladi Kecamatan Pantai Baru; dan
 - g. Desa Nemberaladi Kecamatan Rote Barat.
- b) Sistem Jaringan Prasarana Utama
 - (1) Sistem jaringan transportasi darat meliputi:
 - a. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dan jaringan layanan lalu lintas;
 - b. Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan barang, jembatan timbang dan pengujian kendaraan bermotor; dan
 - c. Jaringan transportasi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).
 - (2) Sistem jaringan transportasi laut meliputi:
 - a. Tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
 - (3) Sistem jaringan transportasi udara meliputi:
 - a. Tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. Ruang udara untuk penerbangan.
 - c) Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:
 - (1) Sistem jaringan energi;
 - (2) Sistem jaringan telekomunikasi;
 - (3) Sistem jaringan sumber daya air; dan
 - (4) Sistem prasarana pengelolaan lingkungan.

Gambar 3.1

Pengembangan Struktur Ruang Kabupaten Rote Ndao



Sumber: RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013 – 2033

2. Arah Pengembangan Pola Ruang Kabupaten Rote Ndao

Rencana pola ruang wilayah meliputi kawasan lindung; dan kawasan budidaya.

- a) Kawasan lindung seluas kurang lebih 64,526.80 Ha meliputi:
 - (1) kawasan hutan lindung;
 - (2) kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - (3) kawasan perlindungan setempat;
 - (4) kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - (5) kawasan rawan bencana alam;
 - (6) kawasan lindung geologi; dan
 - (7) kawasan lindung lainnya.
- b) Kawasan budidaya meliputi:
 - (1) kawasan peruntukan hutan produksi;
 - (2) kawasan peruntukan hutan rakyat;
 - (3) kawasan peruntukan pertanian;
 - (4) kawasan peruntukan perikanan;
 - (5) kawasan peruntukan pertambangan;
 - (6) kawasan peruntukan industri;
 - (7) kawasan peruntukan pariwisata;
 - (8) kawasan peruntukan permukiman;
 - (9) kawasan peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - (10) kawasan peruntukan lainnya

R

φ

g

Gambar 3.2

Pengembangan Pola Ruang Kabupaten Rote Ndao



Sumber: RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013 – 2033

3. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten Rote Ndao

Kawasan strategis di Kabupaten Rote Ndao meliputi kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi dan kawasan strategis kabupaten.

Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan Negara, pertahanan dan keamanan Negara, ekonomi, sosial budaya atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

- Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten yaitu Kawasan Perbatasan Laut RI dengan Negara Australia termasuk Pulau Ndana di Kecamatan Rote Barat Daya.
- Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa seluruh kecamatan di Kabupaten Rote Ndao ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional bidang pertahanan dan keamanan, yaitu kawasan perbatasan Laut RI dengan Negara Australia.

Peruntukan kawasan strategis ini sesuai Pola Ruang diarahkan untuk pembangunan Koramil 1604-2 di Kecamatan Lobalain, KODIM 1627 Rote Ndao di Lobalain, Pangkalan TNI-AL Pulau Rote di Desa Dolasi Kecamatan Rote Barat Daya, Pos TNI – AL di Pulau Ndana Kecamatan Rote Barat Daya dan Papela Kecamatan Rote Timur, pelabuhan untuk



kegiatan perikanan di PPI Tulandale Kecamatan Lobalain dan PPI Papela Kecamatan Rote Timur, Bandar udara dengan skala pelayanan tersier dan Bandar udara pengumpan DC Saudale di Baa Kecamatan Lobalain, Depo minyak dan gas bumi di Lobalain, Pembangkit Tenaga Listrik PLTU di Kecamatan Rote Tengah, dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), PLTS, PLTB, Hybrid di seluruh lokasi berpenghuni. Untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara, maka pusat kegiatan kawasan berada di Perkotaan Baa Kecamatan Lobalain sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

c) Kawasan strategis kabupaten meliputi:

(1) kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

- a. Kawasan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batutua di Kecamatan Kecamatan Rote Barat Daya, Kecamatan Rote Barat, Kecamatan Rote Barat Laut dan Kecamatan Lobalain;
- b. Kawasan Agropolitan berbasis di Kecamatan Rote Barat Daya dan Kawasan Mamaluk Kecamatan Pantai Baru;
- c. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Rote Barat Daya dan Rote Timur
- d. Bandar Udara D.C. Saudale di Kecamatan Lobalain; dan
- e. Pelabuhan Laut Ba'a, di Kecamatan Lobalain.

(2) kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan

- a. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Nemberala-Rote Ndao dan sekitarnya
- b. Rumah Raja Rote di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain;
- c. Rumah Raja Thie di Desa Oebafok, Kecamatan Rote Barat Daya;
- d. Komunitas Lontar di Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya, dan
- e. Wisata religi Fiulain Desa Oebou, Kecamatan Rote Barat Daya.

(3) kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- a. Suaka margasatwa Pulau Ndana di Kecamatan Rote Barat Daya;
- b. Kawasan pantai berhutan bakau di pesisir selatan dan Timur kabupaten; dan
- c. Kawasan mata air di Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Tengah.



Gambar 3. 3

Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Rote Ndao



Sumber: RTRW Kab. Rote Ndao Tahun 2013 – 2033

3.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Rote Ndao. Arah kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan misi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029

No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, profesional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas data dan informasi Pembangunan daerah
			Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring
			Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
			Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Peningkatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
			Peningkatan kapasitas aparatur penyusun dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
		Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kapasitas APIP
			Pengelolaan anggaran berbasis e-budgeting
			Pengelolaan Aset daerah berbasis elektronik yang terintegrasi



No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan upaya aksi pencegahan korupsi	Mencapai predikat opini WTP Optimalisasi implementasi aksi daerah dalam pencegahan korupsi
		Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Peningkatan integrasi sistem layanan publik berbasis digital
		Penerapan Pelayanan Berbasis Teknologi dan Data	Peningkatan Pelayanan Berbasis Teknologi dan Data
		Meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik	Peningkatan layanan aspirasi dan pengaduan berbasis elektronik
		Meningkatkan profesionalisme sumberdaya aparatur	Pengembangan sistem manajemen aparatur berbasis kompetensi
			Penerapan Reward and punishment
			Pengembangan karier ASN berdasarkan kinerja dan integritas
			Peningkatan disiplin ASN
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi	Meningkatkan kualitas Jalan, jembatan dan fasilitas keselamatan jalan	Peningkatan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan fasilitas keselamatan jalan
			Pembangunan prasarana penghubung antar wilayah potensial
		Meningkatkan layanan infrastruktur sumber daya air	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi
			Pembangunan dan pemeliharaan embung/bendung
		Meningkatkan Mitigasi dan Pencegahan Bencana terhadap Perubahan Iklim	Peningkatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan Mitigasi Bencana Daerah
			Pengarusutamaan Adaptasi Perubahan Iklim
		Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
			Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan Limbah Berkelanjutan
3	Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya	Meningkatkan Pencegahan dan penanggulangan penyakit	Peningkatan pencegahan penularan penyakit kepada kelompok rentan
			Penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam Masyarakat
		Meningkatkan Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga kesehatan minimal 5 jenis tenaga kesehatan setiap puskesmas
			Penguatan kapasitas institusi kesehatan dengan peningkatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas
		Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat	Peningkatan kemandirian masyarakat dalam upaya kesehatan promotif dan preventif
		Percepatan Pencegahan dan penanganan Stunting Terintegrasi	Peningkatan kesehatan ibu hamil serta status gizi bayi dan balita secara berkesinambungan
			Kerja sama lintas sektor dalam penanganan dan penanggulangan stunting



No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
4	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal	Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan dapat dijangkau	Peningkatan cakupan imunisasi, asi eksklusif dan kawasan tanpa rokok
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana, tenaga kependidikan dan pendidikan vokasi yang menjangkau seluruh wilayah
			Peningkatan sinergi antar sektor (pendidikan, kesehatan, perlindungan anak) dalam penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif
		Meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini yang holistik dan terpadu dengan aspek kesehatan, gizi, perlindungan, dan pengasuhan	Revitalisasi lahan pertanian
			Optimalisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
			Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi
			Peningkatan pembibitan dan pengembangan serta pakan ternak
			Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan
			Memperkuat cadangan pangan dan gizi masyarakat
			Meningkatkan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi
			Pemanfaatan teknologi dalam pengembangan industri rumah tangga
			Memperkuat infrastruktur dasar dan ekonomi kawasan perdesaan
			Kemudahan akses permodalan
			Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa/kelurahan melalui koperasi merah putih
		Meningkatkan daya tarik pariwisata berbasis potensi daerah	Optimalisasi objek-objek wisata alam, Bahari, religius budaya dan kuliner
			Penyediaan aksesibilitas pariwisata
			Pengembangan atraksi, ketrampilan SDM, layanan dan tata Kelola pariwisata
			Meningkatnya promosi dan penyelenggaraan event-event wisata
		Meningkatkan pendapatan asli daerah	Mengoptimalkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah
			Peningkatan intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
			Penguatan regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah
		Meningkatkan investasi daerah	Meningkatkan promosi dan iklim investasi daerah



No	Misi	Strategi	Arah Kebijakan
5	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja	Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan tenaga kerja berbasis teknologi Pembangunan Balai Latihan Kerja Penyediaan Jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
		optimalisasi sistem perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk miskin dan rentan	Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin, anak yatim, lanjut usia Pemberdayaan ekonomi kelompok miskin dan rentan miskin Pengelolaan Data Fakir Miskin
			Peningkatan kesetaraan gender, hak disabilitas, dan inklusi sosial
		Mengarusutamakan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) atau Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial	
		Meningkatkan fasilitas layanan infrastruktur dasar (Air Bersih, Sanitasi dan Perumahan)	Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin (rumah layak huni, sanitasi dan air bersih)
		Meningkatkan kualitas pengelolaan dan kemandirian desa	Penataan Kelembagaan Desa Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa Peningkatan pengelolaan BUMDES

3.2.5. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai kewenangannya, sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Oleh sebab itu program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi.

1. Program Prioritas Nasional (Asta Cita)

Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN tahun 2025-2029. Untuk pencapaian sasarnya, setiap prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah tahun 2025-2029.

- 1) Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.
- 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara.



- 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.
- 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- 5) Pemberantasan kemiskinan.
- 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba.
- 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
- 8) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi.
- 9) Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif.
- 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
- 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup.
- 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
- 13) Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersaitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan.
- 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan IKN serta kota-kota inovatif-karakteristik-mandiri lainnya.
- 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi.
- 16) Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah.
- 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

2. Dukungan Daerah Terhadap Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029

Dukungan program prioritas daerah terhadap prioritas nasional, kegiatan prioritas utama, proyek strategis nasional dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dalam RPJMN tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

2
1
8



Tabel 3.11

Dukungan Program Prioritas Kabupaten Rote Ndao Terhadap Kegiatan Prioritas Utama RPJMN Tahun 2025-2029

No	Prioritas Nasional	No	Kegiatan Prioritas Utama	Sasaran	Dukungan Program/ Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
1	Prioritas Nasional 1	1	Penguatan pers dan media massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'Sp	Terwujudnya kebebasan pers dan media massa yang berintegritas, bertanggungjawab, edukatif, jujur, objektif dan sehat industri.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
2	Prioritas Nasional 2	2	Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	Peningkatan produksi bahan pangan utama	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		3	Pengembangan pangan akuatik (blue food)	Meningkatnya penyediaan ikan untuk konsumsi masyarakat	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
		4	Pengembangan pangan hewani	Meningkatnya produksi bahan pangan hewani;	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan
				Meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan.		
		5	Pengembangan pangan lokal dan nabati	Meningkatnya produksi pangan lokal dan nabati	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan
		6	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	Meningkatnya jumlah dan kapasitas SPAM yang dikembangkan serta dikelola secara terintegrasi dari hulu ke hilir; Meningkatkan jumlah lembaga pengelola SPAM yang melaksanakan kegiatan pengawasan kualitas air minum secara rutin dan berkala.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		7	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur SPALD	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Meningkatnya keberfungsian dan kualitas infrastruktur SPALD		
		8	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital	Meningkatnya jumlah SDM digital dan terjaganya keamanan data	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		9	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	Meningkatnya ketersediaan data kualitas air sungai dan danau;	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kualitas air permukaan;		
				Meningkatnya kualitas pengujian parameter lingkungan;		
				Meningkatnya pengendalian pencemaran air di sektor industri.		



No	Prioritas Nasional	No	Kegiatan Prioritas Utama	Sasaran	Dukungan Program/ Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		10	Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	Meningkatnya sampah yang dikelola; Meningkatnya jumlah Kabupaten / Kota dengan kepala keluarga yang melakukan pengelolaan sampah.	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		11	Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR	Menurunnya sampah residu yang masuk di TPS / LUR	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		12	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut	Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri garam dan produk olahan hasil laut.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Perikanan
3	Prioritas Nasional 3	13	Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	Meningkatnya ekosistem digital untuk mendukung pemerintah dan masyarakat digital.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
		14	Pengembangan koperasi sektor produksi	Meningkatnya kontribusi koperasi sektor produksi terhadap total kontribusi koperasi.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
4	Prioritas Nasional 4	15	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	Tercapainya pemerataan akses dan pelayanan pendidikan pra sekolah dalam mendukung tumbuh kembang anak.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		16	Revitalisasi sarana dan prasarana Sekolah dan Madrasah yang berkualitas (PHTC)	Tercapainya pemerataan akses pendidikan berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		17	Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah	Tercapainnya penurunan kasus anak putus sekolah dan anak tidak sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		18	Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul	Terselenggaranya layanan pendidikan di sekolah unggul yang mewadai SDM dalam meningkatkan daya saing di tingkat global.	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		19	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (E.G. pelatihan, <i>in-service training</i>), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja.	Terpenuhinya kebutuhan guru di tingkat daerah, satuan pendidikan, dan mata pelajaran.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan



No	Prioritas Nasional	No	Kegiatan Prioritas Utama	Sasaran	Dukungan Program/ Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		20	Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	Meningkatnya peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mengelola iptek dan inovasi. Meningkatnya peran BRIDA dalam Optimalisasi Pemanfaatan Iptek dan Inovasi Meningkatnya peran sektor (K/L) terkait dalam Optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi di sektor-sektor prioritas; Meningkatnya peran <i>science Techno Park</i> (STP) dalam melakukan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		21	Penurunan kematian ibu dan anak	Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar dengan persalinan di fasyankes, memperkuat deteksi dini, ANC, layanan persalinan, KF, KN, layanan emergensi, pelayanan darah, tata laksana balita sakit, serta imunisasi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		22	Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i>	Pencegahan dan penurunan <i>Stunting</i> melalui pendekatan spesifik dan sensitif.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		23	Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis	Meningkatnya masyarakat kelompok usia bayi, balita, remaja, dewasa dan lansia yang menerima pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini, pencegahan penyakit, dan pengurangan potensi beban anggaran pengendalian penyakit.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		24	Penuntasan TBC	Tercapainya penuntasan TBC melalui peningkatan upaya pencegahan TBC, intensifikasi penemuan kasus secara masif dan pengobatan TBC sampai tuntas.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		25	Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita	Terlaksananya pemberian makanan bergizi bagi siswa, santri, ibu Hamil, ibu menyusui dan balita untuk mendukung percepatan pemenuhan gizi.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Timur



No	Prioritas Nasional	No	Kegiatan Prioritas Utama	Sasaran	Dukungan Program/ Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
		26	Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi	Terlaksananya penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi untuk mendukung percepatan pemenuhan Gizi.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Lobalain, Kecamatan Rote Barat Laut, Kecamatan Rote Tengah, Kecamatan Pantai Baru, Kecamatan Rote Timur
		27	Eliminasi penyakit kusta dan <i>Schistosomiasis</i>	Meningkatnya pengendalian penyakit Kusta dan <i>Schistosomiasis</i>	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		28	Investasi pelayanan kesehatan primer	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer hingga tingkat desa dan menguatnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		29	Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses	Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan RS di seluruh Indonesia dan berkembangnya pendekatan khusus pelayanan kesehatan di daerah yang memiliki akses sulit termasuk layanan kesehatan bergerak.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		30	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	Meningkatnya Pemenuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan dengan mendorong peningkatan, Pemenuhan, dan pemerataan dari sisi produksi, kompetensi, jumlah, maupun jenis dari SDM kesehatan yang berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
5	Prioritas Nasional 5	31	Pengembangan hilirisasi Rumput Laut	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri kimia.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
6	Prioritas Nasional 6	32	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	Meningkatnya kualitas Penyaluran bantuan sosial, yang adaptif terhadap berbagai kondisi.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		33	Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pengembangan UMKM	
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	



No	Prioritas Nasional	No	Kegiatan Prioritas Utama	Sasaran	Dukungan Program/ Prioritas Daerah	Perangkat Daerah
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
		34	Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	Meningkatnya penyediaan hunian baru atau peningkatan kualitas yang terintegrasi dengan PSU.	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		35	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan terhadap layanan dasar serta infrastuktur desa.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Prioritas Nasional 7	36	Pencegahan tindak pidana korupsi	Terwujudnya strategi pencegahan korupsi di sektor pemerintah dan masyarakat.	Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
		37	Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep <i>total reward</i> berbasis kinerja ASN	Terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil layak dan kompetitif.	Program Kepegawaian Daerah	
		38	Transformasi digital layanan publik prioritas	Terselenggaranya layanan digital pemerintah yang berkualitas dan terpadu.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		39	Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	Tercapainya peningkatan basis pajak dan kepatuhan wajib pajak	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
8	Prioritas Nasional 8	40	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Terwujudnya kawasan pemajuan kebudayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM kebudayaan.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		41	Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	Terwujudnya ekosistem kebudayaan yang menumbuhkan kapasitas SDM dan lembaga kebudayaan dalam berkarya	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



Tabel 3.12

Dukungan Program Strategis Daerah terhadap
Proyek Strategis Nasional Tahun 2025-2029

No	Proyek Strategis Nasional	Program Strategis Daerah	Perangkat Daerah
A. Makan Bergizi Gratis			
1	Program Makan Bergizi Gratis	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
B. Pembangunan Manusia dan Kebudayaan			
2	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
4	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten /Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Program Penuntasan TBC	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
C. Swasembada Pangan			
6	Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu Sapi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan
D. Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital			
8	Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Katahanan Pangan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan
9	Pengembangan layanan Digital Pemerintah Terpadu	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
E. Perumahan dan Permukiman			
10	Pembangunan 3 Juta Rumah	Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup



Tabel 3.13

**Dukungan Terhadap 8 (Delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
RPJMN Tahun 2025-2029**

No	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	Program Prioritas Daerah
1	Memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
2	Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3	Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
4	Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi	Program Pengelolaan Pendidikan
5	Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial dan serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
6	Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga Kesehatan dan penyuluhy) TNI/PORLI dan pejabat negara	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
7	Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT) dan jaminan penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Kawasan Permukiman
8	Mendirikan Badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

3. Program Prioritas Provinsi

A. DASA CITA

Dasa Cita merupakan rumusan visi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang berisi 10 cita-cita utama sebagai dasar dalam melaksanakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dasa Cita bermakna



sepuluh cita-cita utama pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, dan sejahtera.

Dasa Cita menjadi dasar dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah pada periode 2025–2029, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Dari Ladang dan Laut ke Pasar : Efisien, Modern dan Aman
- 2) Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal
- 3) Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal
- 4) Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat
- 5) Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting
- 6) Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan
- 7) Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni : Mewujudkan NTT yang Sejahtera
- 8) Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin
- 9) Membangun NTT Digital : Akses Merata, Komunikasi Lancar
- 10) Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama

B. PILAR PEMBANGUNAN

Pilar Pembangunan selama lima tahun ke depan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pilar 1: Ekonomi Berkelanjutan
 - a) Memajukan sektor pertanian, Perkebunan, peternakan, perikanan dan keluatan sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan berbasis potensi daerah;
 - b) Mengakselerasi program penciptaan lapangan kerja dan wira usaha baru serta meningkatkan kapasitas wirausaha;
 - c) Memperkaya ekowisata, geowisata, geopark, dan wisata budaya berbasis komunitas, menampilkan jati diri dan pesona NTT ke dunia;
 - d) Memastikan seluruh Masyarakat NTT yang bekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
- 2) Pilar 2: Pemberdayaan Komunitas
 - a) Mengembangkan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal khususnya oleh anak muda milenial dan perempuan;



- b) Menciptakan ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis Potensi Desa;
 - c) Digitalisasi, kolaborasi dan revitalisasi koperasi menuju kemandirian ekonomi;
 - d) Optimalisasi dan penguatan kapasitas BUMDES untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat.
- 3) Pilar 3: Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan
- a) Membangun jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru (*green and blue infrastructure*), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim;
 - b) Pembangunan infrastruktur digitan untuk memperluas akses internet dan komunikasi;
 - c) Meningkatkan kualitas layanan transportasi publik guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.
- 4) Pilar 4: Kesehatan
- a) Pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan pentahelix;
 - b) Penguatan infrastruktur di fasilitas layanan kesehatan;
 - c) Memastikan seluruh Masyarakat NTT sebagai peserta aktif BPJS;
 - d) Pemerataan distribusi dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan;
 - e) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses.
- 5) Pilar 5: Pendidikan
- a) Peningkatan dan pemerataan infrastruktur Pendidikan berkualitas;
 - b) Insentif Pendidikan bagi siswa/mahasiswa berprestasi kurang mampu serta tenaga pendidik di daerah perifer;
 - c) Membangun sekolah vokasi unggulan berbasis potensi daerah;
 - d) Mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk pembelajaran formal dan non formal;
 - e) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus.
- 6) Pilar 6: Reformasi Birokrasi Dan Hak Azasi Manusia
- a) Mentransformasi pelayanan publik menjadi lebih transparan, efisien, profesional proaktif dan melayani;
 - b) Memperkuat sumber pendapat daerah;



- c) Meningkatkan kesejahteraan ASN sebagai salah satu penggerak ekonomi;
 - d) Meningkatkan keamanan daerah dan melindungi hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor.
- 7) Pilar 7: Kolaborasi
- a) Melibatkan dan mengoptimalkan kontribusi diaspora dan potensi Keluarga Besar NTT untuk membangun daerah
 - b) Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh program pemerintah kabupaten/kota serta CSO/NGO untuk Pembangunan di Provinsi NTT

4. Program Prioritas Kabupaten (Mbule Sio)

Adapun program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam RPJMD 5 (lima) tahun kedepan adalah program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao dianalogikan sebagai "**Mbule Sio**". Kata **MBULE**: diartikan sebagai Bulir yang merupakan satuan atau kuantifikasi dari hasil panen seperti padi/jagung. Kata **SIO** diartikan sebagai angka Sembilan yang secara adat memiliki makna kesempurnaan. Secara harafiah "**MBULE SIO**" merupakan 9 Bulir Agenda/Tekad untuk membawa Transformasi bagi masyarakat Rote Ndao secara Bersama sama dalam 5 tahun ke depan.

Adapun program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2029 yang tertuang dalam "**MBULE SIO**" dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. MBULE ESA

"**MBULE ESA**" diartikan sebagai **ROTE NDAO AMANAH**, yaitu dalam penyelenggaraan sistim pemerintahan dilaksanakan secara bersih, efektif, transparan, profesional dan anti korupsi sehingga mampu mengadminstrasikan keadilan sosial di Kabupaten Rote Ndao. Adapun rencana strategis **ROTE NDAO AMANAH** dalam pembangunan yaitu:

1. ASN Bersih, Profesional dan Sejahtera
 - Proyek Bersih, Rote Ndao Maju: memastikan semua ASN yang melaksanakan pengelolaan proyek dari pengadaan sampai serah terima proyek tanpa Fee dengan membuka layanan pengaduan dan sanksi tegas bagi ASN pelanggar.
 - Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui insentif berbasis kinerja.
 - Peningkatan SDM ASN melalui beasiswa dan pelatihan.
2. Peningkatan Kesejahteraan kepala desa dan aparat desa.



3. Revolusi Mental ASN untuk berorientasi pada pelayanan masyarakat: Memulai perubahan mindset dan sikap ASN untuk memprioritaskan pelayanan masyarakat dengan nilai-nilai integritas, profesionalisme, bebas korupsi dan empati.
4. Integrasi teknologi digital dalam pelayanan publik: Memodernisasi layanan publik dan operasional ASN dengan teknologi digital untuk layanan yang lebih efektif dan efisien.
5. Pengkaderan calon pemimpin dan penjenjangan karir berbasis meritokrasi: mengembangkan sistem meritokrasi dalam pengkaderan dan penjenjangan karir ASN, bertujuan untuk mempromosikan kreativitas, inovasi, dan produktivitas.
6. Pengembangan kebijakan berbasis riset dan kajian: tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tujuan ini memprioritaskan pengembangan kebijakan publik yang didasarkan pada riset dan kajian ilmiah
7. Penguatan satu data pembangunan: Manajemen data kependudukan *by name by address* secara digital dan terintegrasi dengan data pembangunan sektoral seperti data kemiskinan, distribusi bantuan layanan dasar, kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja. Tujuannya untuk memastikan distribusi bantuan sosial tepat sasaran dan adil
8. *One Stop Service/Mall* Pelayanan Publik terintegrasi dan digital: menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan dengan mengintegrasikan layanan dari berbagai lembaga, termasuk lembaga vertikal seperti kepolisian, pengadilan, dan Samsat, ke dalam satu sistem terpadu yang dapat diakses secara digital.

B. MBULE DUA

“**MBULE DUA**” diartikan sebagai **ROTE NDAO CERDAS**, merupakan strategi transformasi pendidikan **melalui** peningkatan mutu dan tata kelola pendidikan yang berdaya saing dalam mewujudkan generasi siswa yang **CAKAP** (Cerdas, Kreatif dan Adaptif) dengan fasilitas yang memadai dan inklusif serta didukung tenaga kependidikan tersebar secara merata dan berkualitas, dengan kurikulum yang inovatif pada muatan lokal. Adapun rencana strategis **ROTE NDAO CERDAS** dalam pembangunan yaitu:

1. Generasi Unggul Rote Ndao: merupakan terobosan integratif yang menyatukan layanan Kesehatan dan pendidikan dalam satu platform holistik untuk mendukung anak-anak di Rote Ndao melalui pendekatan



siklus hidup sejak masa in utero hingga memasuki fase pendidikan (Pencegahan stunting, gizi buruk, gizi kurang).

2. 1 KK miskin 1 sarjana: meningkatkan derajat pendidikan masyarakat Rote dengan target minimal 1 KK miskin 1 sarjana melalui pemberian beasiswa bagi seluruh anak dari KK miskin berprestasi.
3. Kartu Rote Cerdas: penyediaan database beasiswa dan akses Pendidikan kepada seluruh generasi muda Rote khususnya yang berasal dari desa dan wilayah kepulauan.
4. Mengintegrasikan pelajaran budaya dan seni tradisional (tarian, sosando, gong) ke dalam kurikulum muatan lokal.

C. MBULE TELU

“**MBULE TELU**” diartikan sebagai **ROTE NDAO SEHAT**, yang merupakan transformasi kesehatan dengan mengoptimalikan pembangunan kesehatan secara MAHIR (Merata, Aksesibel, Holistik, dan Integratif) serta upaya meningkatkan fasilitas kesehatan yang memadai dengan didukung oleh tenaga medis terlatih dalam perawatan efektif dan empatik untuk pencegahan penyakit. Adapun rencana strategis **ROTE NDAO SEHAT** dalam pembangunan yaitu:

1. Transformasi Kesehatan di Puskesmas: memastikan layanan kesehatan di Puskesmas yang MAHIR (Merata, Aksesibel, Holistik dan Integratif).
2. *Universal Health Coverage*: memastikan cakupan layanan BPJS yang merata kepada semua Masyarakat.
3. Program Desa Sehat untuk memperkuat layanan kesehatan pedesaan melalui penyediaan tenaga kesehatan yang merata di setiap desa.
4. Program KK miskin sehat: memastikan layanan Kesehatan yang MAHIR (Merata, Aksesibel, Holistik dan Integratif) kepada seluruh KK miskin melalui penyediaan Kartu Rote Sehat.
5. Memperkuat mutu layanan RSUD Ba'a Menyiapkan pusat layanan kesehatan yang berkualitas melalui PUSKESMAS dengan ditunjang fasilitas yang memenuhi standar dan tenaga medis yang professional.



D. MBULE HA

“**MBULE HA**” diartikan sebagai **ROTE NDAO SEJAHTERA**, melalui upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan **strategi** perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penyediaan fasilitas layanan dasar yang memadai. Adapun rencana strategis **ROTE NDAO SEJAHTERA** dalam pembangunan yaitu:

1. Integrasi data DTKS dan sektor/dinas pemberi bantuan sosial agar distribusi bantuan sosial kepada penerima miskin ekstrim tepat sasaran dan terpantau.
2. PKH Plus untuk penduduk miskin 11 kecamatan, 119 desa/kelurahan. Kelompok sasaran adalah disabilitas, lansia terlantar, perempuan kepala keluarga rentan.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin ekstrim melalui prioritas bantuan modal usaha, pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan, pelatihan kerja.
4. Beasiswa Prioritas yang memfokuskan bagi anak yang bersal dari keluarga miskin ekstrim.
5. Penyediaan bantuan HUNIAN TERPADU (Rumah, air bersih, sanitasi, Listrik).
6. PRIORITAS KERJA: Memastikan absorpsi tenaga kerja dari kelompok miskin dalam berbagai proyek pemerintah.

E. MBULE LIMA

“**MBULE LIMA**” diartikan sebagai **ROTE NDAO BERTANI**, untuk memajukan sektor pertanian, **peternakan** dan perikanan dalam mewujudkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan. Adapun rencana strategis **ROTE NDAO SEJAHTERA** dalam pembangunan yaitu:

1. Perbaikan tata niaga pupuk inisiatif: perbaikan tata niaga pupuk di Kabupaten Rote Ndao bertujuan untuk memastikan distribusi pupuk yang efisien dan tepat sasaran kepada petani.
2. Program pembukaan lahan pertanian baru: program ini akan menyediakan alat berat seperti excavator dan traktor untuk membantu membuka lahan pertanian baru.
3. Kartu tani, nelayan, dan peternak digital: sistem database terintegrasi dan digital ini dirancang untuk memudahkan pengelolaan data tani, nelayan, dan peternakan secara efisien.
4. *Integrated Farming* untuk efisiensi dan efektifitas pengelolaan pertanian, peternakan dan perikanan secara terpadu.



5. Hilirisasi produk pertanian peternakan dan perikanan untuk memberikan nilai tambah melalui pengolahan produk paska panen.
6. Penataan sumber daya air dan eksplorasi potensi sungai bawah tanah untuk mendukung pengembangan integrated farming.
7. Pengembangan sumber daya Listrik skala Industri kecil atau menengah untuk mendukung hilirisasi.
8. Pengendalian/kontrol harga Produk pertanian/perkebunan/peternakan/Perikanan dan jaminan kepastian pasar.
9. Bantuan ternak lokal unggul, bibit pertanian/perkebunan.
10. Bantuan alat tangkap perikanan modern.

F. MBULE NE

“**MBULE NE**” diartikan sebagai **ROTE NDAO BERDAYA**, dengan memperkuat pilar ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, koperasi, BUMDES dan mendorong terciptanya Desa Mandiri untuk meningkatkan peluang kerja. Adapun rencana strategis **ROTE NDAO BERDAYA** dalam pembangunan yaitu:

1. *One Village One Product One Corporate & Agropolitan.*
2. *Communal Branding* untuk UMKM.
3. *Supply and demand channel*, penataan pasar tradisional, inklusi UMKM retail modern.
4. Menumbuhkembangkan koperasi perempuan, petani dan nelayan dan perdagangan antar pulau.
5. Mewujudkan *vocational training* pasca kepulangan TKW.
6. Merevitalisasi koperasi, mengembangkan UMKM dan BUMDES sebagai instrumen pemberdayaan dan pemerataan ekonomi rakyat sampai tingkat desa.
7. Penyediaan platform pasar digital untuk produk lokal: Mengembangkan sebuah platform pasar digital yang komprehensif, bertujuan untuk memfasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi produk.
8. Pengembangan ekonomi kreatif.
9. Memperhebat akses ke pemerintah, swasta dan NGO dalam dan luar negeri untuk pengembangan ekonomi dan investasi.
10. Kerjasama pengelolaan sumber daya ekonomi antar daerah berorientasi ekspor bersama.
11. Memperlancar akses masyarakat ke perbankan.



12. Pengelolaan data base potensi wilayah yang komprehensif, akurat, *up to date* dan *fisibel*, mendetail dan *usable* untuk memperhebat daya tawar Daerah Dengan mitra.
13. Revitalisasi perusahaan-perusahaan daerah untuk memperbesar pendapatan asli daerah sendiri.

G. MBULE HITU

“**MBULE HITU**” diartikan sebagai **ROTE NDAO AKSES**, yaitu membangun Infrastruktur dalam kerangka **pengembangan** wilayah terpadu, bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial yang berkeadilan. Adapun rencana strategis **ROTE NDAO AKSES** dalam pembangunan yaitu:

1. Prinsip pembangunan berlandaskan Rencana Tata Ruang Wilayahn (RTRW): mengarahkan pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rote Ndao, menjamin bahwa pembangunan mendukung fungsi kawasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial dan pemerintahan.
2. Perbaikan tata niaga BBM melalui pembangunan jobor.
3. Meningkatkan jaringan jalan yang menghubungkan pusat pertumbuhan, sentra produksi pertanian, dan pusat aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat, untuk mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat yang lebih efisien. (penguatan akses sabuk utara dan selatan).
4. Peningkatan Infrastruktur pertanian terintegrasi (embung, irigasi, jalan tani)
5. Peningkatan akses air minum dan sanitasi.
6. Akses listrik untuk semua rumah tangga.
7. Peningkatan akses jaringan telepon dan internet.

H. MBULE FALU

“**MBULE FALU**” diartikan sebagai **ROTE NDAO MALOLE**, dengan memprioritaskan pengembangan sektor pariwisata sebagai motor transisi ekonomi yang berimplikasi pada peningkatan **kunjungan** wisatawan. Adapun rencana strategis **ROTE NDAO MALOLE** dalam pembangunan yaitu:

1. Desa wisata terintegrasi dan penguatan industri kreatif: menggabungkan potensi pariwisata dan industri kreatif, program ini



bertujuan untuk mengembangkan desa wisata yang menawarkan pengalaman budaya dan alam autentik, sekaligus menjadi pusat industri kreatif lokal.

2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pariwisata: meningkatkan kualitas dan aksesibilitas infrastruktur pariwisata, termasuk jalan ke destinasi wisata, fasilitas umum, dan kebersihan lokasi wisata.
3. Pusat informasi pariwisata digital terintegrasi: pengembangan platform digital ini menyediakan informasi terpadu tentang pariwisata Kabupaten Rote Ndao, mulai dari kuliner, produk lokal, layanan rental, hingga kalender event.
4. Integrasi kalender event pariwisata Rote dan Provinsi: mengembangkan kalender event pariwisata yang terintegrasi, mencakup seluruh kegiatan dan festival di Kabupaten Rote Ndao serta event-event penting di tingkat provinsi
5. Pembukaan penerbangan langsung Bali-Rote dan Labuan Bajo-Rote: Inisiatif untuk memperkuat konektivitas udara dan meningkatkan aksesibilitas wisatawan ke Kabupaten Rote Ndao melalui pembukaan rute penerbangan langsung dari Bali dan Labuan Bajo ke Rote.
6. Pengembangan wisata bahari: pembukaan jalur tour laut: Tiang Bendera – Mangrove – Batu Termanu, Sai – Litianak – P. Dengka, Oebou – Landu – Nusa Manuk

ROTE NDAO MALOLE juga memprioritaskan pada penataan Kota Ba'a sebagai wajah Ibukota Kabupaten yang bersih, indah dan nyaman yang didukung dengan fungsi pelayanan jasa, perdagangan untuk meningkatkan kohesi sosial. Adapun rencana strategis ini sebagai berikut:

1. Ba'a CERDAS membangun kota Ba'a sebagai pintu masuk dan etalase keberagaman Rote Ndao ditopang oleh utilitas kota cerdas.
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang mendukung kenyamanan, keamanan aktifitas (jalan terstandar, lampu jalan, fasilitas publik lainnya).
3. Penyediaan ruang publik yang dilengkapi sarana olah raga, wifi.
4. Pembangunan gedung seni budaya: bertujuan untuk menyediakan tempat bagi kegiatan wisata dan budaya, mendukung ekonomi kreatif dan meningkatkan pariwisata di Kota Ba'a.
5. Pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR).
6. Pengembangan wisata bahari: pembukaan Jalur Tour Laut: Tiang Bendera – Mangrove – Batu Termanu



I. MBULE SIO

“**MBULE SIO**” diartikan sebagai **ROTE NDAO HARMONI**, dengan mewujudkan harmoni sosial, alam dan lingkungan hidup serta melestarikan kebudayaan dan juga mengembangkan budaya olah raga. Adapun rencana strategis **ROTE NDAO HARMONI** dalam pembangunan yaitu:

1. Kemitraan pemerintah – lembaga adat – agama sebagai pilar pembangunan berperan aktif dalam penyelenggaraan pembangunan di Rote Ndao.
2. Pengembangan seni dan wisata berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat (*eco-tourism*): inventarisasi data kesenian tradisional dan adat budaya lokal.
3. Dialog Intern, dialog antar umat beragama dan dialog antar generasi.
4. Mendorong kemajuan olah raga dengan menghadirkan ternamen secara rutin untuk melahirkan bibit olahragawan (bola kaki, bola voli, dll).
5. Mewujudkan penghargaan dan kesejahteraan atlit, pelatih dan semua elemen yang terlibat dalam kemajuan keolahragaan di Rote Ndao.
6. Menyiapkan fasilitas olahraga di setiap daerah (kecamatan) guna menunjang pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olah raga yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan kolaborasi kemitaraan dilakukan dengan metode PENTA HELIX untuk Rote Ndao maju. Adapun kolaborasi kemitaraan yaitu meliputi:

1. Pemerintah (*government*): berperan dalam pembuatan kebijakan, regulasi, dan penyediaan infrastruktur serta layanan publik.
2. Dunia usaha/Industri (*business*): Melibatkan perusahaan dan industri yang beroperasi dalam ekonomi, memberikan investasi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja.
3. Akademisi (*academia*): Institusi pendidikan dan penelitian yang menyediakan pengetahuan, inovasi, dan teknologi melalui riset serta pengembangan.
4. Komunitas/masyarakat (lembaga agama, adat, komunitas): Kelompok masyarakat atau organisasi sosial yang mewakili kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.
5. Media: pihak yang bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi, edukasi, dan mempengaruhi opini publik. Dalam beberapa model, pihak kelima bisa juga merujuk pada lembaga-lembaga non



pemerintah atau organisasi sukarela (NGOs dan NPOs) yang memainkan peran penting dalam advokasi, kampanye, dan pemberian layanan kepada masyarakat.

Program unggulan daerah Bupati dan Wakil Bupati periode 2025–2029 yang dirumuskan dalam 'MBULE SIO' merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara program-program unggulan tersebut dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.14

Program Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029

Visi: “Transformasi Rote Ndao Dalam Bingkai Ita Esa: Transparan, Adil, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Kompetitif”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, professional dan partisipatoris di atas landasan kepemimpinan yang meritokratik dan inovatif bagi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang berkualitas	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan berbasis elektronik			Indeks Reformasi Birokrasi (RB)			
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Rote Ndao Amanah (Mbule Esa)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Meningkatnya kualitas organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian organisasi
						Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
						Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA								



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
						Meningkatnya fasilitasi terkait penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan di daerah		
						Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
						Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
				Rote Ndao Amanah (Mbule Esa)	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
						Meningkatnya tata kelola perbendaharaan		
						Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan		
						Meningkatnya tata kelola aset daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
						Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Rote Ndao Amanah (Mbule Esa)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
						Indeks SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
						Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	
				Rote Ndao Amanah (Mbule Esa)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bagian Organisasi
						Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Program Pencatatan Sipil	
						Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Rote Ndao Amanah (Mbule Esa)	Nilai Sistem Merit	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
						Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN		
						Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN		
						Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN		
						Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi		
						Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi		
						Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis		



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat kohesi sosial berbasis tata ruang yang komprehensif dan teintegrasi	Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah yang tangguh dan berkelanjutan			Persentase kualitas Infrastruktur berkelanjutan			
			Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	Rote Ndao Akses (Mbule Hitu)	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rote Ndao Akses (Mbule Hitu)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya upaya pengurangan risiko bencana	Rote Ndao Akses (Mbule Hitu)	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat		
						Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana		
			Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Rote Ndao Harmoni (Mbule Sio)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya layanan persampahan regional	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Meningkatnya tata kelola persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Rote Ndao Sehat (Mbule Telu)	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
						Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
3	Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Rote Ndao Sehat (Mbule Telu)	Usia Harapan Hidup	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Dinas Kesehatan
						Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
						Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
3	Mewujudkan Pembangunan dan Tata Kelola Sumber Daya Manusia Rote Ndao yang Unggul (Cerdas), humanis dan berakar budaya	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	Rote Ndao Sehat (Mbule Telu)	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Rote Ndao Sehat (Mbule Telu)	Prevalensi Stunting	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
			Meningkatnya kualitas pendidikan yang unggul	Rote Ndao Cerdas (Mbule Dua)	Indeks Pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
						Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga Pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Program Pengembangan Kurikulum	
						Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
4	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kedaulatan pangan berbasis potensi sumberdaya alam dan kearifan lokal	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif			Laju Pertumbuhan Ekonomi			
			Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	Rote Ndao Bertani (Mbule Ne)	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
						Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	
						Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Peternakan
						Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
						Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
						Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Program Perizinan Usaha Pertanian	
						Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Perikanan
						Meningkatnya konsumsi ikan oleh Masyarakat	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
						Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Rote Ndao Malole (Mbule Falu)	Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pariwisata	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
						Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	
						Meningkatnya produktivitas koperasi	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
						Meningkatnya daya saing UMKM	Program Pengembangan UMKM	
						Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
						Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	
						Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
						Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
						Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
						Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
						Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Rote Ndao Berdaya (Mbule Lima)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
							Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Program Promosi Penanaman Modal	
							Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
							Program Pelayanan Penanaman Modal	
							Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat berbasis GEDSI, layanan infrastruktur perumahan dan permukiman layak, serta kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha	Rote Ndao Bertani (Mbule Ne)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Kemiskinan		
						Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
						Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Program Hubungan Industrial	
			Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan sosial masyarakat	Rote Ndao Sejahtera (Mbule Ha)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
						Meningkatnya cakupan perlindungan sosial korban bencana	Program Penanganan Bencana	
						Meningkatnya cakupan rehabilitasi sosial	Program Rehabilitasi Sosial	
						Meningkatnya pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Program Pemberdayaan Sosial	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Rote Ndao Sejahtera (Mbule Ha)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam Pembangunan	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	Rote Ndao Akses (Mbule Hitu)	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
						Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman	
						Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Mbule Sio	Indikator	Outcome	Program Prioritas	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
						Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
						Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	
						Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Rote Ndao Berdaya (Mbule Ne)	Indeks Desa Membangun (IDM)	Meningkatnya kualitas penataan desa	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	
						Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	
						Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	11 Kecamatan
						Meningkatnya Tata Kelola administrasi	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	



5. Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dan Provinsi

Keselaran prioritas pembangunan daerah dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Keselaran Asta Cita, Dasa Cita dan Mbule Sio

Asta Cita		Dasa Cita		Mbule Sio		Keterkaitan Mbule Sio dengan Asta Cita dan Dasa Cita
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1	Dari Ladang dan Laut ke Pasar, Efisien, Modern dan Aman	1	Rote Ndao Amanah	- ASTA CITA 1 & 7 - DASA CITA 4, 8 & 9
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	2	Milenial dan Perempuan Motor Kreativitas Lokal	2	Rote Ndao Cerdas	- ASTA CITA 4 - DASA CITA 6
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	3	Wisata NTT Penggerak Ekonomi Lokal	3	Rote Ndao Sehat	- ASTA CITA 4 - DASA CITA 5
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.	4	Kesejahteraan Bersama; Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk masyarakat	4	Rote Ndao Sejahtera	- ASTA CITA 6 - DASA CITA 7
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	5	Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting	5	Rote Ndao Bertani	- ASTA CITA 5 - DASA CITA 1
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6	Sekolah vokasi unggulan Berbasis Potensi unggulan	6	Rote Ndao Berdaya	- ASTA CITA 6 - DASA CITA 2
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	7	Jalan, Air, Listrik, rumah Layak Huni, Mewujudkan NTT yang Sejahtera	7	Rote Ndao Akses	- ASTA CITA 7 - DASA CITA 4, 8 & 9



Asta Cita		Dasa Cita		Mbule Sio		Keterkaitan Mbule Sio dengan Asta Cita dan Dasa Cita
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur	8	Pendapatan Daerah Naik, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan ASN Terjamin	8	Rote Ndao Malole	- ASTA CITA 3 - DASA CITA 3
		9	Membangun NTT Digital, Akses Merata, Komunikasi Lancar	9	Rote Ndao Harmoni	- ASTA CITA 8 - DASA CITA 10
		10	Ayo Bangun NTT, Kolaborasi Bersama			

6. Program pengentasan kemiskinan

Dalam program pengentasan kemiskinan, berbagai langkah strategis dirumuskan agar penanganannya lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup pendataan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan dasar, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan verifikasi dan validasi data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2024 sebagai data dasar dan sumber utama dalam penetapan penerima manfaat program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Menyalurkan bantuan sosial dan melakukan pemberdayaan ekonomi kepada target sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 3) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta menyiapkan program/bantuan pendidikan secara tepat sasaran;
- 4) Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, baik upaya kesehatan perorangan (UKP) maupun upaya kesehatan masyarakat (UKM), khususnya di daerah lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 5) Melakukan upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat, termasuk pencegahan dan penanganan sfunting;
- 6) Mendorong kepesertaan keluarga miskin ekstrem agar terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- 7) Menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan program padat karya;
- 8) Membina dan menggerakkan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang mengelola dana bergulir masyarakat miskin ekstrem;



- 9) Menyiapkan ketersediaan akses jalan, air bersih, sanitasi, dan penataan lingkungan;
- 10) memberikan bantuan perbaikan rumah dan/ atau pembangunan rumah baru serta relokasi permukiman bagi keluarga miskin ekstrem;
- 11) Memberikan fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, serta pendampingan dan pelatihan bagi koperasi dan usaha mikro dalam meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem;
- 12) Perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan menciptakan lapangan kerja baru dan/ atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang sudah ada, serta menyiapkan pelatihan program vokasi untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 13) Memberdayakan kelompok petani yang masuk dalam kategori miskin ekstrem;
- 14) Menyediakan sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani;
- 15) Memberdayakan nelayan dan pembudidaya ikan yang tergolong keluarga miskin ekstrem;
- 16) Memberikan bantuan sarana dan prasarana bagi nelayan dan pembudidaya ikan

Tabel 3.16

Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao

No	Perangkat Daerah	Program
A.	MENINGKATKAN PENDAPATAN	
1	Dinas Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Penanganan Kerawanan Pangan Pengawasan Keamanan Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
4	Dinas Peternakan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Perizinan Usaha Pertanian
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa



No	Perangkat Daerah	Program
B. MENURUNKAN BEBAN PENGELUARAN		
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
		Program Pengembangan UMKM
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
7	Dinas Sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana
		Program Rehabilitasi Sosial
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Program Pengembangan Perumahan
		Program Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Persampahan
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana
C. MEMINIMALKAN WILAYAH KANTONG KEMISKINAN		
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		Program Penyelenggaraan Jalan
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11	Dinas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
13	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

7. Inovasi pembangunan daerah

Untuk mendukung Prioritas Pembangunan Daerah (Mbule Sio) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025–2029, telah dikembangkan inovasi baru serta penguatan inovasi yang sudah berjalan dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan, yang dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.17

Keterkaitan Mbule Sio Dengan Inovasi Daerah Tahun 2023-2025

No	Inovasi Daerah	Tahun	Tahapan	Outcome	Keterkaitan dengan Mbule Sio	Perangkat Daerah
1	TULI DEI	2023	Inisiasi	Meningkatnya kualitas pelayan masyarakat	Rote Ndao Amanah	Kecamatan Landuleko
2	Pengawasan Orang Asing melalui Aplikasi/ MANALOLO	2023	Inisiasi	Meningkatnya pendataan terhadap orang asing, organisasi asing, serta imigran ilegal di wilayah hukum Kabupaten Rote Ndao	Rote Ndao Harmoni	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah Menggunakan Media Elektronik	2023	Inisiasi	Meningkatnya penerimaan PAD	Rote Ndao Amanah	Badan Pendapatan Daerah
4	IMA, TAFEFELA BALI' HITA ADAT NA	2023	Inisiasi	Meningkatkan pendapatan para pengrajin tenun ikat	Rote Ndao Harmoni, Rote Ndao Sejahtera, Rote Ndao Berdaya	Kecamatan Rote Barat
5	PeKA DESA	2023	Inisiasi	Meningkatnya pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Rote Ndao Amanah	Inspektorat
6	TI'I LANGGA	2023	Inisiasi	Meningkatnya cakupan wilayah rentan pangan	Rote Ndao Amanah	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7	Potensi Dan Tantangan Budidaya Lagundi	2024	Inisiasi	Meningkatnya perekonomian masyarakat	Rote Ndao Sejahtera, Rote Ndao Berdaya	Kecamatan Rote Timur
8	Optimalisasi Sistem Monitoring Dana Desa Menggunakan Aplikasi Tungga Ndon	2024	Inisiasi	Meningkatnya Pengelolaan dana desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Rote Ndao Amanah	Kecamatan Rote Barat
9	Program Generasi Emas Rote Ndao (PERMATA) 2045	2024	Inisiasi	Meningkatnya generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045	Rote Ndao Cerdas, Rote Ndao Sehat	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
10	HOHOLOK (Sistem Informasi Supervisi Pekerjaan Konstruksi)	2025	Inisiasi	Meningkatnya sistem pengawasan teknis pekerjaan	Rote Ndao Akses	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	E-ASET MALOLE (Digitalisasi Pengelolaan Aset Daerah)	2025	Inisiasi	Meningkatnya pengelolaan aset perangkat daerah	Rote Ndao Amanah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan



No	Inovasi Daerah	Tahun	Tahapan	Outcome	Keterkaitan dengan Mbule Sio	Perangkat Daerah
12	ESA OFFICE (Ekosistem Smart Office)	2025	Inisiasi	Meningktanya transformasi digital birokrasi	Rote Ndao Amanah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
13	BA'ARUNASITA	2025	Inisiasi	Terwujudnya Urban Farming di kota Ba'a melalui gerakan Barunasita	Rote Ndao Bertani	Kecamatan Lobalain
14	MAI FALI (Manajemen Akurasi Informasi: Fasilitasi Aksi Layanan Integrasi)	2025	Inisiasi	Meningkatnya informasi/data stunting	Rote Ndao Sehat	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
15	MASANE'DA ASyIK (Alarm System Informasi Klaim)	2025	Inisiasi	Meningkatnya tata kelola data RSUD dalam pelayanan	Rote Ndao Sehat	Rumah Sakit Umum Daerah
16	ENO INA (Sistem Kemantapan Jalan Kabupaten)	2025	Inisiasi	Meningkatnya jalan kabupaten kondisi mantap	Rote Ndao Akses	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	SOI SALAK (Sistem Optimalisasi Tindak Lanjut Audit Keuangan)	2025	Inisiasi	Meningkatnya pengawasan internal daerah	Rote Ndao Amanah	Inspektorat
18	LAYNDES SIA HITA UMENA	2025	Inisiasi	Meningkatnya pelayanan publik di desa berbasis digital	Rote Ndao Amanah	Kecamatan Rote Barat
19	Nusa Fua Adminduk	2025	Inisiasi	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan	Rote Ndao Amanah	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
20	SIO ESA (Sistem Informasi Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan)	2025	Inisiasi	Meningkatnya pelaporan kegiatan ormas	Rote Ndao Harmoni	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
21	UMA NELAU	2025	Inisiasi	Meningkatnya data kondisi rumah tidak layak huni (RTLH)	Rote Ndao Sejahtera	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
22	Satu Pulau Satu PAUD-HI	2025	Inisiasi	Meningkatnya pemerataan layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif di wilayah kepulauan	Rote Ndao Cerdas, Rote Ndao Sehat	Dinas Pendidikan
23	Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	2023	Uji Coba	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program pemerintah.	Rote Ndao Amanah	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
24	SIPEKERJA	2024	Uji Coba	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dalam pelayanan publik	Rote Ndao Amanah	Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan
25	TERAS PETANG (Ternak Sehat Petani Tenang)	2024	Uji Coba	Meningkatnya kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Rote Ndao	Rote Ndao Bertani	Dinas Peternakan



No	Inovasi Daerah	Tahun	Tahapan	Outcome	Keterkaitan dengan Mbule Sio	Perangkat Daerah
26	ROTEKS (Rote Teknologi Kesehatan Ternak)	2024	Uji Coba	Meningkatnya produktivitas ternak, kesehatan hewan dan porfitabilitas usaha peternakan	Rote Ndao Bertani	Dinas Peternakan
27	ROTE NDAO TANGGUH	2023	Penerapan	Meningkatnya ketangguhan bencana daerah	Rote Ndao Sejahtera dan Rote Ndao Harmoni	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28	AU MUFA'DA	2023	Penerapan	Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan masyarakat	Rote Ndao Amanah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
29	TULU FALI	2023	Penerapan	Meningkatnya distribusi bantuan sosial yang adil dan merata bagi Masyarakat Miskin Ekstrem di Kabupaten Rote Ndao	Rote Ndao Sejahtera	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
30	OFALANGGA	2023	Penerapan	Meningkatnya Penyampaian Laporan LKPJ Pemerintah Daerah	Rote Ndao Amanah	Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
31	ROTE SMART SERVICE	2023	Penerapan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efisien, transparan dan responsif	Rote Ndao Amanah	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
32	Elektronifikasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar	2024	Penerapan	Meningkatnya PAD sektor retribusi pelayanan pasar	Rote Ndao Amanah	Badan Pendapatan Daerah
33	KOKOLAK	2024	Penerapan	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah	Rote Ndao Amanah	Inspektorat
34	BASAN TESA	2024	Penerapan	Meningkatnya kualitas pencatatan administrasi barang milik perangkat daerah	Rote Ndao Amanah	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
35	Festival Rote Malole	2025	Penerapan	Meningkatnya PAD sektor Pariwisata	Rote Ndao Malole	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030 merupakan rencana indikasi rencana kebutuhan pendanaan. Program yang dimaksud selaras dengan program dan kegiatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai urusan.

Program Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030 yang dimaksudkan untuk urusan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan perencanaan operasional, sementara suatu urusan pemerintahan menjadi strategis ditentukan raoleh tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya. Oleh karena itu, suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis pada tahun/periode tertentu tetapi menjadi operasional pada tahun/periode berikutnya dan sebaliknya. Dalam hal suatu program prioritas menjadi urusan pemerintahan strategis maka dalam penganggarannya diprioritaskan terlebih dahulu, demikian pula perencanaan, pengendalian dan evaluasinya dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding progran operasional.

Program prioritas baik strategis maupun operasional pencapaian kinerjanya menjadi tanggung jawab perangkat daerah, namun demikian program prioritas yang merupakan perencanaan strategis menjadi tanggung jawab bersama kepala perangkat daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakannya. Uraian rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan selengkapnnya dapat dilihat pada Tabel 4.1:



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah
Tahun 2025-2030

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB		
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)		TARGET	PAGU (x 1.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	DINAS PENDIDIKAN					275.221.571		298.074.632		289.978.308		270.000.000		271.000.000		272.000.000		288.175.622	
1.1	NON URUSAN					194.742.347		231.853.809		221.949.016		221.949.016		221.434.011		222.127.559		227.981.227	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	194.742.347	100,00	231.853.809	100,00	221.949.016	100,00	221.949.016	100,00	221.434.011	100,00	222.127.559	100,00	227.981.227	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN PENDIDIKAN					73.462.133		58.609.813		48.029.292		48.050.984		49.565.989		49.872.441		60.194.395	
1.2	BIDANG PENDIDIKAN					73.462.133		58.609.813		48.029.292		48.050.984		49.565.989		49.872.441		60.194.395	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Persentase Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	%	88,59	73.201.203	70,39	58.216.374	80,48	47.495.753	80,57	47.544.770	80,85	49.040.850	81,04	49.317.712	81,13	59.639.666	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	14,68		29,21		29,71		30,21		30,71		31,21		31,71		
			Persentase Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	97,41		97,70		97,99		98,00		98,20		98,80		98,80		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAH	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SD/MI	%	57,21		67,21		67,21		77,21		77,40		77,50		77,80		
			Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SMP/MTS	%	46,18		55,12		64,06		64,10		64,40		64,80		65,00		
			Rata-rata kemampuan Numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SD/MI	%	52,67		62,67		72,67		72,50		72,80		72,85		72,90		
			Rata-rata kemampuan Numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional SMP/MTS	%	45,46		55,46		65,46		65,46		65,46		65,46		65,46		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	64,71		65,22		65,74		65,74		65,74		65,74		65,74		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B	%	70,22		71,17		72,13		72,20		72,50		73,00		73,50		
			Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	Oran g	5		4		2		1		1		1		0		
			Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B	Oran g	10		8		4		3		2		1		1		
			Satuan PAUD yang menerapkan PAUD HI	%	25,64		35,90		41,03		46,15		48,72		51,28		51,28		
			Jumlah sekolah inklusif (PAUD)	Setu an Pendidika n	N/A		2		3		4		5		6		6		
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Pendidikan	Indeks pemerataan Guru	%	0,62	260.930	0,53	213.849	0,45	233.539	0,36	206.215	0,27	225.139	0,19	225.139	0,10	225.139	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Guru yang memiliki sertifikat pendidik	%	40,33		56,24		61,14		66,03		70,93		75,82		80,71		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pengembangan Kurikulum	Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	%	11,17	-	17,77	-	24,37	150.000	30,98	150.000	37,58	150.000	44,18	150.000	50,78	150.000	DINAS PENDIDIKAN
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terselesainya a Bahasa dan Sastra Daerah	Persentase siswa yang memahami bahasa dan sastra daerah	%	N/A	-	80,48	179.590	83,33	150.000	83,40	150.000	83,80	150.000	84,00	179.590	84,00	179.590	DINAS PENDIDIKAN
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						7.017.091		7.611.010		-		-		-		-		-	
1.3	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					7.017.091		7.611.010		-		-		-		-		-	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	%	71,43	4.851.592	100,00	5.484.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	71,43		100,00												
			Persentase pemuda berprestasi dan tidak mampu yang memperoleh beasiswa	%	100,00		100,00												
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase atlit yang berprestasi		21,62	2.090.499	88,88	2.051.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningktanya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	100,00	75.000	100,00	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
			Persentase anggota pramuka yang aktif	%	100,00		100,00												
2	DINAS KESEHATAN					149.724.964		137.286.019		127.785.900		127.800.000		129.000.000		130.785.900		132.000.000	
2.1	NON URUSAN					62.056.907		66.060.400		60.902.158		61.500.000		61.500.000		62.000.000		62.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	62.056.907	100,00	66.060.400	100,00	60.902.158	100,00	61.500.000	100,00	61.500.000	100,00	62.000.000	100,00	62.000.000	DINAS KESEHATAN
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Peranokat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
URUSAN KESEHATAN						87.668.057		71.225.619		66.883.742		66.300.000		67.500.000		68.785.900		70.000.000	
2.2	BIDANG KESEHATAN					87.668.057		71.225.619		66.883.742		66.300.000		67.500.000		68.785.900		70.000.000	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Angka kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	116,99	68.733.243	116,00	55.267.128	115,00	50.921.641	114,00	50.341.509	113,00	51.541.509	112,00	52.824.124	100,00	54.038.224	DINAS KESEHATAN
			Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat pendek pada balita)	%	32,40		30,20		28,20		26,40		24,70		23,10		21,60		
			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	58,13		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	87,50		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	66,05		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	86,62		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Anak pada Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	79,65		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase Warga Negara Usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	87,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	%	81,88		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	84,14		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Warga Negara Penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	51,62		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	129,48		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Warga Negara Dengan terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	47,40		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	125,96		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Rumah Tangga ber PHBS	%	58,66		70,00		72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Cakupan Desa UCI (Universal Child Immunization)	%	23,50		25,21		26,89		28,57		30,25		31,93		33,61		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM bidang kesehatan	%	54,90	18.139.186	66,67	15.470.212	78,43	15.468.537	90,20	15.470.212	99,32	15.470.212	99,32	15.470.212	99,50	15.470.212	DINAS KESEHATAN
			Persentase Pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan strategis di Puskesmas	%	83,00		83,83		84,67		85,51		86,36		87,22		88,00		
			Persentase Pemenuhan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Tipe sesuai standar (7 Spesialis (4 dasar dan 3 Penunjang)	%	N/A		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	N/A	515.018	80,00	213.663	81,00	215.663	82,00	213.663	83,00	213.663	84,00	213.663	85,00	213.663	DINAS KESEHATAN
			Persentase Posbindu Aktif	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Orang yang discreaning di Posbindu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Posyandu Aktif	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makan minuman	%	70,00	280.610	95,00	274.616	95,00	277.902	95,00	274.616	95,00	274.616	95,00	277.902	95,00	277.902	DINAS KESEHATAN
			Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	%	85,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					77.681.096		39.057.829		85.903.980		95.231.542		133.781.040		129.583.481		165.000.000	
3.1	NON URUSAN					4.268.939		4.648.218		5.898.685		8.898.685		8.898.685		4.898.685		4.898.685	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	4.268.939	100,00	4.648.218	100,00	5.898.685	100,00	8.898.685	100,00	8.898.685	100,00	4.898.685	100,00	4.898.685	DINAS PUPR
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawalan Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					73.412.147		34.409.611		80.005.296		86.332.857		124.882.355		124.684.776		160.101.315	
3.2	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					73.412.147		34.409.611		80.005.296		86.332.857		124.882.355		124.684.776		160.101.315	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	31,79	9.796.996	33,77	5.423.530	35,75	15.655.384	37,72	24.191.240	39,70	33.725.435	41,68	33.725.435	43,66	40.725.435	DINAS PUPR
			Persentase embung/bendung kondisi baik	%	43,33		48,69		54,44		60,00		65,56		71,11		76,57		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga berakses air minum layak (%)	%	73,37	6.492.397	75,82	1.726.829	77,11	10.960.000	78,39	11.900.000	79,68	14.676.829	80,96	14.776.829	82,24	15.776.829	DINAS PUPR
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase sarana prasarana persampahan yang dibangun	%	-	-	48,15	325.000	53,85	5.000.000	76,92	2.500.000	100,00	2.500.000	-	-	-	-	



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	%	80,69	5.716.654	83,26	5.402.844	84,54	6.498.082	85,83	8.748.082	87,11	5.000.000	88,40	5.000.000	89,68	7.000.000	DINAS PUPR
	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase persetujuan bangunan gedung layak fungsi	%	36,36	210.674	30,56	155.985	44,44	181.674	58,33	181.674	72,22	200.000	88,11	200.000	100,00	200.000	DINAS PUPR
	Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	44,83	50.745.426	46,61	21.068.264	48,46	41.320.155	50,30	37.661.862	52,15	67.080.092	54,00	69.232.513	55,85	93.549.052	DINAS PUPR
			Persentase kondisi baik jalan kabupaten	%	33,47		35,23		37,00		38,76		40,52		42,28		44,04		
			Persentase jalan strategis desa terbangun	%	41,26		42,74		47,16		51,59		56,02		60,44		64,87		
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	%	-	-	-	-	7,39	100.000	8,70	100.000	10,00	150.000	11,30	200.000	12,61	300.000	DINAS PUPR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	97,31	450.000	97,50	307.160	97,55	300.000	97,60	1.050.000	97,65	1.550.000	97,70	1.550.000	97,75	1.550.000	DINAS PUPR
			Persentase pemanfaatan ruang wilayah perkotaan sesuai RTRW	%	61,47		85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP					8.041.632		8.000.832		8.400.000		8.500.832		9.000.000		9.500.832		10.000.000	
4.1	NON URUSAN					2.668.400		2.821.121		2.593.022		2.529.950		3.342.679		2.870.381		3.520.381	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.668.400	100,00	2.821.121	100,00	2.593.022	100,00	2.529.950	100,00	3.342.679	100,00	2.870.381	100,00	3.520.381	DINAS PKPLH
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawalan Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						2.452.716		2.076.187		1.657.815		2.647.726		2.532.568		4.243.620		8.343.620	
4.2	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					2.452.716		2.076.187		1.657.815		2.647.726		2.532.568		4.243.620		8.343.620	
	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	95.200	100,00	85.250	100,00	89.800	100,00	83.459	100,00	90.000	100,00	90.000	100,00	90.000	DINAS PKPLH
	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/kota Yang Ditangani	%	-	2.357.516	-	1.990.938	11,74	1.568.015	31,70	2.564.267	51,65	2.442.568	71,60	4.153.620	100,00	8.253.620	DINAS PKPLH
			Persentase rumah layak huni terbangun	%	57,15		57,33		57,51		57,69		57,87		58,05		58,23		
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						2.720.517		2.569.322		3.949.163		2.800.099		2.593.759		2.251.799		3.001.799	
4.3	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					2.720.517		2.569.322		3.949.163		2.800.099		2.593.759		2.251.799		3.001.799	
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase pemenuhan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100,00	322.859	100,00	237.250	100,00	300.000	100,00	300.000	-	-	100,00	300.000	-	-	DINAS PKPLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan kehati	%	-	1.110.000	-	181.817	9,09	250.000	18,18	50.000	27,27	50.000	36,36	50.000	45,45	350.000	DINAS PKPLH
			Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	%	17,42		20,62		23,81		23,81		23,81		23,81		23,81		DINAS PKPLH



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Poin	68,17	225.000	77,59	130.377	77,76	225.000	77,93	177.638	78,10	211.000	78,27	211.500	78,42	211.500	DINAS PKPLH
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah	Persentase ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah	%	-	-	-	-	100,00	25.000	100,00	70.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	DINAS PKPLH
	Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase sampah yang ditangani dan dikelola	%	56,78	1.062.658	75,01	2.019.879	75,94	3.149.163	76,91	2.202.461	77,90	2.232.759	78,92	1.590.299	80,00	2.340.299	DINAS PKPLH
URUSAN PERTANAHAN						200.000		534.200		200.000		523.057		530.995		135.032		134.200	
4.4	BIDANG PERTANAHAN					200.000		534.200		200.000		523.057		530.995		135.032		134.200	
	Program Penatagunaan Tanah	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas lahan penda bersertifikat	%	10,04	200.000	11,17	534.200	12,29	200.000	13,52	523.057	14,87	530.995	16,35	135.032	18,11	134.200	DINAS PKPLH
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					6.676.088		4.075.395		5.100.000		4.115.395		4.135.395		4.635.395		5.200.000	
5.1	NON URUSAN					2.280.885		3.242.206		4.336.821		3.242.206		3.242.206		3.772.407		4.337.012	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.280.885	100,00	3.242.206	100,00	4.336.821	100,00	3.242.206	100,00	3.242.206	100,00	3.772.407	100,00	4.337.012	SATPOL PP
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4.395.202		833.189		763.179		873.189		893.189		862.988		862.988	
5.2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					4.395.202		833.189		763.179		873.189		893.189		862.988		862.988	
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda/Perkada Kabupaten/Kota	%	0,03	4.359.997	0,05	764.311	0,07	664.502	0,70	804.311	0,75	824.311	0,80	764.311	0,85	784.311	SATPOL PP
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase pelanggaran Perda/Perbup yang ditindak	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	%	100,00	35.205	100,00	68.878	100,00	98.677	100,00	68.878	100,00	68.878	100,00	98.677	100,00	98.677	SATPOL PP
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					2.584.580		2.489.102		2.500.000		2.519.102		2.549.102		2.579.102		3.200.000	
6.1	NON URUSAN					1.443.818		1.516.337		1.398.367		1.516.337		1.516.337		1.516.337		1.516.337	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.443.818	100,00	1.516.337	100,00	1.398.367	100,00	1.516.337	100,00	1.516.337	100,00	1.516.337	100,00	1.516.337	BPBD
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
URUSAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						1.140.762		972.765		1.101.633		1.002.765		1.032.765		1.062.765		1.683.663	
6.2	PENANGGULANGAN BENCANA					1.140.762		972.765		1.101.633		1.002.765		1.032.765		1.062.765		1.683.663	
	Program Penanggulangan Bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100,00	1.140.762	100,00	972.765	100,00	1.101.633	100,00	1.002.765	100,00	1.032.765	100,00	1.062.765	100,00	1.683.663	BPBD
			Persentase Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Warga negara yang memperoleh layanan sesuai sistem dasar penanggulangan bencana	%	66,00		65,65		66,31		100,00		100,00		100,00		100,00		
7	DINAS SOSIAL					2.457.652		2.187.164		2.200.000		2.600.000		3.150.000		3.400.000		3.800.000	
7.1	NON URUSAN					1.993.467		1.760.601		1.832.892		1.810.601		1.880.601		1.982.892		2.064.807	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.993.467	100,00	1.760.601	100,00	1.832.892	100,00	1.810.601	100,00	1.880.601	100,00	1.982.892	100,00	2.064.807	DINAS SOSIAL
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
URUSAN SOSIAL						464.384		426.563		367.108		789.399		1.289.399		1.417.108		1.735.193	
7.2	BIDANG SOSIAL					464.384		426.563		367.108		789.399		1.289.399		1.417.108		1.735.193	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	59,09	122.689	68,67	163.493	69,20	96.785	69,70	263.493	70,37	413.493	71,21	413.493	72,21	513.493	DINAS SOSIAL
			persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	89,92		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Pelayanan dan Penanganan Fakir Miskin	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Penanganan Bencana	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan selama masa tanggap darurat	%	90,83	275.053	100,00	146.613	100,00	155.243	100,00	196.613	100,00	296.613	100,00	374.498	100,00	405.243	DINAS SOSIAL
	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Warga negara penyandang disabilitas tertantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	8,53	34.302	18,20	84.117	17,06	82.740	18,12	284.117	19,19	434.117	20,26	454.117	21,32	584.117	DINAS SOSIAL
			Persentase anak tertantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	38,76		46,51		50,39		54,26		58,14		62,02		65,89		
			Persentase Warga negara lanjut usia tertantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	3,04		10,27		11,58		12,30		13,02		13,75		14,47		
			Persentase Warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN														PD PENANGGUNGJAWAB
					BASELINE 2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase anak korban tindak kekerasan, ABH yang mendapat pendampingan dan bimbingan rehabilitasi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Pemberdayaan Sosial	Meningkatnya pemberdayaan sosial	persentase lembaga kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kualitas pelayanan	%	100,00	32.340	100,00	32.340	100,00	32.340	100,00	45.176	100,00	145.176	100,00	175.000	100,00	232.340	DINAS SOSIAL
			Persentase pemberdayaan kelembagaan sosial dan peran serta kepemudaan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI					4.353.831		2.208.920		2.371.215		2.733.246		3.350.000		3.400.000		4.000.000	
8.1	NON URUSAN					1.723.223		1.704.159		1.753.488		1.774.809		1.878.560		1.883.310		2.040.252	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.723.223	100,00	1.704.159	100,00	1.753.488	100,00	1.774.809	100,00	1.878.560	100,00	1.883.310	100,00	2.040.252	DINAS NAKERTRANS
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN TENAGA KERJA					311.634		326.524		418.000		208.437		231.440		523.354		564.050	
8.2	BIDANG TENAGA KERJA					311.634		326.524		418.000		208.437		231.440		523.354		564.050	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	94,29	285.799	95,45	100.729	91,67	150.000	92,31	153.437	92,86	155.000	93,33	400.000	96,77	433.333	DINAS NAKERTRANS



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja sesuai kebutuhan pasar kerja	%	-	-	-	-	50,00	35.000	53,13	30.000	55,68	35.000	58,33	35.000	60,53	35.000	DINAS NAKERTRANS
	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase Pekerja Pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	%	39,82	25.835	40,15	225.794	40,48	233.000	40,80	25.000	41,12	41.440	41,44	86.354	41,75	95.717	DINAS NAKERTRANS
URUSAN TRANSMIGRASI						2.318.974		178.238		199.727		750.000		1.240.000		993.336		1.395.697	
8.3	BIDANG TRANSMIGRASI					2.318.974		178.238		199.727		750.000		1.240.000		993.336		1.395.697	
	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang dilaksanakan	%	-	-	-	-	-	-	100,00	500.000	100,00	650.000	100,00	834.975	100,00	782.473	DINAS NAKERTRANS
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	%	0,80	2.147.699	0,80	72.291	0,80	70.000	0,80	200.000	0,80	440.000	0,80	258.361	0,80	463.224	DINAS NAKERTRANS
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	%	35,41	171.075	4,25	105.946	4,25	129.727	4,25	50.000	4,25	150.000	4,25	100.000	4,25	150.000	DINAS NAKERTRANS
			Persentase pengembangan kawasan transmigrasi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					9.875.617		7.862.141		7.870.000		7.889.513		7.939.513		7.989.513		8.500.000	
9.1	NON URUSAN					2.733.817		2.846.329		2.989.541		2.855.701		2.862.101		2.989.541		3.074.986	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.733.817	100,00	2.846.329	100,00	2.989.541	100,00	2.855.701	100,00	2.862.101	100,00	2.989.541	100,00	3.074.986	DINAS P3AP2KB
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					739.127		437.259		328.102		455.259		468.059		441.161		675.661	
9.2	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					739.127		437.259		328.102		455.259		468.059		441.161		675.661	
	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	100,00	40.199	100,00	40.600	100,00	23.100	100,00	40.600	100,00	40.600	100,00	40.600	100,00	104.300	DINAS P3AP2KB
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	61,40		62,00		64,00		66,00		68,00		69,00		70,00		
			Cakupan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	%	66,67		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Perlindungan Perempuan	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	82,07	305.000	83,65	146.046	84,43	50.487	85,54	155.046	87,65	161.446	89,74	146.046	90,24	231.446	DINAS P3AP2KB
			Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,07		0,06		0,05		0,04		0,03		0,02		0,01		
			Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase keluarga sejahtera	%	11,78	20 000	12,00	20 000	12,15	20 402	12,65	20 000	12,90	20 000	13,35	20 402	13,85	20 402	DINAS P3AP2KB
	Program Perlindungan Khusus Anak	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	85,07	373.928	86,25	230 613	87,35	234.113	88,45	239 613	89,55	246 013	90,65	234 113	91,75	319 513	DINAS P3AP2KB
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Poin	40,21		45,25		50,55		55,15		60,15		65,15		70,00		
			Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak (0 s/d <18 Tahun)	%	0,13		0,12		0,11		0,09		0,08		0,07		0,07		
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6.402.673		4.578.554		4.552.358		4.578.554		4.609.354		4.558.812		4.749.354	
9.3	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					6.402.673		4.578.554		4.552.358		4.578.554		4.609.354		4.558.812		4.749.354	
	Program Pengendalian Penduduk	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	3,04	289.400	3,01	402 900	3,02	302 900	3,01	402 900	3,00	418 300	2,99	402 900	2,98	488.300	DINAS P3AP2KB
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	29,40		28,00		26,70		25,60		24,60		23,60		22,80		
			Cakupan Pengendalian Penduduk	%	57,00		60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		85,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase Kehamilan yang tidak direncanakan	%	15,23		15,20		15,17		15,14		15,11		15,08		15,05		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	50,32	4.938.180	51,00	3.250.654	52,50	3.324.458	53,70	3.250.654	54,90	3.266.054	55,00	3.230.912	56,00	3.336.054	DINAS P3AP2KB
			Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	%	62,40		63,30		64,10		64,90		65,70		66,50		67,20		
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	4,20		4,90		5,70		6,40		7,10		7,80		8,50		
			Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	20,04		19,70		18,50		17,30		16,30		15,20		14,20		
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga	%	100,00	1.175.093	100,00	925.000	100,00	925.000	100,00	925.000	100,00	925.000	100,00	925.000	100,00	925.000	DINAS P3AP2KB
			Indeks Lansia Berdaya	%	55,00		55,50		55,90		56,30		56,70		57,10		57,50		
			Indeks Pengasuhan Remaja	%	78,00		79,30		80,50		81,60		82,60		83,50		84,40		
			Persentase Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga sejahtera	%	29,12		29,41		29,70		29,99		30,28		30,58		30,58		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					2.297.668		3.214.716		2.500.674		3.244.716		3.274.716		3.304.716		3.500.000	
10.1	NON URUSAN					1.947.771		2.249.326		1.990.424		2.279.326		2.250.950		2.280.950		2.449.326	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.947.771	100,00	2.249.326	100,00	1.990.424	100,00	2.279.326	100,00	2.250.950	100,00	2.280.950	100,00	2.449.326	DINAS DUKCAPIL
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					349.897		965.390		510.250		965.390		1.023.766		1.023.766		1.050.674	
10.2	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					349.897		965.390		510.250		965.390		1.023.766		1.023.766		1.050.674	
	Program Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	37,42	349.897	41,50	633.496	42,00	178.356	42,50	633.496	43,00	633.496	43,50	633.496	44,00	633.496	DINAS DUKCAPIL
			Persentase penerbitan KK	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penerbitan KTP Elektronik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Kepemilikan identitas kependudukan Digital	%	N/A		30,50		30,60		30,70		30,80		30,90		40,00		
	Program Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	92,00	-	94,00	90.270	96,00	90.270	98,00	90.270	100,00	90.270	100,00	90.270	100,00	117.178	DINAS DUKCAPIL
			Persentase penerbitan Akta Perkawinan	%	68,00		70,00		72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		
			Persentase penerbitan Akta Kematian	%	92,00		94,00		96,00		98,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penerbitan Akta Perceraian	%	43,00		44,00		45,00		46,00		47,00		48,00		49,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pemahaman informasi kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dan Pemanfaatan Data	%	100,00	476.352	100,00	241.624	100,00	241.624	100,00	241.624	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					2.846.681		3.008.426		3.413.101		3.057.852		3.107.852		3.157.852		4.200.000	
11.1	NON URUSAN					2.251.155		2.439.417		2.353.875		2.390.885		2.390.885		2.393.875		2.740.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.251.155	100,00	2.439.417	100,00	2.353.875	100,00	2.390.885	100,00	2.390.885	100,00	2.393.875	100,00	2.740.000	DINAS PMD
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					595.536		569.009		1.059.226		666.967		716.967		763.977		1.460.000	
11.2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					595.536		569.009		1.059.226		666.967		716.967		763.977		1.460.000	
	Program Penataan Desa	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%	100,00	97.803	100,00	69.000	100,00	65.706	100,00	65.706	100,00	65.706	100,00	46.708	100,00	115.000	DINAS PMD
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100,00	129.700	100,00	209.000	100,00	643.206	100,00	250.947	100,00	435.449	100,00	466.249	100,00	605.000	DINAS PMD
			Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Pemberdayaan Bumdes	%	23,76		26,73		29,70		32,67		35,64		39,60		42,57		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Desa (LKD)	%	100,00	368.033	100,00	291.009	100,00	350.314	100,00	350.314	100,00	215.812	100,00	251.022	100,00	740.000	DINAS PMD
			Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Pengetahuan dan Keterampilan dalam berinovasi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
12	DINAS PERHUBUNGAN					2.135.542		4.800.000		2.844.359		2.944.359		3.044.359		3.600.000			
12.1	NON URUSAN					2.060.542		2.036.728		2.290.000		2.269.359		2.294.359		2.389.359		3.020.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.060.542	100,00	2.036.728	100,00	2.290.000	100,00	2.269.359	100,00	2.294.359	100,00	2.389.359	100,00	3.020.000	DINAS PERHUBUNGAN
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN PERHUBUNGAN					75.000		707.632		2.510.000		575.000		650.000		655.000		580.000	
12.2	BIDANG PERHUBUNGAN					75.000		707.632		2.510.000		575.000		650.000		655.000		580.000	
	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas laut	%	24,11	25.000	23,81	12.500	23,84	470.000	24,50	75.000	25,17	160.000	25,83	165.000	26,49	70.000	DINAS PERHUBUNGAN



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pengelolaan Pelayaran	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas laut	%	24,11	25.000	23,81	12.500	23,84	470.000	24,50	75.000	25,17	160.000	25,83	165.000	26,49	70.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang kondisi ideal	%	53,99	50.000	23,81	695.132	25,28	2.040.000	26,74	500.000	28,20	490.000	29,66	490.000	31,13	510.000	DINAS PERHUBUNGAN
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN					2.477.867		2.925.287		3.488.241		3.025.287		3.125.288		3.225.288		3.500.000	
13.1	NON URUSAN					2.418.464		2.270.386		2.194.885		1.985.924		1.960.739		2.194.886		2.275.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.418.464	100,00	2.270.386	100,00	2.194.885	100,00	1.985.924	100,00	1.960.739	100,00	2.194.886	100,00	2.275.000	DINAS KISP
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					438.825		632.448		1.239.172		958.611		1.072.049		926.402		1.105.000	
13.2	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					438.825		632.448		1.239.172		958.611		1.072.049		926.402		1.105.000	
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	%	100,00	100.513	100,00	55.016	100,00	26.025	100,00	28.000	100,00	30.000	100,00	31.000	100,00	55.000	DINAS KISP
			Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	100,00		90,00		90,05		90,10		90,15		90,20		90,25		
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,35	338.312	3,45	577.431	3,55	1.213.147	3,65	930.611	3,75	1.042.049	4,00	895.402	4,50	1.050.000	DINAS KISP



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	URUSAN STATISTIK					29.127		13.850		29.712		30.752		32.500		34.000		40.000	
13.3	BIDANG STATISTIK					29.127		13.850		29.712		30.752		32.500		34.000		40.000	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (IPSS)	Poin	1,34	29.127	1,75	13.850	2,00	29.712	2,02	30.752	2,05	32.500	2,07	34.000	2,10	40.000	DINAS KISP
	URUSAN PERSANDIAN					23.990		8.604		24.472		50.000		60.000		70.000		80.000	
13.4	BIDANG PERSANDIAN					23.990		8.604		24.472		50.000		60.000		70.000		80.000	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	100,00	23.990	100,00	8.604	100,00	24.472	100,00	50.000	100,00	60.000	100,00	70.000	100,00	80.000	DINAS KISP
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN					5.390.434		3.847.154		6.097.154		4.109.154		4.309.154		4.509.154		7.000.000	
14.1	NON URUSAN					2.599.574		2.753.138		2.674.464		2.822.337		2.822.337		2.889.050		2.753.138	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.599.574	100,00	2.753.138	100,00	2.674.464	100,00	2.822.337	100,00	2.822.337	100,00	2.889.050	100,00	2.753.138	DINAS KOPERINDAG
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNG AWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					384.159		433.603		2.873.001		550.603		650.603		650.603		2.362.060	
14.2	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					384.159		433.603		2.873.001		550.603		650.603		650.603		2.362.060	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	84,73	9.985	32,68	10.945	33,66	20.000	34,63	15.945	35,61	15.945	36,59	15.945	37,56	20.000	DINAS KOPERINDAG
	Program Pendidikan dan latihan perkoperasian	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	100,00	150.460	100,00	100.000	-	-	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	100,00	100.000	DINAS KOPERINDAG
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	-	-	-	-	2,44	62.000	3,41	62.000	4,39	62.000	5,37	62.000	6,34	62.000	DINAS KOPERINDAG
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Usaha Mikro yang telah terfasilitasi untuk pengembangan produk	%	0,38	45.090	0,46	322.658	0,54	2.741.001	0,61	322.658	0,69	422.658	0,77	422.658	0,84	2.120.060	DINAS KOPERINDAG
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro	%	4,60	178.624	-	-	7,66	50.000	8,43	50.000	9,20	50.000	9,96	50.000	10,73	60.000	DINAS KOPERINDAG
	URUSAN PERDAGANGAN					92.469		170.881		175.548		199.681		299.681		312.968		579.181	
14.3	BIDANG PERDAGANGAN					92.469		170.881		175.548		199.681		299.681		312.968		579.181	
	Program Peningkatan Sarana Distribusi perdagangan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	-	-	0,17	79.681	0,33	94.068	0,67	99.681	0,83	199.681	1,00	205.968	1,17	579.681	DINAS KOPERINDAG
			Persentase Pemenuhan sarana Pedagang Kaki Lima (PKL)	%	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meningkatnya kelancaran dan distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Pemantauan dan pengawasan barang-barang kebutuhan pokok, penting dan bersubsidi	%	100,00	74.805	100,00	82.000	100,00	65.000	100,00	82.000	100,00	82.000	100,00	82.000	100,00	82.000	DINAS KOPERINDAG



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN RUTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	meningkatkan tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	34,90	17.664	34,90	9.200	35,48	16.480	36,07	18.000	36,66	18.000	37,24	25.000	37,83	17.500	DINAS KOPERINDAG
URUSAN PERINDUSTRIAN						2.314.232		489.533		374.141		536.533		536.533		656.533		1.205.622	
14.4	BIDANG PERINDUSTRIAN					2.314.232		489.533		374.141		536.533		536.533		656.533		1.205.622	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Kecil dan Menengah	%	11,31	2.269.644	12,49	343.411	12,66	346.641	12,82	390.411	12,99	390.411	13,16	510.411	13,33	1.059.500	DINAS KOPERINDAG
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana IKM	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Produk Olahan IKM yang memiliki label dan kemasan berstandar	%	39,47	24.588	52,63	146.122	55,92	27.500	69,08	146.122	82,24	146.122	95,39	146.122	100,00	146.122	DINAS KOPERINDAG
			Persentase Industri yang telah memiliki ijin	%	5,10		5,30		5,40		5,51		5,61		5,71		5,81		
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					2.598.952		2.261.997		2.300.000		2.311.997		2.361.997		2.411.997		2.500.000	
15.1	NON URUSAN					2.248.021		2.073.409		1.831.769		1.809.443		1.821.688		1.930.157		2.020.180	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.248.021	100,00	2.073.409	100,00	1.831.769	100,00	1.809.443	100,00	1.821.688	100,00	1.930.157	100,00	2.020.180	DINAS PMPTSP
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawain Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	URUSAN PENANAMAN MODAL					350.931		188.588		468.231		502.554		540.309		481.840		479.820	
15.2	BIDANG PENANAMAN MODAL					350.931		188.588		468.231		502.554		540.309		481.840		479.820	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase informasi peluang usaha sektor unggulan	%	-	-	-	-	100,00	125.000	100,00	125.000	100,00	125.000	100,00	105.000	100,00	100.000	DINAS PMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	66,00	64.491	91,00	12.050	93,00	18.944	96,00	20.839	97,00	22.922	99,00	25.215	100,00	27.736	DINAS PMPTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha	%	2,00	145.000	1,00	109.604	1,00	137.779	1,00	151.557	-	168.713	-	161.801	-	165.481	DINAS PMPTSP
			Persentase Ketaatan Berinvestasi	%	34,00		38,00		42,00		46,00		50,00		54,00		60,00		
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya perizinan usaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai Ketentuan	%	22,23	141.440	33,33	66.734	50,00	161.508	66,67	177.658	83,33	195.424	90,00	156.550	100,00	150.000	DINAS PMPTSP
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	meningkatkan pemanfaatan informasi penanaman modal	Persentase pengelolaan data dan Informasi Penanaman Modal	%	-	-	-	-	100,00	25.000	100,00	27.500	100,00	30.250	100,00	33.275	100,00	36.603	DINAS PMPTSP
16	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					-		-		7.221.692		7.496.192		7.848.192		7.896.192		8.500.000	
16.1	NON URUSAN					-		-		135.182		135.182		135.182		135.182		235.182	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	-	-	-	-	100,00	135.182	100,00	135.182	100,00	135.182	100,00	135.182	100,00	235.182	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					-		-		7.086.510		7.361.010		7.711.010		7.761.010		8.264.818	
16.2	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					-		-		7.086.510		7.361.010		7.711.010		7.761.010		8.264.818	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirasusaha Pemuda	%	-	-	-	-	100,00	4.645.107	100,00	5.310.734	100,00	5.597.566	100,00	5.634.829	100,00	6.138.637	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase pemuda berprestasi dan tidak mampu yang memperoleh beasiswa	%	-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahraagaan	Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase atlet yang berprestasi	%	-	-	-	-	87,73	2.168.403	87,73	1.977.954	87,85	2.038.874	87,90	2.051.181	88,00	2.051.181	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Meningktanya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	-	-	-	-	100,00	75.000	100,00	72.323	100,00	74.550	100,00	75.000	100,00	75.000	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
			Persentase anggota pramuka yang aktif	%	-	-	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
17	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						5.876.625		3.315.524		4.500.000		3.815.524		5.110.665		5.350.000		8.000.000
17.1	NON URUSAN						2.175.125		2.399.254		2.386.400		2.795.524		2.825.301		2.803.759		3.238.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.175.125	100,00	2.399.254	100,00	2.386.400	100,00	2.795.524	100,00	2.825.301	100,00	2.803.759	100,00	3.238.000	DINAS BUDPAR
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN KEBUDAYAAN					635.852		373.074		422.257		410.000		460.000		460.000		460.000	
17.2	BIDANG KEBUDAYAAN					635.852		373.074		422.257		410.000		460.000		460.000		460.000	
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	80,43	274.698	100,00	54.057	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	100,00	80.000	DINAS BUDPAR
			Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda ditetapkan	%	17,22		19,64		22,05		25,28		31,72		40,18		46,83		
	Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	4,85	361.154	7,97	319.017	9,97	362.257	11,29	350.000	16,61	400.000	21,92	400.000	26,57	400.000	DINAS BUDPAR
			Persentase warisan nilai Seni dan Budaya Daerah yang dilestarikan	%	80,43		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN PARIWISATA					3.065.648		543.196		1.691.343		610.000		1.825.364		2.086.241		4.302.000	
17.3	BIDANG PARIWISATA					3.065.648		543.196		1.691.343		610.000		1.825.364		2.086.241		4.302.000	
	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	100,00	201.000	100,00	119.650	100,00	450.000	100,00	90.000	100,00	160.000	100,00	160.000	100,00	650.000	DINAS BUDPAR
			Persentase penyelenggaraan event pariwisata	%	16,13		21,51		26,86		32,26		37,63		43,01		53,76		
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	93,57	2.004.147	89,47	333.430	90,91	1.111.343	93,62	378.000	94,00	1.505.000	94,34	1.755.635	94,64	2.765.000	DINAS BUDPAR
			Persentase destinasi wisata yang dikelola	%	18,28		18,28		21,51		24,73		29,03		32,26		37,63		
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	100,00	860.502	100,00	90.116	100,00	130.000	100,00	142.000	100,00	160.364	100,00	170.606	100,00	887.000	DINAS BUDPAR
			Persentase SDM kepariwisataan	%	3,42		3,76		4,11		4,79		6,84		8,21		8,90		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					1.916.480		1.872.679		1.769.615		1.952.679		1.982.679		2.012.679		2.200.000	
18.1	NON URUSAN					1.380.094		1.418.707		1.586.488		1.402.380		1.422.639		1.430.743		1.430.743	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.380.094	100,00	1.418.707	100,00	1.586.488	100,00	1.402.380	100,00	1.422.639	100,00	1.430.743	100,00	1.430.743	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN PERPUSTAKAAN					489.971		430.893		150.156		477.705		487.099		508.856		616.177	
18.2	BIDANG PERPUSTAKAAN					489.971		430.893		150.156		477.705		487.099		508.856		616.177	
	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	70,07	489.971	71,30	430.893	72,40	150.156	72,78	477.705	73,52	487.099	74,26	508.856	75,00	616.177	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase kunjungan ke perpustakaan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN KEARSIPAN					46.416		23.079		32.971		72.595		72.941		73.079		153.079	
18.3	BIDANG KEARSIPAN					46.416		23.079		32.971		72.595		72.941		73.079		153.079	
	Program Pengelolaan Arsip	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase pengelolaan arsip statis pada pemerintah	%	100,00	46.416	100,00	23.079	100,00	23.079	100,00	22.595	100,00	22.941	100,00	23.079	100,00	73.079	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase OPD yang mengelola arsip secara baku (terdata dan tertata secara baik)	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai dengan NSPK	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	-	-	-	-	4,55	9.891	11,36	50.000	15,91	50.000	20,45	50.000	25,00	80.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Persentase in aktif yang telah di buatkan daftar arsip	%	-	-	-	-	5,00		11,00		16,00		22,00		27,00		
			Persentase aktif statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	-	-	-	-	2,50		5,00		8,50		11,00		13,50		
19	DINAS PERIKANAN						8.267.627		3.615.062		3.700.000		3.815.063		4.015.063		4.215.063		6.000.000
19.1	NON URUSAN						1.623.100		1.835.530		1.626.640		1.832.724		1.941.129		2.036.617		2.275.029
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.623.100	100,00	1.835.530	100,00	1.626.640	100,00	1.832.724	100,00	1.941.129	100,00	2.036.617	100,00	2.275.029	DINAS PERIKANAN
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawalan Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						6.644.527		1.779.532		2.073.360		1.982.339		2.073.934		2.178.446		3.724.971
19.2	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						6.644.527		1.779.532		2.073.360		1.982.339		2.073.934		2.178.446		3.724.971
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2.718	2.609.865	3.043	1.017.086	3.407	1.018.430	3.811	984.897	4.258	997.278	4.752	1.018.088	5.296	1.773.278	DINAS PERIKANAN
			Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap yang diadakan	%	5,05		6,78		8,60		10,53		12,56		14,69		16,92		
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kp/Tahun	59,51	276.378	64,28	225.644	67,19	349.047	70,11	220.000	73,03	270.000	75,95	270.000	78,87	620.000	DINAS PERIKANAN



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase sarana dan prasarana produksi olahan hasil perikanan yang diadakan	%	15,00		20,00		30,00		40,00		50,00		60,00		70,00		
			Persentase pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan yang terlatih	%	5,00		12,50		18,33		24,17		30,00		35,83		43,33		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	18,40	3.758.285	19,00	536.802	22,00	705.883	23,00	777.442	24,00	806.655	25,00	890.360	26,25	1.331.693	DINAS PERIKANAN
			Persentase pelaku perikanan budidaya yang terlatih	%	0,31		0,33		0,35		0,38		0,42		0,46		0,50		
			Persentase sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang diadakan	%	1,77		1,85		1,92		2,00		2,08		2,15		2,23		
20	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN					27.565.712		15.616.784		13.847.130		15.000.000		15.100.000		15.200.000		20.300.000	
20.1	NON URUSAN					7.116.904		6.722.502		6.517.102		6.963.200		6.963.200		6.963.200		7.080.024	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	7.116.904	100,00	6.722.502	100,00	6.517.102	100,00	6.963.200	100,00	6.963.200	100,00	6.963.200	100,00	7.080.024	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	URUSAN PANGAN					2.072.500		184.272		140.773		180.000		180.000		180.000		270.000	
20.2	BIDANG PANGAN					2.072.500		184.272		140.773		180.000		180.000		180.000		270.000	
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	55,50	1.922.500	60,50	87.500	65,50	37.500	70,50	65.000	75,50	65.000	80,50	65.000	85,50	95.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase cadangan pangan daerah	%	8,02		9,13		10,23		11,34		12,45		13,55		14,66		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan desa rawan pangan	%	2,22	75.000	2,27	51.334	2,33	57.835	2,38	65.000	2,44	65.000	2,50	65.000	2,56	100.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	95,00	75.000	100,00	45.438	100,00	45.438	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	75.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	URUSAN PERTANIAN					18.376.307		8.710.010		7.189.256		7.856.800		7.956.800		8.056.800		12.949.976	
20.3	PERTANIAN					18.376.307		8.710.010		7.189.256		7.856.800		7.956.800		8.056.800		12.949.976	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Produksi Tanaman Pangan	%	1,59	4.539.302	1,60	4.665.156	1,62	5.339.280	1,64	5.906.824	1,65	6.006.824	1,67	6.006.824	1,69	8.125.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase Produksi Hortikultura	%	0,79		0,80		0,81		0,82		0,83		0,84		0,85		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	94,30	13.562.006	98,33	3.718.876	69,17	1.800.000	70,00	1.850.000	70,83	1.850.000	71,67	1.925.000	72,50	4.700.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase prasarana pertanian yang disediakan	%	88,00		11,67		23,33		35,00		46,67		58,33		70,00		
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	-	-	-	-	-	-	5,00	50.000	6,00	50.000	7,00	75.000	8,00	75.000	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	%	1,10	275.000	2,19	325.976	2,28	49.976	2,38	49.976	2,48	49.976	2,57	49.976	2,67	49.976	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	DINAS PETERNAKAN					11.423.552		7.369.733		9.000.000		7.489.733		7.589.733		7.689.730		8.500.000	
21.1	NON URUSAN					4.219.380		4.510.428		4.619.507		4.619.507		4.659.615		4.659.615		4.795.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	4.219.380	100,00	4.510.428	100,00	4.619.507	100,00	4.619.507	100,00	4.659.615	100,00	4.659.615	100,00	4.795.000	DINAS PETERNAKAN
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	URUSAN PERTANIAN					7.204.172		2.859.305		4.380.493		2.870.226		2.930.118		3.030.115		3.705.000	
21.2	BIDANG PERTANIAN					7.204.172		2.859.305		4.380.493		2.870.226		2.930.118		3.030.115		3.705.000	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Produksi Komoditas Peternakan	%	3,16	1.003.613	3,42	1.804.954	4,72	3.023.448	6,91	1.755.708	7,47	1.815.860	7,92	1.815.656	8,16	2.325.000	DINAS PETERNAKAN
			Cakupan pemanfaatan luas lahan hijauan makanan ternak (HMT)	%	9,00	-	10,00	-	11,00	-	12,00	-	13,00	-	14,00	-	15,00	-	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase prasarana peternakan yang diadakan	%	9,17	4.385.837	10,00	350.000	10,83	551.300	11,67	352.613	12,50	353.939	13,33	353.939	14,17	400.000	DINAS PETERNAKAN
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PMHS)	%	5,00	1.713.940	5,50	629.798	6,00	699.798	6,50	595.905	7,00	594.269	7,50	594.470	8,00	705.000	DINAS PETERNAKAN
			Persentase pengiriman ternak ke luar daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan berusaha pertanian	Persentase usaha peternakan yang memiliki izin	%	100,00	100.782	100,00	74.553	100,00	105.947	100,00	128.000	100,00	128.050	100,00	128.050	100,00	215.000	DINAS PETERNAKAN
			Persentase pemasaran hasil produksi peternakan	%	0,77		0,90		1,03		1,16		1,28		1,41		1,54		DINAS PETERNAKAN
	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyuluh peternakan	%	-	-	-	-	-	-	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00	60.000	DINAS PETERNAKAN
UNSUR SEKRETARIAT DAERAH																			
22	BAGIAN ORGANISASI					381.383		298.897		370.000		380.000		420.000		460.000		500.000	
22.1	NON URUSAN					174.210		135.415		165.415		175.415		195.415		215.415		275.415	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	174.210	100,00	135.415	100,00	165.415	100,00	175.415	100,00	195.415	100,00	215.415	100,00	275.415	BAGIAN ORGANISASI
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
22.2	ORGANISASI					187.174		163.483		204.586		204.586		224.586		244.586		324.586	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	%	100,00	187.174	100,00	163.483	100,00	204.586	100,00	204.586	100,00	224.586	100,00	244.586	100,00	324.586	BAGIAN ORGANISASI



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
23	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					3.009.335		6.226.075		8.000.000		8.545.060		9.326.075		6.376.075		10.000.000	
23.1	NON URUSAN					982.217		4.536.551		6.442.210		5.855.537		6.636.552		4.536.551		7.345.477	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	982.217	100,00	4.536.551	100,00	6.442.210	100,00	5.855.537	100,00	6.636.552	100,00	4.536.551	100,00	7.345.477	BAGIAN PEMKESRA
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
23.2	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					2.027.118		1.689.524		1.557.790		2.689.524		2.689.524		1.839.524		2.654.524	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	%	100,00	2.027.118	100,00	1.689.524	100,00	1.557.790	100,00	2.689.524	100,00	2.689.524	100,00	1.839.524	100,00	2.654.524	BAGIAN PEMKESRA
			Cakupan pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Dalam Negeri	%	N/A		N/A		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
24	BAGIAN HUKUM					422.511		318.780		320.000		325.000		350.000		375.000		500.000	
24.1	NON URUSAN					156.909		135.493		187.401		135.493		135.493		141.512		141.503	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	156.909	100,00	135.493	100,00	187.401	100,00	135.493	100,00	135.493	100,00	141.512	100,00	141.503	BAGIAN HUKUM



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
24.2	HUKUM					265.702		183.287		132.599		189.507		214.507		233.488		358.497	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Cakupan Penataan Produk Hukum Daerah	%	100,00	265.702	100,00	183.287	100,00	132.599	100,00	189.507	100,00	214.507	100,00	233.488	100,00	358.497	BAGIAN HUKUM
			Persentase Rancangan Perda yang Diharmonisasi dan disistensi	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
25	BIDANG PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					1.026.905		743.887		607.035		650.000		700.000		750.000		900.000	
25.1	NON URUSAN					152.065		134.964		134.964		134.964		134.964		134.964		134.964	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	152.065	100,00	134.964	100,00	134.964	100,00	134.964	100,00	134.964	100,00	134.964	100,00	134.964	BAGIAN EKSBANG
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB		
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)		TARGET	PAGU (x 1.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
25.2	PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					873.841		608.923		472.071		515.036		565.036		615.036		765.036	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perkonomanian dan pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100,00	873.841	100,00	608.923	100,00	472.071	100,00	515.036	100,00	565.036	100,00	615.036	100,00	765.036	BAGIAN EKBANG
26	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA					771.080		769.017		770.000		780.000		810.000		840.000		900.000	
25.1	NON URUSAN					174.829		123.107		123.000		147.654		167.965		194.081		254.081	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	174.829	100,00	123.107	100,00	123.000	100,00	147.654	100,00	167.965	100,00	194.081	100,00	254.081	BAGIAN PBJ
			Persentase terpenuhiya layanan umum dan kepegawalan Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
26.2	PENGADAAN BARANG/JASA					596.252		645.910		647.000		632.346		642.035		645.919		645.919	
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perkonomanian dan pembangunan	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	14,51	596.252	16,62	645.910	17,22	647.000	20,32	632.346	21,92	642.035	24,52	645.919	25,12	645.919	BAGIAN PBJ
			Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	Skor	8,82		8,82		10,59		12,35		14,12		15,88		17,65		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PO PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)	Skor	13,33		17,78		26,67		31,11		35,56		40,00		40,00		
27	BAGIAN UMUM					19.781.211		19.211.950		19.217.291		19.311.950		19.411.950		23.551.802		25.000.000	
27.1	NON URUSAN					15.198.475		12.969.067		16.319.318		16.269.078		16.216.935		20.197.036		21.477.495	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	15.198.475	100,00	12.969.067	100,00	16.319.318	100,00	16.269.078	100,00	16.216.935	100,00	20.197.036	100,00	21.477.495	BAGIAN UMUM
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
27.2	UMUM					4.582.736		6.242.882		2.897.973		3.042.872		3.195.015		3.354.766		3.522.505	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Cakupan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	%	100,00	4.582.736	100,00	6.242.882	100,00	2.897.973	100,00	3.042.872	100,00	3.195.015	100,00	3.354.766	100,00	3.522.505	
28	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					29.849.475		28.242.841		27.606.850		28.000.000		28.200.000		28.400.000		29.000.000	
28.1	NON URUSAN					16.295.162		17.197.499		16.861.695		16.507.600		16.760.526		16.861.696		16.861.696	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	16.295.162	100,00	17.197.499	100,00	16.861.695	100,00	16.507.600	100,00	16.760.526	100,00	16.861.696	100,00	16.861.696	SEKRETARIAT DPRD
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
UNSUR SEKRETARIAT DPRD						13.554.314		11.045.342		10.745.155		11.492.400		11.439.474		11.538.304		12.138.304	
28.2	SEKRETARIAT DPRD					13.554.314		11.045.342		10.745.155		11.492.400		11.439.474		11.538.304		12.138.304	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	ketepatan penetapan perda APBD Tahun N	%	100,00	13.554.314	100,00	11.045.342	100,00	10.745.155	100,00	11.492.400	100,00	11.439.474	100,00	11.538.304	100,00	12.138.304	SEKRETARIAT DPRD
			persentase penetapan Ranperda Tahun N	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Dukungan Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
29	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH					6.481.192		5.080.077		5.142.027		5.242.027		5.342.027		5.442.027		6.500.000	
29.1	NON URUSAN					2.737.829		2.882.680		2.855.343		2.754.343		2.855.343		2.855.343		3.247.979	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.737.829	100,00	2.882.680	100,00	2.855.343	100,00	2.754.343	100,00	2.855.343	100,00	2.855.343	100,00	3.247.979	BAPPERIDA
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
UNSUR PERENCANAAN						1.307.382		964.113		1.921.500		2.222.538		2.061.500		2.162.126		2.827.484	
29.2	PERENCANAAN					1.307.382		964.113		1.921.500		2.222.538		2.061.500		2.162.126		2.827.484	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu	%	100,00	922.002	100,00	660.715	100,00	1.124.500	100,00	1.077.784	100,00	1.070.000	100,00	1.140.484	100,00	1.508.484	BAPPERIDA
			Persentase data pembangunan daerah yang terupdate	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase pemenuhan kegiatan monev untuk perencanaan pembangunan daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	%	100,00	385.380	100,00	303.397	100,00	797.000	100,00	1.144.754	100,00	991.500	100,00	1.021.663	100,00	1.319.000	BAPPERIDA
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	%	80,00		85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		80,00		85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		
		Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	80,00		85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		90,00		
UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						2.402.007		1.220.146		334.558		250.146		384.558		384.558		384.558	
29.3	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.402.007		1.220.146		334.558		250.146		384.558		384.558		384.558	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan	persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang memanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	%	100,00	2.402.007	100,00	1.220.146	100,00	334.558	100,00	250.146	100,00	384.558	100,00	384.558	100,00	384.558	BAPPERIDA
		Meningkatnya fasilitas terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	persentase fasilitas terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
UNSUR PENGELOLAAN PERBATASAN						13.974		13.138		30.626		15.000		40.626		40.000		40.000	
29.4	PENGELOLAAN PERBATASAN					13.974		13.138		30.626		15.000		40.626		40.000		40.000	
	Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya pemanfaatan kawasan perbatasan	Persentase Pemenuhan Perencanaan dan Fasilitas Program Pengelolaan Perbatasan	%	100,00	13.974	100,00	13.138	100,00	30.626	100,00	15.000	100,00	40.626	100,00	40.000	100,00	40.000	BAPPERIDA



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
30	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					170.257.655		194.717.884		210.000.000		194.699.999		194.692.883		211.423.336		219.738.945	
30.1	NON URUSAN					12.372.789		38.705.643		51.318.937		41.894.837		39.554.865		54.352.184		60.068.988	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	12.372.789	100,00	38.705.643	100,00	51.318.937	100,00	41.894.837	100,00	39.554.865	100,00	54.352.184	100,00	60.068.988	BKAD
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawain Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	UNSUR KEUANGAN					157.884.866		156.012.241		158.681.063		152.805.162		155.138.018		157.071.152		159.667.957	
30.2	KEUANGAN					157.884.866		156.012.241		158.681.063		152.805.162		155.138.018		157.071.152		159.667.957	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	%	33,84	157.331.491	33,95	155.565.579	34,29	158.133.381	34,63	152.257.480	34,98	154.590.336	35,33	156.523.470	35,68	158.930.279	BKAD
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	11,91		9,50		9,50		9,60		9,69		9,79		9,89		
			Persentase Penerbitan Dokumen penganggaran daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	4,79	553.375	1,51	446.662	1,54	547.682	1,57	547.682	1,60	547.682	1,64	547.682	1,67	737.678	BKAD
			Penetapan SSH Tepat Waktu	%	50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00		
			Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan barang milik daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
31	BADAN PENDAPATAN DAERAH					4.714.310		6.574.598		6.933.656		6.950.000		8.975.000		7.000.000		7.500.000	
31.1	NON URUSAN					3.841.026		6.019.088		6.047.105		6.063.449		6.079.584		6.095.630		6.585.586	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	3.841.026	100,00	6.019.088	100,00	6.047.105	100,00	6.063.449	100,00	6.079.584	100,00	6.095.630	100,00	6.585.586	BAPENDA
			Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	UNSUR KEUANGAN					873.284		555.510		886.551		886.551		895.416		904.370		914.414	
31.2	PENDAPATAN					873.284		555.510		886.551		886.551		895.416		904.370		914.414	
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	persentase PAD terhadap pendapatan daerah	%	2,21	873.284	2,95	555.510	3,30	886.551	3,38	886.551	3,57	895.416	3,81	904.370	3,98	914.414	BAPENDA
			Persentase pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	%	16,61		16,28		15,95		15,83		15,32		15,01		14,71		
			Persentase Realisasi Pajak daerah	%	102,38		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Realisasi retribusi daerah dan pendapatan daerah lain-lain	%	69,71		77,87		77,87		81,04		84,34		87,45		100,00		
			Persentase Realisasi PBB	%	53,81		84,78		87,20		74,22		81,97		90,54		100,00		
			Persentase Perangkat Daerah yang tertib administrasi pendapatan	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PD PENANGGUNGJAWAB		
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029			2030	
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)		TARGET	PAGU (x 1.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH					4.888.748		4.428.255		3.972.391		4.430.255		4.450.255		4.470.255		4.500.000	
33.1	NON URUSAN					2.437.072		2.136.931		2.079.571		2.350.966		2.356.689		2.356.689		2.356.689	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.437.072	100,00	2.136.931	100,00	2.079.571	100,00	2.350.966	100,00	2.356.689	100,00	2.356.689	100,00	2.356.689	BKPSDMD
			persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	UNSUR KEPEGAWAIAN					2.122.997		1.598.633		1.591.133		1.777.602		1.791.878		1.811.878		1.836.878	
33.2	KEPEGAWAIAN					2.122.997		1.598.633		1.591.133		1.777.602		1.791.878		1.811.878		1.836.878	
	Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	%	100,00	2.122.997	100,00	1.598.633	100,00	1.591.133	100,00	1.777.602	100,00	1.791.878	100,00	1.811.878	100,00	1.836.878	BKPSDMD
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan SDM ASN	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase data kepegawaian yang ter-update, akurat, cepat dan tepat	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan dan melaksanakan peraturan disiplin Cakupan Pembinaan Korpri	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						328.678		692.690		301.687		301.687		301.687		301.687		308.432	
33.3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					328.678		692.690		301.687		301.687		301.687		301.687		308.432	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	%	100,00	328.678	100,00	692.690	100,00	301.687	100,00	301.687	100,00	301.687	100,00	301.687	100,00	308.432	BKPSDMD
		Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase pengembangan SDM ASN	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
34	INSPEKTORAT DAERAH					4.064.853		4.951.554		4.960.000		4.961.554		5.011.554		5.061.554		6.000.000	
34.1	NON URUSAN					3.057.614		3.540.322		3.326.118		3.326.118		3.330.580		3.350.684		3.402.692	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	3.057.614	100,00	3.540.322	100,00	3.326.118	100,00	3.326.118	100,00	3.330.580	100,00	3.350.684	100,00	3.402.692	INSPEKTORAT DAERAH
			persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UNSUR PENGAWASAN						999.739		1.404.414		1.627.109		1.628.761		1.674.197		1.704.051		2.590.412	
34.2	INSPEKTORAT DAERAH					1.007.239		1.411.242		1.633.882		1.635.446		1.680.984		1.710.880		2.597.308	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Menurunnya terjadinya penyelewangan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewanangan	Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK	Temuan	9,00	999.739	10,00	1.404.414	9,00	1.627.109	8,00	1.628.761	7,00	1.674.197	5,00	1.704.051	5,00	2.590.412	INSPEKTORAT DAERAH
			Persentase Review dokumen Perangkat Daerah (RKA, RENSTRA, LKIP, DAK dan dokumen lainnya)	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Persentase Review dokumen pemerintah Daerah (RKPD, Perubahan RKPD, RPJPD, RPJMD, LKPJ, LPPD, LKIP, KUA-PPAS, KUA-PPAS Perubahan dan dokumen lainnya)	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			Nilai Hasil Evaluasi Maturitas SPIP	Level	1,00		1,00		1,00		2,00		2,00		2,00		3,00		
			Nilai Hasil Kapabilitas APIP	Level	1,00		1,00		1,00		2,00		2,00		2,00		3,00		
			Persentase Aparatur Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang Profesional	%	76,00		80,00		84,00		88,00		92,00		96,00		100,00		
			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	%	75,00		77,00		80,00		83,00		85,00		87,00		89,00		
			Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	%	75,00		78,00		80,00		82,00		84,00		86,00		88,00		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Perangkat Daerah Yang Memenuhi Nilai Integritas Pencegahan Korupsi	%	75,00	7.500	75,75	8.828	76,51	6.773	77,00	6.685	77,50	6.787	78,00	6.829	78,00	6.887	INSPEKTORAT DAERAH



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
UNSUR KEWILAYAHAN																			
35 KECAMATAN LOBALAIN						4.404.101		4.658.069		4.660.000		4.698.069		4.738.069		4.778.069		5.000.000	
35.1 NON URUSAN						3.409.716		3.652.831		3.591.172		3.684.032		3.703.904		3.702.915		3.901.505	
	Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhi	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	3.409.716	100,00	3.652.831	100,00	3.591.172	100,00	3.684.032	100,00	3.703.904	100,00	3.702.915	100,00	3.901.505	KECAMATAN LOBALAIN
			persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
35.2 KECAMATAN LOBALAIN						994.385		1.005.239		1.068.829		1.014.038		1.034.165		1.075.154		1.098.495	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Koordinasi Forum Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	-	100,00	9.655	100,00	39.685	100,00	9.655	100,00	9.655	100,00	9.655	100,00	9.655	KECAMATAN LOBALAIN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	942.885	100,00	957.213	100,00	950.793	100,00	957.213	100,00	957.340	100,00	976.999,00	100,00	987.340	KECAMATAN LOBALAIN
	Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketertarikan dan ketertiban umum	%	100,00	51.500	100,00	22.170	100,00	62.170	100,00	22.170	100,00	22.170	100,00	51.500	100,00	51.500	KECAMATAN LOBALAIN



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya fasilitas dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%		-	100,00	18.201	100,00	16.201	100,00	25.000	100,00	35.000	100,00	35.000	100,00	50.000	
36	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT					2.363.822		2.388.110		2.400.000		2.408.110		2.428.110		2.448.110		2.600.000	
36.1	NON URUSAN					2.044.179		2.065.548		2.103.455		2.085.548		2.105.548		2.125.548		2.277.438	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.044.179	100,00	2.065.548	100,00	2.103.455	100,00	2.085.548	100,00	2.105.548	100,00	2.125.548	100,00	2.277.438	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
			persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
36.2	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT					319.643		322.562		298.545		322.562		322.562		322.562		322.562	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Koordinasi Forum Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	-	100,00	2.375	100,00	6.000	100,00	2.375	100,00	2.375	100,00	2.375	100,00	2.375	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	294.015	100,00	302.265	100,00	277.045	100,00	302.265	100,00	302.265	100,00	302.265	100,00	302.265	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	25.628	100,00	8.240	100,00	5.000	100,00	8.240	100,00	8.240	100,00	8.240	100,00	8.240	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya fasilitasi dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	-	-	100,00	9.682	100,00	8.500	100,00	9.682	100,00	9.682	100,00	9.682	100,00	9.682	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT
37	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA					2.257.068		1.411.908		1.420.000		1.452.108		1.482.108		1.512.108		1.700.000	
37.1	NON URUSAN					1.974.024		1.350.473		1.374.536		1.357.643		1.380.323		1.410.323		1.569.823	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.974.024	100,00	1.350.473	100,00	1.374.536	100,00	1.357.643	100,00	1.380.323	100,00	1.410.323	100,00	1.569.823	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
			persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
37.2	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA					283.044		61.435		45.464		94.465		101.785		101.785		130.177	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Koordinasi Forum Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	52.544	100,00	10.981	100,00	11.116	100,00	15.700	100,00	15.700	100,00	15.700	100,00	20.177	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	135.000	100,00	12.074	100,00	12.074	100,00	17.000	100,00	25.000	100,00	25.000	100,00	30.000	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	95.500	-	-	100,00	10.200	100,00	11.765	100,00	11.085	100,00	11.085	100,00	20.000	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya fasilitas dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	-	-	100,00	38.380	100,00	12.074	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	100,00	50.000	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA
38	KECAMATAN ROTE BARAT					1.374.430		1.379.976		1.390.876		1.421.259		1.436.259		1.451.259		1.700.000	
38.1	NON URUSAN					1.344.030		1.366.696		1.351.013		1.381.396		1.396.396		1.411.446		1.660.187	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.344.030	100,00	1.366.696	100,00	1.351.013	100,00	1.381.396	100,00	1.396.396	100,00	1.411.446	100,00	1.660.187	KECAMATAN ROTE BARAT
			persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
38.2	KECAMATAN ROTE BARAT					30.400		13.280		39.863		39.863		39.863		39.813		39.813	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Koordinasi Forum Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	-	-	-	100,00	9.825	100,00	9.825	100,00	9.825	100,00	9.825	100,00	9.825	KECAMATAN ROTE BARAT
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	10.000	100,00	13.280	100,00	13.580	100,00	13.580	100,00	13.580	100,00	13.530	100,00	13.530	KECAMATAN ROTE BARAT
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	20.400	-	-	100,00	10.200	100,00	10.200	100,00	10.200	100,00	10.200	100,00	10.200	KECAMATAN ROTE BARAT



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya fasilitas dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	-	-	-	-	100,00	6.258	100,00	6.258	100,00	6.258	100,00	6.258	100,00	6.258	KECAMATAN ROTE BARAT
39	KECAMATAN ROTE SELATAN						1.340.412		1.340.854		1.350.000		1.361.154		1.376.154		1.391.154		1.700.000
39.1	NON URUSAN						1.281.665		1.284.443		1.242.400		1.247.051		1.262.051		1.277.051		1.529.397
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.281.665	100,00	1.284.443	100,00	1.242.400	100,00	1.247.051	100,00	1.262.051	100,00	1.277.051	100,00	1.529.397	KECAMATAN ROTE SELATAN
			persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
39.2	KECAMATAN ROTE SELATAN						58.747		58.412		107.600		114.103		114.103		114.103		170.603
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Koordinasi Forum Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	-	100,00	2.580	100,00	32.600	100,00	34.103	100,00	34.103	100,00	34.103	100,00	80.603	KECAMATAN ROTE SELATAN
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	22.895	100,00	25.854	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	30.000	KECAMATAN ROTE SELATAN



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	35.852	100,00	17.243	100,00	35.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	100,00	40.000	KECAMATAN ROTE SELATAN
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya fasilitasi dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Terb. Pengelolaan Administrasi	%	-	-	100,00	10.735	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	KECAMATAN ROTE SELATAN
40	KECAMATAN ROTE TENGAH					2.342.086		2.407.759		2.410.000		2.422.759		2.437.759		2.452.759		2.600.000	
40.1	NON URUSAN					2.019.726		2.065.469		1.979.605		2.043.922		2.054.422		2.067.805		2.205.046	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	2.019.726	100,00	2.065.469	100,00	1.979.605	100,00	2.043.922	100,00	2.054.422	100,00	2.067.805	100,00	2.205.046	KECAMATAN ROTE TENGAH
			persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
40.2	KECAMATAN ROTE TENGAH					322.360		342.290		430.395		378.837		383.337		384.954		394.954	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Koordinasi Forum Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	-	100,00	-	100,00	50.825	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	KECAMATAN ROTE TENGAH
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	313.510	100,00	338.940	100,00	330.570,00	100,00	318.837	100,00	323.337	100,00	324.954,00	100,00	334.954	KECAMATAN ROTE TENGAH



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	8.850	100,00	2.600	100,00	29.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	KECAMATAN ROTE TENGAH
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya fasilitasi dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	-	-	100,00	750	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	100,00	20.000	KECAMATAN ROTE TENGAH
41	KECAMATAN PANTAI BARU					2.178.947		2.698.865		2.700.000		2.713.865		2.728.865		2.743.865		2.900.000	
41.1	NON URUSAN					1.891.587		2.398.775		2.400.000		2.409.608		2.423.854		2.435.320		2.535.320	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.891.587	100,00	2.398.775	100,00	2.400.000	100,00	2.409.608	100,00	2.423.854	100,00	2.435.320	100,00	2.535.320	KECAMATAN PANTAI BARU
			persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
41.2	KECAMATAN PANTAI BARU					287.360		300.090		300.000		304.257		305.011		308.545		364.680	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Koordinasi Forum Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	-	100,00	850	100,00	2.400	100,00	3.400	100,00	3.400	100,00	3.400	100,00	15.000	KECAMATAN PANTAI BARU
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	280.700	100,00	289.350	100,00	281.422	100,00	284.127	100,00	284.808	100,00	288.310	100,00	322.580	KECAMATAN PANTAI BARU



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	6.660	100,00	4.960	100,00	6.318	100,00	6.800	100,00	6.868	100,00	6.900	100,00	12.900	KECAMATAN PANTAI BARU
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya fasilitasi dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	-	-	100,00	4.930	100,00	9.860	100,00	9.930	100,00	9.935	100,00	9.935	100,00	14.200	KECAMATAN PANTAI BARU
42	KECAMATAN ROTE TIMUR					1.595.334		1.706.863		1.710.363		1.721.863		1.736.863		1.751.863		1.900.000	
42.1	NON URUSAN					1.236.017		1.367.435		1.367.435		1.368.935		1.378.935		1.388.935		1.483.572	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.236.017	100,00	1.367.435	100,00	1.367.435	100,00	1.368.935	100,00	1.378.935	100,00	1.388.935	100,00	1.483.572	KECAMATAN ROTE TIMUR
			persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
42.2	KECAMATAN ROTE TIMUR					359.317		339.428		342.928		352.928		357.928		362.928		416.428	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Koordinasi Forum Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	-	-	-	100,00	3.500	100,00	8.500	100,00	8.500	100,00	8.500	100,00	28.000	KECAMATAN ROTE TIMUR
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	324.303	100,00	317.511	100,00	317.511	100,00	317.511	100,00	317.511	100,00	317.511	100,00	335.511	KECAMATAN ROTE TIMUR



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	35.014	100,00	10.457	100,00	10.457	100,00	10.457	100,00	10.457	100,00	10.457	100,00	20.457	KECAMATAN ROTE TIMUR
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya fasilitasi dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	-	-	100,00	11.460	100,00	11.460	100,00	11.460	100,00	21.460	100,00	21.460	100,00	32.460	KECAMATAN ROTE TIMUR
43	KECAMATAN NDAO NUSE					649.958		799.903		800.000		814.903		829.903		844.903		1.000.000	
43.1	NON URUSAN					611.508		753.412		719.327		734.230		749.230		764.230		919.327	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	611.508	100,00	753.412	100,00	719.327	100,00	734.230	100,00	749.230	100,00	764.230	100,00	919.327	KECAMATAN NDAO NUSE
			persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
43.2	KECAMATAN NDAO NUSE					38.450		46.491		60.673		60.673		60.673		60.673		60.673	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Koordinasi Forum Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	-	100,00	15.286	100,00	25.348	100,00	25.348	100,00	25.348	100,00	25.348	100,00	25.348	KECAMATAN NDAO NUSE
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	29.600	100,00	24.535	100,00	29.235	100,00	29.235	100,00	29.235	100,00	29.235	100,00	29.235	KECAMATAN NDAO NUSE



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	8.850	100,00	1.750	100,00	14.350	100,00	14.350	100,00	14.350	100,00	14.350	100,00	14.350	KECAMATAN NDAO NUSE
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya fasilitas dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	-	-	100,00	4.920	100,00	11.740	100,00	11.740	100,00	11.740	100,00	11.740	100,00	11.740	KECAMATAN NDAO NUSE
44	KECAMATAN LANDU LEKO					848.604		1.008.712		1.010.000		1.021.712		1.036.712		1.051.712		1.200.000	
44.1	NON URUSAN					760.797		946.289		969.835		961.288		976.288		990.988		1.116.856	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	760.797	100,00	946.289	100,00	969.835	100,00	961.288	100,00	976.288	100,00	990.988	100,00	1.116.856	KECAMATAN LANDU LEKO
			persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
44.2	KECAMATAN LANDU LEKO					87.807		60.424		40.165		60.424		60.424		60.724		83.344	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Koordinasi Forum Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00	28.012	100,00	9.580	100,00	7.500	100,00	9.580	100,00	9.580	100,00	9.580	100,00	14.000	KECAMATAN LANDULEKO
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	41.665	100,00	32.019	100,00	15.165	100,00	32.019	100,00	32.019	100,00	32.019	100,00	34.539	KECAMATAN LANDULEKO



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan ketertiban umum	%	100,00	20.130	100,00	9.125	100,00	7.500	100,00	9.125	100,00	9.125	100,00	9.125	100,00	20.005	KECAMATAN LANDULEKO
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya fasilitas dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	-	-	100,00	9.700	100,00	10.000	100,00	9.700	100,00	9.700	100,00	10.000	100,00	14.800	KECAMATAN LANDULEKO
45	KECAMATAN LOAHOLU						1.502.935		1.371.352		1.375.000		1.386.353		1.401.353		1.416.353		1.600.000
45.1	NON URUSAN						1.458.675		1.337.612		1.316.366		1.355.123		1.366.762		1.379.613		1.499.500
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.458.675	100,00	1.337.612	100,00	1.316.366	100,00	1.355.123	100,00	1.366.762	100,00	1.379.613	100,00	1.499.500	KECAMATAN LOAHOLU
			persentase layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
45.2	KECAMATAN LOAHOLU						44.260		33.740		58.634		31.230		34.591		36.740		100.500
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Koordinasi Forum Pimpinan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	-	-	-	100,00	12.000	100,00	7.000	100,00	10.000	100,00	12.000	100,00	15.000	KECAMATAN LOAHOLU
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya cakupan forum musyawarah dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100,00	14.300	100,00	23.415	100,00	27.400	100,00	14.122	100,00	14.329	100,00	14.415	100,00	40.500	KECAMATAN LOAHOLU



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Koordinasi Ketentraman dan Keterlibatan Umum	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase Layanan Pengaduan kasus ketentraman dan keterlibatan umum	%	100,00	29.960	100,00	6.725	100,00	14.234	100,00	6.584	100,00	6.685	100,00	6.725	100,00	30.000	KECAMATAN LOAHOLU
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya fasilitasi dan pengawasan pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Desa yang Tertib Pengelolaan Administrasi	%	-	-	100,00	3.600	100,00	5.000	100,00	3.524	100,00	3.578	100,00	3.500	100,00	15.000	KECAMATAN LOAHOLU
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3.148.667		3.070.346		3.075.000		3.100.346		3.150.346		33.102.528		3.500.000	
46.1	NON URUSAN					1.249.488		1.382.178		1.408.534		1.351.038		1.459.336		1.634.056		1.649.042	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhiya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	%	100,00	1.249.488	100,00	1.382.178	100,00	1.408.534	100,00	1.351.038	100,00	1.459.336	100,00	1.634.056	100,00	1.649.042	BADAN KESBANGPOL
			persentase terpenuhiya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
			persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					1.899.179		1.688.168		1.666.466		1.749.308		1.691.010		31.468.472		1.850.958	
46.2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					1.899.179		1.688.168		1.666.466		1.749.308		1.691.010		31.468.472		1.850.958	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya unsur masyarakat desa yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase unsur masyarakat desa yang mendapatkan pemahaman ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100,00	576.501	100,00	589.164	100,00	690.098	100,00	705.098	100,00	700.098	100,00	720.098	100,00	750.098	BADAN KESBANGPOL



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2025-2029

NO	PERANGKAT DAERAH/URUSAN /PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	BASELINE 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PD PENANGGUNGJAWAB
					TARGET	PAGU (x 1.000)	2025		2026		2027		2028		2029		2030		
							TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	TARGET	PAGU (x 1.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Meningkatnya Pembinaan Aktivitas Partai Politik	Cakupan Pembinaan Aktivitas Partai Politik	%	100,00	1.165.808	100,00	685.449	100,00	675.000	100,00	675.000	100,00	675.000	100,00	30.346.190	100,00	680.000	BADAN KESBANGPOL
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya aktivitas Ormas	Persentase Ormas yang aktif	%	100,00	13.270	100,00	13.642	100,00	13.642	100,00	13.642	100,00	16.000	100,00	50.000	100,00	50.000	BADAN KESBANGPOL
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Meningkatnya kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase kebijakan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100,00	25.220	100,00	25.472	100,00	25.472	100,00	25.472	100,00	25.472	100,00	75.000	100,00	50.000	BADAN KESBANGPOL
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya penanganan konflik sosial	Persentase penanganan konflik sosial	%	100,00	18.580	100,00	274.440	100,00	262.254	100,00	330.096	100,00	274.440	100,00	277.184	100,00	320.860	BADAN KESBANGPOL
Jumlah						867.604.940		846.838.298		886.947.499		878.350.542		925.145.002		974.985.975		1.041.212.567	



4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2030 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD). Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2025 – 2030 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian sampai dengan tahun 2030 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.2:



Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Poin	62,68	63,00	65,00	65,50	67,00	68,50	71,00	Bagian Organisasi
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A	Bagian Organisasi, Bapperida, Inspektorat
3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD, Inspektorat
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,35	3,45	3,55	3,65	3,75	4,00	4,25	Dinas KISP
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	Poin	89,29	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	Bagian Organisasi, PD Pelayanan Publik
6	Nilai Sistem Merit	%	N/A	64,00	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	BKPSDMD
7	Persentase kualitas infrastruktur berkelanjutan	%	49,52	53,09	54,22	55,36	56,49	57,62	58,75	Dinas PUPR, Dinas PKPLH
8	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	44,83	46,61	48,45	50,30	52,15	54,00	55,85	Dinas PUPR
9	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	14,00	14,87	15,74	16,61	17,48	18,35	19,22	Dinas PUPR
10	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	108,99	107,00	106,00	105,00	104,00	103,00	102,00	BPBD
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,17	77,59	77,76	77,93	78,10	78,27	78,42	Dinas PKPLH
12	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,40	66,58	66,77	66,95	67,13	67,32	67,50	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag, BPS
13	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,85	66,20	66,50	66,90	67,40	67,90	68,50	Dinas Kesehatan, BPS
14	Prevalensi Stunting	%	32,40	30,20	28,20	26,40	24,70	23,10	21,60	Dinas Kesehatan
15	Indeks Pendidikan	Poin	0,629	0,632	0,634	0,638	0,639	0,642	0,645	Dinas Pendidikan



NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	REALISASI 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,20	3,60	4,50	4,75	5,00	5,20	5,60	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Budpar, Dinas Koperindag, DPMPTSP, Dinas Transnaker, BPS
17	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian	%	1,98	2,48	2,98	3,48	3,98	4,48	4,98	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Pariwisata	%	6,35	7,35	8,35	9,35	10,35	11,35	12,35	Dinas Budpar, Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
19	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	0,63	24,71	7,12	7,00	9,00	10,00	11,00	Bapenda
20	Tingkat Kemiskinan	%	25,78	24,51	23,24	21,97	20,70	19,43	19,00	Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas PKPLH, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Transnaker, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperindag, BPS
21	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,42	2,40	2,36	2,30	2,25	2,20	2,00	Dinas Nakertrans, Dinas PUPR, BPS
22	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	3,93	4,37	4,95	5,60	6,26	6,91	7,57	Dinas Sosial
23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	50,43	51,24	52,05	52,86	53,67	54,48	55,29	Dinas P3AP2KB
24	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	%	64,66	65,77	66,39	67,01	67,63	68,25	68,87	Dinas PKPLH, Dinas PUPR
25	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,653	0,660	0,673	0,683	0,693	0,703	0,713	Dinas PMD, 11 Kecamatan



4.2.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) dibagi menjadi 4 (tiga) aspek yaitu:

1. Aspek geografi dan demografi
2. Aspek kesejahteraan masyarakat
3. Aspek daya saing daerah
4. Aspek Pelayanan Umum

Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2030 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.3:



Tabel 4.3

Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2030

NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI										
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,27	72,11	72,95	73,79	74,63	75,47	76,31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	46,50	51,50	56,50	61,50	66,50	71,50	76,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	%	73,37	75,82	77,11	78,39	79,68	80,96	82,24	Dinas PUPR
4	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IPKHD)	Angka	N/A	0,465	0,473	0,481	0,489	0,497	0,505	Dinas PKPLH dan BPS
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,17	77,59	77,76	77,93	78,10	78,27	78,42	Dinas PKPLH
6	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	%	80,69	83,26	84,54	85,83	87,11	88,40	89,68	Dinas PUPR
7	Persentase Sampah yang Ditangani dan Dikelola	%	56,78	75,01	75,94	76,91	77,90	78,92	80,00	Dinas PKPLH
8	Rasio Penggunaan Gas Rumah Tangga	%	0,016	0,018	0,020	0,022	0,024	0,026	0,028	Dinas PKPLH
9	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	108,99	107,00	106,00	105,00	104,00	103,00	102,00	BPBD
10	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,52	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,67	BPBD
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,61	1,56	1,54	1,52	1,50	1,48	1,46	DP3AP2KB, BPS
12	Kepadatan Penduduk	Orang/Km ²	119,48	121,37	123,27	125,17	127,07	128,97	130,87	DP3AP2KB, BPS
II. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT										
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,20	3,60	4,50	4,75	5,00	5,20	5,60	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Budpar, Dinas Koperindag, DPMPTSP, Dinas Transnaker, BPS



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Tingkat Kemiskinan	%	25,78	24,51	23,24	21,97	20,70	19,43	19,00	Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas PKPLH, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Transnaker, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperindag, BPS
3	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rupiah	25.603.988	26.396.124	27.188.260	27.980.396	28.772.532	29.564.668	30.356.804	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Budpar, Dinas Koperindag, DPMPTSP, Dinas Transnaker, BPS
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,42	2,40	2,36	2,30	2,25	2,20	2,00	Dinas Nakertrans, Dinas PUPR, BPS
5	Indeks Gini	Poin	0,323	0,321	0,320	0,318	0,317	0,315	0,312	Dinas Sosial, BPS
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,40	66,58	66,77	66,95	67,13	67,32	67,50	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag, BPS
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,85	66,20	66,50	66,90	67,40	67,90	68,50	Dinas Kesehatan, BPS
8	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	116,99	116,00	115,00	114,00	113,00	112,00	100,00	Dinas Kesehatan
9	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	15,21	12,62	11,63	10,97	10,46	9,96	9,00	Dinas Kesehatan
10	Prevalensi Stunting	%	32,40	30,20	28,20	26,40	24,70	23,10	21,60	Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB
11	Cakupan pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Covarage)	%	25,00	66,00	67,45	68,90	70,35	71,80	73,25	Dinas Kesehatan
12	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	89,00	89,50	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00	Dinas Kesehatan
13	Indeks Pendidikan	Poin	0,629	0,632	0,634	0,638	0,639	0,642	0,645	Dinas Pendidikan, BPS
14	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,83	7,88	7,92	7,98	8,00	8,05	8,10	Dinas Pendidikan, BPS



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Harapan lama sekolah	Tahun	13,23	13,28	13,32	13,38	13,42	13,46	13,50	Dinas Pendidikan, BPS
16	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	10,53	10,53	10,56	10,59	10,62	10,65	10,68	Dinas Pendidikan
17	Angka Literasi									Dinas Pendidikan
	SD	%	50,88	53,38	55,88	58,38	60,88	63,38	65,88	
	SMP	%	60,05	61,15	62,25	63,35	64,45	65,55	66,65	
18	Angka Numerasi									Dinas Pendidikan
	SD	%	48,06	50,96	53,86	56,76	59,66	62,56	65,46	
	SMP	%	56,42	57,92	59,42	60,92	62,42	63,92	65,42	
19	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	65,02	65,25	66,75	68,25	69,75	71,25	72,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)	Poin	N/A	0,465	0,473	0,481	0,489	0,497	0,505	Dinas KISP, BPS
21	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	%	26,63	27,00	36,89	51,84	66,78	81,73	100,00	Dinas Transnaker
22	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	98,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
23	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	3,93	4,37	4,95	5,60	6,26	6,91	7,57	Dinas Sosial
24	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	3,18	3,58	4,17	4,77	5,34	5,71	6,06	Dinas Nakertrans
25	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	86,46	86,46	86,87	87,28	87,69	88,10	88,51	Badan Kesbangpol, Kementerian Agama
26	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	N/A	54,18	54,62	55,06	55,50	55,94	56,38	Dinas Budpar
27	Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	Poin	15,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	DP3AP2KB
28	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,810	0,804	0,797	0,791	0,784	0,778	0,771	DP3AP2KB, BPS
29	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	85,60	85,85	86,09	86,34	86,58	86,83	87,07	DP3AP2KB, BPS
30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	50,43	51,24	52,05	52,86	53,67	54,48	55,29	DP3AP2KB, BPS
III. ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Rasio Ketergantungan	%	59,57	58,62	57,42	56,22	55,02	53,82	52,62	Dinas Transnaker, BPS
2	Persentase koperasi berkualitas	%	19,70	24,39	25,37	26,34	27,32	28,29	29,27	Dinas Koperindag



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pesentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	4,60	5,36	6,13	6,90	7,66	8,43	9,20	Dinas Koperindag
4	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri Pengolahan	%	1,36	1,37	1,38	1,39	1,40	1,41	1,42	Dinas Koperindag, BPS
5	Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Akomodasi Makan dan Minum	%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	Disbudpar, BPS
6	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	16.374	19.000	22.000	23.500	25.000	26.500	28.000	Disbudpar
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,82	72,54	73,26	74,00	74,74	75,48	76,24	Dinas Nakertrans
8	Indeks Inovasi Daerah	Skor	40,18	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	Bapperida
9	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	N/A	67,04	67,84	68,64	69,44	70,24	71,04	Dinas PKPLH, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperindag, Dinas Pendidikan, Dinas Transnaker, Bapperida, BPS
10	Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi	%	N/A	26,20	27,79	29,38	30,97	32,56	34,15	Dinas PKPLH, Bapperida, BPS
11	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	%	N/A	5,30	5,40	5,50	5,60	5,70	5,80	Dinas KISP
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	9,75	9,80	9,85	9,90	9,95	10,00	10,05	Dinas PMPTSP, Dinas Koperindag, Bapperida, BPS
13	Realisasi Investasi Daerah	Milyar Rupiah	334,13	350,13	366,13	382,13	398,13	414,13	430,13	Dinas PMPTSP
14	Persentase Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	%	49,52	53,09	54,22	55,36	56,49	57,62	58,75	Dinas PUPR
15	Persentase Infrastruktur Perumahan dan Permukiman Layak	%	64,66	65,77	66,39	67,01	67,63	68,25	68,87	Dinas PKPLH, Dinas PUPR
16	Persentase rumah layak huni terbangun	%	57,15	57,33	57,51	57,69	57,87	58,05	58,23	Dinas PKPLH
17	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	44,83	46,61	48,45	50,30	52,15	54,00	55,85	Dinas PUPR
18	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	14,00	14,87	15,74	16,61	17,48	18,35	19,22	Dinas PUPR



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Persentase desa maju dan berkembang	%	75,00	79,46	82,14	85,71	90,18	93,75	97,32	DPMPD, Kecamatan
20	Persentase Desa Mandiri	%	-	-	0,89	0,89	0,89	1,79	2,68	Dinas PMD, 11 Kecamatan
21	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,653	0,664	0,673	0,6827	0,6927	0,7027	0,7127	Dinas PMD, 11 Kecamatan
22	Rasio Pajak Daerah Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	%	0,492	0,557	0,622	0,687	0,752	0,817	0,882	Bapenda
23	Tingkat Inflasi	%	1,53	1,75	1,70	1,65	1,60	1,55	1,50	Bagian Ekbang, Dinas Koperindag, BPS
IV. ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	86,74	65,00	65,00	70,00	70,00	80,00	80,00	Bagian Hukum
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,35	3,45	3,55	3,65	3,75	4,00	4,50	Dinas KISP
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Kategori	2,44	2,57	2,58	2,59	2,60	2,61	2,62	Bagian Organisasi
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Daerah	Poin	89,29	89,30	89,32	89,33	89,34	89,35	89,36	Bagian Organisasi
5	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD, Inspektorat
6	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Predikat	62,68	63,00	65,00	65,50	67,00	68,50	71,00	Bagian Organisasi
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	A	Bagian Organisasi
8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	75,90	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	BKAD
9	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	2,10	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,56	BKAD
10	Nilai Sistem Merit	%	N/A	64,00	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	BKPSDMD
11	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	%	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Satpol PP
12	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kesbangpol
13	Konflik SARA	Jumlah Peristiwa	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesbangpol, Kementerian Agama
14	Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	24,58	22,58	20,58	18,58	16,58	14,58	12,58	Satpol PP
15	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerjasama	15	15	16	17	18	19	20	Bagian Hukum
16	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	3,10	3,57	4,04	4,51	4,98	5,45	5,92	Bapperida



4.2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah. IKU Perangkat Daerah berfungsi untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah tahun 2025 – 2030 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.4:



Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2030

NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	PENDIDIKAN									
1	Harapan lama sekolah	Tahun	13,23	13,28	13,32	13,38	13,42	13,46	13,50	Dinas Pendidikan,
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	7,83	7,88	7,92	7,98	8,00	8,05	8,10	Dinas Pendidikan,
3	Persentase penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	86,59	70,39	80,48	80,67	80,85	81,04	81,13	Dinas Pendidikan
4	Persentase Capaian PAUD HI (Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif)	%	25,64	35,90	41,03	46,15	48,72	51,28	51,28	Dinas Pendidikan
5	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	92,23	92,34	92,41	92,49	92,52	92,56	92,59	Dinas Pendidikan
6	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	76,63	78,20	78,57	78,71	78,86	79,01	79,12	Dinas Pendidikan
7	Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	14,68	29,21	29,71	30,21	30,71	31,21	31,71	Dinas Pendidikan
8	Angka putus sekolah	Orang	15	12	6	4	3	2	1	Dinas Pendidikan
9	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	67,20	69,56	70,65	71,38	72,11	72,84	73,49	Dinas Pendidikan
10	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	97,05	98,50	99,50	99,52	99,54	99,56	99,57	Dinas Pendidikan
11	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	94,28	95,00	96,74	97,28	97,83	98,37	98,91	Dinas Pendidikan
12	Angka Literasi									Dinas Pendidikan
	SD	%	50,88	53,38	55,88	58,38	60,88	63,38	65,88	
	SMP	%	60,05	61,15	62,25	63,35	64,45	65,55	66,65	



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Angka Numerasi									Dinas Pendidikan
	SD	%	48,06	50,96	53,86	56,76	59,66	62,56	65,46	
	SMP	%	56,42	57,92	59,42	60,92	62,42	63,92	65,42	
2	KESEHATAN									
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,85	66,20	66,50	66,90	67,40	67,90	68,50	Dinas Kesehatan, BPS
2	Prevalensi Stunting	%	32,40	30,20	28,20	26,40	24,70	23,10	21,60	Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	116,99	116,00	115,00	114,00	113,00	112,00	100,00	Dinas Kesehatan
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	15,21	12,62	11,63	10,97	10,46	9,96	9,00	Dinas Kesehatan
5	Angka Kematian Balita (AKBA)	per 1.000 KH	15,79	15,00	14,00	13,00	12,00	11,00	10,00	Dinas Kesehatan
6	Prevalensi Wasting Balita	%	14,60	13,90	13,60	13,30	12,90	12,60	12,30	Dinas Kesehatan
7	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	50,00	58,33	58,33	58,33	58,33	83,33	100,00	Dinas Kesehatan
8	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
9	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)	%	89,00	88,00	88,50	89,00	89,5	80,00	80,00	Dinas Kesehatan
10	Insidensi Tuberkulosis	Per 100.000 penduduk	106,47	417,00	362,00	322,00	292,00	270,00	250,00	Dinas Kesehatan
11	Cakupan pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Covarage)	%	25,00	66,00	67,45	68,90	70,35	71,80	73,25	Dinas Kesehatan
12	Prevalensi HIV/AIDS	Per 1.000 Penduduk	0,34	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	Dinas Kesehatan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten	%	44,83	46,61	48,45	50,30	52,15	54,00	55,85	Dinas PUPR
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	14,00	14,87	15,74	16,61	17,48	18,35	19,22	Dinas PUPR
3	Persentase rumah tangga bersanitasi dan memiliki air minum layak	%	80,69	83,26	84,54	85,83	87,11	88,40	89,68	Dinas PUPR
4	Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	97,31	97,50	97,55	97,60	97,65	97,70	97,75	Dinas PUPR



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Persentase kondisi baik jalan kabupaten	%	33,47	35,23	37,00	38,76	40,52	42,28	44,04	Dinas PUPR
6	Persentase jalan strategis desa terbangun	%	41,26	42,74	47,16	51,59	56,02	60,44	64,87	Dinas PUPR
7	Persentase irigasi kabupaten kondisi baik	%	31,79	33,77	35,75	37,72	39,70	41,68	43,66	Dinas PUPR
8	Persentase rumah tangga berakses air minum layak	%	73,37	75,82	77,11	78,39	79,68	80,96	82,24	Dinas PUPR
9	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak	%	80,69	83,26	84,54	85,83	87,11	88,40	89,68	Dinas PUPR
10	Persentase pemanfaatan ruang wilayah perkotaan sesuai RTRW	%	81,47	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Dinas PUPR
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN									
1	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni	%	12,25	12,20	12,15	12,10	12,05	12,00	11,95	Dinas PKPLH
2	Persentase rumah layak huni terbangun	%	57,15	57,33	57,51	57,69	57,87	58,05	58,23	Dinas PKPLH
5.	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Angka Kriminalitas	Per 10.000 penduduk	24,58	22,58	20,58	18,58	16,58	14,58	12,58	Satpol PP
2	Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda)	%	20,00	26,67	33,33	40,00	46,67	53,33	60,00	Satpol PP
3	Persentase gangguan tantribun dan perlindungan masyarakat yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
4	Waktu Tingkat tanggap (<i>respons time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
	BENCANA									
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	108,99	107,00	106,00	105,00	104,00	103,00	102,00	BPBD
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Poin	0,52	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,67	BPBD



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase penanganan pra bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
4	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	107,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
5	Persentase penanganan pasca bencana	%	66,00	65,65	66,31	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
6	SOSIAL									
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Mandiri	%	3,93	4,37	4,95	5,60	6,26	6,91	7,57	Dinas Sosial
2	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilayani	%	76,37	70,02	70,68	71,35	72,02	72,68	73,35	Dinas Sosial
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	TENAGA KERJA									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	71,82	72,54	73,26	74,00	74,74	75,48	76,24	Dinas Transnaker
2	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	%	26,63	27,00	36,89	51,84	66,78	81,73	100,00	Dinas Transnaker
3	Persentase tenaga kerja lokal yang terampil dan produktif (bersertifikat)	%	5,46	11,25	17,32	23,94	31,11	38,83	47,10	Dinas Transnaker
4	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	3,18	3,60	4,24	4,87	5,51	5,93	6,36	Dinas Transnaker
5	Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Transnaker
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	85,60	85,85	86,09	86,34	86,58	86,83	87,07	DP3AP2KB, BPS
2	Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	%	0,11	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	DP3AP2KB
3	Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)	Nilai	54,40	55,60	56,80	57,90	58,90	59,90	60,90	DP3AP2KB
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	50,43	51,24	52,05	52,86	53,67	54,48	55,29	DP3AP2KB, BPS
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,810	0,804	0,797	0,791	0,784	0,778	0,771	DP3AP2KB, BPS



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	DP3AP2KB
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	51,56	53,54	54,53	55,52	56,51	57,50	58,49	DP3AP2KB
3	PANGAN									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	71,27	72,11	72,95	73,79	74,63	75,47	76,31	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Nilai	55,50	60,50	65,50	70,50	75,50	80,50	85,50	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Persentase ketersediaan pangan utama	%	38,02	39,02	40,02	41,00	42,00	43,00	44,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	PERTANAHAN									
1	Persentase luas lahan Pemda bersertifikat	%	10,04	11,17	12,29	13,52	14,87	16,35	18,11	Dinas PKPLH
5	LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,17	77,59	77,76	77,93	78,10	78,27	78,42	Dinas PKPLH
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	53,33	70,30	70,50	70,70	70,90	71,10	71,30	Dinas PKPLH
3	Persentase sampah yang ditangani dan dikelola	%	56,78	75,01	75,94	76,91	77,90	78,92	80,00	Dinas PKPLH
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Poin	89,95	90,00	91,00	91,50	92,00	92,50	93,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rasio penduduk ber-KTP persatuan penduduk	%	94,19	96,00	96,20	96,60	97,00	97,20	97,60	Dinas Kependudukan dan Capil
3	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran pada anak 0-17 tahun	%	88,77	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Capil
4	Rasio pasangan berakta nikah	%	64,39	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	76,00	Dinas Kependudukan dan Capil
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	37,42	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50	44,00	Dinas Kependudukan dan Capil



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,653	0,664	0,673	0,683	0,693	0,703	0,713	Dinas PMD
2	Persentase desa maju dan berkembang	%	75,00	79,46	82,14	85,71	90,18	93,75	97,32	Dinas PMD
3	Persentase Bumdes berkembang	%	23,76	26,73	29,70	32,67	35,64	39,60	43,56	Dinas PMD
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,61	1,56	1,54	1,52	1,50	1,48	1,46	DP3AP2KB, BPS
2	Total fertility rate (TFR) / Angka Kelahiran Total	Angka	3,04	3,01	3,02	3,01	3,00	2,99	2,98	DP3AP2KB
3	Angka Prevalensi Kontarsepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	%	50,32	51,00	52,50	53,70	54,90	55,00	56,00	DP3AP2KB
4	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	29,40	28,00	26,70	25,60	24,60	23,60	22,80	DP3AP2KB
9	PERHUBUNGAN									
1	Persentase kualitas layanan perhubungan	%	33,98	36,36	36,91	38,42	39,92	41,42	42,93	Dinas Perhubungan
2	Persentase angkutan barang dan penumpang yang layak fungsi	%	13,97	96,45	97,16	97,87	98,58	99,29	100,00	Dinas Perhubungan
3	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	%	53,99	27,93	29,64	31,36	33,07	34,79	36,50	Dinas Perhubungan
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Poin	99,90	76,70	76,73	76,78	77,00	77,05	77,10	Dinas KISP
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Skor	3,35	3,45	3,55	3,65	3,75	4,00	4,50	Dinas KISP
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	skor	100,00	90,00	95,00	95,05	95,10	95,11	95,12	Dinas KISP
4	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	%	0,84	2,52	10,92	27,73	48,74	69,75	100,00	Dinas KISP
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Persentase koperasi berkualitas	%	19,70	24,39	25,37	26,34	27,32	28,29	29,27	Dinas Koperindag



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase koperasi aktif	%	84,73	32,68	33,66	34,63	35,61	36,59	37,56	Dinas Koperindag
3	Persentase peningkatan jumlah usaha mikro, kecil dan menengah	%	3,07	3,07	3,72	4,30	4,84	5,28	5,64	Dinas Koperindag
12	PENANAMAN MODAL									
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar Rupiah	1.242	1.392	1.542	1.692	1.842	1.992	2.142	Dinas PMPTSP
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Poin	92,04	92,30	92,96	93,89	94,83	95,78	96,00	Dinas PMPTSP
3	Realisasi Investasi Daerah	Milyar Rupiah	334	350	366	382	398	414	430	Dinas PMPTSP
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Persentase Pemuda yang berprestasi	%	0,10	0,10	0,13	0,15	0,18	0,20	0,23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan	%	0,20	0,28	0,33	0,38	0,40	0,43	0,45	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Persentase atlet yang mendapatkan medali dalam Kejurprov/Kejurda	%	21,62	86,86	87,73	87,73	87,73	87,73	87,73	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
14	STATISTIK									
1	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral (IPSS)	Poin	1,34	1,75	2,00	2,02	2,05	2,07	2,10	Dinas KISP
2	Persentase Penyediaan Data Statistik Sektoral	%	70,00	80,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KISP
15	PERSANDIAN									
1	Persentase Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	40,61	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50	Dinas KISP
2	Persentase aplikasi perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KISP
16	KEBUDAYAAN									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	N/A	54,18	54,62	55,06	55,50	55,94	56,38	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	18,68	23,08	24,18	25,27	26,37	27,47	28,57	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase sanggar seni yang aktif	%	25,77	30,93	36,08	41,24	51,55	67,01	72,16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17	PERPUSTAKAAN									
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	65,02	65,25	66,75	68,25	69,75	71,25	72,75	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Poin	91,08	91,10	91,20	91,30	91,40	91,50	91,60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat	Nilai	70,07	71,30	72,40	72,78	73,52	74,26	75,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	KEARSIPAN									
1	Persentase peningkatan arsip terpelihara dan dokumentasi kegiatan daerah	%	13,64	13,65	20,00	40,00	60,00	80,00	85,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	%	52,27	59,09	65,91	72,73	81,82	90,91	100,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
C.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
1	PARIWISATA									
1	Kontribusi sektor Akomodasi dan Makan Minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,21	0,21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	16.374	19.000	22.000	23.500	25.000	26.500	28.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	Persentase Desa Wisata	%	16,96	17,86	18,75	19,64	20,54	21,43	22,32	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Persentase produksi perikanan meningkat	%	7,98	8,00	8,02	8,04	8,05	8,06	8,08	Dinas Perikanan
2	Produksi perikanan laut	Ton	13.621	14.710	15.890	17.168	18.550	20.045	21.663	Dinas Perikanan
3	Produksi perikanan darat	Ton	18,40	19,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	Dinas Perikanan
4	Konsumsi ikan	kg/ perkapita/Tahun	59,51	64,26	67,19	70,11	73,03	75,95	78,87	Dinas Perikanan



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	PERTANIAN									
1	Persentase Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan	%	0,30	30,70	43,40	56,68	70,53	84,98	100,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Produksi sektor pertanian	Ton	156.134,07	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	Produksi sektor perkebunan	Ton	5.149,76	5.000,00	5.100,00	5.150,00	5.200,00	5.250,00	5.300,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4	PETERNAKAN									
1	Persentase peningkatan produksi peternakan	%	3,16	3,42	4,72	6,91	7,47	7,92	8,16	Dinas Peternakan
2	Populasi ternak besar	ekor	101.251	103.151	110.237	126.852	146.754	170.602	196.450	Dinas Peternakan
3	Populasi ternak kecil	ekor	144.377	149.278	153.757	157.890	162.627	167.506	173.385	Dinas Peternakan
4	Populasi ternak unggas	ekor	118.310	124.350	130.567	137.069	143.950	151.148	159.346	Dinas Peternakan
5	PERDAGANGAN									
1	Persentase laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	5,02	5,59	7,76	9,83	11,19	12,07	12,57	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
2	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	%	7,76	8,66	9,08	9,49	9,90	10,32	10,73	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
6	PERINDUSTRIAN									
1	Persentase laju pertumbuhan sektor perindustrian	%	7,23	9,09	10,00	10,61	10,96	11,11	12,22	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
2	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	%	1,36	0,015	0,016	0,017	0,018	0,019	0,020	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag, BPS
7	TRANSMIGRASI									
1	Persentase transmigran yang mandiri	%	53,80	53,82	53,85	53,89	54,54	55,52	56,50	Dinas Transnaker
2	Persentase transmigran lokal yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Transnaker



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	SEKRETARIAT DAERAH									
1	Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Administrasi Pemkesra
2	Persentase layanan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Administrasi Pemkesra
3	Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Administrasi Pemkesra
4	Indeks Reformasi Hukum	Angka	86,74	65,00	65,00	70,00	70,00	80,00	80,00	Bagian Hukum
5	Persentase produk hukum daerah yang diharmonisasi dan diasistensi	%	166,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Hukum
6	Persentase fasilitasi bantuan hukum untuk penanganan Kasus perdata dan TUN pemerintah daerah	%	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Hukum
7	Persentase publikasi produk hukum daerah pada masyarakat dan aparatur pemerintah	%	166,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Hukum
8	Persentase capaian layanan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Perekonomian dan Adm Pembangunan
9	Persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan fisik dan keuangan tepat waktu	%	98,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Perekonomian dan Adm Pembangunan
10	Persentase BUMD yang sehat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Perekonomian dan Adm Pembangunan
11	Persentase ketersediaan data potensi sumberdaya alam	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Perekonomian dan Adm Pembangunan
12	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang dan Jasa	Skor	36,66	43,21	54,46	63,77	71,58	80,39	82,76	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
13	Nilai Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Skor	14,51	16,62	17,22	20,32	21,92	24,52	25,12	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Nilai Jumlah Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ)	Skor	8,82	8,82	10,59	12,35	14,12	15,88	17,65	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
15	Nilai Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (UKPBJ)	Skor	13,33	17,78	26,67	31,11	35,56	40,00	40,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
16	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan LKIP tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
17	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
18	Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
19	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki dokumen ABK, Anjab dan Peta Jabatan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
20	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki SOP	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Organisasi
21	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Organisasi	poin	90,22	90,30	90,32	90,34	90,36	90,38	90,40	Bagian Organisasi
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bagian Umum	Poin	89,29	89,30	89,32	89,33	89,34	89,35	89,36	Bagian Umum
23	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi dengan baik sesuai standar keprotokolan	%	92,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bagian Umum
2	SEKRETARIAT DPRD									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD	poin	85,50	85,58	85,66	85,74	85,82	85,90	85,98	Sekretariat DPRD
2	Persentase rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah	%	175,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD
3	Persentase keputusan DPRD yang dihasilkan	%	170,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat DPRD



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
1 PERENCANAAN										
1	Nilai perencanaan kinerja SAKIP	Poin	20,42	21,00	22,00	23,00	24,00	25,00	26,00	Bapperida
2	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bapperida
3	Persentase capaian kinerja pembangunan daerah	%	96,49	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Bapperida
2 KEUANGAN										
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Predikat	75,90	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	81,00	BKAD
3	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	2,10	2,24	2,31	2,38	2,45	2,52	2,56	BKAD
4	Penetapan APBD	Tepat waktu / Tidak Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BKAD
5	Persentase SILPA terhadap APBD	%	5,16	5,00	4,50	4,00	3,50	3,00	2,50	BKAD
6	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKAD
7	Persentase pengelolaan aset daerah	%	75,65	75,74	75,79	76,54	77,25	80,24	83,23	BKAD
3 PENDAPATAN										
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	0,63	24,71	7,12	7,00	9,00	10,00	11,00	Bapenda
2	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan	%	3,92	5,32	5,34	5,43	5,63	5,88	6,20	Bapenda
3	Persentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	102,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bapenda
4 KEPEGAWAIAN										
1	Nilai Sistem Merit	%	N/A	64,00	67,00	69,00	71,00	73,00	75,00	BKPSDMD



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Persentase penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi	%	92,18	93,75	95,05	96,35	97,65	98,95	100,00	BKPSDMD
3	Persentase terpenuhinya formasi ASN sesuai dengan ANJAB dan ABK	%	58,69	59,00	60,25	61,25	62,25	63,25	64,00	BKPSDMD
4	Persentase data ASN yang diperbaharui tepat waktu	%	88,72	89,72	90,72	91,72	92,72	93,72	94,72	BKPSDMD
5	Persentase ASN kinerja baik	%	99,03	99,15	99,30	99,45	99,60	99,75	99,90	BKPSDMD
6	Persentase tingkat disiplin ASN	%	99,73	99,75	99,80	99,85	99,90	99,95	100,00	BKPSDMD
5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
1	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	62,00	64,00	66,00	68,00	70,00	72,00	74,00	BKPSDMD
2	Persentase ASN yang telah lulus pendidikan dan pelatihan struktural	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKPSDMD
6	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Indeks Inovasi Daerah	Skor	40,18	41,00	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	Bapperida
2	Persentase implementasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan inovasi daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Bapperida
F.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									
1	PENGAWASAN									
1	Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK	Temuan	9,00	10,00	9,00	8,00	7,00	6,00	5,00	Inspektorat
2	Persentase evaluasi AKIP perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Inspektorat
3	Level Maturitas SPIP	Level	0	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	Inspektorat
4	Level Kapabilitas APIP	Level	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	Inspektorat
5	Persentase Aparatur Pemeriksa (Auditor dan P2UPD) yang profesional	%	76,00	80,00	84,00	88,00	92,00	96,00	100,00	Inspektorat
6	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP	%	75,00	77,00	80,00	83,00	85,00	87,00	89,00	Inspektorat
7	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	%	75,33	75,95	76,55	77,12	77,66	78,18	78,67	Inspektorat



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
G.	UNSUR KEWILAYAHAN									
1	KECAMATAN LOBALAIN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lobalain	Poin	86,83	86,85	86,87	86,89	86,91	86,93	86,95	Kecamatan Lobalain
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Lobalain
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Lobalain
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Lobalain
2	KECAMATAN ROTE BARAT LAUT									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rote Barat Laut	Poin	92,28	93,00	93,50	94,10	95,50	96,00	97,00	Kecamatan Rote Barat Laut
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Barat Laut
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Barat Laut
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Barat Laut
3	KECAMATAN ROTE BARAT DAYA									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rote Barat Daya	Poin	91,01	92,00	92,50	93,00	93,50	94,50	95,00	Kecamatan Rote Barat Daya
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Barat Daya
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Barat Daya
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Barat Daya
4	KECAMATAN ROTE BARAT									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rote Barat	Poin	88,17	89,00	90,00	92,00	93,50	95,00	96,00	Kecamatan Rote Barat
2	persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Barat



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Barat
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Barat
5	KECAMATAN ROTE SELATAN									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rote Selatan	Poin	88,83	89,50	90,00	91,20	92,00	92,50	93,00	Kecamatan Rote Selatan
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Selatan
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Selatan
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Selatan
6	KECAMATAN ROTE TENGAH									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rote Tengah	Poin	87,78	82,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	Kecamatan Rote Tengah
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Tengah
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Tengah
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Tengah
7	KECAMATAN PANTAI BARU									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pantai Baru	Poin	86,67	80,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	Kecamatan Pantai Baru
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Pantai Baru
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Pantai Baru
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Pantai Baru



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	KECAMATAN ROTE TIMUR									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Rote Timur	Poin	86,39	87,50	88,00	89,00	90,00	91,00	92,00	Kecamatan Rote Timur
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Timur
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Timur
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Rote Timur
9	KECAMATAN NDAO NUSE									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Ndao Nuse	Poin	91,72	93,00	93,50	94,00	94,50	95,00	96,00	Kecamatan Ndao Nuse
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Ndao Nuse
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Ndao Nuse
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Ndao Nuse
10	KECAMATAN LANDU LEKO									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Landu Leko	Poin	87,83	88,50	89,00	90,80	91,00	92,00	93,00	Kecamatan Landu Leko
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Landu Leko
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Landu Leko
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Landu Leko
11	KECAMATAN LOAHOLU									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Loaholu	Poin	91,39	92,00	92,50	93,00	93,90	94,50	96,00	Kecamatan Loaholu
2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Loaholu



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Persentase desa yang tertib pengelolaan administrasi	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Loaholu
4	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kecamatan Loaholu
H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Indeks Demokrasi Indonesia	Poin	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kesbangpol
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Poin	86,46	86,46	86,87	87,28	87,69	88,10	88,51	Badan Kesbangpol, Kementerian Agama
3	Persentase Ormas/LSM/Yayasan yang dibina	%	24,55	45,45	68,18	72,73	77,27	81,82	86,36	Badan Kesbangpol
4	Persentase potensi paham radikal dan konflik sosial budaya yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kesbangpol



4.2.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau sasaran dalam suatu program, kebijakan, atau urusan pemerintahan. IKK berfungsi untuk evaluasi kinerja organisasi atau instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta mencerminkan prioritas strategis dan hasil yang ingin dicapai perangkat daerah tahun 2025 – 2030 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5:



Tabel 4.5

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 - 2030

NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN PENDIDIKAN									
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD	%	86,59	70,39	80,48	80,67	80,85	81,04	81,13	Dinas Pendidikan
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	%	83,86	83,91	83,97	84,02	84,07	84,12	84,18	Dinas Pendidikan
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	%	67,74	67,84	67,93	68,03	68,13	68,23	68,33	Dinas Pendidikan
4	Persentase Penduduk usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pensisikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	%	14,68	29,21	29,71	30,21	30,71	31,21	31,71	Dinas Pendidikan
2	URUSAN KESEHATAN									
1	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	%	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	Dinas Kesehatan
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Yang Terakreditasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	58,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan	%	67,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	66,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	%	86,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	79,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
8	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	67,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	81,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
10	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	84,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
11	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	51,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
12	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	%	129,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
13	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	%	47,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
14	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	%	125,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	%	0,57	3,33	4,37	5,57	6,57	7,75	8,75	Dinas PUPR
2	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kab/Kota	%	73,37	75,82	77,11	78,39	79,68	80,96	82,24	Dinas PUPR
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	80,69	83,26	84,54	85,83	87,11	88,40	89,68	Dinas PUPR
4	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	44,83	46,61	48,45	50,30	52,15	54,00	55,85	Dinas PUPR
5	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	6,09	6,09	7,39	8,70	10,00	11,30	12,61	Dinas PUPR
6	Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PUPR
4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN									
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PKPLH
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/kota	%	-	-	-	-	-	-	-	Dinas PKPLH
3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/kota Yang Ditangani	%	-	-	11,74	31,70	51,65	71,60	100,00	Dinas PKPLH
4	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	12,25	12,20	12,15	12,10	12,05	12,00	11,95	Dinas PKPLH
5	Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Pada Kawasan Kumuh	%	0,14	0,14	11,44	22,88	47,02	67,12	87,26	Dinas PKPLH



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
A.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									
1	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kantor Sat PolIPP
2	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	45,00	50,00	Kantor Sat PolIPP
3	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	90,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kantor Sat PolIPP
4	Waktu Tanggap (<i>Respons Time</i>) Penanganan Kebakaran	Menit	7,09	10,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00	Kantor Sat PolIPP
B.	BENCANA									
1	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
2	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
3	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BPBD
6	URUSAN SOSIAL									
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	%	8,61	9,68	10,52	11,22	11,92	12,62	13,32	Dinas Sosial
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	90,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Sosial



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	URUSAN TENAGA KERJA									
1	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,136	0,144	0,151	0,164	0,178	0,191	0,204	Dinas Nakertrans
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/Pekerja	2.980.624.948	3.113.757.993	3.246.526.160	3.378.930.947	3.510.973.843	3.642.656.331	3.773.979.884	Dinas Nakertrans
3	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	21,09	22,93	26,11	28,40	30,54	32,56	33,52	Dinas Nakertrans
4	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (dalam dan luar negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/kota	%	67,48	69,11	73,17	77,24	81,30	89,43	97,56	Dinas Nakertrans
2	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	per 100.000 penduduk perempuan	0,08	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	Dinas P3AP2KB
2	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%	3,69	3,81	3,94	4,20	4,46	4,73	5,06	Dinas P3AP2KB
3	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	%	0,13	0,12	0,11	0,10	0,90	0,80	0,70	Dinas P3AP2KB
3	URUSAN PANGAN									
1	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	38,02	39,13	40,23	41,34	42,45	43,55	44,66	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	68,17	77,59	77,76	77,93	78,10	78,27	78,42	Dinas PKPLH
2	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	%	71,67	75,01	75,94	76,91	77,90	78,92	80,00	Dinas PKPLH
3	Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	3,59	4,10	5,13	6,15	7,18	8,21	9,23	Dinas PKPLH
4	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL									
1	Perekaman KTP Elektronik	%	94,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Dukcapil
2	Kepemilikan Akta Kelahiran	%	88,87	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	100,00	Dinas Dukcapil
3	Persentase Anak Usia 0-7 Tahun Kurang 1 (satu) Hari yang Memiliki KIA	%	37,42	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50	44,00	Dinas Dukcapil
4	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	%	4,55	6,82	9,09	11,36	13,64	15,91	18,18	Dinas Dukcapil
5	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	25,00	20,54	16,96	13,39	8,93	4,46	-	Dinas PMPD
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	-	-	0,89	0,89	0,89	1,79	2,68	Dinas PMPD
6	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	3,04	3,01	3,02	3,01	3,00	2,99	2,98	Dinas P3AP2KB
2	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	50,32	51,00	52,50	53,70	54,90	55,00	56,00	Dinas P3AP2KB
3	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang Tidak Terpenuhi.(unmet need)	%	20,04	19,70	18,50	17,30	16,30	15,20	14,20	Dinas P3AP2KB



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	URUSAN PERHUBUNGAN									
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	%	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	81,50	Dinas Perhubungan
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	%	0,315	0,360	0,361	0,362	0,363	0,364	0,365	Dinas Perhubungan
8	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	Dinas KISP
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KISP
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	84,84	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KISP
10	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
1	Persentase koperasi berkualitas	%	19,70	24,39	25,37	26,34	27,32	28,29	29,27	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
2	Persentase usaha mikro yang menjadi wirasausaha	%	4,60	5,36	6,13	6,90	7,66	8,43	9,20	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
11	URUSAN PENANAMAN MODAL									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	86,00	91,00	93,00	95,00	97,00	99,00	100,00	Dinas PMPTSP



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	58,00	59,00	60,00	61,00	62,00	63,00	64,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13	URUSAN STATISTIK									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KISP
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas KISP
14	URUSAN PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	40,61	41,00	41,50	42,00	42,50	43,00	43,50	Dinas KISP
15	URUSAN PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	70,07	71,30	72,40	72,78	73,52	74,26	75,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	65,02	60,80	64,80	68,80	72,80	76,80	80,80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	URUSAN KEARSIPAN									
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	%	28,46	28,90	29,34	29,78	30,22	30,66	31,10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	56,80	60,80	64,80	68,80	72,80	76,80	80,80	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
1	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah total produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	Ton	12.378,00	12.678,00	13.078,00	13.578,00	14.178,00	14.878,00	15.678,00	Dinas Perikanan
2	URUSAN PARIWISATA									
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	50.552.000	45.000.000	46.000.000	47.500.000	49.000.000	50.500.000	52.000.000	Dinas Budpar
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	7,78	83,36	85,74	88,02	92,33	93,55	100,00	Dinas Budpar
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-3,10	87,98	91,64	92,24	95,32	96,24	95,88	Dinas Budpar
4	Tingkat hunian akomodasi	%	39,39	42,93	50,51	55,56	62,50	67,50	75,00	Dinas Budpar
3	URUSAN PERTANIAN									
A. PERTANIAN										
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Hektar	5,00	5,20	5,40	5,42	5,44	5,46	5,48	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
B. PETERNAKAN										
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-56,00	-4,46	-6,67	-7,14	-7,69	-8,33	-9,09	Dinas Peternakan
4	URUSAN PERDAGANGAN									
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	65,81	26,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
2	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	34,90	34,90	35,48	36,07	36,66	37,24	37,83	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
5	URUSAN PERINDUSTRIAN									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	%	1,85	2,18	2,52	2,85	3,18	3,51	3,84	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Koperasi dan UKM, Perindag



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
1	URUSAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN									
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	13,46	14,61	15,77	16,92	17,38	18,07	18,19	BKAD
2	Rasio PAD terhadap pendapatan	%	2,21	2,95	3,30	3,38	3,57	3,81	3,98	BKAD
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	0	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	Inspektorat
4	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	Inspektorat
5	Rasio belanja urusan Pemerintahan umum (dikurangi transfer <i>expenditures</i>)	%	40,69	39,54	39,31	39,19	38,96	38,85	38,73	BKAD
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKAD
2	URUSAN PENGADAAN									
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	-	-	-	-	-	-	-	Bagian PBJ
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	86,53	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43	Bagian PBJ
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	48,17	10,04	10,19	12,64	13,66	14,91	16,15	Bagian PBJ
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	-6,48	16,42	35,44	6,42	18,74	15,19	1,55	Bagian PBJ



NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2024	TARGET TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB / SUMBER DATA
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	URUSAN KEPEGAWAIAN									
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74,41	76,00	78,00	80,00	82,00	84,00	86,00	BKPSDMD
2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22,77	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	34,00	BKPSDMD
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	30,58	32,00	34,00	36,00	38,00	40,00	42,00	BKPSDMD
9	URUSAN MANAJEMEN KEUANGAN									
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-0,29%	-7,44%	-5,15%	-4,81%	-4,58%	-4,58%	-4,58%	BKAD
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-3,47%	-25,15%	-20,85%	-18,39%	-18,39%	-18,39%	-18,39%	BKAD
3	Manajemen aset	Poin	100 (1. Ya, 2. Ya, 3. Ya, 4. Ya)	100 (1. Ya, 2. Ya, 3. Ya, 4. Ya)	100 (1. Ya, 2. Ya, 3. Ya, 4. Ya)	100 (1. Ya, 2. Ya, 3. Ya, 4. Ya)	100 (1. Ya, 2. Ya, 3. Ya, 4. Ya)	100 (1. Ya, 2. Ya, 3. Ya, 4. Ya)	100 (1. Ya, 2. Ya, 3. Ya, 4. Ya)	BKAD
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	6,14	5,16	4,69	4,06	3,56	3,06	3,06	BKAD
10	URUSAN TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK									
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	99,97	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95	99,95	BKAD
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BKAD



BAB V PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan periode I RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu akselerasi & optimalisasi pembangunan.

Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025–2029 perlu memperhatikan sejumlah kaidah sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan turunan, sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terarah. Selain itu, perlu pula diatur pedoman transisi yang mengatur mekanisme penyusunan dan pelaksanaan perencanaan tahunan pada saat periode RPJMD mendekati masa berakhirnya

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. Tujuan disusunnya kaidah pelaksanaan ini adalah untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas, baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. Seluruh perangkat daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan seluruh pemangku kepentingan mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam tujuan, sasaran, dan program RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029;
3. RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Renstra yang mengatur perencanaan



- pembangunan lima tahunan perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.
4. RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Rote Ndao yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rote Ndao. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
 5. Dalam pelaksanaan program/kegiatan, selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
 6. Pasca penetapan RPJMD, apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus membuat Renstra baru.
 7. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/ Renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 8. RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.
 9. Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

5.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan sampai akhir periode RPJMD maka diperlukan pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2030 yang dilaksanakan pada Tahun 2029. Sebagaimana



diketahui, tahun 2029 adalah tahun terakhir RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 dan RPJMD periode berikutnya belum disusun. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2030 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Penyusunan dokumen perencanaan RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2030 mengacu pada:

1. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2045.
2. Rancangan RKP Tahun 2030 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
3. Program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rancangan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2030.
4. Memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013-2033.

RPJMD merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pembangunan daerah periode perencanaan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029. Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2029 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, dan mengawal terwujudnya Transformasi Rote Ndao Dalam Bingkai Ita Esa: Transparan, Akuntabel, Adil, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Kompetitif.


BUPATI ROTE NDAO, 
PAULUS HENUK